

LAMPIRAN PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



Dalam Rangka
HUT KE-81
REPUBLIK INDONESIA





LAMPIRAN PIDATO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN SIDANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA
HUT KE-81 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



LAMPIRAN PIDATO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1-1

BAB 2 81 TAHUN INDONESIA

Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

2-1

BAB 3 ASTA CITA 1

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi,
dan Hak Asasi Manusia (HAM)

3.1	Ideologi Pancasila	3-1
3.2	Komunikasi Publik dan Media	3-3
3.3	Lembaga Perwakilan dan Masyarakat Sipil	3-6
3.4	Hak Asasi Manusia	3-9

BAB 4 ASTA CITA 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

4.1	Pertumbuhan Ekonomi	4-1
4.2	Fiskal	4-5
4.3	Moneter dan Sektor Keuangan	4-8
4.4	Swasembada Pangan	4-17
4.5	Swasembada Energi	4-22
4.6	Swasembada Air	4-25
4.7	Ekonomi Digital	4-30
4.8	Ekonomi Hijau	4-33
4.9	Ekonomi Biru	4-37
4.10	Kerja Sama Internasional	4-41
4.11	Badan Usaha Milik Negara	4-44
4.12	Pertahanan dan Keamanan	4-46
4.13	Ekonomi Syariah	4-50

BAB 5 **ASTA CITA 3**

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

5.1	Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	5-1
5.2	Infrastruktur Transportasi	5-4
5.3	Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	5-8
5.4	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	5-12
5.5	Pengembangan Destinasi Pariwisata	5-16
5.6	Koperasi dan UMKM	5-18
5.7	Ekonomi Kreatif	5-22
5.8	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	5-24
5.9	Proyek Strategis Nasional (PSN)	5-26

BAB 6 **ASTA CITA 4**

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

6.1	Indeks Modal Manusia	6-1
6.2	Kesehatan	6-3
6.3	Pendidikan	6-5
6.4	Iptek dan Inovasi	6-9
6.5	Ketenagakerjaan	6-11
6.6	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6-14
6.7	Kualitas Keluarga	6-17
6.8	Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	6-19
6.9	Perlindungan Anak	6-21
6.10	Manajemen Talenta Nasional	6-25
6.11	Pemuda dan Olahraga	6-29
6.12	Perpustakaan	6-33

BAB 7 **ASTA CITA 5**

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

7.1	Hilirisasi Industri	7-1
7.2	Perikanan	7-4
7.3	Kelautan	7-8
7.4	Perdagangan	7-10
7.5	Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus	7-13
7.6	Investasi	7-16

BAB 8 **ASTA CITA 6**

Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

8.1	Kependudukan	8-1
8.2	Kesejahteraan Sosial dan Penurunan Kemiskinan	8-3
8.3	Penurunan Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat	8-6
8.4	Kemandirian Masyarakat	8-8
8.5	Perkotaan	8-10
8.6	Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Transmigrasi	8-13
8.7	Pengembangan Wilayah	8-16

BAB 9 **ASTA CITA 7**

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

9.1	Reformasi Politik	9-1
9.2	Politik Luar Negeri	9-3
9.3	Reformasi Birokrasi	9-6
9.4	Reformasi Hukum	9-11
9.5	Pemerintah Digital	9-15
9.6	Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	9-18

BAB 10 **ASTA CITA 8**

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

10.1	Agama	10-1
10.2	Kebudayaan	10-4
10.3	Kearsipan	10-6
10.4	Mitigasi Bencana	10-9

BAB 11 **PENUTUP**

11-1

DAFTAR GAMBAR

BAB 2

Gambar 2.1	Peta Sebaran SPPG Tahun 2025-2026	2-6
Gambar 2.2	Peta Sebaran Lokasi Sekolah Rakyat Tahun 2025-2026	2-8
Gambar 2.3	Enam Provinsi dengan Cakupan CKG Tertinggi Tahun 2025	2-9
Gambar 2.4	Peta Sebaran Pembangunan Gerai dan Gudang KDKMP Tahun 2025-2026	2-11
Gambar 2.5	Skema Alur Pengelolaan Sampah	2-12

BAB 4

Gambar 4.1	Ketersediaan Air Per Kapita Indonesia Tahun 2025	4-26
Gambar 4.2	Lingkup Kerja Sama Ekonomi Internasional	4-42
Gambar 4.3	Manfaat Keanggotaan OECD Bagi Indonesia	4-43

BAB 5

Gambar 5.1	Peta Sebaran Lokasi Akses Internet (Bakti AKSI) Semester I 2026	5-3
Gambar 5.2	Peta Sebaran Jaringan Gas Rumah Tangga APBN dan Investasi Badan Usaha (Non-APBN) Triwulan I 2026	5-9
Gambar 5.3	Peta Sebaran Rasio Elektrifikasi (RE) Triwulan I 2026	5-10
Gambar 5.4	Peta Sebaran Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Tahun 2025	5-13
Gambar 5.5	Peta Sebaran Air Minum Aman Tahun 2024	5-13
Gambar 5.6	Peta Sebaran Akses Sanitasi Aman Tahun 2025	5-14
Gambar 5.7	Peta Sebaran BABS di Tempat Terbuka Tahun 2025	5-14
Gambar 5.8	Peta Sebaran Rumah Tangga yang Menerima Layanan Pengumpulan Sampah Dasar Tahun 2025	5-15
Gambar 5.9	Nilai Investasi Proyek Strategis Nasional Tahun 2026	5-27
Gambar 5.10	Peta Status Perkembangan Lokasi Penerapan PSEL Tahun 2026	5-28

BAB 6

Gambar 6.1	Indeks Modal Manusia Tahun 2025	6-2
------------	---------------------------------	-----

BAB 7

Gambar 7.1	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Semester I 2026 10082026_15.47	7-12
------------	--	------

Gambar 7.2	Sebaran Investasi di KI/KEK Prioritas Triwulan I 2026	7-14
------------	---	------

BAB 9

Gambar 9.1	Keberhasilan Pencalonan Strategis Indonesia di Organisasi Internasional Tahun 2025	9-4
------------	--	-----

Gambar 9.2	Sebaran 313 MPP Seluruh Provinsi di Indonesia	9-10
------------	---	------

Gambar 9.3	Hasil Uji Coba Tahap I Digitalisasi Bantuan Sosial di Bali dan Surabaya	9-17
------------	---	------

DAFTAR GRAFIK

BAB 3

Grafik 3.1	Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2021–2026	3-1
Grafik 3.2	Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021–2026	3-3
Grafik 3.3	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2021–2026	3-4
Grafik 3.4	Indeks Kemerdekaan Pers Nasional Tahun 2021–2026	3-5
Grafik 3.5	Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesenjangan Tahun 2021–2026	3-7
Grafik 3.6	Nilai Dimensi Hak Sipil dan Politik	3-9
Grafik 3.7	Nilai Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3-9

BAB 4

Grafik 4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy) Tahun 2022 – Semester I 2026	4-2
Grafik 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (persen, yoy) Tahun 2024 – Semester I 2026	4-3
Grafik 4.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha (persen, yoy) Tahun 2024 – Semester I 2026	4-4
Grafik 4.4	Perkembangan Keseimbangan Primer dan Surplus/Defisit (persen PDB) Tahun 2023–2025	4-7
Grafik 4.5	Perkembangan Laju Inflasi Beberapa Negara (persen, yoy) Tahun 2023 – Semester I 2026	4-8
Grafik 4.6	Perkembangan Inflasi Umum (persen, yoy) Tahun 2023 – Semester I 2026	4-9
Grafik 4.7	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, yoy) Tahun 2023 – Semester I 2026	4-9
Grafik 4.8	Perkembangan Nilai Tukar (Rupiah/US\$) Tahun 2023 – Semester I Juni 2026	4-10
Grafik 4.9	Jumlah Uang Beredar Luas (M2) di Indonesia dan Pertumbuhannya Tahun 2022 – Mei 2026	4-11

Grafik 4.10	Rasio Uang Beredar Luas terhadap PDB Indonesia (persen)	4-11
Grafik 4.11	Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga	4-12
Grafik 4.12	Perkembangan Indikator Kinerja Perbankan	4-12
Grafik 4.13	Total Kredit UMKM (Rp triliun)	4-13
Grafik 4.14	Perkembangan Dana Pensiun	4-13
Grafik 4.15	Perkembangan Aset Asuransi	4-14
Grafik 4.16	Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (Rp triliun)	4-15
Grafik 4.17	Piutang Pembiayaan Pinjaman Daring (Rp triliun)	4-15
Grafik 4.18	Perkembangan IHSG dan Kapitalisasi Pasar Saham	4-16
Grafik 4.19	Perkembangan Yield SBN 10 Tahun (persen)	4-16
Grafik 4.20	Hasil Produksi Pangan dari Kawasan Hutan Tahun 2025 – Mei 2026	4-19
Grafik 4.21	Konsumsi Ikan Masyarakat 2021–2025 (kg/kapita)	4-20
Grafik 4.22	Capaian Indeks Ketahanan Energi Tahun 2023–2026	4-22
Grafik 4.23	Capaian Tambahan Kapasitas Air Baku (m ³ /detik) Tahun 2023–2026	4-26
Grafik 4.24	Capaian Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun 2023–2026	4-27
Grafik 4.25	Capaian Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ribu ha) Tahun 2015–2026	4-28
Grafik 4.26	PDB Triwulanan dan Laju Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi Atas Dasar Harga Berlaku (qtq) Triwulan I 2024 – Triwulan II 2026	4-30
Grafik 4.27	Nilai Investasi dan Proporsi Sektor Informasi dan Komunikasi (qtq) Triwulan I 2024 – Triwulan II 2026	4-31
Grafik 4.28	Tenaga Kerja Sektor Informasi dan Komunikasi Tahun 2020–2025 dan Target 2026	4-32

Grafik 4.29	Capaian Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2021–2026	4-33
Grafik 4.30	Capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK (persen) Tahun 2021–2026	4-34
Grafik 4.31	Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan (ribu ha) Tahun 2021–2025	4-35
Grafik 4.32	Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia Tahun 2024–2025	4-37
Grafik 4.33	Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha) Tahun 2022–2025	4-39
Grafik 4.34	Tren Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA (dalam ribu US\$) Tahun 2006–2025	4-42
Grafik 4.35	Capaian Asia Power Index (Military Capability)	4-46
Grafik 4.36	Peringkat Indonesia dalam SIPRI Top 100	4-47
Grafik 4.37	Tingkat Kriminalitas Indonesia	4-48
Grafik 4.38	Indeks Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2023 - 2025	4-49
Grafik 4.39	Nilai Ekspor Halal Indonesia (US\$ Miliar)	4-50
Grafik 4.40	Perkembangan Aset Keuangan Syariah Nasional (Rp Triliun)	4-51
Grafik 4.41	Perkembangan Nilai ZIS-DSKL (Rp Triliun)	4-52

BAB 5

Grafik 5.1	Perkembangan Proyek KPBU yang Beroperasi Tahun 2021–2026	5-24
------------	--	------

BAB 6

Grafik 6.1	Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2022–2026	6-12
Grafik 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020–2026	6-12
Grafik 6.3	Tren Angka Kelahiran Total Tahun 1971–2025	6-15
Grafik 6.4	Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2022–2026	6-15

Grafik 6.5	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2021–2026	6-22
Grafik 6.6	Persentase Perempuan Berumur 20–24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun pada 2021–2025	6-23
Grafik 6.7	Capaian MTN Bidang Riset dan Inovasi Tahun 2024–2026	6-26
Grafik 6.8	Capaian MTN Bidang Seni Budaya Tahun 2022–2025	6-27
Grafik 6.9	Perolehan Medali Asian Youth Para Games dan Asian Youth Games	6-28
Grafik 6.10	Data Pelatih, Wasit Juri, dan Tenaga Pendukung Tahun 2024-2026	6-28
Grafik 6.11	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2024-2029	6-30
Grafik 6.12	Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Sea Games	6-32
Grafik 6.13	Peringkat FIFA Futsal Indonesia	6-32
Grafik 6.14	Nilai Budaya Literasi Tahun 2023–2026	6-34

BAB 7

Grafik 7.1	Capaian Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2021–2025	7-7
Grafik 7.2	Produksi Garam Tahun 2021–2026 (juta ton)	7-9

BAB 8

Grafik 8.1	Kondisi Kemiskinan Indonesia Tahun 2022–2026	8-3
Grafik 8.2	Rasio Gini Indonesia Tahun 2022–2026	8-6
Grafik 8.3	Capaian Kumulatif Redistribusi Tanah Tahun 2021–2026 (bidang tanah)	8-9

BAB 9

Grafik 9.1	Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) Nasional	9-1
Grafik 9.2	Jumlah Data Pemilih Berdasarkan Rekapitulasi PDPB Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	9-2
Grafik 9.3	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2022–2025	9-3
Grafik 9.4	Komposisi Nilai Hibah kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing dan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular berdasarkan Sektor Tahun 2025	9-5

Grafik 9.5	Pelindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2021-2025	9-6
Grafik 9.6	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021–2025	9-7
Grafik 9.7	Capaian Indeks Pelayanan Publik K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021–2025	9-8
Grafik 9.8	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional Tahun 2021–2025	9-9
Grafik 9.9	Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2021–2026	9-11
Grafik 9.10	Capaian Indeks Integritas Nasional Tahun 2023–2025	9-13
Grafik 9.11	Capaian Indeks SPBE Tahun 2018–2025	9-16
Grafik 9.12	Capaian Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020–2025	9-19
Grafik 9.13	Tren Pendapatan Asli Daerah Seluruh Pemerintah Tahun 2020–2026	9-19
BAB 10		
Grafik 10.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022–2026	10-2
Grafik 10.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023–2026	10-4
Grafik 10.3	Jumlah Arsip yang Dilestarikan Tahun 2022–2025	10-7
Grafik 10.4	Kejadian Bencana Tahun 2021–2025	10-10
Grafik 10.5	Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim terhadap PDB pada Empat Sektor Prioritas Tahun 2021-2026	10-11
Grafik 10.6	Capaian Pembangunan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air Tahun 2023–2026	10-12

DAFTAR TABEL

BAB 3

Tabel 3.1	Capaian Indeks Aktualisasi Pancasila Dimensi Sila Tahun 2021–2024	3-2
-----------	---	-----

BAB 4

Tabel 4.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara Tahun 2023 – Semester I 2026	4-6
Tabel 4.2	Produksi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	4-18
Tabel 4.3	Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	4-23
Tabel 4.4	Capaian Kinerja Ekonomi Biru Aspek Pertumbuhan dan Nilai Tambah Tahun 2024–2026	4-38
Tabel 4.5	Capaian Kinerja Ekonomi Biru Aspek Lingkungan Tahun 2024–2026	4-39
Tabel 4.6	Capaian Kinerja Ekonomi Biru Aspek Sosial dan Inklusivitas Tahun 2024–2026	4-40
Tabel 4.7	Capaian Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan Tahun 2025	4-46

BAB 5

Tabel 5.1	Capaian Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024–2026	5-2
Tabel 5.2	Capaian Infrastruktur Konektivitas dan Layanan Transportasi Periode 2024–2026	5-4
Tabel 5.3	Capaian Infrastruktur Ketenagalistrikan Tahun 2023–2026	5-9
Tabel 5.4	Capaian Utama Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2026	5-12
Tabel 5.5	Capaian Pembangunan Destinasi Pariwisata	5-17
Tabel 5.6	Capaian Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2024-2026	5-19
Tabel 5.7	Koperasi Aktif berdasarkan Sektor Usaha	5-19
Tabel 5.8	Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Tahun 2024–2025	5-22
Tabel 5.9	Jumlah dan Nilai Proyek KPBU Tahun 2025 dan Tahun 2026	5-25

BAB 6

Tabel 6.1	Capaian Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2024-2026	6-4
Tabel 6.2	Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2022–2026	6-6
Tabel 6.3	Capaian Pembangunan Bidang Iptek dan Inovasi Tahun 2024–2026	6-10
Tabel 6.4	Capaian Pembangunan Bidang Kualitas Keluarga Tahun 2023–2026	6-17
Tabel 6.5	Capaian Pembangunan Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan Tahun 2023-2026	6-19
Tabel 6.6	Capaian Pembangunan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026	6-22

BAB 7

Tabel 7.1	Capaian Pembangunan Industri dan Hilirisasi Tahun 2024 - Semester I 2026	7-1
Tabel 7.2	Capaian Produksi Hasil Perikanan Tahun 2025 – Triwulan II 2026 (juta ton)	7-4
Tabel 7.3	Komoditas Prioritas Hilirisasi Sektor Perikanan Tahun 2025 (juta ton)	7-5
Tabel 7.4	Jumlah UPI Menengah dan Besar Menurut Jenis Kegiatan Olahan Utama Tahun 2024	7-6
Tabel 7.5	Capaian Pembangunan Perdagangan Tahun 2024 – Semester I 2026	7-10
Tabel 7.6	Capaian Pendukung Peningkatan Hilirisasi Tahun 2024 - 2026	7-11
Tabel 7.7	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan Nasional Tahun 2024 - 2026	7-14
Tabel 7.8	Capaian Realisasi Investasi Tahun 2024 - Semester I 2026	7-17

BAB 8

Tabel 8.1	Capaian Indikator Kependudukan Tahun 2021–2026	8-1
Tabel 8.2	Realisasi Bantuan Sosial dalam Program Penurunan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023–2026	8-4
Tabel 8.3	Sepuluh Provinsi dengan Penurunan Rasio Gini Tertinggi Tahun 2025 - 2026	8-7
Tabel 8.4	Capaian Indikator Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2024–2026	8-10
Tabel 8.5	Capaian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Transmigrasi Tahun 2024–2026	8-13
Tabel 8.6	Realisasi Pertumbuhan PDRB Wilayah KBI dan KTI (persen, yoy) Tahun 2020–2026	8-16

BAB 9

Tabel 9.1	Barang Bukti Narkotika dan Psikotropika yang Berhasil Disita Tahun 2026	9-14
Tabel 9.2	Capaian K/L/D yang Memanfaatkan SPLP Tahun 2023–2026	9-16

BAB 10

Tabel 10.1	Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2023–2025	10-7
Tabel 10.2	Arsip Indonesia yang Masuk ke dalam Daftar <i>Memory of the World</i> Tahun 2024-2026	10-8

BAB 1

Pendahuluan



Presiden memberikan penghargaan kepada para atlet yang memperoleh medali pada ajang SEA Games 2025
Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2025



Senja di Candi Ratu Boko, DI Yogyakarta, 2026
Sumber: BP BUMN



Saluruh upaya pembangunan yang ditempuh bangsa Indonesia merupakan manifestasi komitmen bangsa untuk menunaikan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia saat ini memasuki momentum strategis melalui transformasi menyeluruh demi memperkuat kemandirian bangsa menuju 100 tahun Indonesia merdeka.

Tahun 2026 menjadi fase percepatan transformasi ekonomi, pangan, energi, dan industri. Hal ini sejalan dengan tema RKP 2026, yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor dengan tetap memperhatikan fungsi pembangunan berkelanjutan.

Tema Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kedaulatan, serta kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menjadi landasan pelaksanaan pembangunan nasional yang memberikan manfaat nyata, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan eskalasi ketegangan geopolitik, perubahan iklim, disrupsi teknologi, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta kualitas dan pemerataan SDM. Pemerintah terus berupaya menghadapi tantangan tersebut melalui intervensi kebijakan yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Hal ini menuntut perencanaan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis risiko.

Penguatan transformasi pembangunan inklusif diarahkan melalui berbagai intervensi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, peserta didik, dan ibu hamil; Sekolah Rakyat untuk perluasan akses pendidikan yang lebih merata; Sekolah Unggul Garuda untuk mencetak generasi muda berdaya saing global; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain itu, juga dilakukan Hilirisasi Industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional; Swasembada Pangan untuk meningkatkan produksi, distribusi, dan jaminan ketersediaan pangan; serta pengelolaan persampahan untuk mencegah krisis ekologi dan menjaga kelestarian lingkungan.

Lampiran Pidato Presiden RI tahun 2026 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pidato Kenegaraan Presiden RI tahun 2026. Lampiran pidato ini, disusun untuk memahami secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai capaian, tantangan, dan upaya pembangunan. Lampiran pidato diawali dengan penjelasan pelaksanaan transformasi struktural yang diikuti dengan pendalaman capaian, tantangan, dan upaya pelaksanaan Asta Cita dan RPJMN 2025-2029. Lampiran pidato ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi pemangku kepentingan terkait.



Presiden menyapa masyarakat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, 2026

BAB 2

81 TAHUN INDONESIA

Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur



Presiden Prabowo bersama Anak Indonesia
Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025



Koperasi Merah Putih Desa Dukuhrejo, Jawa Tengah
Sumber: Kementerian Koperasi, 2026



Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menegaskan tujuan bersama seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan kedaulatan nasional, keadilan sosial untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran yang berkelanjutan. Ketiga kata kunci dalam tema Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menjadi semangat yang menjiwai arah pembangunan nasional.

Berdaulat

merefleksikan kemampuan bangsa untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasional, memperkuat kemandirian, dan meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi dinamika global.

Adil

mencerminkan terjaminnya pemerataan akses dan kesempatan terhadap pelayanan publik yang berkualitas, perlindungan sosial, serta pemanfaatan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Makmur

menggambarkan terwujudnya kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Semangat tema Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia selaras dengan Visi Indonesia 2045, yaitu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Dalam mewujudkan visi

tersebut, RPJPN Tahun 2025–2045 memuat upaya-upaya transformatif yang mencakup transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola, yang ditopang oleh landasan transformasi berupa supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

VISI INDONESIA 2045

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,
Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

5 Sasaran Utama Pembangunan

1 Pendapatan per Kapita setara negara maju

Target 2045

- GNI Per Kapita (USD): **30.300**
- Kontribusi PDB Maritim (%): **15**
- Kontribusi PDB Manufaktur (%): **28**

2 Kemiskinan menurun dan Ketimpangan berkurang

Target 2045

- Tingkat Kemiskinan (%): **0,5 – 0,8**
- Rasio Gini (Indeks): **0,290 – 0,320**
- Kontribusi PDRB KTI (%): **28,5**

3 Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

Target 2045

- Global Power Index **15 besar**
(peringkat)

4 Daya saing sumber daya manusia meningkat

Target 2045

- Indeks Modal Manusia **0,73**
(Indeks)

5 Intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero

Target 2045

- Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): **93,5**
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks): **83**

8 Misi Pembangunan

Transformasi Indonesia

- 1 Transformasi Sosial
- 2 Transformasi Ekonomi
- 3 Transformasi Tata Kelola

Landasan Transformasi

- 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kerangka Implementasi Transformasi

- 6 Pembangunan kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- 7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8 Kesisambungan Pembangunan

RPJPN 2025–2045 dilaksanakan secara bertahap melalui rencana pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMN. RPJMN 2025–2029 yang berbasis Asta Cita menjadi tahap pertama yang berfokus pada penguatan transformasi. Asta Cita diterjemahkan menjadi

Prioritas Nasional yang menjadi arah kebijakan dan fokus pembangunan nasional di dalam RPJMN, yang mengintegrasikan peran seluruh pemangku kepentingan sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang adaptif, responsif, dan berbasis risiko.



Agenda Pembangunan RPJPN 2025–2045

- Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- Transformasi Ekonomi
- Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Transformasi Ekonomi

- Transformasi Ekonomi
- Transformasi Sosial
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Transformasi Ekonomi

- Transformasi Sosial
- Transformasi Ekonomi

- Transformasi Ekonomi
- Transformasi Tata Kelola
- Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Asta Cita



Prioritas Nasional 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)



Prioritas Nasional 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru



Prioritas Nasional 3

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi



Prioritas Nasional 4

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas



Prioritas Nasional 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri



Prioritas Nasional 6

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan



Prioritas Nasional 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan



Prioritas Nasional 8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Presiden, pelaksanaan RPJMN 2025–2029 hingga 2026, secara khusus menekankan pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dijabarkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia.

Swasembada Pangan - Program Swasembada Pangan merupakan salah satu program strategis nasional yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan berkualitas secara berkelanjutan melalui pendekatan *Food-Energy-Water (FEW) Nexus*. Sasaran utama

program meliputi peningkatan ketersediaan pangan berbasis lumbung pangan; peningkatan kualitas konsumsi dan ketahanan pangan; serta peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan tata kelola sistem pangan.

Pada 2026, pelaksanaan program difokuskan pada pengembangan kawasan pangan terintegrasi (padi, jagung, dan ubi kayu); pengembangan kawasan perkebunan (sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete, dan rempah); serta peningkatan produksi daging, susu, dan telur. Selain itu, pelaksanaan program difokuskan pada penguatan sistem kesehatan dan karantina hewan, tumbuhan, serta ikan terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produksi dan mendukung keamanan pangan nasional.

Sementara itu, pada sektor perikanan dan kelautan, akselerasi penyediaan pangan akuatik dilakukan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah pesisir dan pengembangan lokasi Budidaya Ikan Darat Tematik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus memperkuat cadangan pangan nasional serta meningkatkan kualitas dan nilai gizi pangan melalui fortifikasi dan biofortifikasi guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ditekankan pada pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi SDM yang inklusif, serta penguatan riset dan inovasi. Peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan juga terus didorong melalui penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)*, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), peningkatan pengolahan ikan, perlindungan tanaman dan kesehatan ikan, penguatan

pengelolaan pascapanen, serta peningkatan mutu dan sertifikasi produk.

Pelaksanaan program swasembada pangan juga didukung melalui penataan dan penguatan regulasi dan kebijakan, antara lain: (1) tata kelola pupuk bersubsidi; (2) percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; (3) pendayagunaan penyuluh pertanian; (4) percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah; (5) percepatan pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; (6) penetapan calon lokasi KNMP.

Dukungan kebijakan dan regulasi tersebut berperan penting dalam mengoptimalkan pencapaian program swasembada pangan. Hal ini tecermin dari peningkatan kesejahteraan petani yang ditunjukkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,48 (Mei 2026) dan kesejahteraan nelayan yang ditunjukkan oleh Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 108,05 (semester I 2026). Penguatan NTP dan NTN mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi petani dan nelayan yang didukung antara lain oleh (1) produksi padi sebesar 33,46 juta ton (semester I 2026); (2) produksi jagung sebesar 8,58 juta ton (semester I 2026); (3) produksi perikanan yang mencapai 13,08 juta ton pada periode yang sama. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial bagi petani dan nelayan.

Program swasembada pangan juga memperkuat ketahanan pangan nasional, yang ditandai dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,17 juta ton (Juni, 2026) sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Peningkatan produksi pangan yang mendukung penguatan cadangan tersebut mendorong pencapaian pertumbuhan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada triwulan II 2026, PDB Sektor ini tumbuh sebesar 3,80 persen. Pada saat yang sama,



terjaganya ketersediaan dan keterjangkauan pangan diharapkan mampu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi 6,55 persen.

Hilirisasi - Penguatan struktur industri melalui hilirisasi menjadi salah satu strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi.

Pada semester I 2026, realisasi investasi pada 15 komoditas prioritas hilirisasi RPJMN 2025–2029 mencapai Rp273,47 triliun atau 27,06 persen dari total realisasi investasi nasional. Pada April 2026, pemerintah melaksanakan *groundbreaking* tahap II terhadap 13 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar Rp116 triliun, yang terdiri atas 5 proyek sektor energi, 5 proyek sektor mineral, dan 3 proyek sektor perkebunan.

Pada sektor energi, pemerintah memperkuat hilirisasi dan ketahanan energi melalui sejumlah proyek yaitu (1) pembangunan fasilitas kilang *gasoline* (bensin) di Riau dan Jawa Tengah; (2) pembangunan tangki operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur; serta (3) pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi *dimethyl ether* (DME) berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Sumatera Selatan. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor bensin dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), sekaligus memperkuat kapasitas penyimpanan dan distribusi energi di kawasan Indonesia bagian timur.

Pada sektor mineral, hilirisasi terus diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas basis industri manufaktur, dan memperkuat rantai pasok industri nasional. Proyek hilirisasi nikel yang dikembangkan diantaranya adalah fasilitas manufaktur baja nirkarat berbasis nikel

di Sulawesi Tengah, serta modernisasi fasilitas produksi *slab* baja karbon berbasis bijih besi lokal di Banten.

Pada komoditas tembaga, pemerintah juga mengembangkan industri hilir tembaga dan emas secara terintegrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, yang mencakup fasilitas pengolahan kuningan (*brass mill* dan *brass cup*) berkapasitas 10.000 ton per tahun serta fasilitas pengolahan residu hasil pemurnian tembaga (*anode slime*) menjadi logam mulia berkapasitas 30 ton emas per tahun (setara 5 juta keping produk logam mulia per tahun).

Pada sektor perkebunan, pemerintah mempercepat hilirisasi sawit melalui pembangunan fasilitas pengolahan industri *oleofood* dan *biodiesel* di KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara. Pembangunan tersebut direncanakan akan memproduksi margarin dan *shortening* berkapasitas 35.000 ton per tahun, *cocoa butter substitute* berkapasitas 25.000 ton per tahun, serta *biodiesel* berkapasitas 450.000 ton per tahun. Upaya hilirisasi sawit juga didukung oleh implementasi Perpres No. 16/2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang bertujuan untuk memperkuat aspek keberlanjutan dan ketertelusuran rantai pasok.

Selain itu, hilirisasi komoditas kelapa juga diperkuat melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan terpadu di Maluku Tengah yang menghasilkan *Medium Chain Triglycerides* (MCT), tepung kelapa (*coconut flour*), dan karbon aktif (*activated carbon*). Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat mendorong diversifikasi produk, memperluas akses pasar ekspor, serta mempercepat transformasi industri berbasis sumber daya lokal.

Makan Bergizi Gratis - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi pembangunan SDM melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang menasar: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B); peserta didik dan santri dari PAUD hingga SMA sederajat; serta kelompok sasaran lain sesuai ketentuan, termasuk guru dan tenaga kependidikan.

Program MBG dirancang untuk meningkatkan status gizi masyarakat, mendorong perilaku makan sehat, meningkatkan kehadiran, partisipasi dan prestasi belajar peserta didik, serta berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga dan penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan rantai pasok pangan daerah.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola program dan ekosistem pendukung menjadi aspek prioritas agar manfaat MBG dapat dirasakan secara luas, merata, dan berkelanjutan. Upaya perbaikan penyelenggaraan program MBG dilakukan melalui moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, pembenahan kualitas SPPG yang telah beroperasi agar memenuhi standar operasional, serta penguatan implementasi program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema yang lebih adaptif dan efisien.

Hingga Juli 2026, Program MBG telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.670 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penyelenggaraan program ini juga didukung oleh sekitar 1,3 juta tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG, 29.671 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta kemitraan dengan 454 koperasi, 46

Gambar 2.1
Peta Sebaran SPPG Tahun 2025-2026



Sumber: Badan Gizi Nasional, 2026

Keterangan: Data Per Juli 2026

BUM Desa, 14 BUM Desa Bersama, dan 1.151 UMKM dalam penyediaan bahan pangan dan layanan pendukung lainnya.

Pemerintah terus memperkuat ketepatan sasaran penerima manfaat yang akan diarahkan

pada kelompok dan wilayah dengan tingkat kerawanan pangan serta kerentanan sosial ekonomi yang tinggi. Penyelenggaraan program MBG akan difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, dan



penguatan ekosistem pendukung. Selain itu, pemerintah akan mempercepat Sertifikasi Laik Sanitasi dan Higiene (SLHS), memperkuat standarisasi SPPG, mengembangkan digitalisasi pengawasan, serta mengintegrasikan sistem informasi gizi untuk menjamin keamanan pangan, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program.

Peningkatan kebutuhan pangan untuk MBG juga perlu diantisipasi melalui penguatan pasokan, stabilisasi harga pangan, dan perencanaan menu yang sesuai dengan potensi pangan lokal. Oleh karena itu, penguatan peran dan peningkatan produktivitas petani, nelayan, peternak, koperasi, BUM Desa, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan terus didorong untuk memastikan ketersediaan, akses, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan pangan bergizi.

Keberhasilan penyelenggaraan program MBG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga terlahir dari semangat gotong royong seluruh bangsa. Sebanyak 136.115 kader Tim Pendamping Keluarga telah terlibat aktif untuk memberikan edukasi dan mendistribusikan makanan bergizi secara rutin. Selain itu, perubahan perilaku konsumsi pangan yang sehat akan didorong melalui intensifikasi edukasi pangan dan gizi, sinergi intervensi gizi yang komprehensif, serta penguatan Usaha Kesehatan Sekolah atau Madrasah (UKS/M).

Sekolah Rakyat- Sekolah Rakyat merupakan Program Direktif Presiden yang diatur melalui Perpres No. 120/2025, bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, termasuk

Anak Tidak Sekolah (ATS). Pelaksanaan program dilakukan melalui penyediaan layanan pendidikan berasrama pada berbagai jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Sebagai program pembangunan yang bersifat jangka panjang, Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas SDM, dan mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarkelompok masyarakat.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang komprehensif guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pembentukan karakter, serta penguatan kompetensi peserta didik. Hingga Juli 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau 43.251 siswa (14.773 siswa lama dan 28.478 siswa baru) yang didukung oleh 5.629 guru, dan 11.504 tenaga kependidikan dalam 1.550 rombongan belajar.

Program Sekolah Rakyat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Hingga Tahun Ajaran 2025/2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi. Pada Tahun Ajaran 2026/2027, penyelenggaraan Sekolah Rakyat akan dikembangkan secara bertahap melalui (1) transformasi 93 Sekolah Rakyat Rintisan menjadi Sekolah Rakyat Permanen; (2) keberlanjutan 81 Sekolah Rakyat Rintisan Tahun Ajaran 2025/2026 yang tetap beroperasi; serta (3) penambahan 8 lokasi Sekolah Rakyat Rintisan baru di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Selain memperluas akses pendidikan, Program Sekolah Rakyat juga mulai menunjukkan capaian dalam pengembangan prestasi peserta didik. Hingga Tahun Ajaran 2025/2026,

Gambar 2.2

Peta Sebaran Lokasi Sekolah Rakyat Tahun 2025-2026



Sumber: Kementerian Sosial, 2026

sebanyak 325 peserta didik berhasil meraih prestasi pada berbagai ajang di kancah nasional maupun internasional. Salah satunya adalah keberhasilan peserta didik meraih Juara II pada Kejuaraan Karate Series 7–2025 Senkaido Open International Karate *Championship*. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya dan meraih prestasi, terlepas dari keterbatasan kondisi ekonominya.

Sejalan dengan hal tersebut, Program Sekolah Rakyat juga menunjukkan capaian positif dalam peningkatan mutu dan keberlanjutan pendidikan. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 59 Sekolah Rakyat telah terakreditasi dan 480 peserta didik berhasil lulus, terdiri atas 382 lulusan SD, 84 lulusan SMP, dan 12 lulusan SMA. Khusus lulusan SMA, seluruhnya telah memperoleh asesmen dan pendampingan untuk menentukan rencana pascalulus. Capaian ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya

memastikan akses dan kualitas pendidikan, tetapi juga mendukung transisi lulusan menuju pendidikan tinggi, dunia kerja, maupun jalur pengabdian sesuai potensi masing-masing.

Cek Kesehatan Gratis - Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit yang masif termasuk membangun kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Program CKG dilaksanakan sebagai langkah pencegahan sejak dini terjadinya penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi di Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui skrining kesehatan sesuai siklus hidup, yang mencakup bayi baru lahir, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah dan remaja, dewasa, serta lanjut usia. Hingga Juni 2026, cakupan penerima CKG telah mencapai 59,5 juta jiwa.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta menurunnya angka kesakitan dan beban pembiayaan kesehatan keluarga dan BPJS Kesehatan akibat penyakit



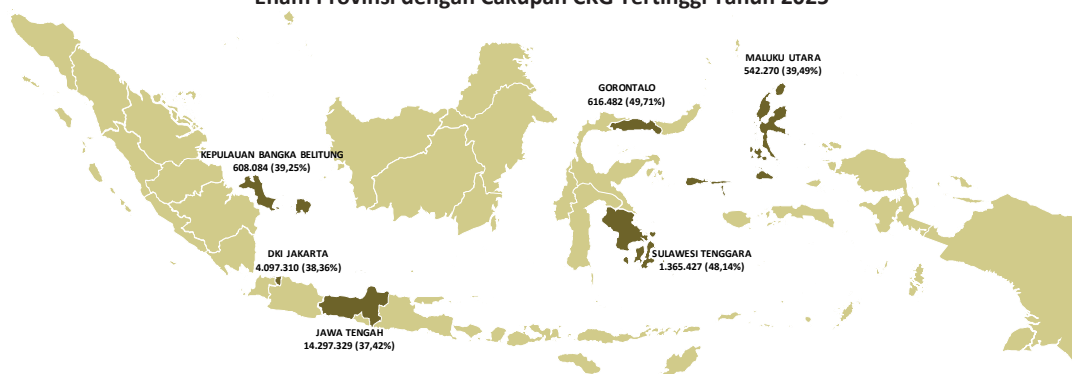
kronis dan katastrofik. Lebih lanjut, Program CKG juga bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis data melalui integrasi hasil skrining dan pemeriksaan kesehatan ke dalam sistem informasi kesehatan nasional guna mendukung perencanaan dan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan Program CKG.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi melalui berbagai media. Selain itu, penguatan pelaksanaan CKG didukung oleh Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan dukungan pelaksanaan CKG di lingkungan madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pesantren.

Pada 2025, cakupan penerima CKG sebesar 70,2 juta jiwa. Berdasarkan kelompok usia, cakupan CKG adalah kelompok usia bayi baru

Gambar 2.3
Enam Provinsi dengan Cakupan CKG Tertinggi Tahun 2025



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

lahir 429 ribu jiwa (9,39 persen), balita dan anak pra-sekolah 4,5 juta jiwa (16,78 persen), usia sekolah dan remaja 24 juta jiwa (49,60 persen), usia dewasa 34,4 juta jiwa (20,26 persen), dan usia lanjut 6,8 juta jiwa (20,16 persen).

Pada 2025 terdapat 6 provinsi yang memiliki cakupan CKG cukup besar yaitu Gorontalo 49,71 persen, Sulawesi Tenggara 48,14 persen, Maluku Utara 39,49 persen, Kepulauan Bangka Belitung 39,25 persen, DKI Jakarta 38,36 persen, dan Jawa Tengah 37,42 persen.

Upaya meningkatkan cakupan perluasan pelaksanaan di luar fasilitas kesehatan menjadi salah satu strategi utama. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong partisipasi

fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta, serta inovasi layanan CKG termasuk waktu dan tempat pemberian layanan. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjamin ketersediaan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk memastikan CKG terlaksana.

Kartu Kesejahteraan/Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Bantuan Sosial Terintegrasi - Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Bantuan Sosial Terintegrasi merupakan salah satu program yang mendukung percepatan penurunan kemiskinan. Program ini diarahkan untuk memperkuat integrasi perlindungan sosial melalui transformasi ekonomi rumah tangga, sehingga masyarakat

miskin dan rentan tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

Fokus dari PRO-KESRA adalah integrasi program perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, mencakup berbagai program subsidi dan bantuan sosial yang komprehensif dari berbagai sektor berbasis individu dan keluarga, baik bantuan berupa uang, barang, maupun jasa. PRO-KESRA mengintegrasikan (1) Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Program Sembako; (3) Program Indonesia Pintar (PIP); (4) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); (5) Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI); dan (6) Subsidi Energi.

Hingga semester I 2026, pemerintah telah memberikan bantuan PKH kepada 9,58 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Sembako kepada 16,19 juta KPM, Program ATENSI sebanyak 91,15 ribu jiwa penduduk rentan, PBI-JKN kepada 96,80 juta penerima, dan PIP kepada 13,66 juta peserta didik.

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sesuai kondisi dan sasaran program yang lebih tepat sasaran. Program ini dilaksanakan melalui: (1) pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN); (2) transformasi proses pengusulan dan penyaluran bantuan secara digital melalui skema *on demand*; (3) penerapan skema graduasi untuk mendorong kemandirian penerima manfaat; serta (4) peningkatan kualitas desain program bantuan sosial.

Pelaksanaan program dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan bertujuan untuk meningkatkan

ketepatan sasaran penerima manfaat, memperkuat implementasi perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi, memperkuat kesinambungan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, dan mempercepat graduasi penerima manfaat.

Sampai dengan Semester I 2026, pemerintah telah melaksanakan uji coba digitalisasi bantuan sosial di 43 kabupaten/kota dan diperluas ke 100 kabupaten/kota lainnya, menyempurnakan sistem pemantauan dan pengelolaan data, serta memperkuat tata kelola kelembagaan dalam pelaksanaan bantuan sosial. Upaya tersebut menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan efektivitas program.

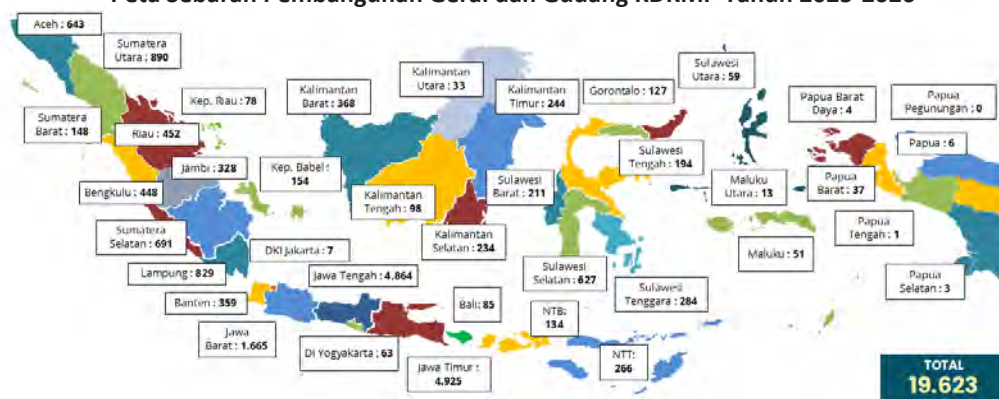
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi di desa dan kelurahan. Program ini didukung oleh Inpres No. 9/2025 sebagai landasan pembentukan KDKMP, Inpres No. 17/2025 untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dan Inpres No. 5/2026 untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia.

Program KDKMP diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal melalui penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha bersama, dan perluasan kemitraan. Melalui penyediaan layanan usaha yang terintegrasi, KDKMP diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan secara berkelanjutan.



Gambar 2.4

Peta Sebaran Pembangunan Gerai dan Gudang KDKMP Tahun 2025-2026



Sumber: Kementerian Koperasi, 2026

Keterangan: Data per 5 Agustus 2026

Hingga 5 Agustus 2026, sebanyak 83.382 KDKMP telah berbadan hukum. Selain itu, sebanyak 38.109 titik telah diajukan untuk dibangun gerai fisik KDKMP, dengan 19.623 gudang dan gerai telah selesai dibangun. Untuk memperkuat pengelolaan usaha KDKMP, pemerintah merekrut 30.000 manajer KDKMP melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan KDKMP terus berlanjut, tidak hanya pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada penguatan sarana pendukung dan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi operasional koperasi.

Pemerintah akan terus mendorong percepatan operasionalisasi KDKMP secara bertahap melalui (1) penguatan tata kelola dan kelembagaan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM; (3) pengembangan usaha dan kemitraan; (4) pembangunan dan optimalisasi sarana fisik; serta (5) percepatan digitalisasi dan dukungan pembiayaan. Melalui berbagai upaya tersebut, KDKMP diharapkan menjadi penggerak penguatan ekonomi kerakyatan.

Perumahan - Penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan salah satu prioritas pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini difokuskan pada pemulihan ekonomi rumah tangga dan stabilitas sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap kepemilikan hunian, diantaranya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat miskin dan rentan, masyarakat terdampak bencana, serta masyarakat generasi muda.

Pemerintah mengakselerasi penyediaan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah bagi MBR termasuk masyarakat miskin dan rentan, melalui: (1) peningkatan hunian melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara perorangan maupun berkelompok; (2) pembangunan rumah khusus; (3) pembangunan dan revitalisasi hunian vertikal; (4) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang terkoneksi dan terintegrasi; (5) pengembangan kawasan permukiman berorientasi transit (*Transit Oriented Development*), khususnya

untuk hunian vertikal; (6) penanganan permukiman kumuh terpadu skala kota dan kawasan; (7) fasilitasi rumah tangga melalui pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), kredit program perumahan (KPP), kredit pemilikan rumah (KPR), dan pembiayaan mikro; serta (8) penguatan ekosistem perumahan melalui peningkatan tata kelola dan penataan ulang BP Tapera. Selain itu, pemerintah meluncurkan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) dalam bentuk kegiatan penggantian atap seng menjadi genteng.

Berbagai upaya tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Pada 2025, akses rumah tangga terhadap hunian layak mencapai 68,40 persen. Hingga akhir Juni 2026, penyediaan rumah layak huni terus berlanjut melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, dengan realisasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 850.786 unit pada 2025 dan 380.787 unit pada semester I 2026.

Gambar 2.5

Skema Alur Pengelolaan Sampah



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2026

Pengelolaan Sampah - Penetapan status darurat sampah pada 2024 menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah terus memperkuat pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penguatan pengelolaan sampah diarahkan tidak hanya untuk mencapai target 100 persen sampah terkelola pada 2029, tetapi juga untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular yang

menciptakan nilai tambah, menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) guna mencapai target *Net Zero Emission* (NZE), serta mengoptimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Selanjutnya, mengingat hingga 2025, sampah yang berhasil dikelola baru mencapai sekitar 33,54 persen, upaya perbaikan sistem pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan melalui pengoperasian 20.908 Bank Sampah Unit (BSU), 369 Bank Sampah Induk (BSI), dan 3.194 unit Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R)



aktif, tetapi juga melalui pembinaan terhadap 186 bank sampah dan kelompok masyarakat pengelola.

Pemerintah juga mendorong penerapan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berlandaskan Perpres No. 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Penerapan PSEL tersebut menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi kondisi darurat sampah sekaligus mengurangi timbulan sampah khususnya sampah residu secara signifikan. Pada tahap pertama, pembangunan PSEL direncanakan di Kota Bekasi, Denpasar, dan Bogor. Selanjutnya, pembangunan tahap kedua akan dilaksanakan di Yogyakarta, Lampung, Medan, Semarang, Serang, Surabaya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Bekasi. Pada tahap kedua, PSEL juga dibangun di Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara untuk melayani pengelolaan sampah DKI Jakarta.

Selain itu, Program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) turut diluncurkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat

melalui gerakan kerja bakti dan aksi kebersihan lingkungan secara masif. Hingga April 2026, sebanyak 33 provinsi dan 141 kabupaten/kota telah melaporkan pelaksanaan aksi tersebut yang melibatkan sekitar 347.000 peserta di 912 titik lokasi dengan total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 1.310,7 ton.

Untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan terukur, pemerintah pusat terus mendorong serta memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah. Hingga Juli 2026, sebanyak 487 kabupaten/kota dan 37 provinsi telah memiliki dokumen tersebut.

Untuk memastikan keberhasilan seluruh upaya pengelolaan sampah, diperlukan penguatan kebijakan dan tata kelola yang komprehensif melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah yang mendukung ekonomi sirkular. Selain itu, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur persampahan dan penegakan hukum yang lebih tegas memperkuat pengelolaan persampahan ke depan.



Pembagian Makan Bergizi Gratis di Sentani, Papua
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

BAB 3

ASTA CITA 1

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi,
dan Hak Asasi Manusia (HAM)



Paskibraka Nasional 2025
Sumber: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2025

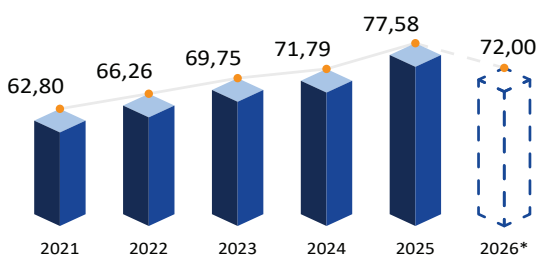
Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2021-2026



Sumber: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2025

*) Angka target

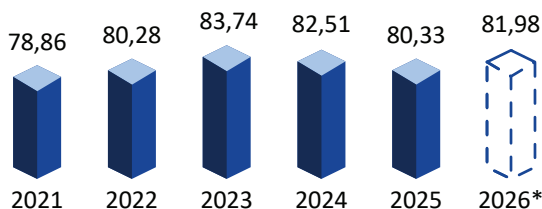
Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) 2021-2026



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

*) Angka target

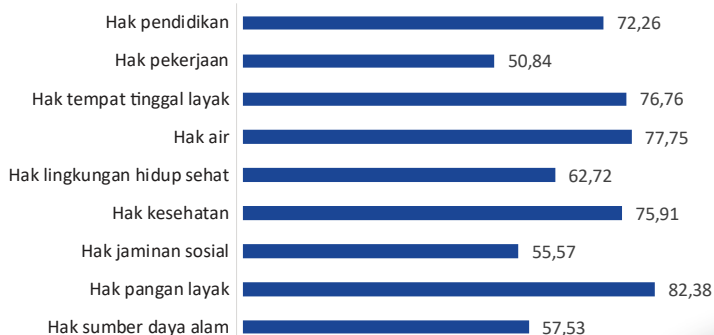
Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesenjangan 2021-2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

*) Angka target

Nilai Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya



Sumber: Kementerian Hak Asasi Manusia, 2025



Pancasila merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap sila di dalamnya memberikan jiwa dan panduan agar kebebasan berpendapat dan HAM tetap selaras dengan nilai leluhur bangsa. Pancasila berfungsi sebagai pemandu moral dan hukum yang mengikat partai politik dan parlemen agar sistem demokrasi dan HAM berjalan seimbang. Pancasila memastikan bahwa kekuasaan terbatas serta komunikasi publik dan media tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.

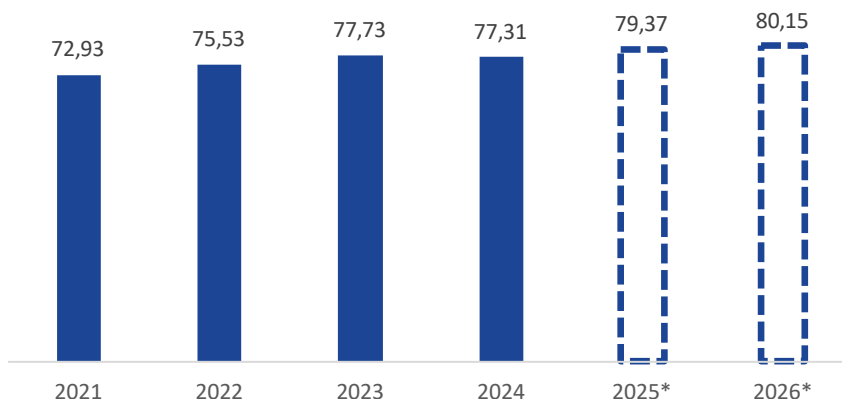
3.1 Ideologi Pancasila

3.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah berkomitmen memperkuat penerapan Ideologi Pancasila dalam semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komitmen ini diwujudkan dalam capaian Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) pada tahun 2024 yang mencatatkan nilai nasional sebesar 77,31.

Secara umum, praktik nilai-nilai luhur Pancasila dalam keseharian masyarakat masih terjaga dengan baik. Capaian IAP nasional terus meningkat dari kategori “cukup” menjadi kategori “baik” pada 2024.

Grafik 3.1
Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2021–2026



Sumber: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2025
Keterangan: *) Angka target

Tabel 3.1

Capaian Indeks Aktualisasi Pancasila Dimensi Sila Tahun 2021-2024

Sila	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*
Ketuhanan Yang Maha Esa	73,06	76,06	78,32	83,68	80	81
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	76,93	81,32	81,46	75,44	83	84
Persatuan Indonesia	77,05	78,80	81,18	84,32	83	84
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	72,51	74,47	79,35	74,27	81	82
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	65,10	66,98	68,33	68,86	70	71

Sumber: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2025

Keterangan: *) Angka target

Selanjutnya, pelembagaan untuk mendorong nilai-nilai Pancasila dilaksanakan melalui analisis yang menghasilkan rekomendasi berupa 31 *output* rancangan produk hukum nasional. Rekomendasi ini telah diselaraskan dengan nilai Pancasila, serta mendorong kolaborasi bersama K/L dan Pemda Provinsi melalui Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Penerjemahan dan penerapan nilai Pancasila ke dalam konsep operasional sehari-hari ditekankan ke berbagai komponen bangsa melalui beberapa program. Program-program tersebut adalah Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) serta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N).

Pendidikan kepemimpinan ini menanamkan empat konsensus dasar bangsa (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika). Pendidikan ini didesain untuk pemimpin seluruh

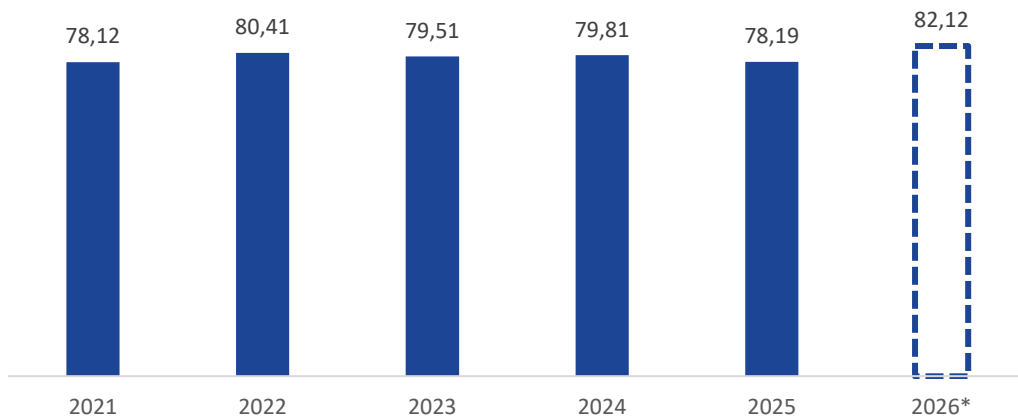
komponen bangsa agar berkarakter negarawan, berpikir holistik, integral, dan komprehensif, dengan moral dan etika kebangsaan, berintegritas dan profesional.

Selain penekanan nilai Pancasila di level pimpinan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kohesivitas sosial dan wawasan kebangsaan berlandaskan nilai-nilai Pancasila melalui komunikasi publik. Hal ini ditunjukkan dengan 83,1 persen konten komunikasi publik yang diproduksi dan disebarkan pada kanal informasi publik yang telah mengandung unsur nilai-nilai Pancasila.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila di seluruh komponen bangsa menjadi prinsip dasar dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila turut menopang stabilitas demokrasi serta menjaga Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bertahan pada kategori “sedang” (2021) dan ditargetkan meningkat menjadi kategori “baik” (2026).



Grafik 3.2
Indeks Demokrasi Indonesia 2021-2026



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026
Keterangan:*) Angka target

Nilai religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial mbingkai penyelenggaraan demokrasi Indonesia serta menjadi pedoman dalam memperkuat kualitas aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi di tengah dinamika kondisi dalam dan luar negeri. Hal tersebut dicapai melalui penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan lembaga demokrasi serta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang menjadi pedoman pemda dalam meningkatkan kualitas demokrasi sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.1.2 Tantangan dan Upaya

Pembumian ideologi Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan antara lain: (1) pemahaman, praktik, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari; (2) keragaman dan penyebaran nilai dan pandangan di luar Pancasila sebagai dampak teknologi informasi digital; (3) penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai desain tata kelola kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial budaya; serta (4) pemahaman, aktualisasi, dan keteladanan nilai-

nilai Pancasila bagi penyelenggara negara.

Beberapa upaya pemerintah dalam merespon tantangan tersebut, antara lain: (1) penguatan pendekatan pembelajaran inovatif melalui fasilitasi siswa dan masyarakat dalam praktik langsung nilai-nilai Pancasila; (2) internalisasi Pancasila dalam panduan penyelenggara negara, termasuk pada ruang digital; (3) menyusun Peta Jalan PIP yang melekat pada proses perencanaan dan pengendalian pembangunan; dan (4) memperkuat aktualisasi dan internalisasi Pancasila melalui kolaborasi antarinstansi serta implementasi Pancasila secara lebih masif dan terstruktur di kalangan penyelenggara negara.

3.2 Komunikasi Publik dan Media

3.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah melakukan penguatan pers dan media massa, serta sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik. Hal ini ditunjukkan, diantaranya dengan telah didiseminasikannya program hasil terbaik

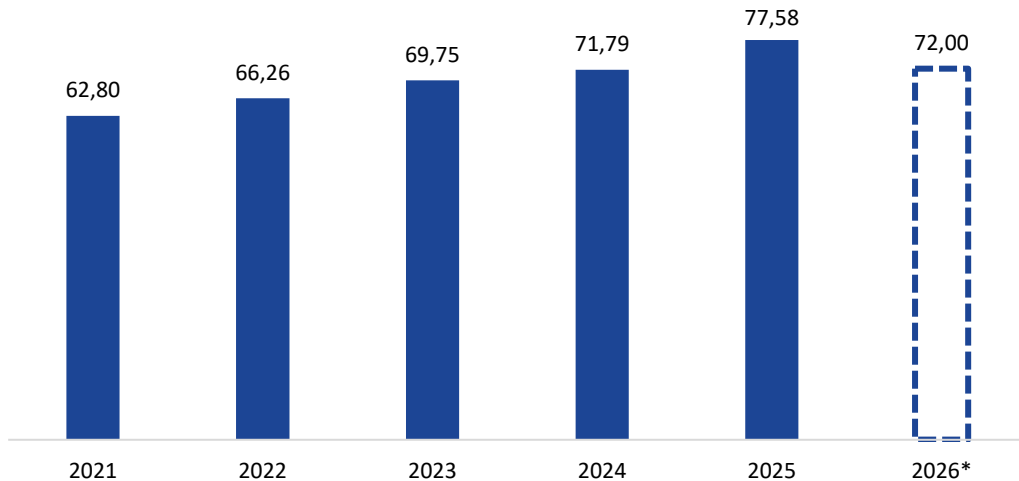
cepat yang menjangkau lebih dari 100 juta masyarakat, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen melindungi generasi muda melalui penerbitan PP No. 17/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Penguatan komunikasi publik dan media, ditandai dengan nilai Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)

sebesar 77,58 (kategori Baik) atau meningkat 5,49 poin dari tahun 2024. Salah satu indikator yang diukur adalah Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Informasi Publik dengan nilai nasional sebesar 77,99 (kategori Baik). Sementara itu, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi Publik memiliki nilai nasional sebesar 74,16 (kategori Baik). Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas proses komunikasi publik pemerintah secara menyeluruh yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Grafik 3.3

Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2021–2026



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

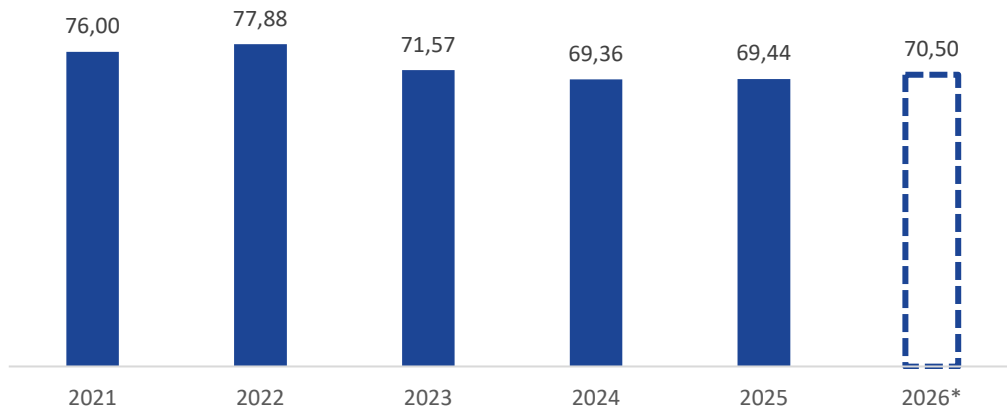
Keterangan:*) Angka target

Pada penguatan pers dan media massa, nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 meningkat 0,08 poin dari 2024, yaitu sebesar 69,44. Capaian tersebut masuk dalam kategori “Cukup Bebas” yang mencerminkan adanya kebebasan jurnalis, ruang kebebasan sipil yang masih terbuka, dan keragaman sudut pandang pemberitaan yang semakin baik.

Peningkatan serupa juga terdapat pada bidang penyiaran yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) sebesar 3,29 (kategori Berkualitas) atau meningkat 0,07 poin dari periode II 2024. Sebanyak enam dari delapan kategori program siaran TV telah melampaui standar kualitas Komisi Penyiaran Indonesia.



Grafik 3.4
Indeks Kemerdekaan Pers Nasional Tahun 2021-2026



Sumber: Dewan Pers, 2025
Keterangan:*) Angka target

Salah satu inovasi penguatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat ekosistem pers adalah melalui Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S). Pada 2025 sampai dengan semester I 2026, telah disusun desain ruang uji kebijakan (*policy sandbox*), yang berfokus pada tiga provinsi intervensi serta satu provinsi pembanding tren dan pembelajaran, yaitu Provinsi Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat Daya, dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Implementasi kebijakan ditujukan untuk menguji pola penyehatan pers dan media melalui model kemitraan multipihak, seperti dengan pemerintah daerah, swasta, filantropi, masyarakat, asosiasi pers, serta media lokal yang dapat direplikasi pada tingkat nasional untuk mendukung keberlanjutan industri pers.

Pada sisi lain, penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik ditandai dengan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) nasional yang mencapai angka 66,43 (kategori

Sedang). Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk terus memperkuat sistem, mekanisme, dan komitmen badan publik terhadap keterbukaan Informasi. Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan meningkatkan tata kelola, kapasitas sumber daya, dan kesiapan infrastruktur komunikasi dan informasi publik.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital melalui *Digital Talent Scholarship* (DTS). Pelatihan dilaksanakan dalam berbagai bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti desain grafis, pemrograman, keterampilan digital dasar, serta terkait kecerdasan buatan (AI).

Pada 2025, DTS telah diikuti oleh 434.948 peserta yang terdiri atas 93.415 peserta lulus pelatihan DTS, dan 341.533 peserta berhasil menyelesaikan pelatihan *microskill* (pembelajaran singkat dan terfokus). Pada

semester I 2026, pelatihan ini telah diikuti oleh 224.079 peserta. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya sebanyak 118.284 peserta (2024).

Hasil survei analisis dampak pelaksanaan DTS menunjukkan bahwa 94 persen responden bekerja dengan teknologi digital, 17,6 persen alumni berhasil mengubah status pekerjaan dari yang sebelumnya tidak bekerja menjadi bekerja. Hasil survei ini juga ditandai dengan 9 persen alumni beralih menjadi mempersiapkan usaha, serta 39,9 persen alumni berhasil meningkatkan penghasilan.

3.2.2 Tantangan dan Upaya

Langkah pemerintah dalam peningkatan kualitas komunikasi publik dan media masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) mekanisme kerja komunikasi publik lintas instansi; (2) pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dan program pemerintah; (3) tingkat akurasi dan keberimbangan kinerja jurnalis; (4) tingkat ketergantungan dari perusahaan pers; (5) kesesuaian penyiaran dan porsi iklan pada program TV; dan (6) tingkat pemerataan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.

Berbagai upaya untuk mewujudkan demokrasi dalam komunikasi publik dan media massa, yaitu: (1) penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Sistem Komunikasi Publik Nasional sebagai payung hukum dan panduan bagi aktivitas komunikasi publik nasional; (2) penguatan forum komunikasi kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah untuk pemerataan akses dan kualitas komunikasi publik; (3) peningkatan advokasi dan perbaikan mutu jurnanisme; (4) percepatan implementasi *policy sandbox* penguatan pers dan media massa

yang BEJO'S di daerah intervensi; (5) penguatan kolaborasi dengan asosiasi penyiaran dan periklanan; dan (6) penyusunan kajian dampak regulasi (*regulatory impact assessment*) dalam kerangka revisi UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.3 Lembaga Perwakilan dan Masyarakat Sipil

3.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah terus meningkatkan kinerja lembaga perwakilan dan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan sehingga menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indeks Demokrasi Indonesia menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemajuan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Nilai IDI tahun 2025 pada aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai 78,28 dengan kategori sedang. Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi dan menghasilkan kebijakan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat masih tetap terjaga. Hal tersebut dapat menjadi landasan untuk memperkuat kualitas legislasi melalui sinergi antarpemangku kepentingan. Selain itu, setiap proses penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan mengedepankan partisipasi publik secara substantif dalam pengambilan kebijakan.

Pemerintah bersinergi dengan lembaga perwakilan, yakni DPR RI dan DPD RI untuk mendukung pembangunan politik nasional. Peran pemerintah dan lembaga perwakilan dilaksanakan secara holistik untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pusat dan daerah.



Hingga 2026, DPD telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi sebagai masukan strategis Rencana Kerja Pemerintah 2027. Selain itu, DPD juga terus mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah kepulauan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah sekaligus memperkuat kesatuan dan kedaulatan bangsa.

DPR bersama pemerintah hingga Juli 2026, telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU, salah satunya adalah UU No. 2/2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi pekerja maupun pemberi kerja. Selain itu, DPR bersama pemerintah juga memastikan APBN menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

MPR terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan dan ruang permusyawaratan rakyat dalam memperkuat literasi konstitusi dan merawat konsensus

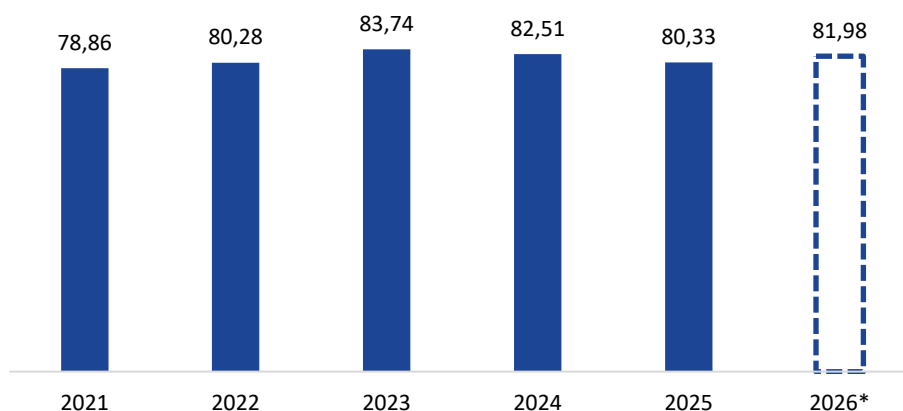
dasar kebangsaan Pancasila dan UUD 1945. Kedaulatan rakyat perlu diperkuat agar tidak berhenti pada prosedur elektoral semata. Demokrasi Indonesia harus berkembang ke arah demokrasi substantif yang menjamin partisipasi publik bermakna, memperkuat etika berbangsa, menegakkan negara hukum, dan menjaga efektivitas *checks and balances*.

Pemerintah mendorong pelaksanaan fasilitasi *meaningful public participation* sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan pada proses penyusunan Naskah Akademik (NA) dan RUU. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan lima puluh lembaga riset dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan substansi NA dari RUU yang disusun.

Sementara itu, pemerintah melaksanakan pengolahan data aspirasi masyarakat sebagai bentuk penguatan fungsi representasi daerah dalam menghubungkan kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan nasional. Pada 2025, pemerintah telah menyusun

Grafik 3.5

Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesenjangan Tahun 2021-2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026
Keterangan:*) Angka target

5 rekomendasi kebijakan dalam fungsi legislasi dan pengawasan yang berdasarkan data pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda). Selain itu, telah dilaksanakan pelatihan terkait penyerapan dan pengolahan data asmasda kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan staf ahli anggota dewan perwakilan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan peran dan kualitas lembaga legislatif.

Pelibatan lembaga perwakilan dan masyarakat sipil (organisasi profesi, akademisi, dan komunitas lokal) sangat krusial dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kematangan demokrasi di Indonesia tidak hanya diukur dari pemilu, tetapi juga dari peran aktif masyarakat sipil dalam menyalurkan aspirasi dan mengawasi program pemerintah.

Saat ini, kondisi masyarakat sipil di Indonesia terus menunjukkan perkembangan. Penguatan masyarakat sipil terus dijaga dengan jaminan kesetaraan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kondisi tersebut tecermin dari Indeks Kinerja Ormas yang mencapai 80,34 (2025) dan aspek kesetaraan dalam IDI yang konsisten pada kategori “baik” sejak 2021. Capaian tersebut menunjukkan semakin kondusifnya ekosistem bagi masyarakat sipil untuk berorganisasi, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menyampaikan aspirasi secara demokratis.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam pembangunan terus berkembang melalui forum konsultasi publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai

tingkatan, dan forum konsultasi pembangunan lainnya. Upaya ini menjadi komitmen nyata pemerintah dalam memastikan aspirasi dan partisipasi masyarakat hadir dalam proses pengambilan kebijakan.

Pelibatan masyarakat sipil yang ideal tidak hanya mendengar aspirasi rakyat, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, produk kebijakan publik yang dihasilkan dapat menghadirkan manfaat yang dirasakan secara langsung, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.3.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan nasional perlu didukung dengan beberapa prasyarat kunci seperti lembaga legislatif yang terbuka dan dekat dengan masyarakat, serta masyarakat sipil yang aktif dan kuat. Tantangan yang perlu diatasi, yaitu: (1) optimalisasi kanal/platform penyerapan dan pengelolaan aspirasi pada penyusunan RUU; (2) produktivitas dan kualitas fungsi legislasi; serta (3) akses partisipasi masyarakat yang terbuka, bebas, inklusif, dan aman dalam penyusunan kebijakan.

Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain: (1) revitalisasi layanan digital penyerapan aspirasi masyarakat yang mudah diakses; (2) penguatan sistem pendukung, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyusunan legislasi yang melibatkan lembaga riset dan pendidikan; dan (3) penguatan ekosistem yang mendukung keterlibatan masyarakat sipil dari tahap implementasi hingga evaluasi pembangunan.



3.4 Hak Asasi Manusia

3.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan kewajiban negara yang pelaksanaannya perlu diukur secara objektif untuk memastikan bahwa norma HAM telah

diterjemahkan ke dalam penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur negara, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik berbasis HAM. Perkembangan implementasi HAM di Indonesia selanjutnya diukur dengan Indeks HAM Indonesia.

Grafik 3.6

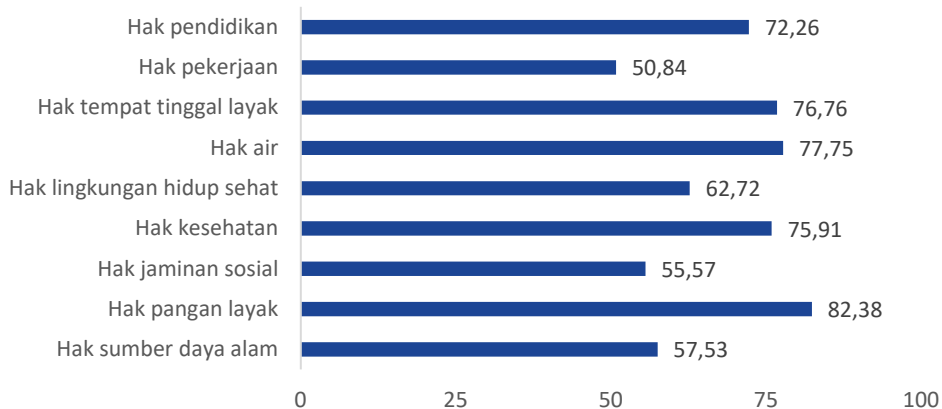
Nilai Dimensi Hak Sipil dan Politik



Sumber: Kementerian Hak Asasi Manusia, 2025

Grafik 3.7

Nilai Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya



Sumber: Kementerian Hak Asasi Manusia, 2025

Indeks HAM Indonesia 2025 yang mengukur kondisi 2024 adalah sebesar 63,20. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi norma dan prinsip HAM di Indonesia telah cukup baik. Indeks tersebut terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi hak sipil dan politik serta dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Capaian dimensi hak sipil dan politik mencapai nilai 58,28 dengan capaian tertinggi pada indikator hak untuk berserikat yang mendapat skor 93,33. Sementara itu, dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya mendapat nilai 68,97 dengan capaian tertinggi pada indikator hak atas pangan yang layak dengan skor 82,83.

Capaian tersebut turut didukung oleh penguatan kapasitas dan pemahaman HAM di kalangan aparatur negara. Sepanjang 2025, telah dilakukan pendidikan HAM bagi 235 lembaga untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan komitmen aparatur pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pemenuhan HAM.

Hingga semester I 2026 telah dilaksanakan 30 kegiatan penguatan kapasitas HAM aparatur negara di 30 provinsi, dengan Dinas Kesehatan menjadi sasaran instansi prioritas pada tahap awal. Kegiatan tersebut telah menjangkau lebih dari 11.600 aparatur negara sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pendidikan HAM juga dilakukan terhadap masyarakat, yakni melalui penyusunan kurikulum pendidikan wajib yang mengintegrasikan prinsip HAM. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat atas hak mereka serta

agar masyarakat dapat menerapkan perilaku nondiskriminatif dalam kehidupan sehari-hari.

Selain melalui pendidikan HAM, penghormatan dan pemenuhan HAM juga diiringi dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi K/L/D melalui mekanisme penilaian HAM. Pada 2026, pemerintah melaksanakan penilaian HAM terhadap kementerian/lembaga. Penilaian berfokus pada pemenuhan hak memperoleh keadilan, hak atas pendidikan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui mekanisme ini, K/L/D didorong untuk memperkuat tata kelola, kebijakan, dan kualitas pelayanan publik agar sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Penguatan implementasi HAM melalui penilaian tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih adil, inklusif, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan yang lebih baik atas pemenuhan hak-haknya, memiliki akses yang lebih setara terhadap layanan publik, serta mendapatkan perlindungan yang lebih efektif dari tindakan diskriminatif maupun pelanggaran HAM.

3.4.2 Tantangan dan Upaya

Beberapa tantangan yang perlu terus direspons adalah perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal ini ditandai dengan mekanisme pengaduan yang mencatat 3.003 laporan isu HAM sepanjang 2025 dan 1.123 laporan pada semester I 2026.

Sebagai upaya menghadapi tantangan tersebut, beberapa langkah telah dan akan terus dilakukan. Pertama, dari segi perlindungan, telah dibangun arsitektur kebijakan atas kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini mengingat dari keseluruhan laporan isu HAM, pelaku usaha menjadi pihak terlapor kedua tertinggi.



Penerapan Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) didorong sebagai instrumen bagi pelaku usaha untuk menganalisis dan memitigasi potensi pelanggaran HAM secara dini dalam operasional bisnisnya. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Penilaian Kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha yang akan menjadi panduan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) secara nasional.

Kedua, dari sisi penegakan, proses penanganan pelanggaran HAM serta pemulihan korban pelanggaran HAM terus diprioritaskan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pemantauan intensif, mediasi, serta penyampaian rekomendasi tindak lanjut atas dugaan pelanggaran HAM. Lebih lanjut, pemerintah melakukan upaya diskusi awal pembentukan Kelompok Kerja Nasional (*desk*) Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, yang dirancang sebagai wadah koordinasi lintas sektor.



Latihan Persiapan Pengibaran Bendera
Merah Putih di SD YPPGI 07 Irai, Papua Barat
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

BAB 4

ASTA CITA 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara
dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan,
Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.



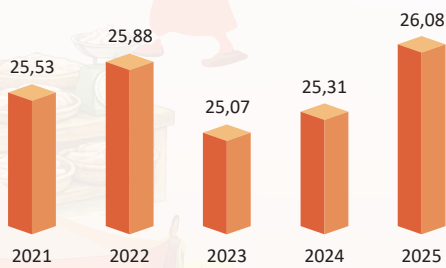
Persawahan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
Sumber: Kementerian Pertanian, 2026

Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy) Tahun 2022 – Triwulan I 2026



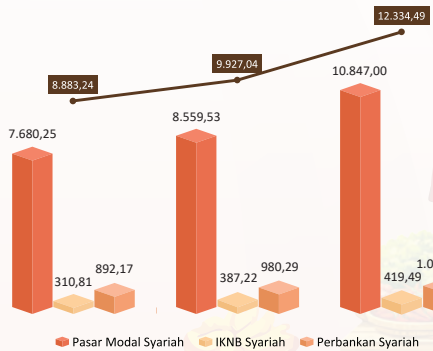
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026
Keterangan: *) Realisasi semester I 2026

Konsumsi Ikan Masyarakat 2021-2025



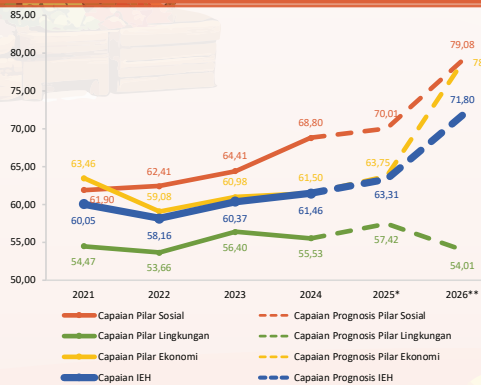
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2025

Perkembangan Aset Keuangan Syariah Nasional (Rp Triliun)



Sumber: OJK, Kementerian Keuangan, dan KNEKS, 2026 (diolah)

Capaian Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2021-2026



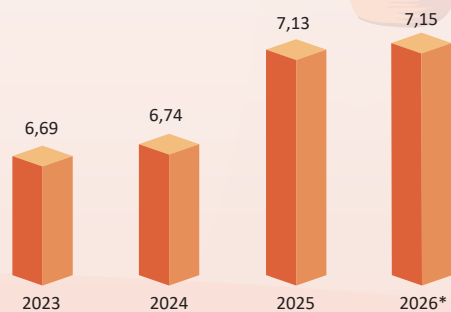
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Keterangan:

*: Capaian 2025 masih bersifat sementara

** : Angka target

Tren Peningkatan Indeks Ketahanan Energi Tahun 2023-2026



Sumber: Kementerian ESDM, 2026

Keterangan: *) Capaian semester I 2026

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Kemandirian bangsa semakin menunjukkan hasil nyata dalam mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Langkah kemandirian bangsa diwujudkan melalui swasembada pangan, energi, dan air yang didukung oleh ketangguhan fondasi makro, pertahanan, dan keamanan nasional yang solid. Kemandirian ini direfleksikan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta diperkuat melalui kemitraan strategis antarnegara, regional, dan global.

4.1 Pertumbuhan Ekonomi

4.1.1 Capaian Utama Pembangunan

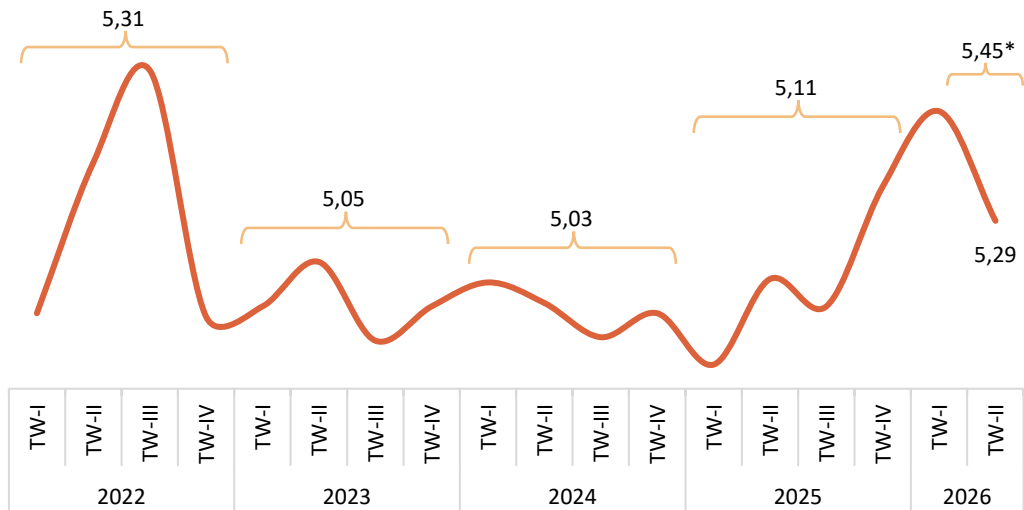
Indonesia berhasil mempertahankan kinerja perekonomian yang resilien di tengah dinamika kondisi global yang penuh ketidakpastian. Kondisi tersebut disebabkan oleh konflik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia dan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang mengakibatkan disrupsi rantai pasok perdagangan dunia, serta penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat.

Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 5,03 persen pada 2024 menjadi 5,11 persen pada 2025. Pada sisi pendapatan nasional, *Gross*

National Income (GNI) per kapita meningkat sebesar 4,07 persen dari US\$4.920 (2024) menjadi US\$5.120 (2025), mempertahankan status Indonesia sebagai Negara Berpendapatan Menengah Atas.

Momentum positif tersebut berlanjut pada awal 2026. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencatatkan kinerja solid sebesar 5,45 persen (yoy). Capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang semakin tangguh di tengah tantangan global dan domestik, didukung oleh sinergi kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga daya beli dan stabilitas harga, serta optimalisasi belanja pemerintah.

Grafik 4.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy)
Tahun 2022 – Semester I 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Keterangan: *) Realisasi semester I 2026

Pada 2025, seluruh komponen sisi pengeluaran menunjukkan pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan belanja barang tahan lama (peralatan rumah tangga) dan jasa pendidikan. Pemerintah juga menjaga stabilitas inflasi pangan dan energi melalui bantuan sosial serta operasi pasar, yang menopang daya beli masyarakat. Kinerja investasi yang diukur dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan tren yang terus meningkat. Capaian tersebut salah satunya didukung oleh kinerja investasi mesin dan peralatan yang tumbuh hingga 17,99 persen.

Capaian ini mencerminkan optimisme dunia usaha, sejalan dengan realisasi investasi yang tumbuh sebesar 12,7 persen sepanjang 2025, baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Ekspor Indonesia juga mencatat pertumbuhan, didorong oleh antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif resiprok

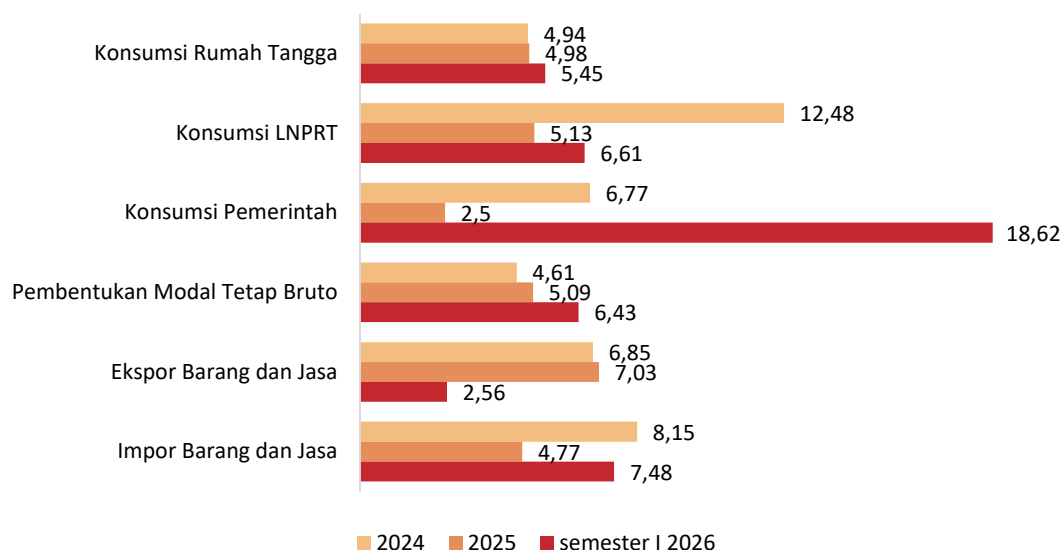
Amerika Serikat melalui peningkatan ekspor sebelum implementasi tarif (*frontloading*).

Pada awal 2026, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran juga terus menunjukkan kinerja yang terjaga. Kinerja ini antara lain didukung oleh akselerasi belanja dan investasi serta kebijakan dalam menjaga konsumsi rumah tangga, seperti penyaluran bantuan sosial (Program Keluarga Harapan/PKH, Program Indonesia Pintar/PIP, dan Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT). Selain itu, Pengeluaran Pemerintah juga mencatatkan akselerasi yang antara lain didorong oleh perluasan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Tunjangan Hari Raya Idulfitri yang jatuh pada triwulan I 2026.

Kinerja investasi (PMTB) semester I 2026 tumbuh sebesar 6,43 persen (yoy), meningkat dibandingkan capaian semester I 2025 sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh partisipasi aktif investasi swasta dan BUMN dalam pembangunan berbagai infrastruktur strategis.



Grafik 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (persen, yoy)
Tahun 2024 – Semester I 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

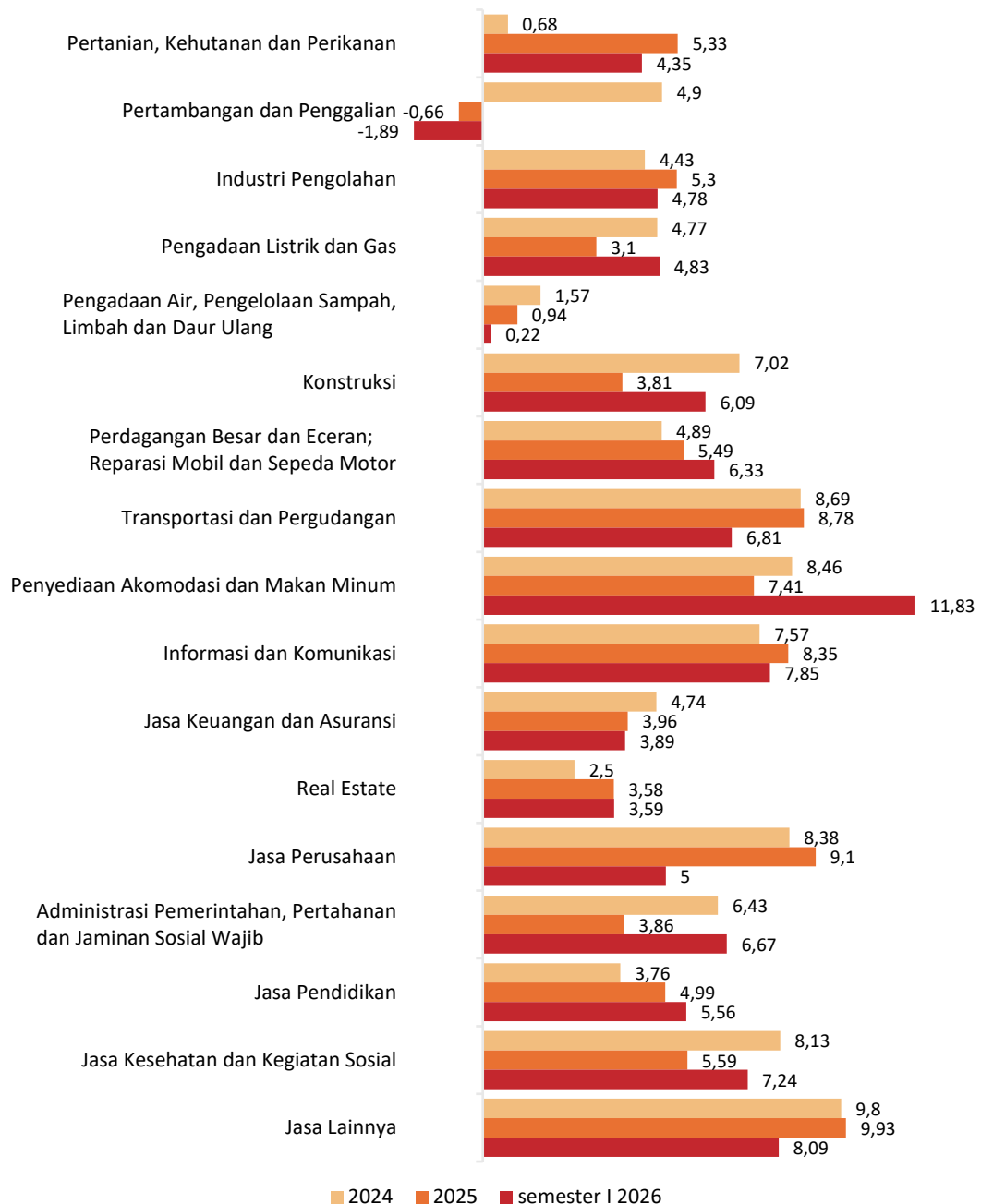
Pada sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan pada periode 2025. Akselerasi program swasembada pangan nasional turut mendorong pertumbuhan sektor pertanian pada 2025 melalui upaya perluasan lahan serta peningkatan produksi padi dan jagung.

Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan yang tinggi pada 2025 juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan hilirisasi serta ditopang oleh permintaan domestik dan luar negeri yang kuat. Hal ini menjadi sinyal positif pergeseran struktur ekonomi ke sektor bernilai tambah tinggi.

Sektor Industri Pengolahan pada 2025 mencatatkan rekor pertumbuhan sektoral tertinggi sejak 2012. Pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan hilirisasi yang semakin diperluas ke berbagai sektor strategis lainnya.

Dari sisi hilir, peningkatan jumlah penerima manfaat MBG juga berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kinerja tersebut berlanjut hingga semester I 2026. Sementara, kinerja sektor pertanian meningkat didukung perluasan lahan pertanian dan intensifikasi seperti program cetak sawah pada semester I 2026.

Grafik 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha (persen, yoy)
Tahun 2024 – Semester I 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026



4.1.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia di antaranya: (1) kebutuhan BBM dalam negeri yang tinggi dan pengaruh disrupsi pada rantai pasok di Timur Tengah; (2) produk ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh komoditas sumber daya alam serta kebutuhan devisa dalam sistem keuangan domestik; (3) perubahan struktur pasar tenaga kerja yang ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja terdidik yang masuk sektor informal; (4) dinamika perdagangan global yang semakin multipolar seiring dengan restrukturisasi rantai pasok global; dan (5) tekanan inflasi impor akibat depresiasi nilai tukar rupiah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah antara lain: (1) penguatan ketahanan energi melalui akselerasi program mandatori Biodiesel 50 (B50) dan Bioetanol 20 (E20) berbasis kelapa sawit dan tebu, serta upaya peningkatan kapasitas *refinery* domestik; (2) pembentukan badan pengelola ekspor sumber daya alam untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan devisa hasil ekspor komoditas strategis, serta penguatan kapasitas hilirisasi industri; (3) perluasan lapangan kerja melalui tiga jalur utama: (a) pengembangan industri strategis bernilai tambah tinggi (hilirisasi, otomotif, dan semikonduktor); (b) program padat karya berbasis pemberdayaan masyarakat; serta (c) peningkatan daya saing tenaga kerja melalui program 500.000 lulusan SMK Go Global; (4) optimalisasi kerja sama dagang dan investasi dengan mitra eksisting, penguatan integrasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta keberlanjutan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk menjaga akses pasar.

4.2 Fiskal

4.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif yang dikelola secara *prudent* dan kredibel. Selama 2025, kinerja fiskal dijaga tetap resilien. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat.

Pendapatan Negara dan Hibah secara nominal mencapai Rp2.765,20 triliun pada 2025 atau setara dengan 11,61 persen PDB. Kinerja pendapatan negara tetap dapat terjaga meskipun terjadi penyesuaian postur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibat pengalihan pengelolaan dividen BUMN kepada BPI Danantara.

Pada 2025, pendapatan negara tercatat solid, dengan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.218,20 triliun (9,31 persen PDB) dan PNBP sebesar Rp541,40 triliun. Meskipun penerimaan pajak mengalami koreksi tipis dari capaian tahun sebelumnya, kinerja ini tetap berada pada jalur yang kuat dan menjadi penyangga utama pelaksanaan APBN. Kinerja pendapatan negara 2025 dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas yang berdampak pada penerimaan perpajakan dan PNBP, serta implementasi penyesuaian tarif PPN yang hanya berlaku secara terbatas untuk barang mewah.

Realisasi Belanja Negara pada 2025 mencapai Rp3.434,70 triliun (14,42 persen PDB), tumbuh 2,23 persen dibandingkan 2024. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.585,60 triliun (10,85 persen PDB), dan Transfer ke Daerah sebesar Rp849,00 triliun (3,56 persen PDB). Peningkatan Belanja Pemerintah Pusat juga diarahkan untuk mendukung pendanaan berbagai program yang manfaatnya diterima oleh Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan layanan publik di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).

Realisasi pembiayaan anggaran 2025 mencapai Rp742,60 triliun, lebih tinggi dari defisit sebesar Rp669,50 triliun (2,81 persen PDB). Realisasi keseimbangan primer sebesar negatif Rp155,1 triliun (-0,65 persen PDB), dengan tren menuju positif yang merefleksikan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Sementara itu, rasio utang terhadap PDB pada 2025 sebesar 40,54 persen tetap terkendali sebagaimana *debt rule* yaitu di bawah 60 persen PDB, mencerminkan pengelolaan utang yang hati-hati (*prudent*) di tengah tingginya dinamika ekonomi global.

Tabel 4.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara Tahun 2023 – Semester I 2026

Uraian	Satuan	2023	2024	2025	Semester I	
					2025	2026
Pendapatan Negara dan Hibah	%PDB	13,33	12,88	11,61	-*	-*
	Rp triliun	2.783,93	2.850,61	2.765,2	1.201,8	1.459,4
Penerimaan Perpajakan	%PDB	10,31	10,08	9,31	-*	-*
	Rp triliun	2.154,21	2.231,84	2.218,2	978,29	1187,8
Penerimaan Negara Bukan Pajak	%PDB	2,93	2,64	2,27	-*	-*
	Rp triliun	612,53	584,38	541,4	222,87	271
Belanja Negara	%PDB	14,94	15,18	14,42	-*	-*
	Rp triliun	3.121,22	3.359,77	3.434,7	1.406,04	1656
Belanja Pemerintah Pusat	%PDB	10,72	11,28	10,85	-*	-*
	Rp triliun	2.239,78	2.496,22	2.585,6	1.003,57	1.298,6
Transfer ke Daerah	%PDB	4,22	3,9	3,56	-*	-*
	Rp triliun	881,43	863,54	849	402,47	357,4

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026 (diolah)

Keterangan: *) angka realisasi APBN dalam satuan persen PDB pada periode Semester I tidak tersedia

Kinerja APBN hingga semester I 2026 tetap solid untuk mendukung stabilitas fiskal dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Negara dan Hibah hingga Juni 2026 terealisasi sebesar Rp1.459,40 triliun (dari target sebesar Rp3.153,60 triliun) atau

mengalami peningkatan sebesar 21,43 persen (yoy). Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp1.187,80 triliun atau tumbuh sebesar 18,9 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.656,00 triliun atau tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy),

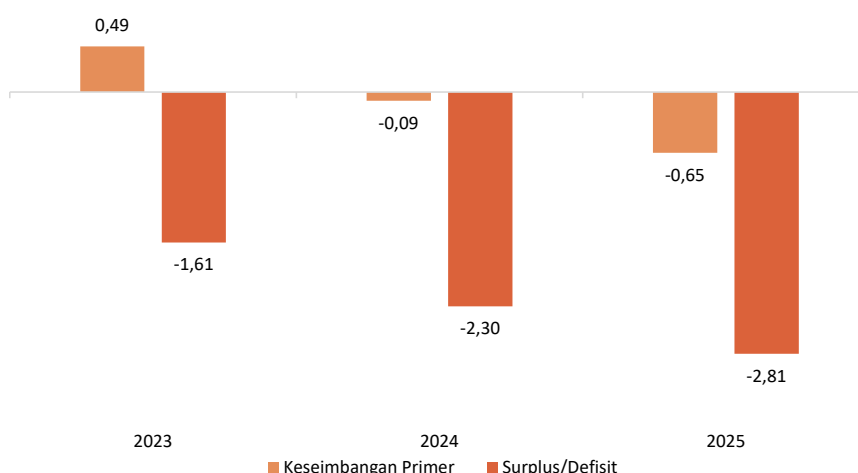


terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.298,60 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp357,40 triliun.

Pertumbuhan Belanja Negara mencapai 17,78 persen (yoy) menunjukkan realisasi Belanja Negara yang lebih cepat dan merata sejak awal tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja K/L antara lain untuk pelaksanaan Program MBG, penyaluran bantuan sosial, pembangunan

infrastruktur, pembayaran THR dan Gaji ke-13. Belanja Non-K/L diantaranya untuk pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi BBM dan listrik. Selanjutnya, Keseimbangan primer mencapai Rp85,10 triliun dengan tren yang semakin meningkat. Defisit APBN mencapai Rp196,50 triliun atau sebesar 0,76 persen PDB dari target APBN sebesar 2,68 persen yang mengindikasikan bahwa defisit tetap terjaga dalam batas aman untuk mendukung stabilitas perekonomian.

Grafik 4.4
Perkembangan Keseimbangan Primer dan Surplus/Defisit (persen PDB)
Tahun 2023 - 2025



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026 (diolah)

4.2.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan fiskal terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek pendapatan, aspek belanja, dan aspek pembiayaan negara. Tantangan aspek pendapatan antara lain: (1) tekanan ekonomi global terhadap sumber-sumber penerimaan; (2) perluasan basis pajak di tengah besarnya sektor informal; (3) adaptasi regulasi terhadap perkembangan ekonomi digital; (4) penerimaan dari sektor SDA seiring dengan upaya peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi; (5) pemanfaatan Coretax yang masih dalam masa transisi; serta (6) risiko *forgone revenue*

(kehilangan potensi penerimaan) akibat insentif perpajakan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, tantangan aspek belanja negara, antara lain: (1) terbatasnya ruang fiskal di tengah dinamika perekonomian; (2) kualitas belanja pemerintah; (3) sinergi APBN dan APBD dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan melalui hubungan keuangan pusat dan daerah; serta (4) meningkatnya tekanan terhadap fleksibilitas fiskal akibat besarnya porsi belanja yang bersifat *mandatory*.

Tantangan aspek pembiayaan antara lain: (1) terbatasnya ruang fiskal untuk mengelola defisit dan pembiayaan secara *prudent*, kredibel, dan berkelanjutan; (2) tekanan terhadap pengelolaan utang akibat kenaikan biaya pinjaman dan volatilitas nilai tukar; (3) diversifikasi sumber pembiayaan inovatif; serta (4) peningkatan pembayaran pokok dan bunga utang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya antara lain: (1) memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan BPI. Di antara guna meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan; (2) memperluas basis pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan; (3) mengoptimalkan implementasi Coretax dan meningkatkan kepatuhan berbasis risiko; (4) memfokuskan belanja pada program/kegiatan berdaya ungkit tinggi dengan indikator kinerja yang terukur; (5) memperkuat harmonisasi APBN dan APBD; (6) memperluas bauran sumber pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi peran BPI. Di antara; serta (7)

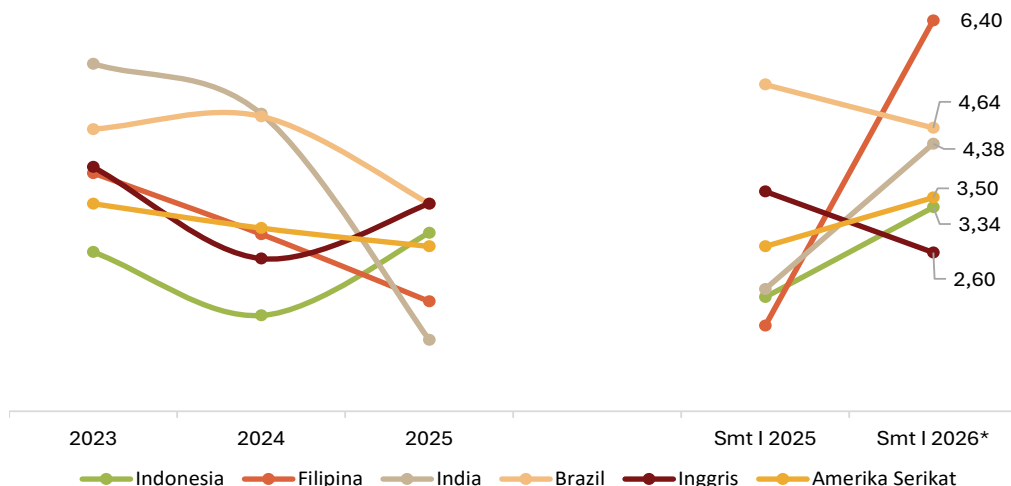
memperkuat pengelolaan utang melalui prinsip kehati-hatian dengan menjaga defisit APBN tetap terkendali, serta mengelola risiko nilai tukar dan suku bunga sejalan dengan komitmen menjaga kesinambungan fiskal.

4.3 Moneter dan Sektor Keuangan

4.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Pada 2026, sinergi kebijakan moneter dan sektor keuangan terus diperkuat untuk menjadi landasan kokoh dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Perkembangan inflasi tahun 2023 hingga Juni 2026 konsisten terkendali dalam rentang sasaran 1,5 – 3,5 persen, didukung oleh sinergi kebijakan yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada Juni 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,34 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi beberapa negara lain seperti India, Brazil, Filipina, dan Amerika Serikat.

Grafik 4.5
Perkembangan Laju Inflasi Beberapa Negara (persen, yoy)
Tahun 2023 – Semester I 2026



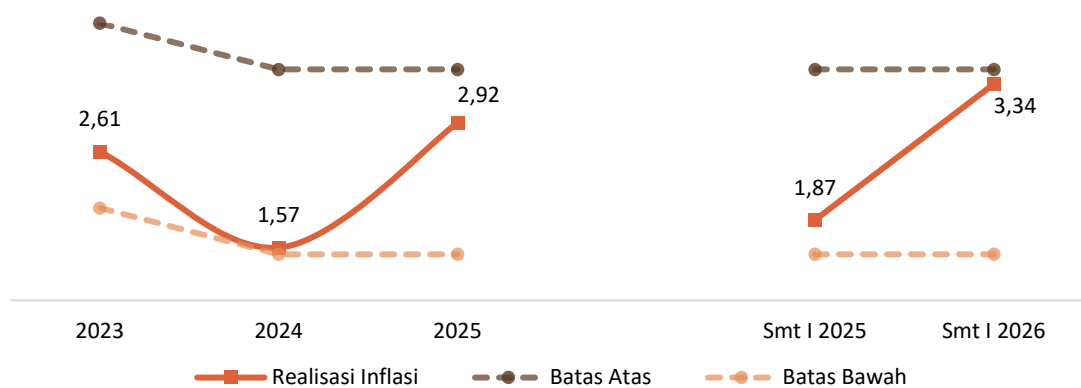
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia dan badan statistik masing-masing negara, 2026



Inflasi berdasarkan komponen berfluktuasi seiring dengan dinamika harga komoditas global, permintaan musiman, dan faktor cuaca. Sementara, inflasi inti terkendali di bawah 3 persen, didukung oleh permintaan dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Inflasi *Administered Price* dikendalikan melalui kebijakan subsidi energi dan diskon tarif

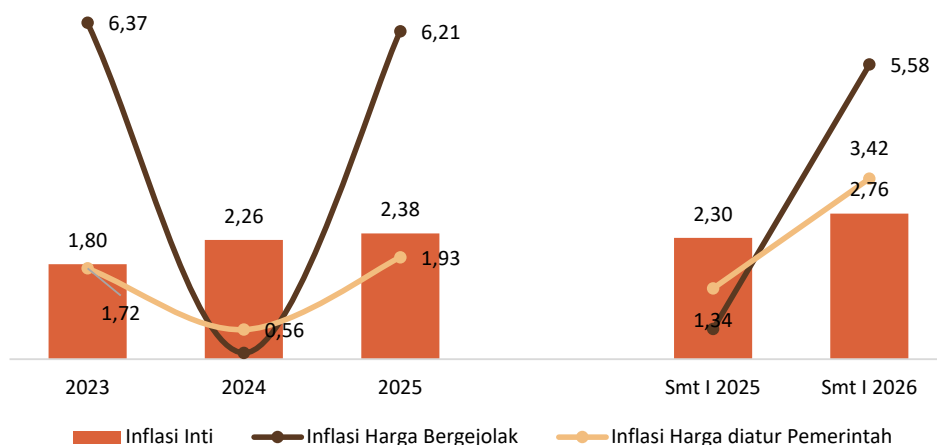
transportasi pada periode HBKN. Inflasi *volatile food* diintervensi melalui kebijakan stabilisasi harga dan fasilitasi distribusi pangan. Konsistensi kebijakan stabilisasi harga dan penguatan pasokan mendukung ketahanan daya beli masyarakat serta kepastian bagi dunia usaha.

Grafik 4.6
Perkembangan Inflasi Umum (persen, yoy)
Tahun 2023 – Semester I 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Grafik 4.7
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, yoy)
Tahun 2023 – Semester I 2026

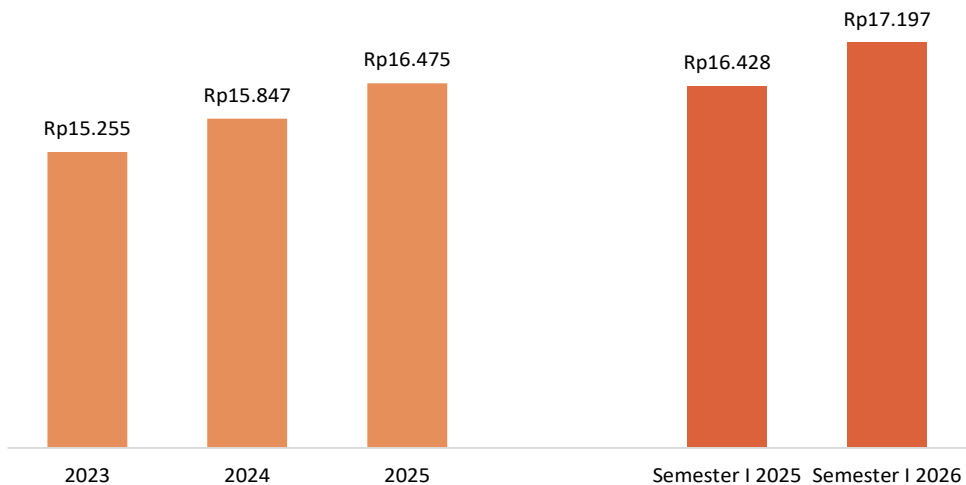


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Nilai tukar Rupiah sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 berfluktuasi dengan rata-rata Rp16.039/US\$. Di tengah penguatan dolar AS, Rupiah mengalami penyesuaian pada semester I 2026 sebesar 6,4 persen (ytd). Terkoreksinya

nilai Rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, tingginya suku bunga global, volatilitas harga energi, ketergantungan impor energi dan bahan baku, serta sensitivitas aliran modal asing.

Grafik 4.8
Perkembangan Nilai Tukar (Rupiah/US\$)
Tahun 2023 – Semester I Juni 2026



Sumber: Bank Indonesia, 2026

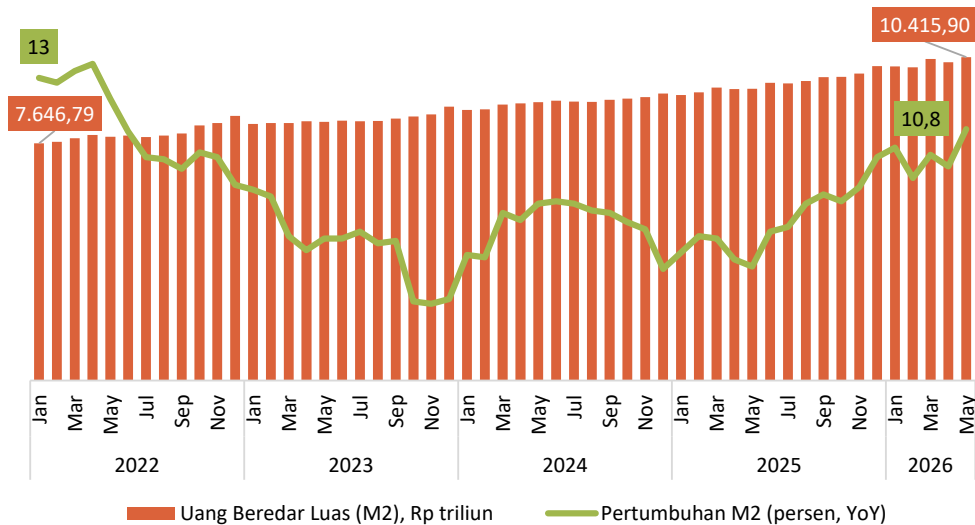
Pada Juni 2026, nilai tukar Rupiah kembali menguat, didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dengan menaikkan BI-Rate dan mengoptimalkan instrumen moneter untuk menarik arus modal asing. Kebijakan moneter juga disinergikan dengan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan.

Sementara itu, likuiditas di sektor keuangan masih cukup memadai untuk mendukung bauran kebijakan moneter Bank Indonesia.

Sampai pertengahan 2026, jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.416 triliun dengan pertumbuhan sebesar 10,8 persen (yoy). Rasio Uang Beredar Luas (M2) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga telah mengalami kenaikan dari 38,8 persen pada 2019 menjadi 42,8 persen pada Mei 2026. Tren peningkatan rasio ini menunjukkan arah pendalaman keuangan (*financial deepening*) yang terus membaik.

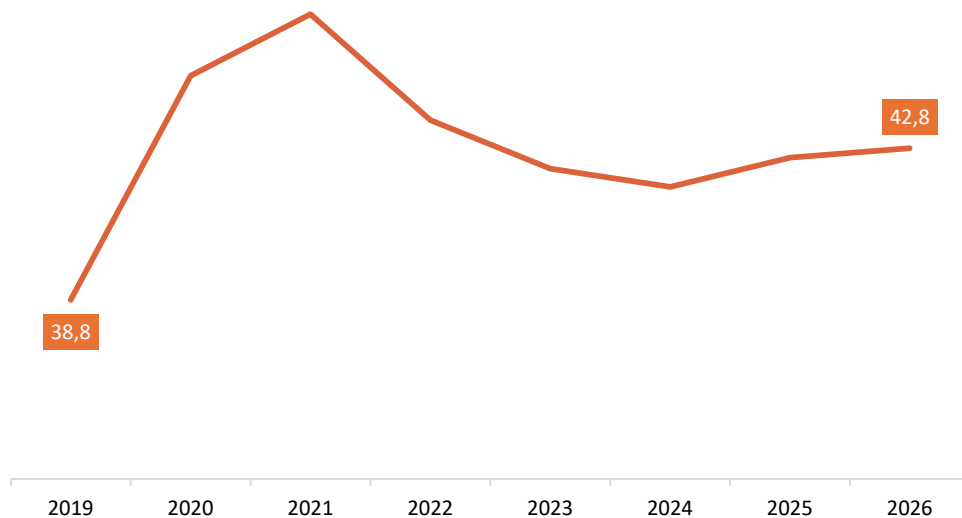


Grafik 4.9
Jumlah Uang Beredar Luas (M2) di Indonesia dan
Pertumbuhannya Tahun 2022 - Mei 2026



Sumber : Bank Indonesia, 2026

Grafik 4.10
Rasio Uang Beredar Luas terhadap PDB Indonesia (persen)

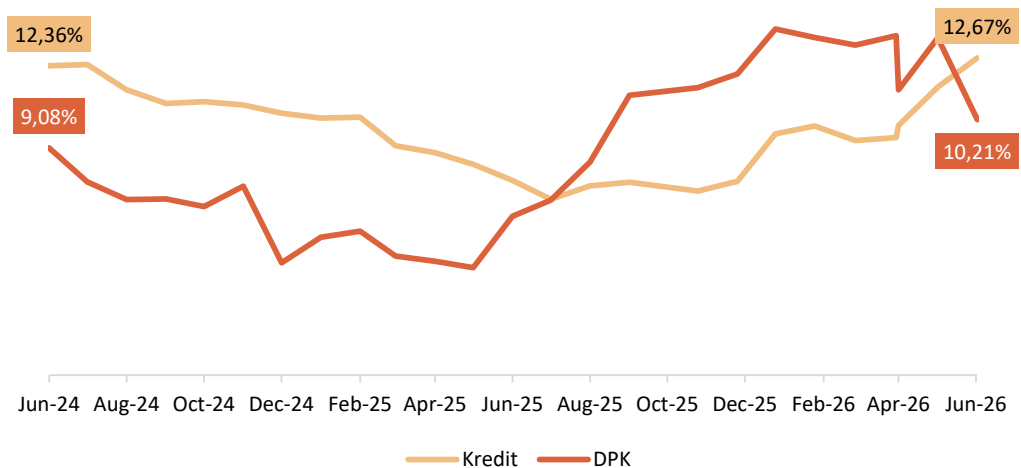


Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Fungsi intermediasi perbankan juga berjalan baik di tengah kebijakan suku bunga tinggi yang tecermin dari pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 12,67 persen (yoy) dan 10,21 persen (yoy) pada Juni

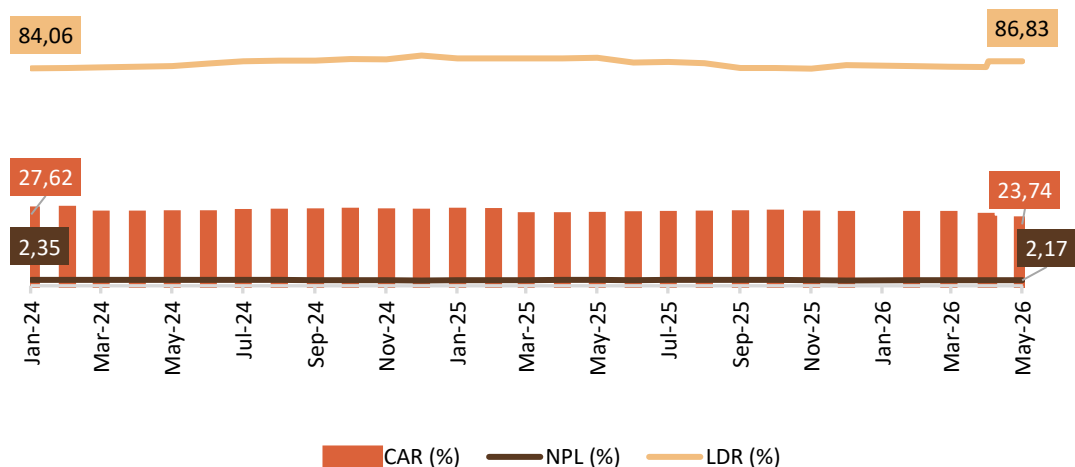
2026. Didukung oleh rasio kinerja seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di level 86,83 persen, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di level 23,74 persen serta penurunan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di level 2,17 persen.

Grafik 4.11
Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026

Grafik 4.12
Perkembangan Indikator Kinerja Perbankan



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026

Dari total kredit perbankan, sebesar 74,97 persen disalurkan ke lapangan usaha produktif, terutama industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Penyaluran kredit UMKM hingga April 2026 telah mencapai Rp1.505,44 triliun. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembiayaan sektor prioritas termasuk UMKM, melalui

program seperti: Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp279,59 triliun kepada 1,93 juta debitur yang didominasi debitur mikro sektor perdagangan (Mei 2026); Kredit Perumahan sebesar Rp17,74 triliun kepada 82.946 debitur, serta Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya.



Grafik 4.13
Total Kredit UMKM (Rp triliun)

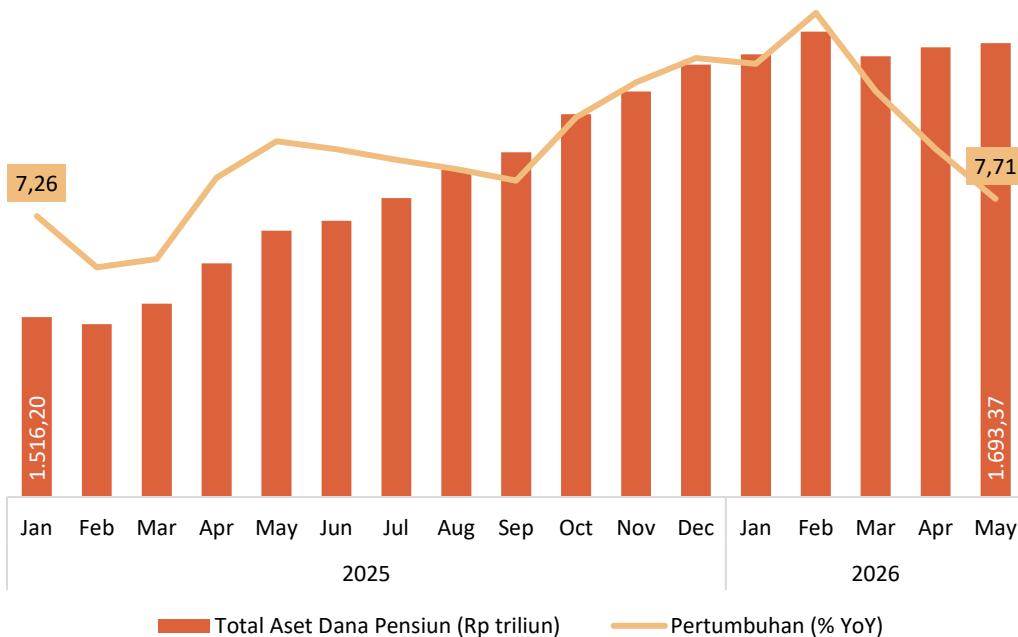


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Penguatan sektor keuangan juga tecermin dari perkembangan positif Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Aset dana pensiun dan asuransi masing-masing mengalami kenaikan mencapai

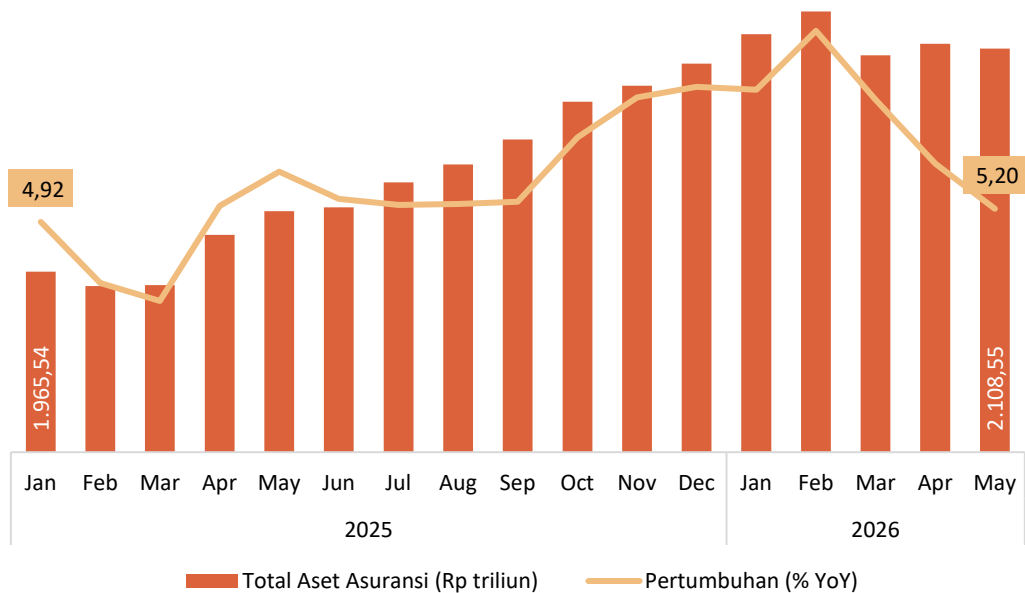
Rp1.693,37 triliun atau tumbuh 7,71 persen (yoy) dan Rp2.108,55 triliun atau tumbuh 5,20 persen (yoy) pada Mei 2026, mencerminkan ekspansi yang tetap terjaga.

Grafik 4.14
Perkembangan Dana Pensiun



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Grafik 4.15
Perkembangan Aset Asuransi



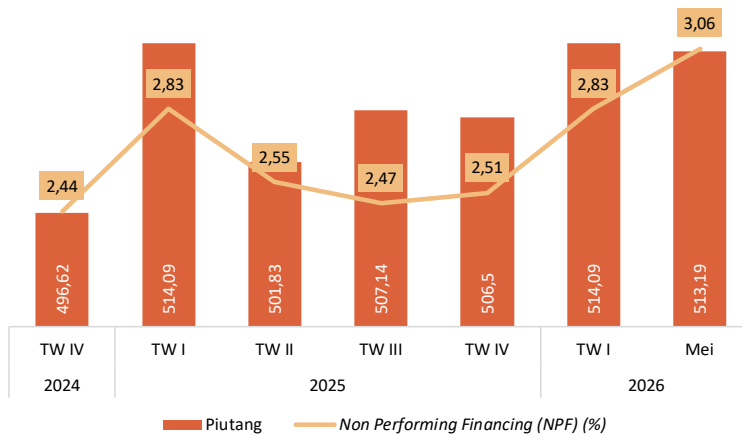
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Pembiayaan juga didukung sektor non bank seperti industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML). Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan tumbuh 1,71 persen (yoy) menjadi Rp513,19 triliun pada Mei 2026, terutama pada sektor perdagangan, dengan dominasi debitur usaha mikro dan kecil. Penyaluran pembiayaan industri pergadaian tumbuh 55,72 persen (yoy) menjadi Rp193,76 triliun pada Mei 2026, didominasi produk gadai (84,15 persen).

Outstanding pembiayaan pinjaman daring (Pindar) tumbuh 25,60 persen (yoy) menjadi Rp103,73 triliun pada Mei 2026, terutama pada sektor perdagangan, dengan TWP90 terjaga di 4,42 persen. Sementara itu, Penyaluran pinjaman Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mencapai Rp1,05 triliun dengan total aset sebesar Rp1,62 triliun pada Mei 2026. Alternatif pendanaan usaha juga diperluas melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) dengan total dana Rp1,94 triliun pada Mei 2026.

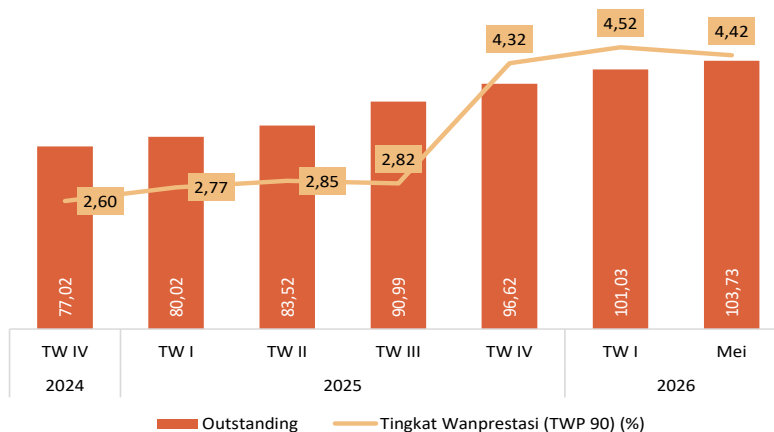


Grafik 4.16
Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (Rp triliun)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Grafik 4.17
Piutang Pembiayaan Pinjaman Daring (Rp triliun)



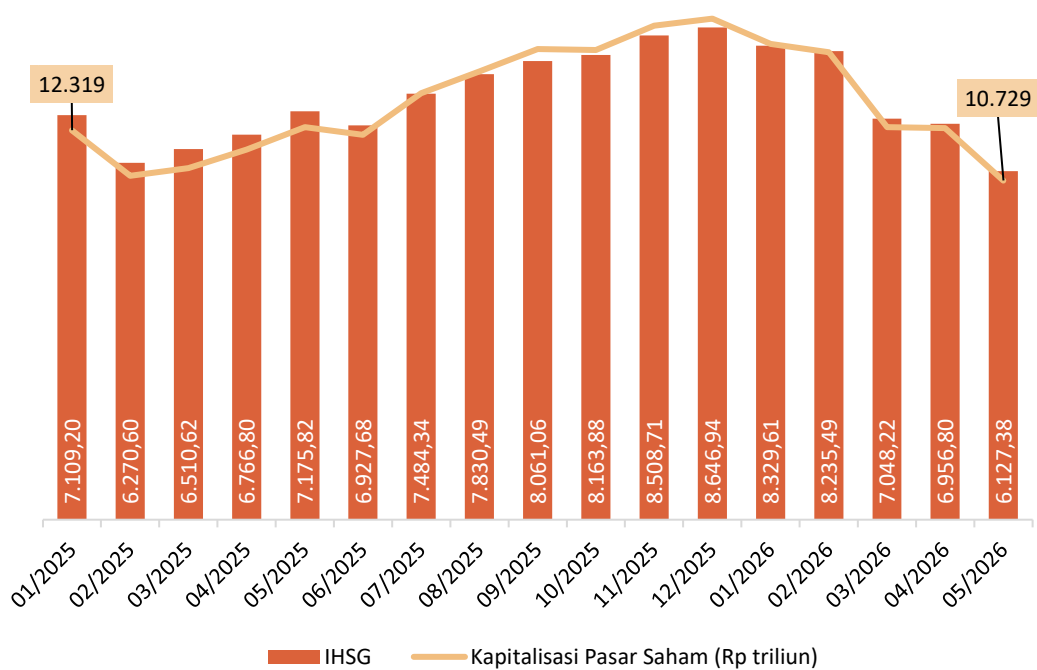
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Sektor jasa keuangan non bank lainnya mendukung ketahanan ekonomi melalui Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, dan Asuransi Nelayan untuk melindungi usaha dari risiko kegagalan. Pemerintah juga terus memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro melalui Skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Hingga triwulan II 2026, penyaluran pembiayaan dalam Skema UMi mencapai Rp2,19 triliun kepada 344.512 nasabah. Sementara itu,

Program Mekaar telah menjangkau sekitar 23,3 juta nasabah di seluruh Indonesia.

Dari sisi pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetap menunjukkan resiliensi di tengah dinamika pasar keuangan. Pada Mei 2026, IHSG berhasil bertahan di level 6.127 dengan kapitalisasi pasar saham sebesar Rp10.729 triliun. Sementara itu, yield SBN tenor 10 tahun berada pada level 6,86 persen pada akhir Mei 2026 seiring penyesuaian terhadap dinamika pasar keuangan global dan domestik.

Grafik 4.18
Perkembangan IHSG dan Kapitalisasi Pasar Saham



Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, 2026 diolah

Grafik 4.19
Perkembangan Yield SBN 10 Tahun (persen)



Sumber: PHEI, 2026



4.3.2 Tantangan dan Upaya

Beberapa tantangan pada sektor moneter, antara lain: Inflasi dihadapkan pada risiko gangguan pasokan, volatilitas harga komoditas global, dan *imported inflation*. Pengendalian inflasi diarahkan untuk stabilisasi nilai tukar penguatan ketahanan energi nasional, serta menjaga kecukupan pasokan pangan melalui pengembangan kawasan pangan dan hortikultura, bantuan sarana dan infrastruktur produksi, penguatan cadangan pangan pemerintah, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta perbaikan kualitas data pangan.

Sementara itu, tantangan terhadap nilai tukar antara lain: tingginya suku bunga global, volatilitas harga energi, ketergantungan impor energi dan bahan baku, dan sensitivitas aliran modal asing. Kebijakan stabilisasi nilai tukar diarahkan untuk memperkuat operasi moneter *pro-market*, menetapkan BI-Rate sesuai dinamika ekonomi dan keuangan, menjaga ketersediaan cadangan devisa, serta optimalisasi implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA.

Sektor Keuangan menghadapi beberapa tantangan penting, antara lain: (1) *undisbursed loan* perbankan yang belum terserap secara optimal; (2) tekanan dan perubahan struktur biaya dana (*cost of fund*) perbankan akibat kenaikan *yield* Surat Berharga Negara (SBN); (3) transformasi pasar modal untuk memenuhi standar global pasca penilaian MSCI; (4) diversifikasi produk yang masih terbatas sehingga pembiayaan masih didominasi sektor perbankan; (5) pembiayaan sektor produktif yang belum optimal dan masih terkonsentrasi pada sektor tertentu; (6) penyaluran pembiayaan yang belum merata antarsegmen masyarakat

dan antarwilayah; serta (7) kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis ditempuh antara lain: (1) penguatan regulasi melalui UU No.4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) guna mendorong iklim bisnis yang lebih kompetitif; (2) penguatan basis investor dalam negeri dan diversifikasi sumber mata uang; (3) percepatan pelaksanaan 8 rencana aksi diantaranya menaikkan batas minimum *free float* emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen dan demutualisasi bursa; (4) penguatan kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mengakselerasi penyaluran kredit ke sektor-sektor strategis dan prioritas; (5) perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif melalui akselerasi digital, pemanfaatan alternatif *credit scoring*, integrasi data, dan penguatan skema penjaminan/asuransi; serta (6) peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui perluasan akses, kepemilikan, dan pemanfaatan produk serta layanan jasa keuangan yang berkualitas, optimalisasi agen Laku Pandai, serta akselerasi digitalisasi layanan keuangan, termasuk QRIS dan dompet elektronik (*e-wallet*).

4.4 Swasembada Pangan

4.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Pengembangan swasembada pangan merupakan langkah perwujudan kedaulatan pangan yang dilaksanakan melalui pengembangan *eco-region* sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, yang sehat dan bergizi, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan tangguh, dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan

pangan secara berkelanjutan, memperbaiki kualitas dan menjamin keamanan konsumsi pangan, memperkuat penanganan kerawanan pangan, serta meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan tata kelola sistem pangan.

Produksi komoditas pertanian secara umum terus mengalami peningkatan. Beberapa komoditas telah mencapai swasembada antara lain, komoditas padi, jagung, daging ayam, telur ayam, cabai dan bawang merah.

Selain itu, sebagai tolok ukur ketercapaian Swasembada Pangan, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dirumuskan sebagai parameter komposit yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di masyarakat. Capaian IKP nasional menunjukkan tren peningkatan dari 71,2 pada 2024 menjadi 73,0 pada 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 75,4 pada 2026. Peningkatan ini didukung oleh keberhasilan intervensi dalam meningkatkan ketersediaan,

serta kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Peningkatan ketersediaan pangan nasional tecermin dari indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang meningkat dari 94,1 pada 2024 menjadi 97,5 pada 2025. Sejalan dengan perkembangan tersebut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketersediaan pangan nasional.

Angka capaian produksi komoditas pada 2025 lebih tinggi dari 2024. Angka capaian pada semester I 2026 juga lebih tinggi dari angka capaian pada semester I 2025. Peningkatan produksi tersebut didukung oleh berbagai intervensi pemerintah secara terpadu, antara lain: (1) peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, serta penguatan sarana dan prasarana produksi; (2) penyediaan input produksi; (3) pengembangan teknologi dan inovasi; serta (4) penguatan akses pasar dan rantai pasok komoditas pangan.

Tabel 4.2
Produksi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan

Indikator	Satuan	Capaian					Semester I	
		2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026
Produksi Padi	juta ton	54,41	54,75	53,64	53,16	60,21	33,43	33,46
Produksi Jagung*	juta ton	13,42	16,51	14,78	15,15	16,17	8,56	8,58
Produksi Cabai	juta ton	2,74	3,02	3,06	3,04	3,45	1,48	1,56
Produksi Tebu	juta ton	-	36,44	31,05	33,22	39,07	4,52	11,40
Produksi Daging	juta ton	4,13	4,56	4,62	4,85	5,04	-**	-**
a. Daging sapi/kerbau	ribu ton	384,70	390,97	477,46	488,22	515,6	356,58	346,04
b. Daging ayam	juta ton	3,46	3,95	3,87	4,12	4,27	2,21	2,29
Produksi Susu	ribu ton	946,40	824,30	787,40	809,00	820,94	410,40	477,70
Produksi Telur	juta ton	5,89	6,34	6,59	6,72	6,91	3,51	3,35
Produksi Bawang Merah	juta ton	2,01	1,98	1,99	2,09	2,18	0,86	0,98

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, 2026

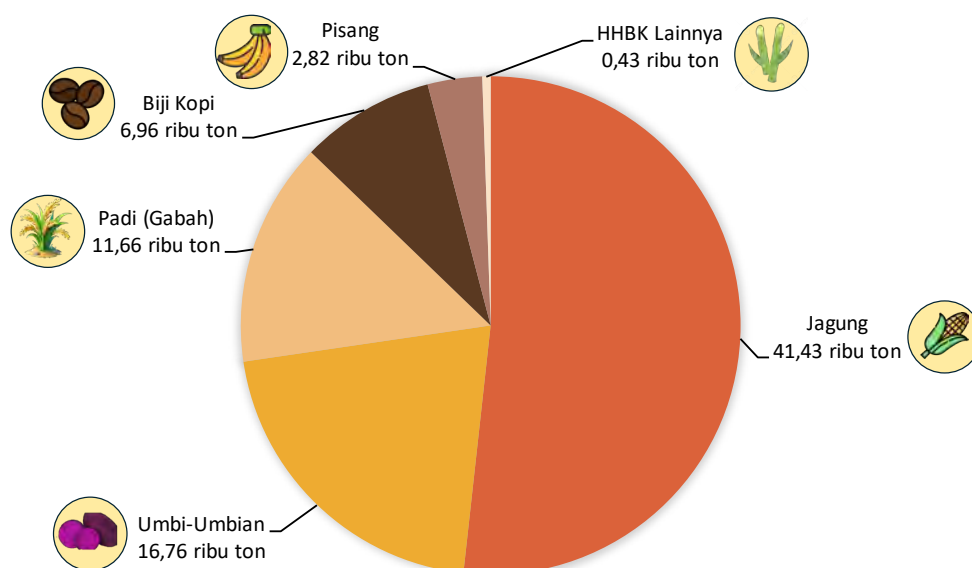
Keterangan: *) Angka Konversi JTKP ke JPK-KA 14%



Sektor kehutanan juga berkontribusi dalam penyediaan pangan lokal. Dalam rentang 2025 hingga Mei 2026, realisasi produksi pangan kawasan hutan telah mencapai 105.813 ton dari 169.573 ha lahan yang dimanfaatkan oleh 662

kelompok tani dengan komoditas utama berupa jagung, padi, umbi-umbian, dan buah-buahan. Hal ini dicapai melalui sistem agroforestri pada lahan perhutanan sosial dengan target produksi sebesar 650.000 ton pada periode 2025-2029.

Grafik 4.20
Hasil Produksi Pangan dari Kawasan Hutan Tahun 2025 - Mei 2026



Sumber: Kementerian Perhutanan, 2026 (diolah)

Peningkatan produksi perikanan turut memperkuat ketersediaan dan keterjangkauan sumber protein bagi masyarakat. Total produksi perikanan meningkat dari 23,56 juta ton (2024) menjadi 26,26 juta ton (2025). Total produksi 2025 terdiri atas perikanan tangkap sebesar 7,85 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 18,41 juta ton. Peningkatan tersebut didukung oleh penguatan produktivitas melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, penerapan teknologi dan inovasi, serta penguatan rantai pasok dan distribusi hasil perikanan.

Sejalan dengan meningkatnya produksi, tingkat konsumsi pangan masyarakat juga semakin membaik. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya angka Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi

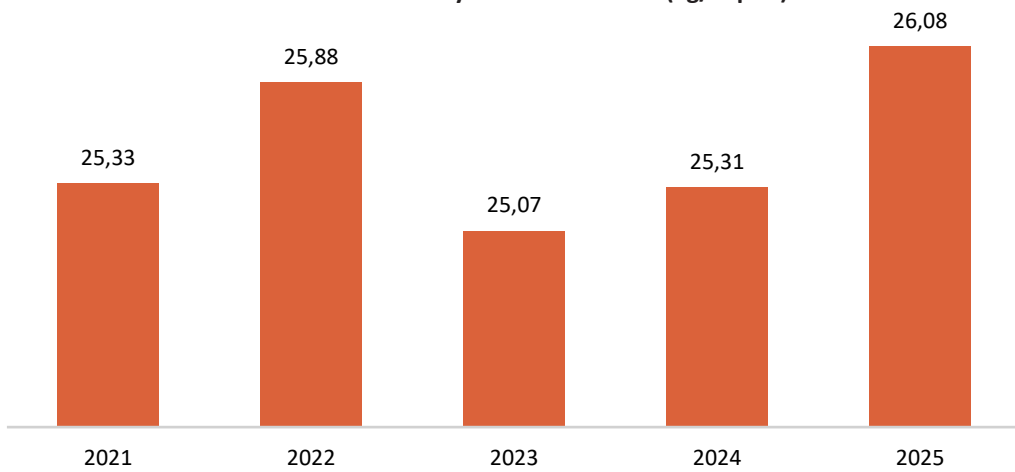
Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) dari 8,27 persen (2024) menjadi 7,89 persen (2025). Menurunnya prevalensi tersebut menggambarkan berkurangnya persentase masyarakat yang belum mampu mencukupi kebutuhan minimum kalori dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat juga membaik, ditunjukkan oleh skor PPH Konsumsi yang meningkat dari 93,5 (2024) menjadi 95,1 (2025). Peningkatan ini didukung dengan konsumsi buah dan sayur pada 2025 sebesar 261,86 gram/kapita/hari, serta konsumsi pangan hewani sebesar 133,37 gram/kapita/hari.

Konsumsi pangan akuatik juga menjadi komponen penting dalam pemenuhan protein hewani yang terjangkau. Pada 2025, Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) mencapai 26,08 kg/kapita/tahun. Capaian ini meningkat 3,05 persen dibandingkan tahun 2024 dan tumbuh rata-rata 1,30 persen per

tahun selama lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut didukung oleh intervensi pemerintah melalui edukasi konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang, peningkatan akses terhadap pangan sumber protein hewani, serta penguatan diversifikasi pangan dan promosi konsumsi ikan.

Grafik 4.21
Konsumsi Ikan Masyarakat 2021-2025 (kg/kapita)



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2025

Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,67 persen, kemudian meningkat signifikan menjadi 5,33 persen pada 2025. Pada triwulan I 2026, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 4,97 persen (yoy). Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor ini tetap tumbuh dan secara konsisten mampu menopang perekonomian nasional.

Perkebunan merupakan kontributor terbesar dalam sektor pertanian, yakni 4,51 persen terhadap keseluruhan PDB dan 34,46 persen terhadap PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pertumbuhan sektor perkebunan (yoy) meningkat dari 0,67 persen (2024) menjadi sebesar 3,00 persen (2025).

Kelapa sawit (*Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO)) serta kopi merupakan beberapa komoditas perkebunan yang menjadi komoditas ekspor utama pada sektor pertanian. Produksi total CPO dan PKO nasional meningkat dari 50,26 juta ton (2024), menjadi 51,50 juta ton (2025). Produksi kopi nasional juga meningkat dari 813,35 ribu ton (2024) menjadi 832,68 ribu ton (2025). Perkembangan ini dapat mendukung terjaminnya ketersediaan bahan baku untuk hilirisasi bernilai tambah tinggi. Peningkatan produksi komoditas perkebunan didukung melalui peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman, serta peremajaan dan pengembangan areal perkebunan.

Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai pelaku utama sektor pertanian menjadi prioritas utama pembangunan khususnya



dalam mendukung pencapaian swasembada pangan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kinerja positif sektor pertanian juga tecermin pada NTP yang meningkat dari 123,26 (2025) menjadi 125,48 (Mei 2026). Hal ini mengindikasikan penguatan daya beli petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun menunjang kegiatan usaha taninya. NTN juga mengalami peningkatan dari 103,86 (2025) menjadi 108,05 (semester I 2026). Penguatan NTN ini mencerminkan membaiknya daya tukar dan kondisi ekonomi relatif nelayan. Penguatan ini didorong oleh kenaikan harga ikan hasil tangkapan yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga.

Pelaksanaan program swasembada pangan juga didukung oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan pada 2025 dan 2026, antara lain: (1) tata kelola pupuk bersubsidi; (2) percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; (3) pendayagunaan penyuluh pertanian; (4) percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah; (5) percepatan pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; (6) penetapan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih; dan (7) perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

4.4.2 Tantangan dan Upaya

Swasembada pangan secara umum menunjukkan kemajuan. Beberapa tantangan penting yang dihadapi antara lain dari sisi eksternal maupun internal. Tantangan dari sisi eksternal antara lain: dampak perubahan iklim, pergeseran musim, bencana alam, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi global berpotensi memengaruhi kontinuitas

pasokan dan stabilitas harga komoditas pertanian. Memasuki 2026, sektor pertanian juga dihadapkan pada fenomena El Niño yang diperkirakan memengaruhi pola curah hujan dan ketersediaan air irigasi.

Tantangan dari sisi internal antara lain: regenerasi petani, jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian, alih fungsi lahan pertanian, serta disparitas distribusi logistik antarwilayah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut fokus kebijakan diarahkan pada penanganan kerawanan pangan antarwilayah, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, riset dan adopsi teknologi, hilirisasi komoditas bernilai tambah tinggi, pemerataan rantai dingin (*cold chain*), serta keterjangkauan harga pangan. Penyediaan pangan tidak hanya bertumpu pada produktivitas hulu, tetapi juga membenahi tata kelola bantuan dan subsidi (termasuk pupuk, benih, alsintan, dan BBM), pendampingan dan bantuan pembiayaan. Pada sisi konsumsi, kebijakan diarahkan untuk mendorong diversifikasi, fortifikasi, keamanan pangan, dan efisiensi tata niaga.

Selanjutnya, penguatan ketahanan pangan sektor pertanian diarahkan pada tiga fokus. Pertama, Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi yang mengedepankan penguatan hulu-hilir komoditas tanaman pangan serta optimalisasi sistem agroforestri pada lahan perhutanan sosial. Kedua, Pengembangan Kawasan Perkebunan untuk mendorong diversifikasi usaha tani dan hilirisasi komoditas unggulan seperti sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete, dan rempah. Ketiga, peningkatan produksi daging, susu, dan telur yang ditempuh melalui pengembangan sentra peternakan terpadu, penguatan kemitraan peternakan rakyat, serta penguatan kesehatan

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta hilirisasi sektor peternakan.

Selain itu, akselerasi sektor pangan akuatik dan maritim diperkuat melalui enam fokus melalui: (1) pengembangan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir; (2) revitalisasi Tambak Nila Salin seluas 14.090 ha di Pantura untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan marginal; (3) pemodelan dan replikasi 2.000 ha Tambak Udang Terintegrasi; (4) pengembangan Budidaya Ikan Darat Tematik untuk memperkuat ketahanan gizi lokal di wilayah daratan; (5) kemandirian komoditas penunjang dan operasional laut melalui pengembangan 2.000 ha Kawasan Sentra Industri Garam

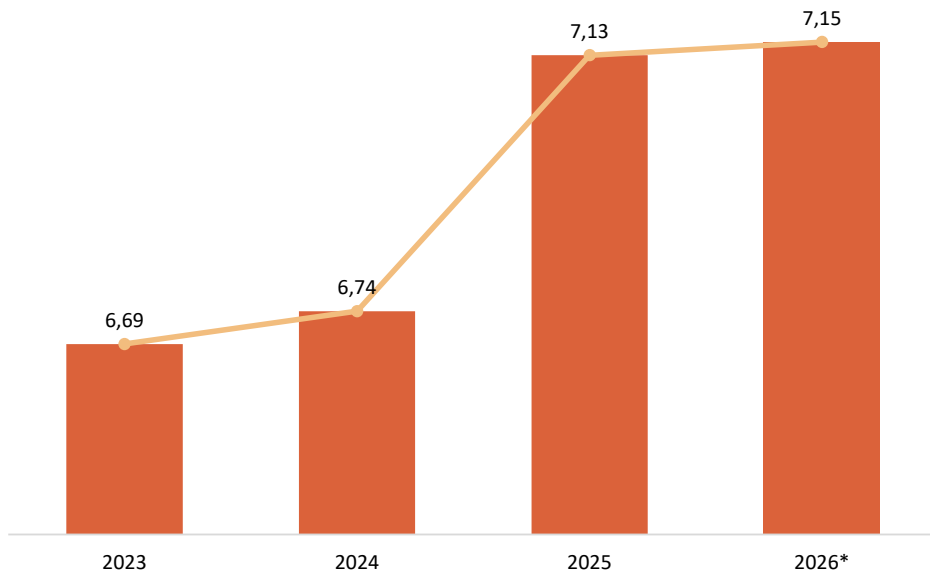
Nasional; serta (6) penyediaan 4.582 Kapal Ikan Modern untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan keselamatan operasional nelayan.

4.5 Swasembada Energi

4.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Swasembada Energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan. Hingga saat ini, Swasembada Energi terus menunjukkan kemajuan. Hal ini tecermin dari meningkatnya Indeks Ketahanan Energi menjadi 7,13 pada 2025, yang termasuk dalam kategori “Tahan”, meningkat dari 6,74 (2024).

Grafik 4.22
Capaian Indeks Ketahanan Energi Tahun 2023-2026



Sumber: Kementerian ESDM, 2026

Peningkatan Indeks Ketahanan Energi tersebut didukung oleh perbaikan pada berbagai indikator utama, antara lain meningkatnya porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer, pertumbuhan konsumsi

listrik per kapita, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan energi.

Capaian diatas menunjukkan penguatan yang berkelanjutan pada aspek ketersediaan,



aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan energi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan penyediaan energi, memperluas infrastruktur energi, serta mengakselerasi pemanfaatan teknologi energi bersih.

Capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, sekaligus mendukung implementasi transisi energi yang berkeadilan menuju pencapaian target *Net Zero Emission*.

Tabel 4.3
Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan

Indikator Program Prioritas	Satuan	2023	2024	2025	Semester I	
					2025	2026
Pasokan Energi Primer	MTOE	259,46	278,8	288,96	133,59	86,19*
Konsumsi Energi Final Per Kapita	TOE/kapita	0,61	0,63	0,65	0,29	0,27
Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer	%	13,29	14,65	15,75	15,95	18,30*
Intensitas Energi Primer	SBM/miliar Rp	132,58	133,00	144,58	141,56	150,45
Jumlah Lifting Minyak Bumi	ribu BOPD	605,54	579,66	605,27	600,56	576,22
Jumlah Lifting Gas Bumi	ribu BOEPD	1.041,98	1.016,71	951,80	956,26	1.045,21*
Jumlah Produksi Batubara	juta ton	775,18	836,13	817,48	389,28	367,06*
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota	kumulatif sambungan	922.766	943.708	943.708	943.708	943.708
Jumlah Panjang Pipa Transmisi/ Distribusi Gas Bumi yang Difasilitasi	Km	22.478	22.533	22.818,05	22.540,00	22.969,13
Jumlah Volume Penyaluran BBM Bersubsidi	juta kL	18,06	18,13	18,92	8,95	9,73
Jumlah Volume Penyaluran BBM Nonsubsidi	juta kL	32,47	35,10	37,07	17,55	18,52
Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif)	ribu pelanggan	88.785	92.494	95.774	94.013	97.224*
Konsumsi Biofuel	juta kL	12,29	13,16	14,94	7,10	7,48
Produksi Listrik Energi Terbarukan	GWh	50.246	53.954	80.607	37.711	43.968
Penurunan Intensitas Energi Final	SBM/miliar Rp	0,89	1,04	1,32	0,96	0,59
Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (Kumulatif)	GW	13,56	14,32	16,15	15,72	16,28

Sumber: Kementerian ESDM, 2026 (diolah)

Keterangan: *) Angka masih bersifat sementara/prognosa

Pada aspek ketersediaan, pemerintah terus menjaga ketersediaan pasokan energi melalui peningkatan capaian *lifting* minyak bumi, intensifikasi produksi, dan optimalisasi sumur

eksisting. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan hulu migas dalam menahan laju penurunan produksi alamiah sekaligus memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

Pemerintah juga memastikan keberlanjutan pasokan batu bara nasional sebagai salah satu penopang utama ketersediaan energi dalam negeri selama proses transisi energi berlangsung melalui kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO), pengendalian kuota produksi melalui persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta percepatan kontrak pasokan. Hingga semester I 2026, produksi sementara tercatat 367,06 juta ton, yang menunjukkan bahwa kapasitas produksi nasional tetap memadai untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik dan industri. Ketersediaan energi dan bahan baku strategis diperkuat di sisi hulu melalui pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan, survei geologi, serta peningkatan kegiatan eksplorasi guna menjaga kesinambungan pasokan nasional.

Pada aspek keterjangkauan, pemerintah terus menjaga akses masyarakat terhadap energi dengan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi maupun nonsubsidi. Sepanjang 2025, volume penyaluran BBM bersubsidi mencapai 18,92 juta kL, sementara penyaluran BBM nonsubsidi mencapai 37,07 juta kL. Hingga semester I 2026, penyaluran BBM bersubsidi telah mencapai 9,73 juta kL dan penyaluran BBM nonsubsidi mencapai 18,52 juta kL. Keduanya meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan energi melalui pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat dan dunia usaha, sekaligus memastikan stabilitas pasokan di seluruh wilayah.

Sementara itu, pada aspek aksesibilitas, perluasan akses energi terus didorong melalui pengembangan infrastruktur energi, salah satunya melalui pembangunan jaringan gas kota

yang secara kumulatif telah mencapai 943.708 sambungan rumah. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap energi yang lebih bersih, efisien, dan andal.

Pada aspek pemanfaatan sumber daya energi yang bersih dan berkelanjutan, pemerintah terus berupaya meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi primer menjadi 18,30 persen pada triwulan I 2026 dan konsumsi biofuel menjadi 7,48 juta kL pada semester I 2026. Peningkatan ini didukung oleh pelaksanaan kebijakan mandatori B50, menempatkan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang telah menerapkan mandatori B50 secara nasional.

Pemanfaatan sumber daya energi yang bersih juga didukung oleh penguatan insentif fiskal dan nonfiskal, implementasi *carbon credit* pada sektor energi, serta percepatan implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW. Selain melalui peningkatan pemanfaatan EBT dan Bahan Bakar Nabati (BBN), transisi energi juga membutuhkan ketersediaan mineral strategis sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, jaringan ketenagalistrikan, pembangkit energi terbarukan, dan industri pendukungnya. Untuk mengoptimalkan pengelolaan, pengolahan, dan pemanfaatan mineral strategis, pemerintah telah membentuk badan pengelola dan percepatan hilirisasi mineral strategis.

4.5.2 Tantangan dan Upaya

Dalam pemenuhan agenda swasembada energi, tantangan utama pada sektor migas mencakup: (1) penurunan produksi alamiah pada lapangan-lapangan tua; (2) urgensi percepatan pembangunan infrastruktur migas; dan (3) volatilitas harga energi global.



Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan tersebut, pemerintah menempuh sejumlah langkah strategis, antara lain: (1) optimalisasi sumur eksisting melalui *Enhanced Oil Recovery* (EOR); (2) reaktivasi sumur tua termasuk penyederhanaan perizinan bagi sumur masyarakat; (3) percepatan proses dari *Plan of Development* (POD) menuju produksi; serta (4) penawaran wilayah kerja migas potensial kepada investor, termasuk proyek strategis nasional seperti pengembangan kilang *Grass Root Refinery* (GRR) Tuban.

Pada sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT), tantangan utama antara lain: (1) penggunaan energi fosil yang masih mendominasi; (2) capaian biofuel masih didominasi biodiesel sementara bioetanol dan bioavtur belum kompetitif secara komersial; serta (3) realisasi pembangunan pembangkit EBT.

Upaya yang dilakukan antara lain: (1) penguatan regulasi dan pengawalan implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) termasuk lelang wilayah panas bumi; (2) penahapan pemanfaatan BBN, penerapan *multi feedstock*, dan riset teknologi BBN tingkat lanjut; serta (3) percepatan peningkatan porsi EBT dalam bauran energi yang selaras dengan RUPTL.

Pada sektor mineral, batu bara, dan geologi, tantangan utama antara lain: (1) kecukupan pasokan batu bara domestik di tengah dinamika harga dan permintaan ekspor; (2) fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral strategis yang membutuhkan investasi, teknologi, energi, dan bahan baku; (3) data geologi dan eksplorasi untuk menemukan sumber daya dan cadangan baru; serta (4) tata kelola lingkungan, reklamasi pascatambang, dan penertiban tambang ilegal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menempuh langkah-langkah antara lain: (1) pengendalian produksi dan pemenuhan kebutuhan domestik; (2) percepatan hilirisasi mineral strategis untuk mendukung rantai pasok energi nasional; (3) peningkatan survei dan pemetaan geologi, pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan, dan peningkatan eksplorasi pada wilayah prospektif; serta (4) penguatan pengawasan perizinan dan penegakan hukum terhadap tambang ilegal, pemenuhan jaminan reklamasi dan pascatambang, serta penerapan teknologi rendah emisi dan penyusunan peta jalan dekarbonisasi.

4.6 Swasembada Air

4.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Swasembada air merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan, energi, dan penguatan ketahanan nasional. Pembangunan sumber daya air diarahkan untuk menjamin kecukupan ketersediaan air secara berkelanjutan melalui penyediaan air baku, peningkatan layanan irigasi, dan konservasi sumber daya air yang terintegrasi. Berbagai intervensi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah.

Ketersediaan sumber daya air di Indonesia pada 2025 masih menunjukkan kondisi surplus, dengan sebagian besar wilayah berada pada kategori tanpa tekanan terhadap ketersediaan air. Kondisi tersebut menunjukkan potensi sumber daya air dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan ketahanan air nasional. Di sisi lain, karakteristik geografis dan

hidrologi menyebabkan kondisi ketersediaan air berbeda antarwilayah, sehingga beberapa wilayah memerlukan pengelolaan sumber daya air yang lebih optimal untuk mengimbangi kebutuhan air yang terus meningkat. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan sumber

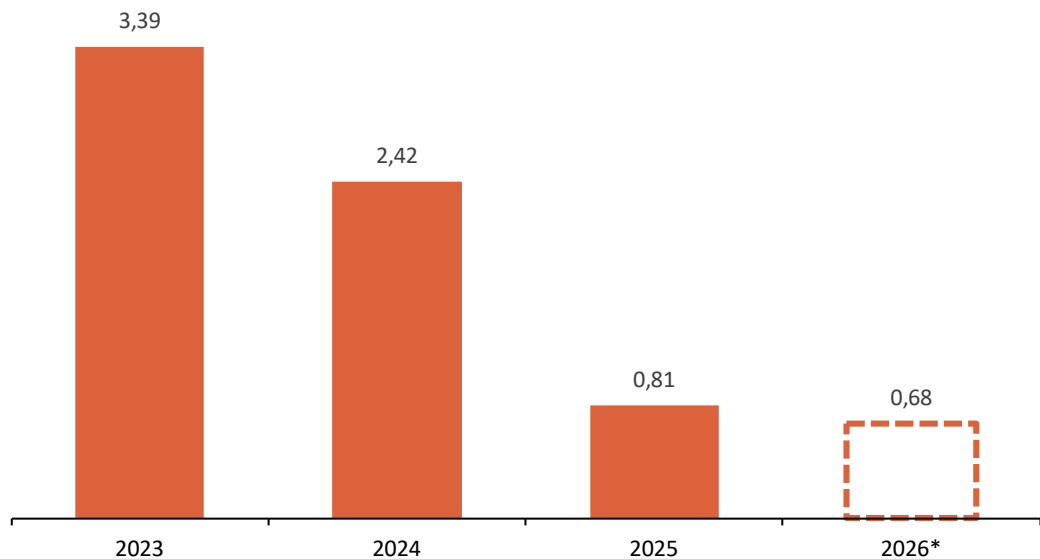
daya air perlu terus ditingkatkan melalui pembangunan dan optimalisasi infrastruktur tampungan air, konservasi sumber daya air, serta peningkatan efisiensi pemanfaatan air untuk mendukung ketahanan dan swasembada air secara berkelanjutan.

Gambar 4.1
Ketersediaan Air Per Kapita Indonesia Tahun 2025



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2026 (diolah)

Grafik 4.23
**Capaian Tambahan Kapasitas Air Baku (m^3/detik)
Tahun 2023-2026**



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2026 (diolah)
Keterangan: *Angka target

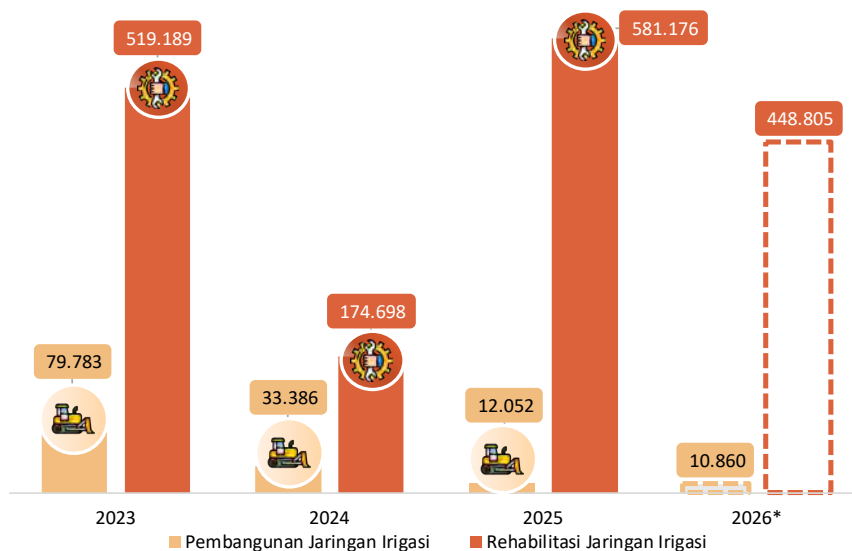


Penyediaan prasarana air baku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya di pulau-pulau kecil terluar, daerah 3T dan perbatasan, kawasan metropolitan, kawasan perkotaan, dan kawasan strategis. Pada 2025, rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk telah mencapai 52,95 persen yang didukung oleh tambahan kapasitas air baku sebesar 0,81 m³/detik. Pada 2026, penambahan kapasitas air baku ditargetkan sebesar 0,68 m³/detik yang didukung melalui pembangunan prasarana air baku DAS Kawal di Pulau Bintan, pembangunan prasarana air baku Kertasari di Kabupaten Bandung, dan Karian Dam-Serpong *Water Conveyance System*.

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi merupakan upaya strategis untuk menjamin

ketersediaan air bagi tanaman pangan, khususnya padi. Pada 2025, persentase luas baku sawah fungsional beririgasi telah mencapai 61,69 persen, capaian tersebut didukung oleh pembangunan jaringan irigasi seluas 12.052 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 581.176 ha. Pencapaian tersebut didukung oleh implementasi Inpres No. 2/2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, yang memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Upaya ini dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan utama, jaringan tersier, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang mencakup 411.821 ha pada 2025.

Grafik 4.24
Capaian Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (ha)
Tahun 2023-2026

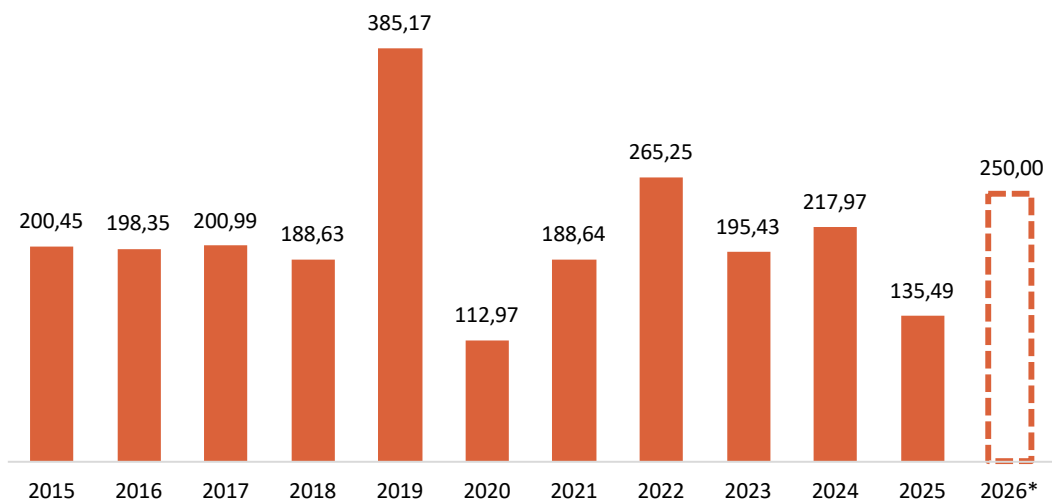


Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2026 (diolah)
Keterangan: *Angka target

Dalam mendukung Swasembada Air diperlukan upaya peningkatan konservasi sumber daya air yang bertujuan untuk menjaga kondisi dan fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas air yang baik untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor secara berkelanjutan. Salah satu upaya konservasi sumber daya air secara vegetatif dilaksanakan

melalui kegiatan penanaman di lahan kritis, termasuk lahan mineral, gambut, dan mangrove. Pada 2025, penanaman telah dilaksanakan pada lahan kritis seluas 139,35 ribu ha, di dalam maupun di luar kawasan hutan (termasuk mangrove). Selain itu, juga telah dibangun 229 unit infrastruktur pengendali erosi dan sedimentasi.

Grafik 4.25
Capaian Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ribu ha)
Tahun 2015-2026



Sumber : Kementerian Kehutanan, 2026

Keterangan : *Angka target

4.6.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan swasembada air, antara lain: (1) sinergi para pemangku kepentingan dalam penguatan pengelolaan air; (2) perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan pasokan dan keandalan sistem sumber daya air; (3) pendanaan inovatif untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya air; (4) meningkatnya kebutuhan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air; serta (5) meningkatnya kebutuhan air baku di kawasan prioritas dan pusat-pusat pertumbuhan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian swasembada air, antara lain: (1) perbaikan tata kelola dan kelembagaan pengelolaan sumber daya air; (2) peningkatan ketahanan dan keandalan sistem sumber daya air yang adaptif terhadap perubahan iklim; (3) penguatan keberlanjutan pendanaan operasi dan pemeliharaan melalui optimalisasi skema pembiayaan dan kemitraan strategis; (4) akselerasi pembangunan prasarana air baku dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur sumber daya air yang telah terbangun; serta (5) akselerasi dan rehabilitasi DAS kritis.



Keberhasilan swasembada air ditandai dengan meningkatnya tutupan lahan dan pemulihan sumber mata air. Pengalaman di Desa Lelobatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) rehabilitasi lahan seluas 175 ha melalui keterlibatan masyarakat setempat telah kembali memunculkan 40 mata air baru di sekitar lokasi hutan. Selain berdampak pada terjaganya lingkungan, juga telah berhasil memulihkan hasil pertanian dan perkembangan ekonomi produktif di masyarakat.

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2025

Keterangan: Foto berseri dari 2019-2025

(a) Kegiatan rehabilitasi hutan bersama masyarakat tahun 2019-2021; (b) tutupan hutan yang sudah kembali pada 2025; (c) mata air yang muncul setelah kegiatan rehabilitasi hutan

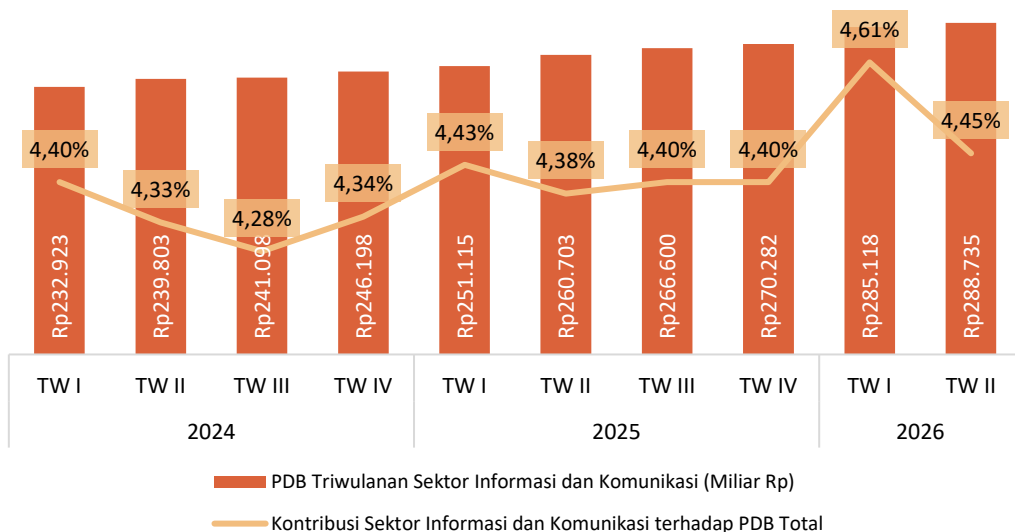
4.7 Ekonomi Digital

4.7.1 Capaian Utama Pembangunan

Memasuki 2026, ekonomi digital Indonesia menunjukkan pertumbuhan kinerja yang tangguh di tengah dinamika perekonomian global yang dibayangi oleh berbagai ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi digital salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi yang cukup signifikan. Sektor ini tumbuh sebesar 6,97 persen dibandingkan 2025 (yoy) dan sebesar 2,71 persen dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu (qoq). Pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh penguatan aspek infrastruktur digital yang telah secara resmi memulai seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz (2026). Hal ini, sebagai langkah optimalisasi spektrum frekuensi dalam

mendukung perluasan akses konektivitas dan peningkatan kualitas layanan *mobile broadband* nasional. Ketersediaan spektrum yang lebih optimal mendorong investasi operator telekomunikasi dalam memperluas dan meningkatkan kapasitas jaringan. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas layanan digital dan mempercepat adopsi teknologi digital oleh masyarakat dan dunia usaha pada perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, pembelajaran daring, layanan kesehatan, hingga pemanfaatan layanan berbasis *cloud* dan *streaming*. Hal yang sama, juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi internet sebesar 235,26 juta jiwa (Maret, 2026) atau 81,72 persen dari total penduduk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan potensi pertumbuhan lebih lanjut, terutama disertai dengan peningkatan tingkat literasi digital.

Grafik 4.26
PDB Triwulanan dan Laju Pertumbuhan PDB
Sektor Informasi dan Komunikasi Atas Dasar Harga Berlaku (qto)
Triwulan I 2024 - Triwulan II 2026



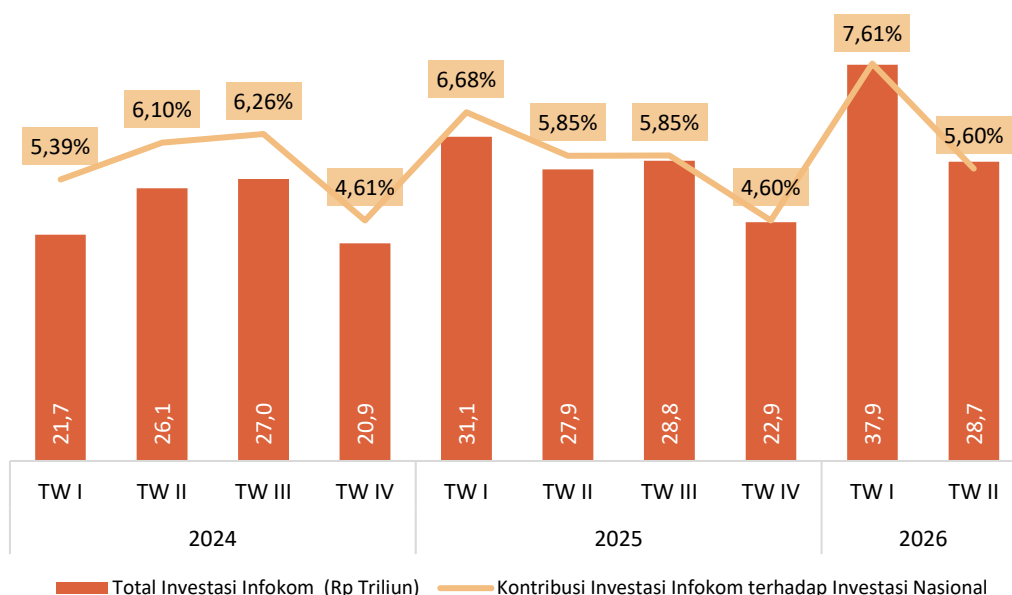
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)



Pada sisi pemerintah, adopsi teknologi digital dilakukan melalui perluasan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengintegrasikan berbagai aplikasi yang tersebar di seluruh kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun di daerah. Peran tersebut juga terlihat pada nilai realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa senilai Rp494,97 triliun dengan tingkat persentase digitalisasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebesar 58,62 persen.

Realisasi investasi pada sektor informasi dan komunikasi di Indonesia meningkat menjadi Rp37,9 triliun, tumbuh signifikan sebesar 22,18 persen dari triwulan I 2025 (yoy). Proporsi investasi sektor informasi dan komunikasi mencapai 7,61 persen terhadap total seluruh investasi, mendekati rasio tertinggi yang pernah dicapai dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan ini menandakan bahwa sektor digital dan telekomunikasi kembali menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia.

Grafik 4.27
Nilai Investasi dan Proporsi Sektor Informasi dan Komunikasi (qtq)
Triwulan I 2024 - Triwulan II 2026

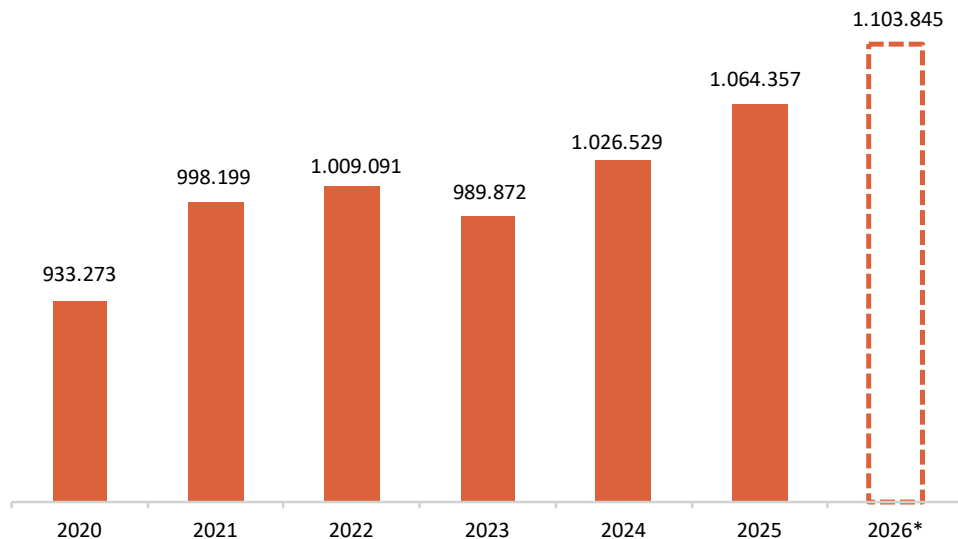


Sumber : BKPM, 2026 (diolah)

Meningkatnya investasi asing juga memperkuat posisi Indonesia sebagai hub pusat data regional strategis. Perkembangan tersebut mendukung upaya tercapainya nilai ekonomi digital nasional yang diproyeksikan akan menembus US\$130 miliar pada 2026. Peningkatan kinerja sektor ini juga ditopang oleh realisasi berbagai proyek infrastruktur digital berskala besar, seperti pembangunan pusat data di Jakarta

dan Karawang untuk memenuhi kebutuhan komputasi awan (*cloud computing*) dan pengembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Pada triwulan II 2026, proporsi PMA terhadap total investasi sektor informasi dan komunikasi sebesar 72,53 persen, salah satunya terlihat dari investasi pembangunan pusat data seluas 12 ha di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat senilai US\$2,3 miliar.

Grafik 4.28
Tenaga Kerja Sektor Informasi dan Komunikasi
Tahun 2020 - 2026



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)
 Keterangan: *) Angka target

Seiring dengan bertumbuhnya sektor ekonomi digital, jumlah tenaga kerja sektor informasi dan komunikasi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pekerjaan berbasis *platform digital* diperkirakan menjadi bidang pekerjaan utama bagi 4,3 juta orang pekerja *platform/gig workers*.

Secara khusus pada sektor informasi dan komunikasi, pertumbuhan tenaga kerja berketerampilan tinggi terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan talenta digital sebesar 9 juta orang hingga 2030. *Digital Talent Scholarship* hingga tahun 2026 telah mengakomodasi 224.079 orang. Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada pilar pekerjaan juga menunjukkan peningkatan sebesar 4,28 poin yaitu dari 38,09 (2024), menjadi 42,91 (2025). Perkembangan ini menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja berkeahlian digital.

4.7.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan pengembangan ekonomi digital antara lain: (1) adopsi dan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor strategis, terutama pada sektor pertanian dan perikanan, UMKM, perdagangan, dan digitalisasi daerah; (2) perluasan literasi dan kapasitas talenta digital; (3) pemerataan tingkat maturitas dan adopsi digital antarwilayah serta antarsektor; dan (4) regulasi yang adaptif dan responsif di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung secara cepat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengupayakan langkah-langkah strategis seperti: (1) fasilitasi adopsi teknologi untuk sektor-sektor strategis ekonomi digital; (2) penguatan literasi dan ekosistem talenta digital melalui penyelarasan pendidikan (*industry-driven curriculum*); (3) penguatan alokasi dana riset digital untuk pengembangan riset dan inovasi, serta kolaborasi multipihak



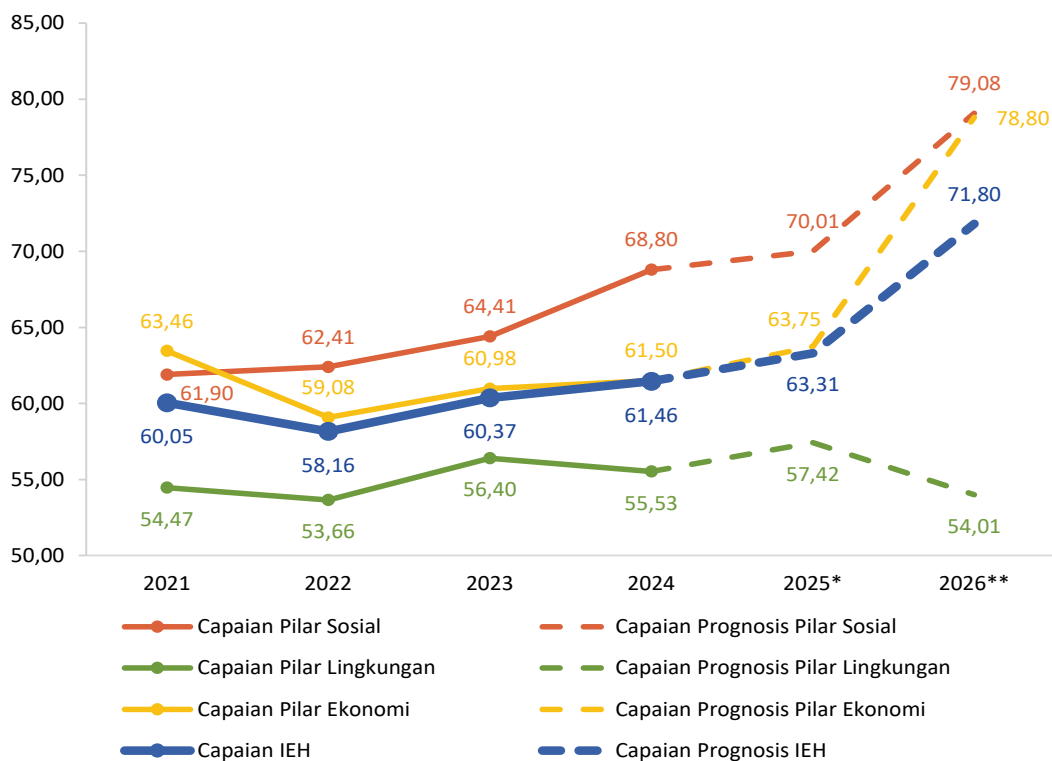
antara pemerintah, perguruan tinggi, industri dan lembaga pelatihan; (4) percepatan transformasi digital yang inklusif di berbagai wilayah lainnya di Indonesia sebagai upaya mendorong tingkat adopsi multi-sektor yang lebih tinggi; dan (5) penguatan regulasi dan tata kelola melalui penyederhanaan kebijakan, *regulatory sandbox*, dan perumusan kebijakan digital yang melibatkan kolaborasi lintas pemangku kebijakan.

4.8 Ekonomi Hijau

4.8.1 Capaian Utama Pembangunan

Transformasi ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan produktivitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan melalui investasi, inovasi, pembangunan infrastruktur, penciptaan

Grafik 4.29
Capaian Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2021-2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Keterangan:

*: Capaian 2025 masih bersifat sementara

** : Angka tahun 2026 merupakan angka target

lapangan kerja, serta pengembangan keterampilan hijau. Progres dan capaian transformasi ekonomi hijau diukur menggunakan Indeks Ekonomi Hijau (IEH), dimana pada 2024 capaian IEH sebesar 61,46 meningkat 1,09 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 60,37.

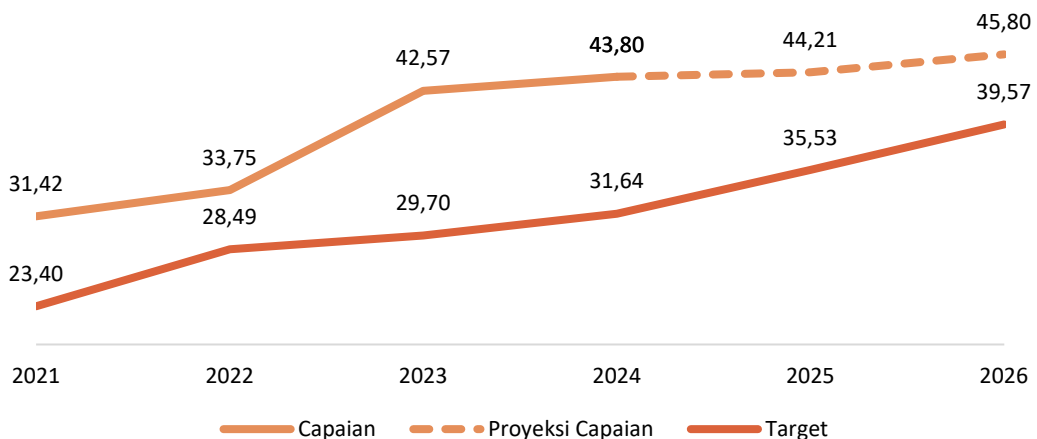
Pilar ekonomi dalam IEH meningkat dari 60,98 (2023) menjadi 61,50 (2024). Tren positif ini diproyeksikan terus berlanjut seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang menerapkan prinsip

keberlanjutan. Di sektor kehutanan, diversifikasi usaha dan perluasan basis ekonomi nonkayu mendorong peningkatan produksi Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK) dari 870,41 ribu ton (2024) menjadi 1,02 juta ton (2025).

Selain itu, peningkatan produktivitas turut dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem secara berkelanjutan mendukung bioekonomi. Pada 2025, hal tersebut turut mendorong investasi di sektor kehutanan sebesar Rp1,85 triliun dan menghasilkan PNBPN sebesar Rp24,3 miliar dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta Rp348 miliar dari jasa lingkungan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Pemerintah juga mempercepat pengembangan teknologi hijau melalui pembangunan pembangkit listrik EBT. Pada 2025, kapasitas terpasang EBT mencapai 16,15 GW yang mendorong peningkatan bauran EBT dari 14,65 persen pada 2024 menjadi 15,75 persen. Pengembangan energi rendah karbon ini, bersama dengan upaya mitigasi di lima sektor prioritas lainnya diproyeksikan turut berkontribusi menjaga keberlanjutan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) yang pada 2024 telah mencapai 98,32 tCO₂e per miliar rupiah, atau 43,80 persen lebih rendah dibandingkan 2010. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pembangunan Rendah Karbon (PRK) semakin efektif yang ditandai dengan semakin rendahnya emisi GRK yang dihasilkan untuk setiap rupiah nilai tambah ekonomi yang diciptakan.

Grafik 4.30
Capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK (persen)
Tahun 2021-2026



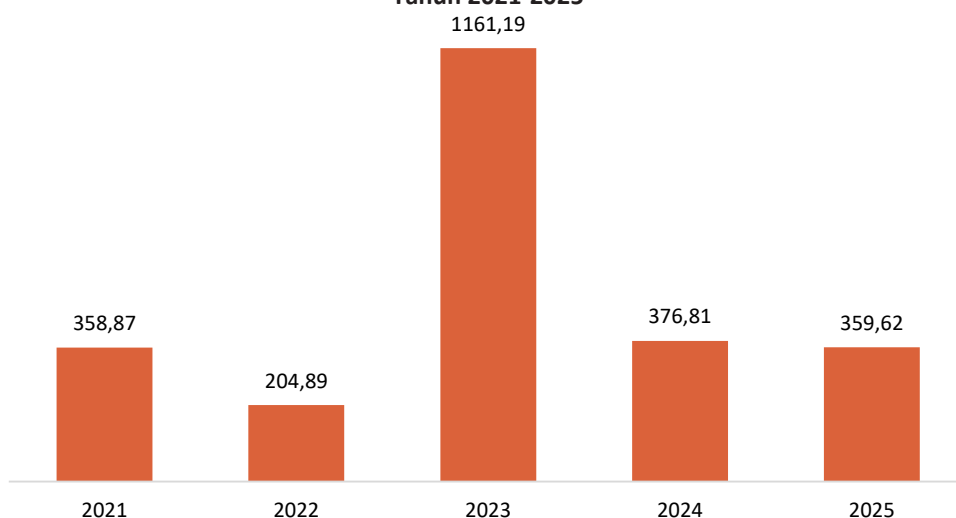
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026.



Pada 2024, pilar lingkungan dalam IEH memiliki capaian sebesar 55,53. Capaian ini diproyeksikan akan meningkat seiring dengan penguatan berbagai upaya pelestarian lingkungan. Pada 2025, perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi berhasil memulihkan 6.676,38 ha KSA, KPA, dan TB, serta mengembangkan areal preservasi seluas 431.245 ha. Upaya perlindungan dan

pengelolaan ekosistem gambut turut mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan memulihkan ekosistem gambut seluas 906.446,6 ha. Sementara itu, kolaborasi multipihak dalam merespons kebakaran hutan dan lahan melalui intervensi lapangan yang cepat dan terukur, mampu menekan luas kebakaran menjadi 359,62 ribu ha (2025), atau menurun 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 4.31
Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan (ribu Ha)
Tahun 2021-2025



Sumber: Kementerian Kehutanan, 2026.

Capaian pilar lingkungan juga didukung oleh implementasi PRK. Pada 2025, penguatan sinergi multipihak dalam melaksanakan aksi mitigasi di sektor energi, lahan, karbon biru, pertanian, sampah dan limbah, serta dekarbonisasi industri terverifikasi berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 780,47 juta tCO₂e. Untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi GRK, pemerintah juga menyelenggarakan perdagangan karbon melalui IDX Carbon. Hingga Juli 2026, volume transaksi perdagangan karbon mencapai sekitar 1,9 juta tCO₂e dengan nilai transaksi sebesar Rp93,8 miliar.

Sementara itu, untuk mempercepat pencapaian target *Net Zero Emission*, implementasi Perpres No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional akan mendorong penerapan nilai ekonomi karbon sekaligus meningkatkan akuntabilitas aksi mitigasi.

Selain itu, capaian pilar lingkungan juga didukung oleh upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan penerapan pola konsumsi serta produksi berkelanjutan melalui penguatan ekosistem ekonomi sirkular. Pada 2025, rasio penggunaan material sirkular di sektor industri

mencapai 12 persen dan persentase sampah yang didaur ulang meningkat menjadi 14,2 persen.

Di sisi lain, pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir terus diperkuat, tidak hanya melalui pengoperasian infrastruktur pengolahan sampah, tetapi juga melalui pembinaan terhadap 186 bank sampah dan kelompok masyarakat serta penguatan tata kelola persampahan melalui pembinaan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di 343 kabupaten/kota. Selain itu, juga dilaksanakan Penilaian Indeks Risiko TPA berbasis *Integrated Risk-Based Approach* (IRBA) sebagai dasar penentuan prioritas penanganan TPA yang masih menerapkan praktik *open dumping* sesuai dengan tingkat risikonya. Berbagai upaya tersebut berkontribusi terhadap capaian pengelolaan sampah sebesar 33,54 persen dari total timbulan sampah pada 2025.

Capaian pilar sosial dalam IEH meningkat signifikan dari 64,41 (2023) menjadi 68,80 (2024). Peningkatan ini diproyeksikan terus berlanjut seiring dengan pengembangan tenaga kerja hijau (*green jobs*) untuk memenuhi kebutuhan sektor EBT, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.

Pada 2024, jumlah tenaga kerja hijau di Indonesia mencapai 3,64 juta orang atau 2,52 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, pemerintah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia pada April 2025 sebagai acuan strategis bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan kompetensi dan memperluas lapangan kerja hijau.

Selain mendorong penciptaan lapangan kerja, pilar sosial ekonomi hijau juga diarahkan

untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan ekologi dan sosial. Pada 2025, berbagai program pemberdayaan masyarakat terus diperluas, antara lain melalui program kampung iklim yang melibatkan 288 kelompok masyarakat, peningkatan kompetensi 124 kelompok masyarakat pemanfaat kawasan konservasi, pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang menysasar 23 kelompok masyarakat, pemberian bantuan implementasi peningkatan kualitas kesehatan lingkungan kepada 435 kelompok masyarakat, dan program desa mandiri peduli gambut di 27 desa.

4.8.2 Tantangan dan Upaya

Transformasi ekonomi hijau menghadapi beberapa tantangan antara lain: (1) pengelolaan sampah domestik masih didominasi pendekatan kumpul-angkut-buang dengan praktik *open dumping* di TPA; (2) implementasi kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dan skema insentif bagi pelaku usaha sirkular belum optimal; (3) ketergantungan yang tinggi pada penggunaan energi fosil, sehingga peningkatan aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi berpotensi mendorong kenaikan emisi GRK; (4) laju perubahan tutupan lahan memberikan tekanan terhadap keanekaragaman hayati; (5) integrasi pengelolaan keanekaragaman hayati dengan perencanaan pembangunan; serta (6) ekosistem pendukung pengembangan tenaga kerja hijau.

Sebagai respons tantangan diatas, upaya yang akan dilakukan antara lain: (1) penguatan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir; (2) percepatan implementasi EPR, khususnya pada sektor plastik dan kemasan,



serta industri skala besar untuk menetapkan target penggunaan material daur ulang dalam proses produksi; (3) percepatan pembangunan EBT, khususnya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM); (4) penguatan pembiayaan hijau melalui pemanfaatan skema pendanaan inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan dan air limbah; (5) pengendalian perubahan tutupan lahan melalui penguatan kebijakan pemanfaatan ruang dan perlindungan kawasan bernilai penting bagi keanekaragaman hayati serta memperkuat tata kelola; dan (6) penguatan strategi vokasi hijau melalui perluasan *reskilling* dan *upskilling*, pengembangan keterampilan hijau, serta penguatan skema sertifikasi kompetensi berbasis keterampilan hijau.

4.9 Ekonomi Biru

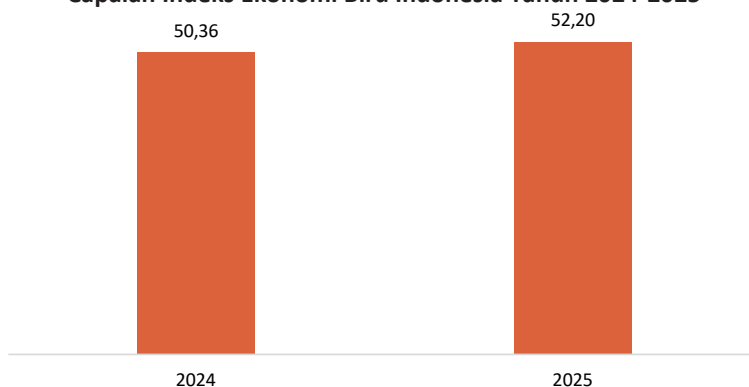
4.9.1 Capaian Utama Pembangunan

Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menjaga kelestarian ekosistem laut. Sebagai negara kepulauan dengan potensi kelautan yang besar, Indonesia menempatkan ekonomi biru sebagai salah satu strategi utama dalam transformasi ekonomi nasional yang menyeimbangkan ekonomi, inklusivitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 14 (*Life Below Water*).

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan ekonomi biru. Kinerja pembangunan ekonomi biru menunjukkan perbaikan yang tecermin dari peningkatan IBEI sebesar 50,36 (2024) menjadi 52,20 (2025). Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pada kinerja pembangunan ekonomi biru secara agregat, khususnya dalam pengintegrasian aspek ekonomi, lingkungan, sosial, tata kelola, dan faktor pendukung dalam pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Grafik 4.32
Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia Tahun 2024-2025



Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2025

Capaian IBEI Pilar Ekonomi tercatat sebesar 25,47 (2024) dan 25,40 (2025). Hal ini menunjukkan kinerja pilar ekonomi yang relatif stabil, namun masih memerlukan peningkatan investasi untuk memacu produktivitas nilai tambah dan pendapatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan.

Produksi perikanan meningkat dari 23,56 juta ton (2024) menjadi 26,26 juta ton (2025) yang didukung oleh kenaikan produksi rumput laut dari 9,85 juta ton menjadi 11,65 juta ton, serta peningkatan perikanan tangkap dari 7,81 juta ton menjadi 7,85 juta ton.

Pada triwulan II 2026, secara kumulatif produksi perikanan telah mencapai 13,08 juta ton, terdiri atas 3,52 juta ton perikanan tangkap, 3,63 juta ton budidaya ikan, dan 5,92 juta ton rumput laut.

Pada 2025, pertumbuhan sektor Perikanan tercatat sebesar 2,23 persen, dan 2,78 persen pada triwulan I 2026. Hal ini didukung oleh produksi olahan perikanan yang meningkat dari 3,62 juta ton (2024) menjadi 3,78 juta ton (2025). Selain itu, dari sektor angkutan laut juga tumbuh dari 2,42 persen pada 2024 menjadi 6,87 persen pada 2025.

Tabel 4.4
Capaian Kinerja Ekonomi Biru Aspek Pertumbuhan dan Nilai Tambah Tahun 2024-2026

Indikator	Satuan	2024	2025	2026*
IBEI Pilar Ekonomi	Indeks	25,47	25,40**	
Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK)	%	0,68	4,95	2,78
Produksi Perikanan (Total)	juta ton	23,56	26,26	13,08
a. Produksi Perikanan Tangkap	juta ton	7,81	7,85	3,52
b. Produksi Budidaya (ikan)	juta ton	5,90	6,75	3,63
c. Produksi Budidaya (Rumput Laut)	juta ton	9,85	11,65	5,92
Volume Produksi Olahan Perikanan	Juta ton	3,62	3,78	3,82
Nilai Ekspor Kelautan-Perikanan	US\$ miliar	5,95	6,27	2,99
Volume Produksi Garam	juta ton	2,04	1,04	-
Produktivitas Lahan Garam Rakyat	ton/ha	61,40	52,13	85,00
Pertumbuhan PDB Angkutan Laut	%	2,42	6,87	-

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas; Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterangan:

*) Data semester I 2026

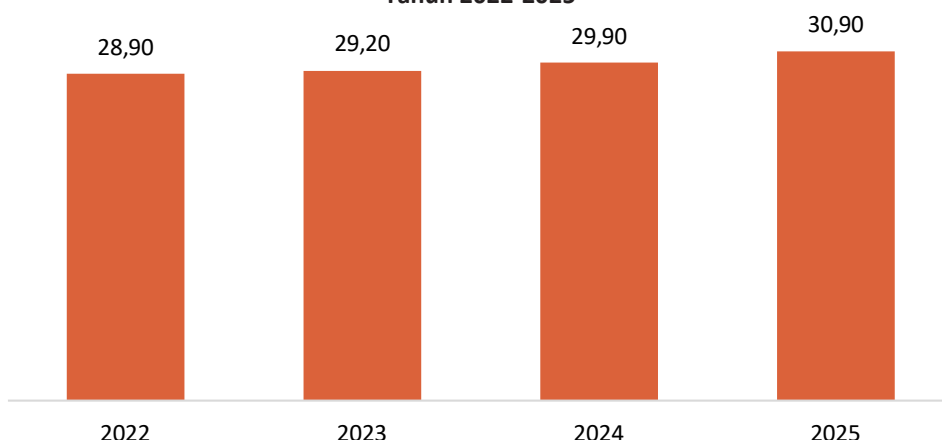
**) Data Sementara

Secara umum, capaian kinerja ekonomi biru menunjukkan perkembangan yang beragam. Produksi perikanan total meningkat dari tahun 2024 ke 2025, terutama didukung oleh

peningkatan produksi budidaya rumput laut, begitu pula dengan volume produksi olahan perikanan juga meningkat secara bertahap.



Grafik 4.33
Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta Ha)
Tahun 2022-2025



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2026

Capaian IBEI Pilar Lingkungan meningkat dari 25,47 pada 2024 menjadi 26,25 pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan ekonomi biru, terutama terkait efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, tata ruang laut, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta konsolidasi data lingkungan kelautan. Capaian ini didukung oleh perluasan kawasan

konservasi perairan yang meningkat dari 29,9 juta ha (2024) menjadi 30,9 juta ha (2025). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati laut, mendukung pemulihan stok ikan, memperkuat ketahanan ekosistem pesisir terhadap perubahan iklim, serta mendukung pencapaian target konservasi laut jangka panjang.

Tabel 4.5
Capaian Kinerja Ekonomi Biru Aspek Lingkungan
Tahun 2024-2026

Indikator	Satuan	2024	2025
IBEI Pilar Lingkungan	Indeks	25,47	26,25***
Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	juta ha	29,9	30,97
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	persen	91,17*	17,01**
Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif di Kelola (Kumulatif)	juta ha	17,8	18,5

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas; Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterangan:

*) kumulatif 2020-2024

**) kumulatif 2025-2029

***) Data Sementara

Capaian IBEI Pilar Sosial meningkat dari 70,52 pada 2024 menjadi 71,36 pada 2025. Capaian ini menunjukkan manfaat pembangunan kelautan dan perikanan dapat dirasakan oleh nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan (KP), dan masyarakat pesisir. Perbaikan aspek sosial juga terlihat dari meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) , dari 75,35 persen pada 2024 menjadi 80,13 persen pada 2025.

Selain itu, tingkat kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, ditunjukkan melalui peningkatan NTN dari 101,76 (2024) menjadi 103,86 (2025), dan mencapai 108,05 pada semester I 2026. Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) meningkat dari 102,07 (2024) menjadi 103,03 (2025), dan mencapai 106,39 pada semester I 2026. Kenaikan NTN dan NTPi menunjukkan bahwa daya beli nelayan dan pembudidaya ikan relatif membaik.

Tabel 4.6
Capaian Kinerja Ekonomi Biru Aspek Sosial dan Inklusivitas
Tahun 2024-2026

Indikator	Satuan	2024	2025	2026*
IBEI Pilar Sosial	Indeks	70,52	71,36***	-
Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di DUDI	%	75,35	80,13	38,75**
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	101,76	103,86	108,05
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks	102,07	103,03	106,39

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas; Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterangan:

*) Data Semester I 2026

**) Data Triwulan I 2026

***) Data Sementara

Dengan demikian, capaian pembangunan ekonomi biru menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa aspek utama, yaitu peningkatan IBEI secara agregat, penguatan produksi perikanan, peningkatan produksi olahan, perluasan kawasan konservasi, peningkatan serapan lulusan KP di DUDI, serta perbaikan NTN dan NTPi.

4.9.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan ekonomi biru masih menghadapi beberapa tantangan penting. Dari aspek ekonomi, peningkatan produksi kelautan dan perikanan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan nilai tambah, hilirisasi, efisiensi rantai pasok, investasi, dan daya saing produk.

Pada aspek sosial, manfaat ekonomi biru belum

sepenuhnya merata, terutama karena masih terbatasnya akses terhadap pembiayaan, teknologi, pelatihan, perlindungan usaha, dan pasar yang lebih luas.

Sementara itu, pada aspek lingkungan, tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut akibat perubahan iklim, pencemaran, degradasi habitat, serta pemanfaatan ruang dan sumber daya laut yang belum sepenuhnya berkelanjutan masih perlu dikendalikan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi biru tidak hanya perlu diarahkan pada peningkatan produksi dan nilai ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, perlindungan ekosistem, serta tata kelola data dan ruang laut yang lebih terintegrasi.



Dalam menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus memperkuat implementasi ekonomi biru secara terpadu. Dari aspek ekonomi, pemerintah mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan kelautan dan perikanan, penguatan sentra produksi dan industri pengolahan di wilayah potensial, modernisasi pelabuhan perikanan, pengembangan sistem rantai dingin, peningkatan konektivitas logistik, serta modernisasi pergaraman nasional untuk memperkuat nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bahan baku industri.

Dari aspek sosial, penguatan ekonomi biru diarahkan untuk memperluas manfaat bagi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelaku usaha kecil, dan masyarakat pesisir melalui pendidikan vokasi, perluasan akses pembiayaan, kemitraan usaha, perlindungan pendapatan, serta perluasan akses pasar.

Dari aspek lingkungan, upaya diarahkan pada peningkatan efektivitas kawasan konservasi perairan, rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian pencemaran dan sampah laut, serta penguatan penataan ruang laut sebagai fondasi pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan berketahanan iklim.

4.10 Kerja Sama Internasional

4.10.1 Capaian Utama Pembangunan

Di tengah dinamika ekonomi global yang dihadapi dengan ketidakpastian, Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi ekonomi sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pasar, memperkuat daya saing nasional, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral,

pemerintah mendorong terciptanya peluang ekonomi baru, memperluas kemitraan strategis, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Selama tahun 2025 hingga Juli 2026, Indonesia telah memiliki 25 perjanjian dagang yang telah berlaku (*implemented*), baik dalam kerangka ASEAN maupun bilateral. Perjanjian tersebut meliputi AFTA, ACFTA, AKFTA, AJCEP, AIFTA, AANZFTA, AHKFTA, RCEP, IJEPA, IA-CEPA, IK-CEPA, IUAE-CEPA, IC-CEPA, IP-PTA, IM-PTA, II-PTA, serta sejumlah perjanjian yang baru berlaku seperti IP-CEPA (Peru), ICA-CEPA (Kanada), IEU-CEPA (Uni Eropa), IT-PTA (Tunisia), dan I-EAEU FTA (Eurasia). Capaian ini memperluas akses pasar Indonesia ke berbagai kawasan strategis dan meningkatkan peluang perdagangan serta investasi.

Indonesia juga berhasil mengimplementasikan lima perjanjian dagang, yaitu IP-CEPA, ICA-CEPA, IEU-CEPA, IT-PTA, dan I-EAEU FTA. Implementasi kelima perjanjian tersebut menjadi langkah penting dalam diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke Amerika Selatan, Amerika Utara, Uni Eropa, Afrika Utara, dan kawasan Eurasia. Saat ini terdapat dua perjanjian dagang yang masih berada dalam tahap ratifikasi, yaitu Protokol Perubahan IJEPA dan Indonesia–GCC FTA. Setelah seluruh proses hukum domestik di masing-masing negara selesai, kedua perjanjian tersebut akan dapat diberlakukan secara penuh.

Pemerintah juga terus memperluas jaringan kerja sama ekonomi melalui 13 perundingan dagang yang sedang berlangsung. Perundingan tersebut antara lain mencakup Bangladesh, Sri Lanka, Türkiye, GCC, SACU, ASEAN–Canada, ASEAN–China 3.0, ASEAN–India Review, ASEAN–South Korea Upgrade, EFTA Upgrade, DEFA, CPTPP, ASEAN–New Zealand–Australia FTA (AANZFTA) dan beberapa inisiatif kerja sama

strategis lainnya. Penyelesaian perundingan ini diharapkan semakin meningkatkan akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Selain itu, terdapat dua perundingan dagang yang masih menunggu

penjadwalan putaran negosiasi berikutnya. Pemerintah terus berkoordinasi dengan negara mitra agar proses perundingan dapat segera dilanjutkan dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Gambar 4.2
Lingkup Kerja Sama Ekonomi Internasional

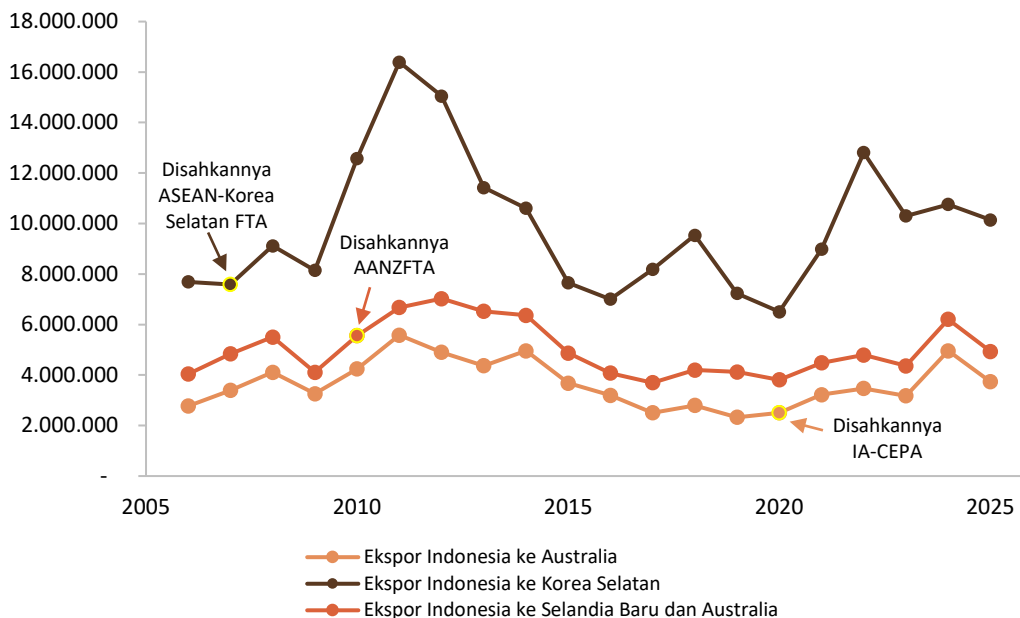


Sumber: Kementerian Perdagangan, 2026

Pelaksanaan FTA yang telah diimplementasikan menunjukkan kontribusi positif dalam penguatan hubungan dagang Indonesia dengan negara mitra. Tren ekspor ke Korea Selatan,

Australia, dan Selandia Baru tetap terjaga. Hal ini mencerminkan meningkatnya peran kerja sama perdagangan dalam mendukung daya saing ekspor Indonesia.

Grafik 4.34
Tren Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA (dalam ribu US\$)
Tahun 2006 – 2025



Sumber: trademap.org, 2025 (diolah)



Melengkapi langkah strategis perluasan akses pasar, Indonesia juga melakukan penyelesaian negosiasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026. Kesepakatan ini menggenapkan upaya integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok global dengan menjadi landasan kemitraan perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan saling menguntungkan. Terjalannya ART tidak hanya mendongkrak kepercayaan dunia usaha, tetapi juga membuka ruang esensial bagi ekspansi ekspor produk unggulan nasional ke salah satu pasar terbesar di dunia.

Pada tingkat global, Indonesia mempertegas posisinya dalam memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara berkembang dengan mengemban amanah sebagai tuan rumah sekaligus Keketuaan D-8 (Developing Eight) pada 2026. Walaupun terdapat penundaan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 karena eskalasi konflik yang meningkat di Timur Tengah, hal ini tidak mengubah inisiatif Indonesia untuk memajukan agenda kolaborasi

ekonomi yang konkret sekaligus membuka peluang bagi perluasan akses pasar intra-D-8, percepatan hilirisasi industri, penguatan rantai pasok regional, serta integrasi ekonomi melalui kerja sama di sektor industri, perdagangan, dan ketahanan pangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi kolektif yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat posisi dalam tata kelola ekonomi global melalui kemajuan proses aksesi ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Setelah selesai menyusun dan menyampaikan Initial Memorandum ke Sekretariat OECD pada Juni 2025, saat ini Indonesia telah memasuki tahap penelaahan dokumen kebijakan dengan berbagai komite OECD untuk mendorong harmonisasi kebijakan nasional dengan standar internasional. Proses ini menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi struktural, meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat iklim investasi, serta mendorong daya saing nasional.

Gambar 4.3
Manfaat Keanggotaan OECD Bagi Indonesia



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2026

Diplomasi Indonesia yang bebas aktif diperkuat melalui kunjungan Presiden Republik Indonesia ke beberapa negara seperti Peru, Belgia, Kanada, Australia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Prancis, dan Singapura telah meningkatkan kepercayaan mitra strategis terhadap Indonesia. Diplomasi yang dilaksanakan tersebut menghasilkan berbagai komitmen kerja sama perdagangan, investasi, dan pengembangan industri yang mendukung transformasi ekonomi nasional serta semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terbuka, inklusif, dan dipercaya dalam tatanan ekonomi global.

4.10.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan penguatan kerja sama ekonomi internasional berasal dari dinamika geopolitik dan geoeкономи yang semakin kompleks, meningkatnya kebijakan proteksionisme, serta berkembangnya standar perdagangan baru. Selain itu, dunia usaha juga masih menghadapi kendala literasi terkait pemanfaatan dokumen kesepakatan internasional oleh pelaku usaha, standar produk, dan hambatan non-tarif sehingga belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan akses pasar baru dan tarif preferensial.

Menjawab tantangan tersebut, kemitraan ekonomi harus diseimbangkan antara pasar tradisional (seperti AS dan Tiongkok) dengan pasar non tradisional (Amerika Latin, Afrika, dan mitra D-8) agar kepentingan nasional tidak terdampak oleh pergeseran geopolitik. Di sisi lain, diperlukan upaya untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan dan investasi, serta pendampingan teknis bagi pelaku usaha

mengenai standar ekspor baru (terutama terkait isu lingkungan dan keberlanjutan pada pasar negara maju). Upaya tersebut didukung melalui penguatan koordinasi lintas K/L serta optimalisasi implementasi berbagai perjanjian perdagangan, sehingga manfaat kerja sama internasional dapat dirasakan secara lebih luas oleh pelaku usaha dan masyarakat.

4.11 Badan Usaha Milik Negara

4.11.1 Capaian Utama Pembangunan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan strategis sebagai penggerak perekonomian nasional dan kemandirian bangsa. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, pemerintah terus melaksanakan reformasi untuk mewujudkan BUMN yang sehat, profesional, kompetitif, dan berdaya saing. Reformasi BUMN yang telah dilakukan salah satunya melalui penataan kelembagaan pengelola BUMN dengan pembagian peran yang lebih jelas antara fungsi regulator dan pengelola operasional BUMN.

Reformasi BUMN menghasilkan perbaikan kinerja keuangan BUMN. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aset BUMN, laba BUMN dan *Return on Asset* (ROA) BUMN pada tahun 2025. Hingga triwulan I 2026, aset BUMN tercatat sebesar Rp13.132,20 triliun. Kinerja BUMN semakin efektif dan optimal dalam memanfaatkan aset, ditunjukkan oleh ROA BUMN yang meningkat dari 0,50 persen (triwulan I 2025) menjadi 0,56 persen (triwulan I 2026). Sejalan dengan hal tersebut, laba BUMN juga meningkat dari Rp62,16 triliun (triwulan I 2025) menjadi Rp73,19 triliun (triwulan I 2026) atau tumbuh 17,68 persen (yoy).



Reformasi BUMN tidak hanya mendorong peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi pada berbagai prioritas. Peran tersebut diwujudkan melalui investasi yang mencapai Rp40,30 triliun pada triwulan I 2026 untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan dan energi, serta 35 Proyek Strategis Nasional.

Di sektor pembiayaan, Bank Himbara telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp137,4 triliun kepada lebih dari 2,23 juta debitur. Sementara pembiayaan rumah bersubsidi oleh perbankan BUMN hingga triwulan I 2026 telah mencapai lebih dari 5,8 juta unit rumah. Dalam transformasi digital, BUMN sektor telekomunikasi melayani 74,1 juta pelanggan *mobile broadband* dan menyediakan 1,24 juta sambungan internet berkecepatan tinggi, sedangkan layanan perbankan digital melalui 1,18 juta agen laku pandai di lebih dari 67 ribu desa telah memproses 253 juta transaksi senilai Rp420 triliun.

Badan Usaha Milik Negara juga mengelola lebih dari 100 pelabuhan dan menjadikannya sebagai operator pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Sementara itu, BUMN juga memperluas akses ekspor ke 60 negara. Selain itu, 23 BUMN memperoleh pengakuan Fortune Southeast Asia 500 dan 4 BUMN dalam Forbes Global 2000. Hingga Juni 2026 BUMN juga telah membangun 1.151,6 km Jalan Tol Trans Sumatera.

Pada aspek sosial dan lingkungan, BUMN juga memperbesar kontribusinya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mencapai Rp4,1 triliun pada tahun 2025. Program TJSL ini terdiri atas pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola, serta diiringi penerapan pendekatan *Creating Shared Value* (CSV) melalui 89 program di tahun 2025 dan 78 program hingga triwulan II 2026.

4.11.2 Tantangan dan Upaya

BUMN masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional, antara lain: (1) portofolio usaha yang belum sepenuhnya selaras dengan kompetensi inti (*core business*); dan (2) kualitas investasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, upaya dilakukan antara lain: (1) memperkuat transformasi BUMN melalui Program Penataan BUMN dan anak usaha BUMN (*streamlining*) dengan menyederhanakan struktur dan memfokuskan portofolio pada *core business*; (2) meningkatkan kualitas investasi BUMN melalui penguatan tata kelola investasi, penerapan prinsip *value creation*, disiplin alokasi modal (*capital allocation*), dan prioritas investasi pada sektor strategis yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang; dan (3) memperkuat tata kelola BUMN melalui penerapan prinsip *good corporate governance* dan penguatan manajemen risiko.

4.12 Pertahanan dan Keamanan

4.12.1 Capaian Utama Pembangunan

Pertahanan dan keamanan merupakan fondasi untuk mendorong kemandirian bangsa. Stabilitas keamanan nasional menjadi prasyarat utama untuk kesinambungan pembangunan nasional, salah satunya ditunjukkan melalui capaian *Asia Power Index*. Capaian pembangunan bidang tersebut didukung oleh

serangkaian kebijakan antara lain pembangunan postur pertahanan serta pengembangan industri pertahanan; penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung; penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri serta keamanan siber, sandi, dan sinyal; profesionalisme pelayanan kepolisian mendukung keamanan masyarakat; penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; serta Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Tabel 4.7
Capaian Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan Tahun 2025

Indikator	Satuan	Target	Capaian
<i>Asia Power Index (Military Capability)</i>	nilai	16	15,9 ¹⁾
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	67,50	85,47 ^{1*)}
Global Cybersecurity Index (GCI)	nilai	100	100 ^{2*)}
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)	nilai	60	60 ³⁾

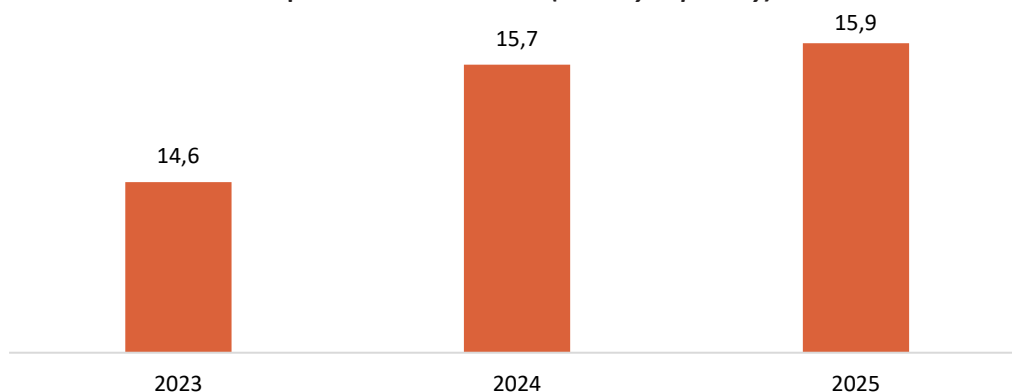
Sumber: 1) BPS RI; 2) *International Telecommunication Union* (ITU); 3) Bakamla RI.

Keterangan:*) Capaian 2024

Capaian pembangunan bidang pertahanan yang diukur melalui *Asia Power Index (Military Capability)* menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Peningkatan tersebut merupakan

hasil dari pembangunan bidang pertahanan yang tidak hanya berfokus pada modernisasi alutsista tetapi juga peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Grafik 4.35
Capaian *Asia Power Index (Military Capability)*



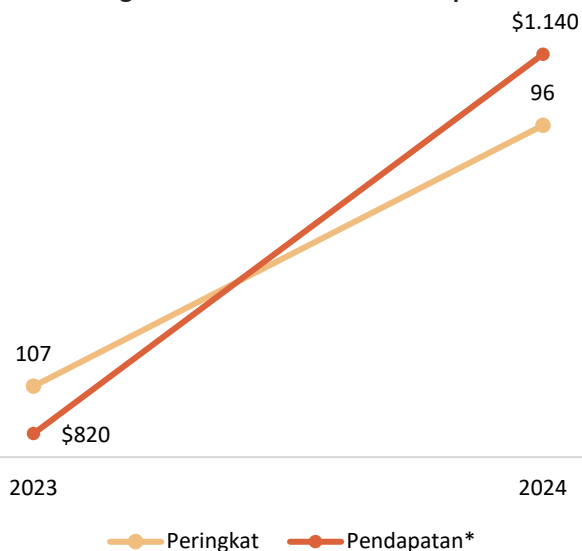
Sumber: *Lowy Institute*, 2025 (diolah)



Peningkatan kemampuan pertahanan sejalan dengan peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI sebagai upaya meningkatkan kemandirian di bidang pertahanan.

Capaian pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri tersebut digambarkan dengan holding BUMN industri pertahanan, yang masuk dalam Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Top 100.

Grafik 4.36
Peringkat Indonesia dalam SIPRI Top 100



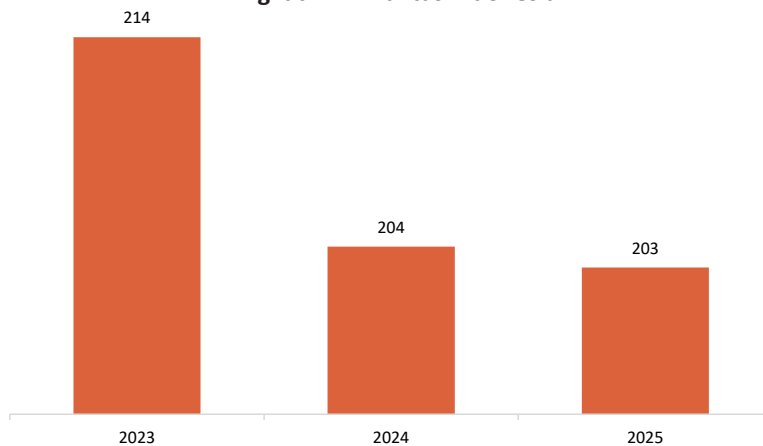
Sumber: SIPRI, 2025 (diolah)

Keterangan: *) Dalam Juta US\$

Pada bidang keamanan, pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan rasa aman bagi segenap masyarakat Indonesia. Keseriusan dalam melaksanakan pembangunan di bidang keamanan ditunjukkan oleh Indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian

di Area Tempat Tinggalnya. Pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum (APH) terus berupaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta mengintensifkan digitalisasi layanan guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan.

Grafik 4.37
Tingkat Kriminalitas Indonesia



Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, 2025 (diolah)

Kinerja bidang keamanan laut ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Keamanan Laut Nasional pada 2025 menjadi sebesar 60 meningkat dari sebelumnya 59 pada 2024. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan keamanan dan keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah bersama dengan masyarakat pengguna laut.

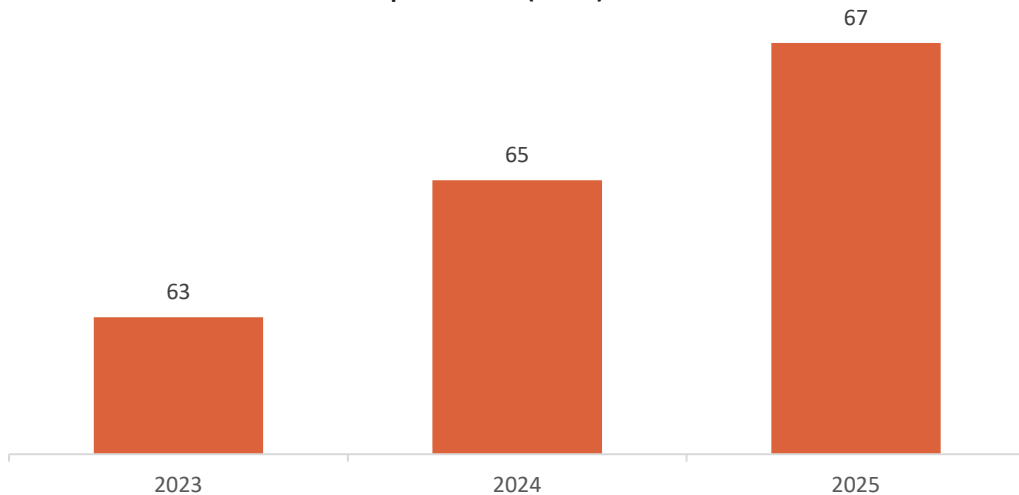
Komitmen pemerintah dalam mengelola keamanan siber nasional ditunjukkan oleh tingginya kemampuan SDM sandi siber dengan nilai rata-rata *Gap Competency Index* yang hanya sebesar 6,22 persen pada 2025. Selain itu, pemerintah juga selalu mengedepankan upaya pencegahan, deteksi, penanggulangan, dan respons pelanggaran keamanan yang terjadi di ruang siber. Sehingga, Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara percontohan oleh *International Telecommunication Union (ITU)*. Selain itu, penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Siber dan Persandian, serta perluasan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral di bidang keamanan siber jakan memperkuat keamanan siber nasional.

Hal ini juga terlihat pada capaian Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber yang melampaui target 2025 yang mengindikasikan kemampuan nasional dalam mencegah (mengidentifikasi dan melindungi), mendeteksi, merespons, menangani, serta memulihkan sistem dari ancaman, serangan, dan/atau insiden siber.

Peningkatan capaian indeks P4GN mengindikasikan adanya perbaikan kinerja nasional dalam implementasi penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan yang berkelanjutan, yaitu memutus mata rantai kejahatan sekaligus menghadirkan pilihan penghidupan yang layak dengan pemberdayaan masyarakat. Strategi pencegahan dan pemberantasan juga akan ditingkatkan dengan mengedepankan aspek *demand reduction* seperti optimalisasi program ANANDA BERSINAR, pengintegrasian kurikulum anti narkoba, dan pemberdayaan wilayah rawan, serta aspek *supply reduction* seperti pendekatan intelijen, operasi lintas negara, kerja sama/kolaborasi antar stakeholder dan strategi *follow the money*.



Grafik 4.38
Indeks Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan
Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2023 - 2025



Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2025 (diolah)

4.12.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain: (1) ketegangan kawasan yang berlarut dan tidak dapat diprediksi; (2) kompleksitas perang termasuk penggunaan teknologi baru; (3) meningkatnya faktor risiko terjadinya kejahatan; (4) meningkatnya jumlah *New Psychoactive Substances* (NPS) dan metode penggunaan narkoba yang semakin beragam; (5) eksploitasi ruang laut yang tidak terkendali memunculkan ancaman bagi keamanan wilayah laut Indonesia; dan (6) ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi digital.

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, beberapa upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia meliputi (1) penguatan kemampuan pertahanan Indonesia melalui optimalisasi postur

pertahanan; (2) penguatan industri pertahanan dalam negeri; (3) kolaborasi kegiatan APH bersama masyarakat termasuk patroli yang disesuaikan dengan titik kerawanan; (4) digitalisasi Pelayanan Kepolisian untuk mempermudah akses masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta penegakan hukum (Gakkum); (5) penguatan pencegahan, peningkatan pengawasan, serta perluasan layanan rehabilitasi dan integrasi sosial; (6) penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan melalui penguatan Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, Penegakan Hukum di perairan dan pelibatan aktif masyarakat pesisir dalam mengamankan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan (7) penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi, pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, serta penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.

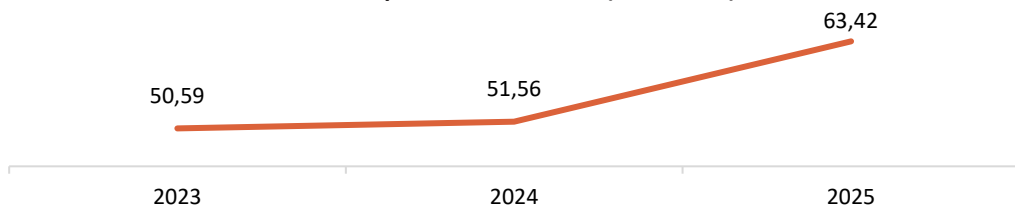
4.13 Ekonomi Syariah

4.13.1 Capaian Utama Pembangunan

Kinerja ekonomi syariah Indonesia secara konsisten berada pada peringkat lima besar global menurut *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER) 2025/2026. Pencapaian ini menunjukkan daya saing yang kuat, khususnya di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ekonomi syariah mengalami perkembangan penting di tengah semakin ketatnya persaingan global. Pada 2025, nilai ekspor produk halal nasional meningkat dari US\$51,56 miliar menjadi US\$63,42 miliar, atau tumbuh 23,00 persen (yoy). Capaian ini didorong oleh komitmen pemerintah dalam perluasan ekonomi halal melalui penguatan industri dan UMKM, peningkatan kerja sama internasional dan promosi global, serta hilirisasi produk dan integrasi rantai pasok halal antarnegara.

Grafik 4.39
Nilai Ekspor Halal Indonesia (US\$ Miliar)



Sumber: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2025 (diolah)

Penguatan sektor riil difokuskan pada pengembangan rantai nilai halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah strategis yang tengah berjalan adalah pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di 4 lokasi, yaitu: Bintang Halal Inti Hub, Cikande Modern Industrial Estate, Jababeka Halal Industrial Center, dan Halal Industrial Park Sidoarjo. Sebagai katalisator industri halal nasional, KIH mengintegrasikan infrastruktur dan sistem jaminan halal dalam satu kawasan untuk meningkatkan daya saing, kualitas, dan kapasitas produksi lokal. Selain itu, pemerintah bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk memperluas promosi produk halal di pasar domestik maupun global, salah satunya melalui Indonesia Halal Industry Award (IHYA).

Ekosistem halal juga terus diakselerasi melalui penyediaan kuota sertifikasi halal gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berskema *self-*

declare. Program ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui sinergi pendanaan dan pendampingan dengan berbagai stakeholder terkait. Sementara itu, diplomasi halal di kancah internasional juga terus diperkuat melalui perluasan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 114 lembaga halal luar negeri hingga Juli 2026.

Saat ini, pemerintah melalui BPJPH tengah mengakselerasi target Wajib Halal Oktober yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman UMK bersertifikat halal pada 18 Oktober 2026. Hal ini selaras dengan amanat UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan PP No. 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Hingga Mei 2026, tercatat 13,67 juta produk di Indonesia telah tersertifikasi halal dan akan terus bertambah setiap hari. Komitmen ini dilakukan tidak hanya memberi kepastian bagi konsumen muslim,



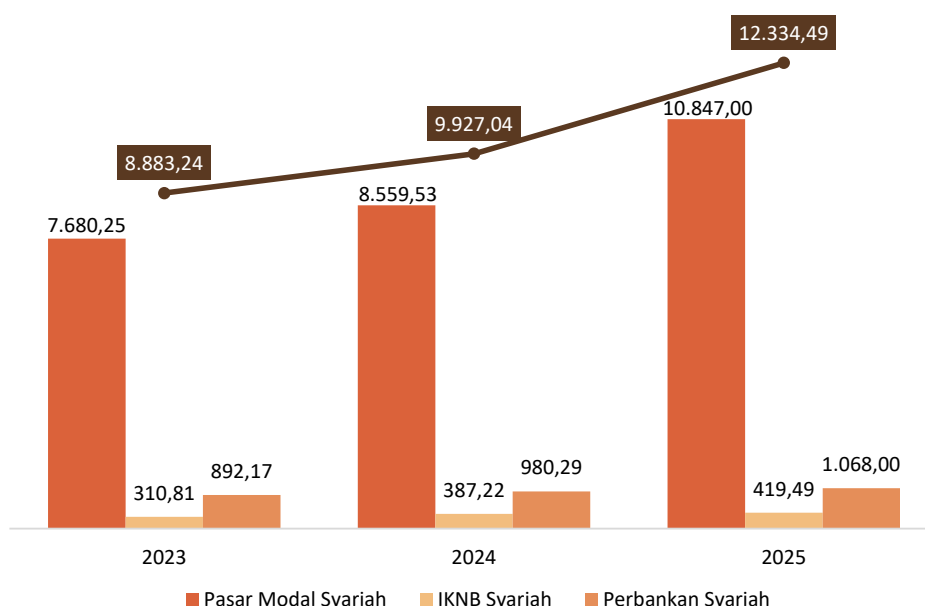
melainkan juga meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, sebagai penggerak sektor riil ekonomi syariah, keuangan syariah juga tumbuh. Pada 2025, total aset keuangan syariah nasional yang berasal dari perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah, meningkat dari Rp9.927,04 triliun (2024) menjadi Rp12.334,49 triliun (2025) atau tumbuh 24,30 persen (yoy). Capaian ini didorong oleh beberapa hal antara lain akselerasi *spin-off* dan konsolidasi bank umum syariah, perluasan pembiayaan pada rantai nilai halal dan UMKM,

serta pembangunan layanan bank bullion syariah.

Kontribusi keuangan syariah terhadap sektor riil juga diperkuat melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang berkontribusi dalam membiayai program dan Proyek Strategis Nasional. Ke depan, akselerasi khususnya pada perbankan syariah juga diarahkan pada optimalisasi fungsi intermediasi salah satunya melalui *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) dan penguatan peran keuangan syariah dalam mendukung pembangunan daerah.

Grafik 4.40
Perkembangan Aset Keuangan Syariah Nasional (Rp Triliun)

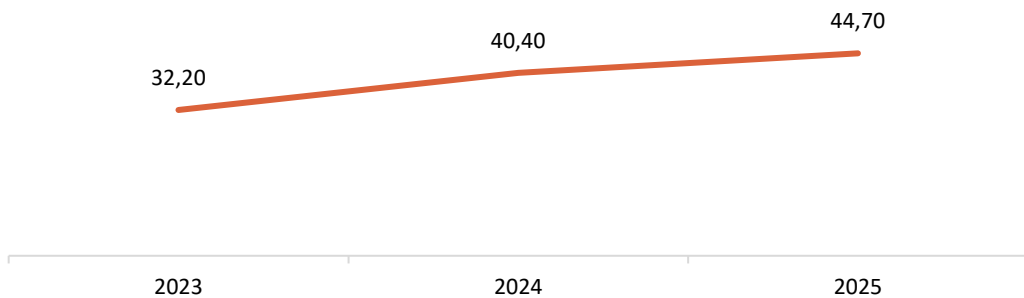


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2026

Dana sosial syariah juga menunjukkan kinerja positif. Pada 2025, penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) meningkat dari Rp40,40 triliun menjadi Rp44,70 triliun atau setara dengan 0,188 persen terhadap PDB. Capaian ini didukung oleh penguatan tata kelola,

digitalisasi, dan koordinasi pusat-daerah. Selain itu, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memperkuat ketepatan sasaran program zakat dan pengentasan kemiskinan, menjadikannya instrumen perlindungan sosial sekaligus pengungkit kemandirian ekonomi masyarakat.

Grafik 4.41
Perkembangan Nilai ZIS-DSKL (Rp Triliun)



Sumber: Baznas dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2026 (diolah)

4.13.2 Tantangan dan Upaya

Akselerasi pengembangan ekonomi syariah saat ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain: (1) daya saing industri domestik dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi pasar halal global; (2) perluasan potensi ekspor produk halal ke negara-negara anggota OKI; (3) terbatasnya produk UMKM yang memiliki tersertifikasi halal; (4) kapasitas dan integrasi sektor keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan industri dan UMKM halal; (5) tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah; (6) sinergi tata kelola kelembagaan ekonomi syariah; (7) pemanfaatan hasil riset dan inovasi produk halal untuk substitusi impor; dan (8) integrasi inovasi jasa keuangan syariah.

Dalam menjawab dinamika tantangan tersebut, formulasi kebijakan ke depan diarahkan pada sejumlah langkah strategis yang berkesinambungan, antara lain: (1) mengoptimalkan KIH dan memperluas promosi sektor strategis (makanan, minuman,

fesyen muslim, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata) untuk memacu daya saing; (2) mengoptimalkan peran Indonesia di D-8 dan Kampung Haji sebagai ekosistem Rantai Pasok Haji dan Umroh untuk meningkatkan ekspor; (3) mempercepat program sertifikasi halal secara menyeluruh, termasuk standardisasi hulu seperti Rumah Potong Hewan (RPH) dan Juru Sembelih Halal (Juleha); (4) diversifikasi produk halal dan digitalisasi UMKM; (5) memperluas akses layanan pembiayaan dan memperkuat integrasi sektor keuangan syariah dengan ekosistem industri halal nasional; (6) menggencarkan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah secara masif dan berkelanjutan; (7) menyempurnakan tata kelola melalui penguatan koordinasi kelembagaan; dan (8) memperkuat dan menyempurnakan integrasi lembaga riset dan inovasi dengan inkubator bisnis dan akselerator bisnis terkait inovasi produk halal untuk substitusi impor dan inovasi jasa keuangan syariah.



Bendungan Pamukkulu, Sulawesi Selatan
Sumber: BP BUMN, 2026



Industri Kelapa di Halmahera Utara, Maluku Utara
Sumber: Kementerian Transmigrasi, 2026

BAB 5

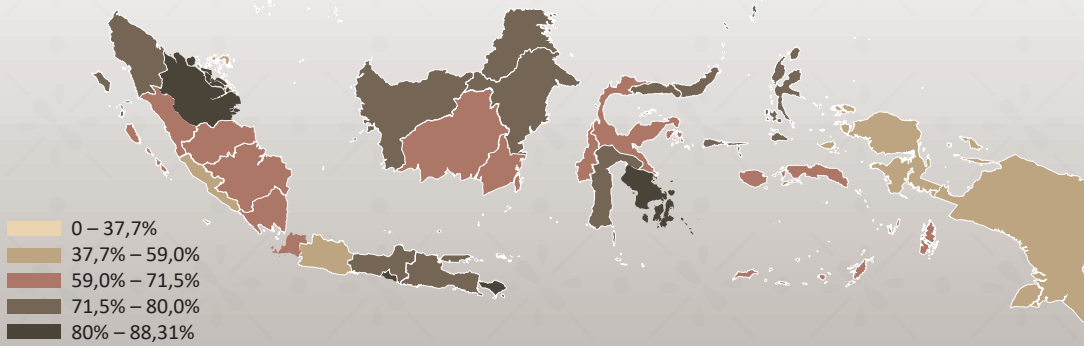
ASTA CITA 3

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.



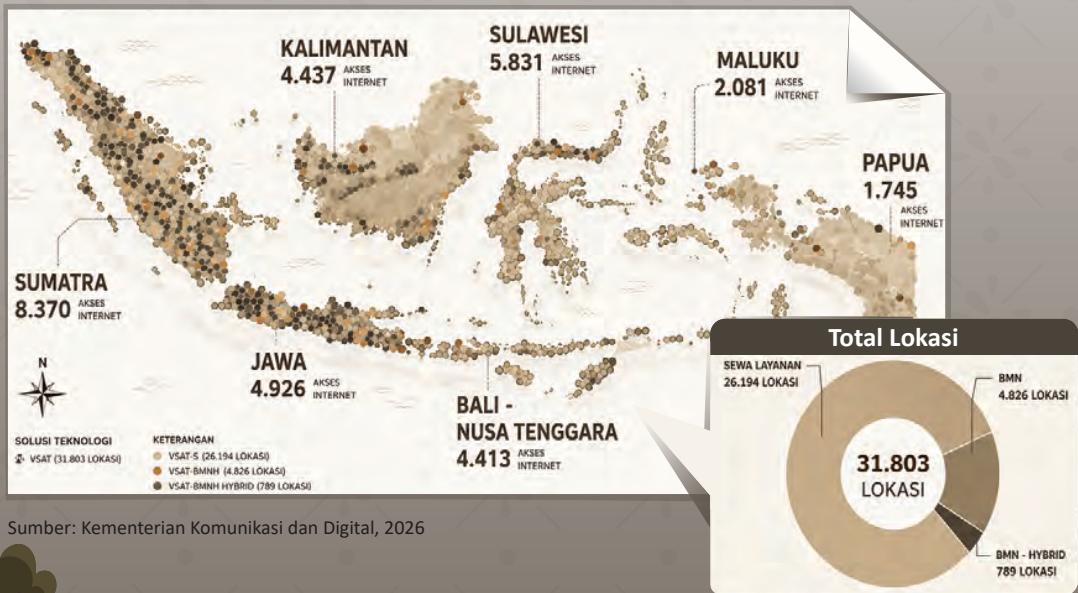
IPAL Kota Jambi, Jambi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025



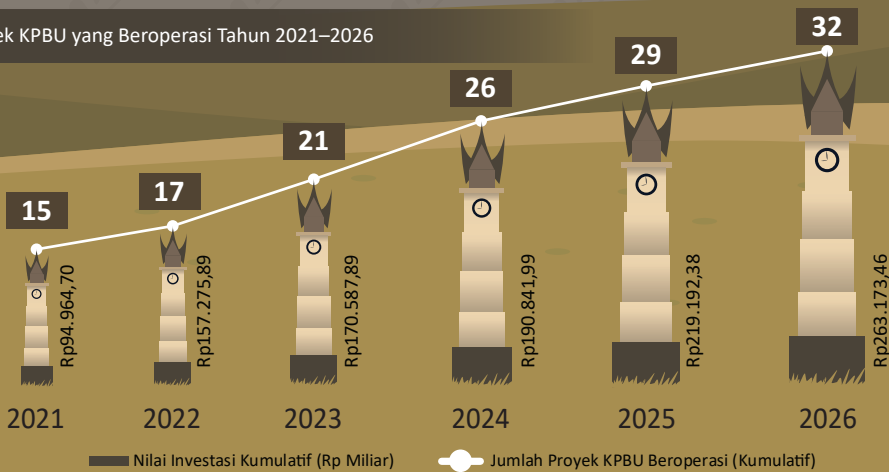
Sumber: Susenas KOR BPS 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)

Peta Sebaran Lokasi Akses Internet (Bakti AKSI) Semester I 2026



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2026

Perkembangan Proyek KPBU yang Beroperasi Tahun 2021–2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Industri Agromaritim di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Pengembangan infrastruktur terus dilanjutkan untuk memperkuat konektivitas, akses terhadap layanan dasar, ketahanan energi, serta daya dukung kawasan permukiman dan sentra produksi melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, energi dan ketenagalistrikan, serta perumahan dan kawasan permukiman. Penguatan infrastruktur tersebut menjadi fondasi dalam meningkatkan produktivitas dan pemerataan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, transformasi ekonomi terus didorong dengan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pemberdayaan koperasi dan UMKM, optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna memperluas lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan memperkuat pengembangan industri agromaritim melalui peran aktif koperasi.

5.1 Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

5.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Berdasarkan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dilakukan oleh badan usaha. Guna memenuhi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation*) bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) (non-komersial), pemerintah membangun infrastruktur *backbone* Palapa Ring di 57 kabupaten/kota, *backhaul* satelit SATRIA-1, dan *last-mile* BTS 4G.

Pembangunan infrastruktur *backbone*, *backhaul*, dan *last-mile* ini melengkapi infrastruktur milik operator telekomunikasi swasta, di mana pemerintah berperan sebagai regulator. Sebagian besar jaringan *backbone* dan *backhaul* berbasis fiber optik dimanfaatkan untuk *last-mile* 4G yang jangkauannya telah mencapai 99,21 persen wilayah permukiman dan 98,94

persen dari populasi. Pada 2025, pemerintah melakukan penyesuaian jumlah lokasi layanan *Base Transceiver Station* (BTS) *last-mile* yang dibiayai seiring transformasi wilayah non-komersial menjadi komersial. Hal ini ditandai dengan terminasi layanan pemerintah di daerah yang kini telah terlayani secara mandiri oleh jaringan 4G operator telekomunikasi. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas layanan *mobile broadband* 4G melalui kegiatan operasional dan pemeliharaan (*operations and maintenance*) infrastruktur BTS 4G yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Selanjutnya, layanan 5G di Indonesia pada akhir tahun 2025 telah mencakup 62 kabupaten/kota dengan cakupan sinyal seluas 6.383,38 km² dari luas wilayah permukiman sebesar 51.042,96 km².

Cakupan jaringan fiber optik yang diukur melalui ketersediaan *Optical Distribution Point* (ODP) mencapai 72,96 persen pada tahun 2025, atau telah menjangkau 5.315 dari 7.285 kecamatan di Indonesia. Pada Semester I 2026, cakupan

tersebut meningkat menjadi 73,01 persen atau 5.319 kecamatan yang telah memiliki ODP yang terhubung dengan jaringan fiber optik. Peningkatan ini memperluas konektivitas digital nasional untuk mendukung perluasan layanan *broadband*, peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, dan percepatan transformasi digital di berbagai sektor strategis.

Pada semester I 2026, rata-rata utilisasi Palapa Ring di 57 kabupaten/kota nonkomersial

meningkat sebesar 4 persen dibandingkan dengan semester I 2025. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pemanfaatan jaringan dalam memperluas akses konektivitas bagi layanan publik, pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, serta pengembangan ekonomi digital lokal, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Jaringan ini beroperasi secara andal sepanjang tahun tanpa *downtime*, dengan tingkat *Service Level Agreement* (SLA) mencapai 100 persen.

Tabel 5.1
Capaian Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024–2026

Uraian	Satuan	2024	2025	Semester I	
				2025	2026
Jumlah penyediaan BTS 4G lastmile (akumulatif) di wilayah 3T	desa/kelurahan	6.794	6.747	6.747	6.747
Cakupan backbone darat/fiberisasi (akumulatif)	% kecamatan yang memiliki <i>Optical Distribution Point</i> (ODP)	68,48	72,96	71,20	73,01
Utilisasi <i>backbone</i> Palapa Ring	% utilisasi rata-rata	54,35	54,39	52,96	56,96
Okupansi satelit SATRIA-1	%	66	83	75	85
Cakupan layanan 5G	% luas pemukiman	4,44	12,51	6,33	12,51 ^{*)}

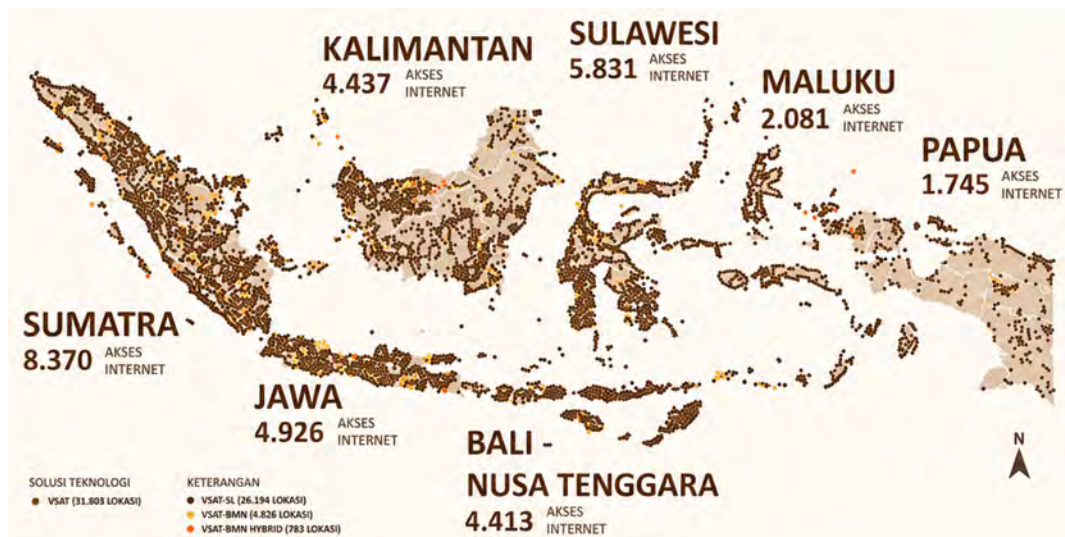
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2026

Keterangan: *) Realisasi Desember 2025

Untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani *backhaul* fiber optik, pemerintah memanfaatkan satelit SATRIA-1 sebagai *backhaul*. Hingga semester I 2026, sebanyak 31.803 lokasi akses internet pemerintah yang ditopang oleh *backhaul* satelit SATRIA-1 telah beroperasi untuk melayani masyarakat. Pada periode yang sama, okupansi kapasitas satelit

SATRIA-1 mencapai 127 Gbps atau 85 persen dari total kapasitas 150 Gbps yang dimiliki satelit SATRIA-1. Pemanfaatan kapasitas ini difokuskan sebagai *backhaul* akses internet bagi berbagai layanan publik, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keandalan konektivitas nasional.

Gambar 5.1
Peta Sebaran Lokasi Akses Internet (Bakti AKSI) Semester I 2026



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2026

5.1.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan infrastruktur TIK masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T; (2) keberagaman prosedur perizinan antardaerah dalam penggelaran infrastruktur telekomunikasi terestrial (fiberisasi) hingga tingkat kecamatan; (3) utilisasi kapasitas jaringan aktif Palapa Ring; dan (4) ekosistem pengembangan jaringan 5G pada aspek infrastruktur, investasi, ekosistem, serta keterbatasan alokasi lebar pita spektrum frekuensi yang ideal dengan harga lisensi yang proporsional bagi kemampuan industri.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain: (1) optimalisasi transportasi udara untuk

pengiriman perangkat di wilayah 3T dan penyediaan sarana dan prasarana yang memudahkan operator telekomunikasi berinvestasi; (2) pendampingan teknis dalam perluasan dan pemanfaatan jaringan dan penguatan kerja sama lintas sektor guna mempercepat penyusunan regulasi terkait penyediaan jaringan serat optik melalui pemanfaatan infrastruktur bersama; (3) penyusunan skema penyewaan kapasitas layanan *dark fiber* Palapa Ring dengan komitmen sewa jangka panjang dalam optimalisasi utilisasi kapasitas Palapa Ring; serta (4) pengembangan layanan 5G melalui penyusunan *roadmap*, penataan ulang spektrum frekuensi, harmonisasi dan penyederhanaan aturan hak perlintasan (*right-of-way*) guna mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

5.2 Infrastruktur Transportasi

5.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional melalui pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, aman, efisien, dan berkelanjutan. Penguatan konektivitas tersebut menjadi fondasi dalam

mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang serta barang, memperkuat efisiensi logistik nasional, mendorong keterhubungan pusat-pusat pertumbuhan, dan mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Langkah tersebut ditandai dengan peningkatan kinerja sektor transportasi.

Tabel 5.2
Capaian Infrastruktur Konektivitas dan Layanan Transportasi Periode 2024–2026

Uraian	2024	2025	Semester I	
			2025	2026
Konektivitas Jalan ¹⁾				
Kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/kota (%) ^{a)}	95/69/55 ^{b)}	93/66/51/74	93/66/51/74	93/66/51/74
Panjang jalan tol yang beroperasi (km) ^{b)} (2020-2024)	933	1.028	1.004	1.040
Konektivitas Berbasis Rel ²⁾				
Jumlah perjalanan kereta api (juta perjalanan)	0,86	1,07	0,53	0,54
Jumlah penumpang angkutan kereta api (juta orang)	501	551,19	262	286,90
Konektivitas Perkotaan ²⁾				
Jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan (juta orang) ^{c)}	685 (2023)	920,07	427,83	476,71
Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan (kumulatif) (kota)	6 (2020-2023)	10	6	14
Konektivitas Darat ²⁾				
Jumlah terminal penumpang yang beroperasi (lokasi)	113 (2023)	113	113	122
Volume angkutan penyeberangan (juta kendaraan)	11,5 (2023)	12,22	6,37	6,85
Konektivitas Laut ²⁾				
Muatan barang angkutan laut nonkomersil (ton)	660.664 (2023)	874.375	104.966	463.006
Pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif angka dasar 2020) (lokasi)	72	92	72	92
Konektivitas Udara ²⁾				
On time performance penerbangan (%)	73,80	74,50	77,76	80,42



Uraian	2024	2025	Semester I	
			2025	2026
Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif)	116 (2020-2024)	116	116	117
Keselamatan Transportasi ²⁾				
Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan (%)	53,68 (2023)	66,30	82,87	84,95
SDM Transportasi ²⁾				
Peningkatan pemenuhan SDM transportasi yang kompeten (%)	85,5 (2023)	99,27	67,17	70,07
Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi (%)	119,68 (2023)	101,89	53,09	60,57
SDM Pencarian dan Pertolongan ³⁾				
Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih (orang)	5.155 (2020-2023)	14.866	13.955	14.966

Sumber: 1) Kementerian Pekerjaan Umum; 2) Kementerian Perhubungan; dan 3) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Semester I 2026

Keterangan: a) Variabel Indikator Kemantapan Jalan Kabupaten dan Kota masih digabung pada Tahun 2024 dan mulai dipisah pada tahun 2025, b) Tambahan Panjang Jalan Tol yang beroperasi kumulatif dari Tahun 2020 - 2024 c) 10 Kota Metropolitan Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Bandung, Semarang, Makassar dan Manado

Penguatan konektivitas jalan dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan sebagai tulang punggung sistem transportasi nasional. Hingga semester I 2026, kondisi kemantapan jalan nasional tetap terjaga di atas 93 persen dan ditargetkan mencapai 94,40 persen pada akhir tahun dengan disertai peningkatan kualitas jalan daerah untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Di sisi lain, panjang jalan tol yang beroperasi meningkat dari 933 km pada tahun 2024 menjadi 1.040 km pada Semester I Tahun 2026, sehingga memperkuat keterhubungan antarpusat pertumbuhan, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung efisiensi sistem logistik nasional. Upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan Inpres No. 11/2025 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan akses menuju kawasan sentra produksi, pusat pelayanan dasar, dan simpul logistik sehingga

membentuk jaringan jalan nasional dan daerah yang semakin terpadu.

Pada sektor perkeretaapian, peningkatan jumlah penumpang angkutan kereta api dari 262 juta orang pada semester I 2025 menjadi 286,90 juta orang pada semester I 2026 menunjukkan semakin meningkatnya pemanfaatan transportasi berbasis rel oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, jumlah perjalanan kereta api juga meningkat dari 0,53 juta perjalanan menjadi 0,54 juta perjalanan pada periode yang sama. Penguatan layanan melalui penyelenggaraan kereta api antarkota, perkotaan, dan perintis, yang didukung oleh *Public Service Obligation* (PSO), *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO), serta kualitas sarana dan prasarana, turut memperkuat peran transportasi perkeretaapian sebagai sistem transportasi nasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan.



Gerbang Tol Simpang Panei, Sumatera Utara
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2026



Pencapaian jumlah pengguna angkutan umum perkotaan, didukung oleh pengembangan sistem angkutan umum massal yang telah menjangkau 14 kota sehingga meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat, serta mendorong terciptanya sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien. Hingga semester I 2026 peningkatan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan telah mencapai 476,71 juta orang. Hal ini sejalan dengan pembangunan jaringan baru seperti lanjutan MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Jabodetabek, *Surabaya Regional Railway Line* (SRRL), serta pengembangan dan penyelenggaraan BRT. Selain itu, dukungan operasional juga dilakukan melalui penyediaan PSO dan program *Buy the Service* (BTS).

Akselerasi konektivitas darat ditandai dengan beroperasinya 122 terminal penumpang yang memperluas aksesibilitas, meningkatkan keselamatan, menertibkan operasional, dan memperkuat integrasi antarmoda. Pada moda penyeberangan, volume angkutan penyeberangan mencatatkan peningkatan hingga 6,85 juta kendaraan. Capaian tersebut didorong oleh penambahan *trip* kapal berkapasitas besar dan penerapan *e-ticketing*. Langkah ini memberikan kemudahan mobilitas antarwilayah dan kepastian layanan penyeberangan, serta menjaga kontinuitas rantai pasok barang kebutuhan pokok.

Penguatan kinerja konektivitas laut ditandai oleh realisasi muatan barang layanan angkutan laut sebesar 463.006 ton yang didukung dengan peningkatan kapasitas 92 pelabuhan dan standardisasi pelabuhan utama. Pencapaian ini diakselerasi melalui perluasan pelayaran perintis di wilayah 3T guna menekan disparitas harga serta penerapan sistem digital Inaportnet pada 264 Unit Pelaksana Teknis pelabuhan. Intervensi tersebut meningkatkan keandalan

layanan transportasi laut, menjaga kelancaran rantai pasok barang pokok, serta memperkuat integrasi ekonomi dan daya saing maritim nasional.

Peningkatan konektivitas udara ditunjukkan oleh naiknya kinerja ketepatan waktu penerbangan (*on time performance*) yang mencapai 80,42 persen pada semester I Tahun 2026. Hal ini menandakan perbaikan pada aspek regulasi dan efektivitas manajemen maskapai serta operasional dan layanan kebandarudaraan secara *end to end*, terutama pada bandara-bandara primer. Di samping itu, fokus pengembangan pada bandara umum eksisting diarahkan pada optimalisasi kapasitas eksisting baik untuk bandara primer maupun bandara *feeder*. Pada aspek layanan bersubsidi, pemerintah tetap berupaya menjalankan program penerbangan perintis untuk melayani penumpang dan kargo dengan tujuan memastikan kemudahan mobilitas masyarakat dan mendukung distribusi logistik barang penting di daerah 3T.

Selain infrastruktur dan layanan konektivitas, pemerintah memperkuat keselamatan transportasi sebagai prioritas penyelenggaraan layanan, terutama melalui penguatan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini ditandai oleh penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan yang meningkat dari tahun ke tahun. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan, penguatan kelembagaan, dan meningkatnya kesadaran keselamatan di masyarakat sebagai fondasi untuk menekan kecelakaan, melindungi produktivitas masyarakat, serta mendukung keselamatan transportasi yang berkelanjutan.

Pembangunan sektor transportasi juga didukung oleh penguatan kapasitas sumber

daya manusia (SDM). Peningkatan pemenuhan SDM transportasi yang kompeten dan lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi terus dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi berbasis standar kompetensi. Selain itu, kapasitas SDM pencarian dan pertolongan juga terus diperkuat melalui peningkatan jumlah personel terlatih sehingga mampu mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang semakin cepat, profesional, dan responsif dalam penanganan kondisi darurat.

5.2.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) pemerataan tingkat kemantapan antara jalan nasional dan daerah; (2) skema pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi; (3) keterpaduan konektivitas antarmoda serta jangkauan sarana layanan di antarwilayah; (4) kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, terutama pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang meningkatkan risiko kecelakaan dan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan; serta (5) kapasitas prasarana, integrasi *first/last-mile*, serta tata kelola aset untuk menekan daya tarik dan keselamatan perkeretaapian.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengarahkan upaya pada beberapa aspek strategis, yaitu: (1) sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, penganggaran, serta penanganan jalan; (2) penguatan kapasitas pembiayaan melalui optimalisasi skema inovatif dan kolaboratif, termasuk KPBU dan partisipasi BUMN; (3) perluasan rute perintis, integrasi simpul transportasi, dan digitalisasi layanan antarmoda;

(4) peningkatan aspek keselamatan transportasi melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kualitas fasilitas keselamatan jalan, penanganan kendaraan ODOL secara bertahap dan terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi keselamatan; dan (5) pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional yang diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan, memperluas jaringan operasional, serta menjadikan transportasi kereta api sebagai tulang punggung transportasi massal yang aman, andal, efisien, dan berkelanjutan.

5.3 Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

5.3.1 Capaian Utama Pembangunan

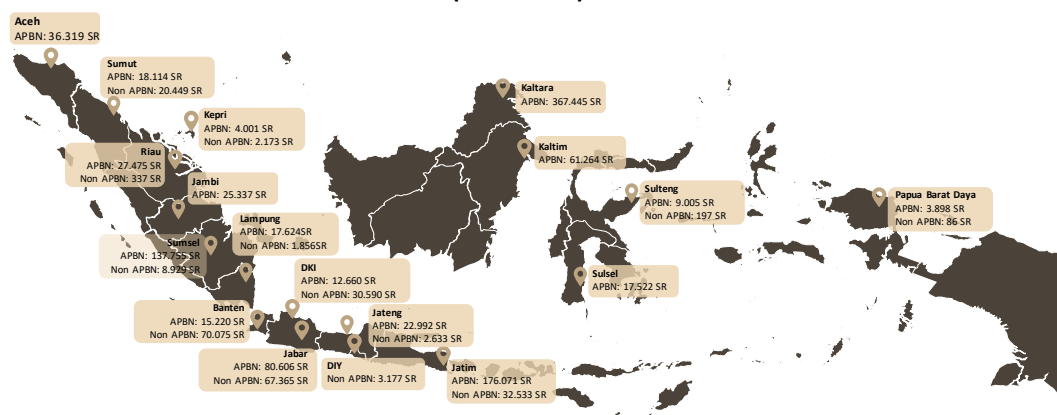
Pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi gas bumi terus diperkuat untuk meningkatkan keandalan pasokan energi, memperluas akses pemanfaatan gas, serta mendukung penyediaan energi maupun gas yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat maupun sektor produktif. Pada 2026, salah satu capaian pembangunan infrastruktur energi nasional adalah menguatnya konektivitas jaringan gas nasional khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa. Hal tersebut ditunjukkan dengan beroperasinya Proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon–Semarang (Cisem) Tahap II dengan realisasi panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi pada semester I 2026 mencapai 22.969,13 km melampaui target 22.600 km. Penguatan infrastruktur transmisi tersebut menjadi fondasi bagi perluasan jaringan distribusi gas termasuk program pengembangan jaringan gas kota untuk rumah tangga (Jargas). Kehadiran program ini mendukung pengurangan subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg sekaligus menghemat devisa melalui pengurangan impor LPG.



Pembangunan Jargas didorong melalui pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan partisipasi badan usaha guna memperluas jangkauan layanan gas bumi kepada masyarakat

secara lebih luas, efisien, dan berkelanjutan. Pembangunan jargas hingga tahun 2026 telah mencapai 943.708 SR, yang terdiri atas 703.308 SR melalui pendanaan APBN dan 240.400 SR melalui skema non-APBN.

Gambar 5.2
Peta Sebaran Jaringan Gas Rumah Tangga APBN dan Investasi
Badan Usaha (Non-APBN) Triwulan I 2026



Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan menunjukkan peningkatan. Hingga semester I tahun 2026, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik mencapai 107,89 GW dan panjang jaringan transmisi tenaga listrik mencapai 76.739 kms.

Tabel 5.3
Capaian Infrastruktur Ketenagalistrikan Tahun 2023–2026

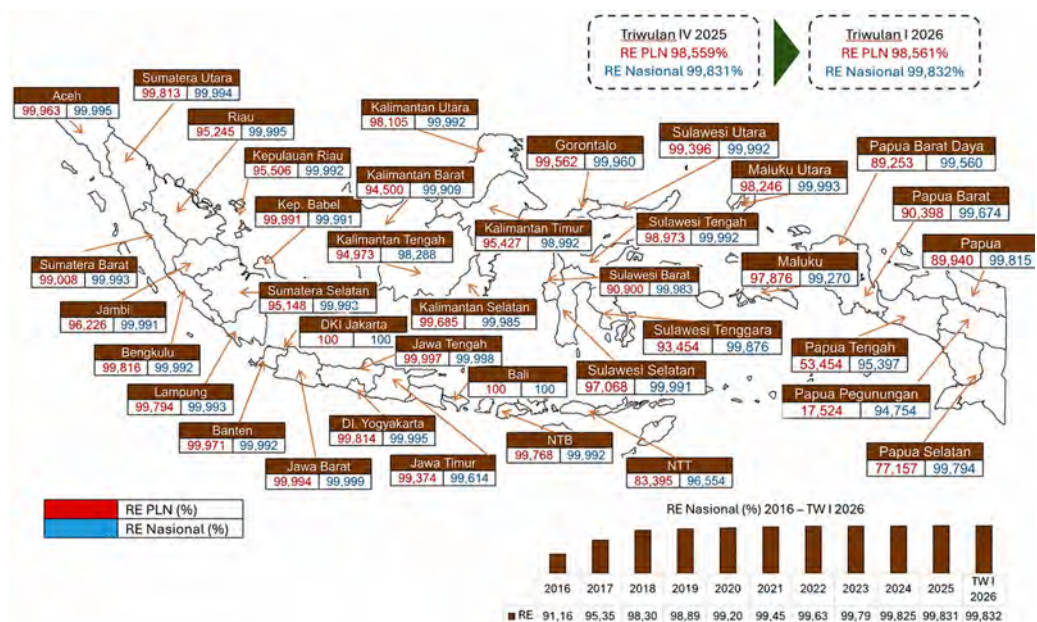
Uraian	Satuan	2023	2024	2025	Semester I	
					2025	2026
Konsumsi listrik per kapita	kWh	1.337	1.411	1.584	1.448	1.602
Rasio elektrifikasi	%	99,79	99,83	99,831	99,830	99,850
Kapasitas pembangkit listrik (kumulatif)	GW	91,17	100,65	107,46	104,94	107,89
Penurunan emisi pembangkitan listrik	juta ton CO ₂	15,32	16,94	17,01	12,14	17,01
Produksi tenaga listrik	GWh	442.289	449.615	494.353	232.462	244.270
Panjang jaringan transmisi tenaga listrik	kms	71.923	73.814	76.271	74.680	76.739
Kapasitas gardu induk	MVA	177.390	183.560	190.436	186.620	192.416
Panjang jaringan distribusi tenaga listrik	kms	1.081.656	1.099.731	1.118.955	1.104.712	1.132.985

Uraian	Satuan	2023	2024	2025	Semester I	
					2025	2026
Kapasitas gardu distribusi	MVA	71.244	73.724	80.472	77.436	84.418
SAIDI	jam/ pelanggan/ tahun	5,64	5,34	8,48	1,91	5,66
SAIFI	kali/ pelanggan/ tahun	4,27	3,23	3,23	1,46	2,51
Susut jaringan	%	8,63	8,58	8,25	7,53	8,73
SPKLU dan private charging station terpasang (kumulatif)	unit	932	3.202	4.778	4.186	5.037
SPBKLU terpasang (kumulatif)	unit	1.772	1.902	1.907	1.902	2.921
Koneksi tenaga listrik tambahan yang berkualitas	unit rumah tangga	131.600	155.429	220.857	-	12.901

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2026.

Peningkatan elektrifikasi tecermin dari perluasan 100 persen terdiri atas rasio desa berlistrik PLN (RD PLN) sebesar 93,67 persen dan RD non-PLN (RD PLN) sebesar 93,67 persen dan RD non-PLN sebesar 6,33 persen.

Gambar 5.3
Peta Sebaran Rasio Elektrifikasi (RE) Triwulan I 2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)

Keterangan:

RE PLN: Hanya pelanggan rumah tangga yang dilayani oleh jaringan listrik PLN.

RE NASIONAL: Gabungan dari listrik PLN, listrik non-PLN (swasta/pemda), dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).



Dalam mendukung transisi energi, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) guna meningkatkan bauran energi bersih, memperkuat ketahanan energi, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu dampak dari pembangunan infrastruktur pembangkit tersebut adalah penurunan emisi pembangkit listrik. Pada semester I 2026 terjadi penurunan emisi pembangkit listrik sebesar 17,01 Juta Ton CO₂ meningkat sekitar 40 persen dari 12,14 Juta Ton CO₂ (semester I 2025).

Sejalan dengan peningkatan penggunaan kendaraan listrik pada 2025, total penggunaan mobil penumpang listrik mencapai 160.300 unit dan motor listrik sebesar 371.900. Pemerintah terus mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional melalui perluasan jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Hingga semester I 2026, jumlah SPKLU untuk kendaraan roda empat telah mencapai 5.037 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

5.3.2 Tantangan dan Upaya

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi tantangan utama yang dihadapi adalah pemerataan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan nasional untuk memperkuat ketahanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, hilirisasi industri, adopsi kendaraan listrik, dan upaya mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060.

Untuk merespon tantangan strategis di atas, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi melalui: (1) penguatan

jaringan transmisi dan distribusi; (2) fasilitasi pengembangan Jargas non-APBN; (3) pembangunan Jargas untuk 1 Juta Sambungan Rumah; (4) percepatan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Dumai–Sei Mangkei (Dusem); dan (5) pembangunan infrastruktur regasifikasi dan Terminal *Liquefied Natural Gas* (LNG) guna meningkatkan keandalan dan fleksibilitas pasokan energi.

Pemerintah terus berupaya mempercepat transisi energi melalui pembangunan pembangkit listrik EBT, perluasan jaringan transmisi, dan penerapan teknologi *smart grid*. Program PLTS 100 GWp menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kapasitas pembangkit rendah karbon secara masif, mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain itu, pengembangan PLTA Skala Besar Terintegrasi diarahkan sebagai penyedia pasokan listrik beban dasar (*baseload*) rendah karbon yang andal untuk mendukung pertumbuhan permintaan listrik, pengembangan kawasan industri dan hilirisasi sumber daya alam, serta mempercepat pemanfaatan potensi EBT di lokasi-lokasi yang selama ini belum optimal melalui perluasan jaringan (*grid extension*) yang terintegrasi dengan pusat permintaan.

Pemerintah juga terus memperluas akses listrik ke wilayah 3T dan memperkuat tata kelola, mempermudah perizinan, serta mendorong skema pembiayaan inovatif. Langkah strategis ini dirancang demi mewujudkan sistem kelistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan sebagai fondasi kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hilirisasi industri, serta tercapainya target transisi energi di Indonesia.

5.4 Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, aman, dan terjangkau, sekaligus mendukung

produktivitas, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus mempercepat penyediaan hunian layak dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas melalui penyediaan dan peningkatan kualitas rumah, pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, serta pengelolaan persampahan.

Tabel 5.4
Capaian Utama Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026 ^{b)}
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan ¹⁾	%	60,66	63,15	65,25	68,40	68,66
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	11,80 (2020)	20,49	30,45	33,00 ^{a)}	36,00
Akses Air Minum Jaringan Perpipaan ¹⁾	%	19,47	19,76	30,12	30,15 ²⁾	33,00
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ¹⁾	%	10,16	10,21	10,25	10,30	17,00
Rumah Tangga yang Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka ¹⁾	%	5,86	4,20	3,20	2,35	1,50
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah ³⁾	%	15,00 (13,00 terdaur ulang)	14,05 (0,78 terdaur ulang)	12,92 (1,08 terdaur ulang)	16,65 (1,93 terdaur ulang)	28,00 (17,00 terdaur ulang)

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik, 2025; 2) Kementerian PU, 2025; 3) Kementerian Lingkungan Hidup, 2026, capaian menurun dari *baseline* 2022 karena terdapat kecenderungan penurunan daerah yang melakukan penginputan data ke dalam SIPSN.

Keterangan: a) target pemutakhiran RKP 2025; b) target RKP 2026

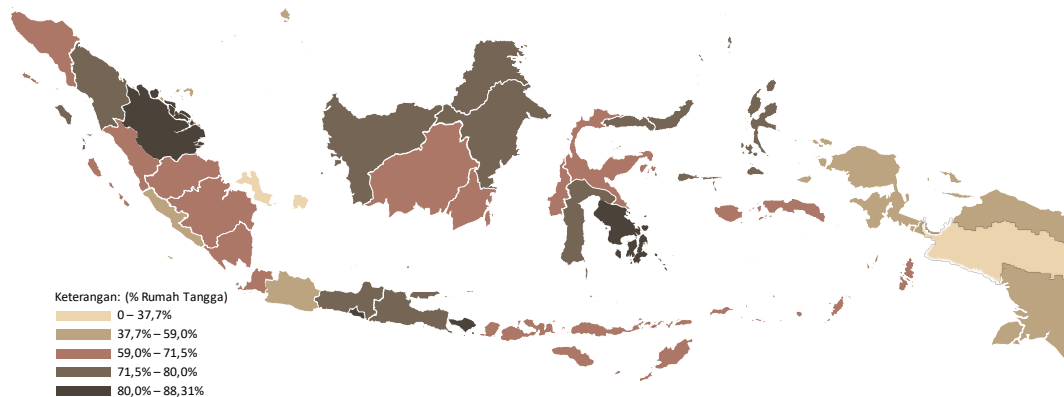
Pada sektor perumahan, pemerintah mendorong capaian pemenuhan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan terus diakselerasi melalui Program 3 Juta Rumah (1 Juta Rumah Baru dan 2 Juta Renovasi Rumah). Pada semester I tahun 2026, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) sebanyak 83.907 unit, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 91.531 unit, dan Kredit Program Perumahan (KPP) kepada 95.878 debitur. Pada periode yang sama, pembangunan 240 unit rumah susun bagi ASN/TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah diselesaikan. Capaian



tersebut didukung oleh penguatan kebijakan yang membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembiayaan dan sektor swasta dalam memperluas akses perumahan, salah satunya yakni pemanfaatan lahan aset BUMN.

Gambar 5.4
Peta Sebaran Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Tahun 2025



Sumber: Susenas KOR BPS 2025, Bappenas 2026 (diolah)

Pada sektor air minum, pemerintah terus memperkuat penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terintegrasi dari hulu ke hilir demi mendukung peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, pemerintah telah membangun SPAM dengan kapasitas sebesar 282.295 liter/detik dan 21,97 juta sambungan rumah. Selain itu, kinerja penyelenggara air minum juga terus diperkuat. Saat ini dari 404 BUMD air minum,

sebanyak 258 BUMD air minum berstatus sehat dan 183 BUMD air minum telah menerapkan tarif *Full Cost Recovery* (FCR). Dalam mempercepat capaian akses air minum aman menuju 43 persen pada 2029, pemerintah menerbitkan pedoman kebijakan penyelenggaraan SPAM terpadu dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030.

Gambar 5.5
Peta Sebaran Air Minum Aman Tahun 2024



Sumber: Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT), 2024

Pada sektor sanitasi (air limbah domestik), percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk menjamin kesehatan lingkungan masyarakat. Sejak 2025, pemerintah telah membangun tangki septik untuk 141.116 rumah tangga, memberikan bantuan sarana pengangkutan lumpur tinja kepada 16 Kabupaten/Kota, serta membangun dan merehabilitasi 9 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan potensi layanan untuk 435.989 rumah tangga. Pemerintah menerapkan prinsip *Citywide Inclusive Sanitation* (CWIS) agar pilihan

teknologi dan model layanan disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, serta kapasitas masing-masing daerah. Selain itu, untuk memastikan infrastruktur yang telah terbangun dapat berfungsi optimal dan benar-benar melayani masyarakat, pemerintah memberikan pendampingan kepada 170 kabupaten/kota untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas operator. Penguatan seluruh rantai layanan tersebut mendorong perluasan akses saat ini untuk mencapai akses sanitasi aman sebesar 30 persen dan pengentasan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terbuka 0 persen pada akhir 2029.

Gambar 5.6
Peta Sebaran Akses Sanitasi Aman Tahun 2025



Sumber: Susenas KOR BPS 2025, Bappenas 2026 (diolah)

Gambar 5.7
Peta Sebaran BABS di Tempat Terbuka Tahun 2025



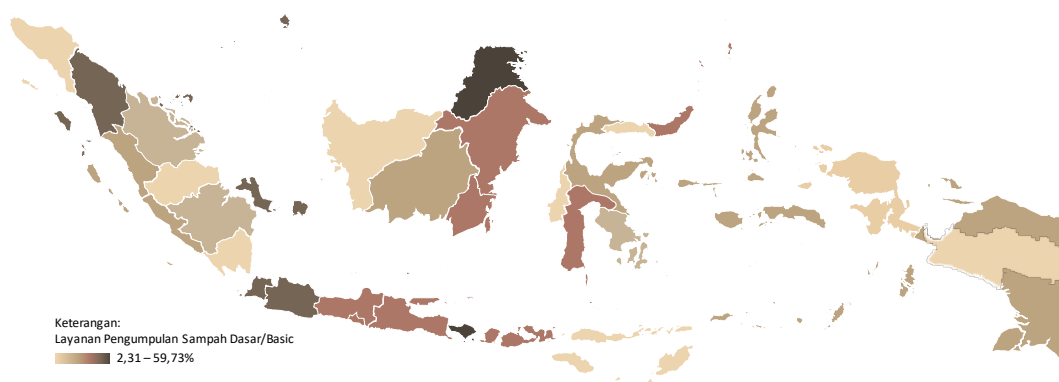
Sumber: Susenas KOR BPS 2025, Bappenas 2026 (diolah)



Pada sektor persampahan, pemerintah menerapkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Pada 2025, pemerintah telah melakukan optimalisasi dua Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi *sanitary landfill* dan perluasan layanan pengelolaan sampah melalui pembangunan TPS3R bagi 6.801 kepala keluarga dan

pembangunan TPST bagi 15.333 kepala keluarga. Untuk menjamin pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah secara optimal dan memperluas layanan pengumpulan sampah rumah tangga eksisting, pemerintah juga melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapan dan komitmen perbaikan tata kelola persampahan.

Gambar 5.8
Peta Sebaran Rumah Tangga yang Menerima Layanan Pengumpulan Sampah Dasar Tahun 2025



Sumber: Susenas KOR BPS 2025, Bappenas 2026 (diolah)

5.4.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman memerlukan penguatan sinergi lintas sektor dalam pengembangan ekosistem dan skema pembiayaan, penguatan tata kelola antarlembaga, peningkatan kapasitas penyelenggara layanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akses terhadap hunian layak, air minum aman, sanitasi aman, dan reformasi pengelolaan sampah.

Tantangan di sektor perumahan adalah perluasan akses penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja informal terutama terhadap akses

pembiayaan perumahan dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) termasuk peningkatan kualitas atap. Tantangan di sektor air minum terutama penuntasan SPAM terbangun menjadi sambungan rumah. Tantangan di sektor sanitasi adalah pemerataan infrastruktur pengolahan dan keterhubungan layanan hingga tingkat rumah tangga. Sedangkan tantangan sektor persampahan adalah penguatan ekosistem pengelolaan sampah yang meliputi infrastruktur pengelolaan sampah, pembentukan operator layanan persampahan oleh pemerintah daerah, regulasi dan retribusi, ketersediaan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan (RIPS), kesiapan masyarakat dalam memilah sampah, dan keterhubungan ke layanan.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkuat Program 3 Juta Rumah melalui optimalisasi skema mikrokredit untuk penyediaan dan peningkatan kualitas hunian, serta penyesuaian tenor FLPP eksisting untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR dan pekerja informal. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan jumlah penerima BPS melalui Program Gentengisasi untuk mewujudkan struktur atap rumah yang lebih sehat, tahan lama, dan sesuai standar.

Pada sektor air minum dan sanitasi, melalui Program Swasembada Air, pemerintah akan mempercepat pembangunan SPAM dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur di daerah. Langkah ini sejalan dengan peningkatan kapasitas operator, integrasi layanan air minum dan sanitasi, serta pemberian insentif pendanaan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dan memperluas cakupan layanan aman.

Pada sektor persampahan, akselerasi pengelolaan persampahan dilakukan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dan optimalisasi infrastruktur. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan tata kelola persampahan dilaksanakan melalui empat intervensi kunci yaitu pembentukan BLUD layanan hulu-hilir, penyusunan RIPS, peningkatan kolektibilitas retribusi, serta partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dan keterhubungan ke layanan. Upaya ini diperkuat melalui Program Pengendalian Sampah untuk mentransformasi sistem pengelolaan secara menyeluruh.

5.5 Pengembangan Destinasi Pariwisata

5.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong kelestarian lingkungan melalui *Blue-Green-Circular Economy* (BGCE), dan melestarikan budaya luhur bangsa. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Pembangunan pariwisata terus menunjukkan peningkatan aktivitas pascapandemi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB meningkat dari 4,67 persen (2023) menjadi 4,82 persen (2024). Selain itu, penerimaan devisa pariwisata juga meningkat signifikan dari US\$ 16,70 miliar (2024) menjadi US\$ 18,27 miliar (2025).

Peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) berdampak terhadap nilai tambah yang diterima pelaku usaha dan masyarakat. Kunjungan wisman meningkat dari 5,89 juta kunjungan (2022) menjadi 15,39 juta kunjungan (2025), sementara perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) tumbuh dari 734,86 juta perjalanan (2022) menjadi 1,20 miliar perjalanan (2025). Hingga semester I 2026, jumlah kunjungan wisman mencapai 7,45 juta, sedangkan perjalanan wisnus tercatat sebesar 630,41 juta. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat dan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi pariwisata Indonesia, sekaligus memperkuat



kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Hal ini didukung oleh pembukaan rute penerbangan domestik dan internasional baru serta kebijakan penambahan negara bebas visa kunjungan.

Tabel 5.5
Capaian Pembangunan Destinasi Pariwisata

Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	
						Semester I	Target ^{a)}
Rasio PDB Pariwisata	%	3,72	4,67	4,82	4,20-4,30 ^{a)}	-	4,60 - 4,70
Devisa Pariwisata	US\$ miliar	6,78	14,00	16,70	18,27	4,05 ^{b)}	21,20 - 22,60
Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	US\$/ kunjungan	1.481,59	1.198,85	1.201,23	1.188,00	1.177,00 ^{b)}	1.330,00
Tenaga Kerja Pariwisata	juta orang	22,89	24,41	25,01	25,91	-	26,04
Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index)	peringkat TTDI	32 (2021)	-	22	-	-	20
Kunjungan Wisatawan Mancanegara	juta kunjungan	5,89	11,60	13,89	15,39	7,45	16,00-17,60
Perjalanan Wisatawan Nusantara	juta perjalanan	734,86	839,67	1.021,13	1.200,33	630,41	1.176,00

Sumber: 1) BPS, 2026; 2) Bank Indonesia, 2026; 3) Kementerian Pariwisata, 2026; 4) World Economic Forum, 2024
Keterangan: a) Target RKP 2025 Pemutakhiran b) Capaian triwulan I 2026

Pembangunan pariwisata nasional diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing, melalui optimalisasi potensi dan keunggulan lokal, pengembangan pariwisata minat khusus seperti gastronomi, wisata bahari, *wellness tourism*, wastra, serta seni dan desain.

Beberapa capaian penting sektor pariwisata antara lain: (1) terselenggaranya 239 *event* berkualitas (Event by Indonesia) yang terdiri atas Karisma Event Nusantara (KEN), MICE, *event*

internasional, nasional, dan daerah sepanjang tahun 2025 dengan perputaran ekonomi mencapai Rp23,76 triliun serta melibatkan 20.877 UMKM dan 257,5 ribu tenaga kerja; (2) memperkuat posisi Indonesia di peringkat 2 Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026 sebagai salah satu destinasi *muslim-friendly* terbaik dunia yang didukung kebijakan peningkatan jumlah produk bersertifikat halal, di antaranya di 1.116 Desa Wisata; (3) keikutsertaan Indonesia melalui Paviliun Wonderful Indonesia

pada Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin (pameran dagang pariwisata terbesar di dunia) 2026 dan meraih “*Travelers’ Choice Awards Best of the Best*” 2026; (4) keikutsertaan Indonesia dalam ajang Outbound Travel Mart (OTM) Mumbai 2026 dan meraih penghargaan “*Experiential & Cultural Tourism Award*”; dan (5) sebanyak 3 (tiga) geopark, yaitu Rinjani-Lombok, Kaldera Toba, dan Ciletuh-Palabuhanratu, secara resmi memperoleh status “*green card*” dalam revalidasi UNESCO Global Geopark (UGGp); serta (6) berkembangnya daya saing global dari sisi penilaian pelaku industri restoran Indonesia yang ditunjukkan dengan August (Jakarta) dan Locavore NXT (Bali) masuk dalam Asia's 50 Best Restaurants 2026.

5.5.2 Tantangan dan Upaya

Beberapa tantangan utama dalam pengembangan pariwisata, antara lain: (1) konsentrasi kunjungan wisatawan pada destinasi tertentu, erosi budaya lokal, dan ketahanan destinasi terhadap krisis, bencana, dan perubahan iklim; (2) konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur penunjang destinasi pariwisata; (3) standarisasi pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata; (4) daya saing destinasi pariwisata (kualitas amenitas, atraksi, pemasaran destinasi, dan akses pembiayaan *event*) di tengah persaingan global; dan (5) keterampilan SDM pariwisata yang sesuai kebutuhan industri dan keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok pariwisata.

Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan destinasi pariwisata, upaya dilakukan melalui program dan intervensi, antara lain: (1) penguatan aspek keberlanjutan di destinasi pariwisata yang meliputi penerapan

prinsip BGCE, pelestarian kearifan lokal, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan; (2) pengembangan infrastruktur dan konektivitas destinasi yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pendukung pariwisata termasuk perluasan jaringan nirkabel terbuka di kawasan pariwisata; (3) transformasi tata kelola dan digitalisasi pariwisata yang meliputi pemanfaatan AI (Tourism 5.0) untuk pengambilan keputusan, peningkatan sertifikasi untuk menjamin mutu destinasi, dan penguatan iklim investasi melalui simplifikasi perizinan usaha pariwisata; (4) peningkatan daya saing dan nilai tambah destinasi yang meliputi penguatan *branding* dan pemasaran destinasi, pengakuan internasional terhadap destinasi (UNESCO), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, dan pengembangan mekanisme pembiayaan termasuk inisiasi skema Indonesia Quality Tourism Fund; dan (5) peningkatan kompetensi SDM pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi serta penguatan rantai nilai pariwisata yang inklusif untuk mendukung ekosistem industri pariwisata.

5.6 Koperasi dan UMKM

5.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi terus diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mendorong pengembangan sektor agromaritim pada sentra-sentra produksi. Penguatan ini menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing perekonomian nasional.



Tabel 5.6
Capaian Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2024-2026

No	Nama Indikator	Satuan	2024	2025	Semester I	
					2025	2026
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB ¹⁾	%	0,97	1,02	0,95 ^{a)}	1,01 ^{a)}
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah ²⁾	%	3,06	3,28	3,31 ^{b)}	3,28 ^{c)}
3	Rasio Kewirausahaan ²⁾	%	3,08	3,29	3,35 ^{b)}	3,43 ^{b)}

Sumber: 1) Kementerian Koperasi, 2026 (PDB ADHB 2024-2026); 2) Badan Pusat Statistik (Survei Angkatan Kerja Nasional/ Sakernas).

Keterangan: a) Realisasi Volume Usaha Koperasi per 31 Maret 2026 dan data PDB ADHB April 2025 s.d. Maret 2026; b) Realisasi Sakernas periode Februari; c) Capaian Semester I menggunakan realisasi Sakernas Agustus 2025 mengingat belum tersedianya raw data Sakernas Februari 2026.

Tren perkembangan koperasi yang positif didukung dengan terbitnya Inpres 9/2025 terkait pembentukan 80.000 KDKMP. Hal ini dapat dilihat pada jumlah anggota koperasi yang meningkat dari 31,85 juta orang (2025) menjadi 34,03 juta orang (Juli 2026). Rasio Volume Usaha Koperasi (VUK) terhadap PDB juga mengalami peningkatan dari 0,97 persen (2024) menjadi 1,01 persen (2026). Peningkatan

tersebut sejalan dengan penambahan VUK sebesar Rp15,74 triliun pada periode Desember 2025 hingga Juni 2026, serta telah beroperasinya beberapa KDKMP. Sebagai upaya mencapai target VUK terhadap PDB 1,12 persen pada akhir tahun 2026, pemerintah terus memperkuat usaha koperasi serta mendorong percepatan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan operasionalisasi usaha KDKMP.

Tabel 5.7
Koperasi Aktif berdasarkan Sektor Usaha

Sektor Usaha	Volume Usaha (triliun)		Proporsi Volume Usaha (%)		Jumlah Koperasi Aktif	
	2025	Juni 2026	2025	Juni 2026	2025	Juni 2026
Perdagangan Besar dan Eceran	39,52	43,15	16,34	16,80	71.108	74.084
Jasa Keuangan dan Asuransi	137,15	144,12	56,72	55,96	51.793	50.621
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,26	16,47	6,31	6,40	42.404	43.305
Jasa Lainnya	12,29	11,05	5,08	4,30	32.828	31.267
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,38	17,44	5,12	6,80	8.472	8.264
Industri Pengolahan	4,12	4,71	1,71	1,80	6.189	6.498

Sektor Usaha	Volume Usaha (triliun)		Proporsi Volume Usaha (%)		Jumlah Koperasi Aktif	
	2025	Juni 2026	2025	Juni 2026	2025	Juni 2026
Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,55	0,25	0,20	1.889	2.282
Sektor Usaha Lainnya	20,49	20,07	8,47	7,80	7.779	7.964
Total	241,82	257,56	100	100	222.462	224.285

Sumber: Kementerian Koperasi, 2026

Kinerja koperasi yang terus membaik didukung oleh penguatan kelembagaan dan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan. Dari aspek kelembagaan, pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas koperasi melalui pelatihan manajerial, pembinaan tata kelola, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Dari aspek usaha, pemerintah memperkuat akses pembiayaan dan pengembangan usaha koperasi, salah satunya melalui instrumen penyaluran dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi. Pada 2025, realisasi penyaluran dana bergulir mencapai Rp1,70 triliun kepada 166 koperasi. Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp843 miliar.

Pengembangan UMKM dan kewirausahaan terus menunjukkan kemajuan. Pemerintah memperkuat daya saing UMKM melalui kemudahan legalitas usaha, perluasan akses pembiayaan, penguatan akses pasar, serta pengembangan ekosistem kewirausahaan. Pada aspek legalitas, pemerintah terus mendorong formalisasi usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hingga Juli 2026, sebanyak 16,73 juta usaha telah memiliki NIB, dengan 16,59 juta di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil (UMK). Capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mendorong legalitas UMK.

Pada aspek pembiayaan, pemerintah memperkuat akses permodalan bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik bagi perorangan maupun kelompok usaha. Pada periode Januari-Juli 2026, KUR sebesar Rp159,80 triliun telah disalurkan kepada 2,50 juta debitur. Jumlah tersebut merupakan 54,20 persen dari target penyaluran 2026. Selain itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi hingga Juli 2026 telah mencapai Rp103,20 triliun (64,60 persen). Capaian ini mempertegas peran KUR sebagai instrumen pembiayaan untuk mendorong penguatan sektor produktif nasional.

Pada aspek akses pasar dan kemitraan, pemerintah memperkuat keberpihakan kepada UMKM melalui berbagai kebijakan afirmatif. Hingga Desember 2025, area infrastruktur publik bagi usaha mikro dan kecil (UMK) telah terealisasi sebesar 38 persen dari alokasi minimal 30 persen. Sementara hingga Juni 2026, nilai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM telah mencapai 43,54 persen atau senilai Rp113,84 triliun dari alokasi minimal 40 persen.

Selain itu, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok BUMN mencatat nilai transaksi Rp177,10 miliar dengan melibatkan 1.219 UMKM sepanjang tahun 2025. Pemerintah juga memperluas akses



pasar melalui platform Inabuyer dengan potensi transaksi sebesar Rp2,21 triliun yang melibatkan 804 UMKM dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan 57.600 UMKM sebagai pemasok pada semester I 2026.

Berbagai upaya tersebut dilengkapi dengan penguatan ekosistem kewirausahaan melalui integrasi layanan usaha, inkubasi, pelatihan, pendampingan, serta pengembangan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM. Hingga Juli 2026, BDT UMKM telah menghimpun data 30,20 juta UMKM secara *by name by address* sebagai fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Data tersebut menjadi basis implementasi pemberdayaan terintegrasi melalui Kartu Usaha Produktif (KUP). Untuk mendukung pelaksanaan KUP, pemerintah mengembangkan Sistem Aplikasi Pengembangan UMKM (SAPA UMKM) yang mengintegrasikan layanan pengembangan UMKM lintas kementerian/lembaga. Sejak diluncurkan pada 21 Mei 2026, SAPA UMKM telah mengintegrasikan 86 program/kegiatan dari 4 kementerian/lembaga dan 5 pemerintah daerah.

5.6.2 Tantangan dan Upaya

Pengembangan koperasi di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain: (1) rasio partisipasi masyarakat dalam berkoperasi; (2) penerapan teknologi dan inovasi untuk daya saing; (3) struktur usaha koperasi yang masih didominasi oleh koperasi berskala mikro (KUK-1); (4) akses pembiayaan bagi koperasi; serta (5) tata kelola koperasi, termasuk penyelenggaraan RAT dan pemutakhiran data koperasi.

Program PROKESRA-Produktif memberikan intervensi sesuai tingkat perkembangan usaha, meliputi peningkatan kapasitas usaha, pendampingan dan inkubasi bisnis, perluasan akses pembiayaan dan investasi, penguatan akses pasar, kemitraan dan rantai nilai, adopsi inovasi dan teknologi, penguatan legalitas, serta sertifikasi, standardisasi, dan peningkatan kualitas produk.

Beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain: (1) peningkatan literasi dan sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat, khususnya generasi muda; (2) penguatan kapasitas SDM koperasi melalui pelatihan manajerial dan adopsi teknologi; (3) pengembangan usaha koperasi melalui pendampingan produksi, pengembangan rantai nilai, dan inovasi produk; (4) peningkatan kapasitas koperasi agar lebih *bankable* dan optimalisasi skema pembiayaan afirmatif; dan (5) penguatan tata kelola melalui pendampingan penyelenggaraan RAT dan pemutakhiran data koperasi.

Di sisi lain, pengembangan UMKM dan kewirausahaan masih menghadapi tantangan, antara lain: (1) produktivitas UMKM untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi; (2) aksesibilitas UMKM terhadap sumber daya produktif; (3) perkembangan kewirausahaan inovatif yang mampu menciptakan lapangan kerja; (4) kemitraan usaha dan rantai pasok UMKM; serta (5) pemanfaatan BDT UMKM dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pengembangan UMKM.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain: (1) peningkatan produktivitas UMKM melalui program PROKESRA-Produktif yang mengintegrasikan program pemberdayaan lintas kementerian/lembaga; (2) penguatan tata kelola program pengembangan UMKM, termasuk PROKESRA-Produktif, melalui SAPA UMKM; serta (3) peningkatan pemanfaatan BDT UMKM sebagai dasar penetapan sasaran, integrasi layanan, pemantauan graduasi, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.

5.7 Ekonomi Kreatif

5.7.1 Capaian Utama Pembangunan

Sektor ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi yang memadukan identitas budaya, inovasi desain, teknologi digital, dan media melalui penguatan komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta peningkatan daya saing produk kreatif Indonesia di pasar global. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif terlihat melalui proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif yang mencapai Rp1.757,87 triliun (2025) dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 7,38 persen.

Tabel 5.8
Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Tahun 2024–2026

Indikator	Satuan	2024	2025	2026
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7,28	7,38 ^{d)}	7,42-8,00 ^{a)}
Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif	%	6,57	6,86 ^{d)}	5,66 ^{a)}
Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif	%	13,23	17,72	7,57 ^{c)}
Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	juta orang	26,47	27,40	26,06 ^{a)}
Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif	%	54,86 ^{b)}	32,23 ^{b)}	5,80-7,87 ^{a)}

Sumber: 1) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; 2) Badan Pusat Statistik; 3) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keterangan: a) Target RPJMN tahun 2025-2029; b) Nilai capaian investasi sektor ekonomi kreatif adalah nilai investasi sektor ekonomi kreatif dan berbagai sektor terkait ekonomi kreatif (sedang dalam proses penajaman berdasarkan proporsi KBLI ekonomi kreatif); c) Capaian triwulan I; d) Angka capaian sementara per Juni 2026.

Peningkatan PDB ekonomi kreatif didorong oleh pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif. Pada 2025, pertumbuhan ekspor di sektor ekonomi kreatif mencapai 17,72 persen, dengan kontributor terbesar adalah sektor fesyen yang diikuti kriya, dan kuliner. Sektor fesyen berkontribusi sebesar 56,49 persen terhadap total ekspor ekonomi kreatif.

Selain itu, potensi kekayaan intelektual sebagai aset takbenda terus didorong melalui perluasan dan penganeekaragaman penetrasi pada kanal digital, fasilitasi promosi pada produk ekonomi

kreatif yang potensial, serta diplomasi budaya untuk membuka akses pasar yang lebih luas, sejalan dengan pertumbuhan konsumsi konten nasional. Hal ini terlihat dari peningkatan minat konsumsi masyarakat pada produk lokal, di antaranya terlihat dari jumlah penonton film nasional yang melebihi 1 juta orang di layar bioskop.

Pendapatan studio animasi berbasis kekayaan intelektual terus meningkat, dengan Asia Tenggara sebagai pasar terbesar karena kedekatan budaya. Pemerintah juga



memberikan dukungan akselerasi perluasan jejaring internasional kepada 50 startup gim lokal sepanjang 2025. Selain itu, komitmen kerja sama Tailan-Indonesia membuka kesempatan partisipasi Indonesia dalam Grand Halal Bangkok 2026 dan kerja sama produksi film bersama (*co-production*) di Festival Film Tailan-Indonesia.

Pada 2025, sektor ekonomi kreatif menyerap 27,40 juta tenaga kerja atau tumbuh sebesar 5,44 persen. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh sektor kuliner, fesyen, dan kriya. Selain itu, terdapat beberapa sektor dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan seperti aplikasi dan gim sebesar 86,50 persen, desain produk sebesar 34,60 persen serta film, animasi, dan video sebesar 15,50 persen. Potensi tersebut dioptimalkan melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif menyesuaikan kebutuhan industri. Peningkatan kualitas SDM tersebut sejalan dengan masuknya sektor ekonomi kreatif sebagai bagian dari manajemen talenta seni budaya dan kolaborasi program bersama lintas pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta.

Sementara itu, investasi di sektor ekonomi kreatif juga terus meningkat sebesar 32,23 persen dan mencapai Rp283 triliun (2025). Peningkatan investasi tersebut mencerminkan semakin besarnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi kreatif Indonesia, yang didukung pertumbuhan pasar domestik, fasilitasi kemudahan investasi, serta perluasan dan diversifikasi akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Di sisi lain, perluasan kerjasama investasi internasional didorong melalui: (1) penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Prancis untuk mempercepat

terwujudnya kolaborasi film internasional antara kedua negara melalui film “Happy Eyes” dan peluang kerja sama *co-production* film lainnya; (2) keterlibatan dalam forum bisnis seperti Indonesia Creative Economy Investment Business Matching yang mempertemukan pelaku subsektor animasi dan kuliner Indonesia dengan pasar di Swiss dan aktivitas di Jepang melalui Japan–ASEAN Startup Business Matching Fair dan SusHi Tech Tokyo 2026. Pemerintah juga melakukan penguatan kelembagaan penunjang ekonomi kreatif, salah satunya melalui penetapan Perpres No. 37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045. Perpres ini sebagai panduan jangka panjang dan menjadi peta jalan strategis yang mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif lintas sektor.

5.7.2 Tantangan dan Upaya

Ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual masih memiliki sejumlah tantangan, antara lain: (1) ketersediaan akses pembiayaan dan investasi yang lebih inklusif bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan model pembiayaan inovatif; (2) kualitas, standardisasi kompetensi, dan tingkat kesejahteraan tenaga kerja ekonomi kreatif; (3) keselarasan pola regulasi, tata kelola, dan kelembagaan ekonomi kreatif antara pemerintah pusat dan daerah; (4) ketahanan rantai nilai produk ekonomi kreatif di pasar global dan nasional; dan (5) dukungan ekosistem ekonomi kreatif.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk penguatan ekosistem ekonomi kreatif, antara lain: (1) perluasan dan diversifikasi akses pembiayaan alternatif melalui pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan

intelektual, penguatan literasi keuangan, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia ekonomi kreatif melalui penguatan kolaborasi sektor pendidikan dan industri, fasilitasi peningkatan keterampilan dan pengembangan portofolio, serta perlindungan tata kelola kerja yang berkeadilan; (3) harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kelembagaan penunjang ekonomi kreatif; (4) diversifikasi dan efisiensi rantai nilai ekonomi kreatif dari hulu hingga hilir, salah satunya melalui optimalisasi platform digital; (5) penguatan riset dan integrasi sistem pendataan ekonomi kreatif sebagai dasar masukan penyusunan kebijakan berbasis kolaborasi lintas pemangku kepentingan; (6) penyelenggaraan World Conference on Creative Economy (WCCE); serta (7) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang difokuskan pada 15 provinsi prioritas, yaitu Aceh, Sumatera

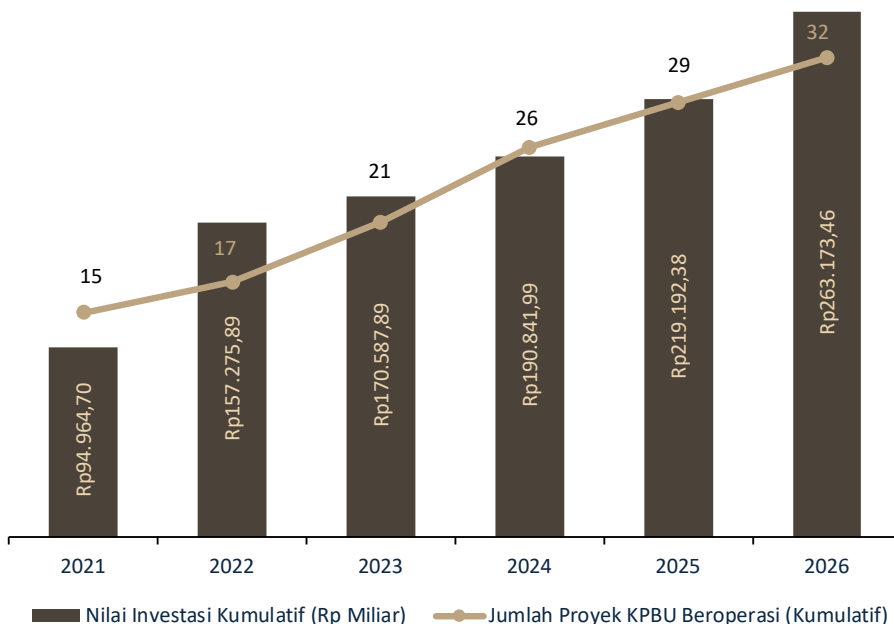
Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

5.8 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

5.8.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah terus memperkuat sinergi pembiayaan melalui optimalisasi berbagai sumber pendanaan untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur nasional. Pengembangan skema KPBU diarahkan untuk memperluas kapasitas pembiayaan infrastruktur melalui kolaborasi pemerintah dan swasta berlandaskan pada Perpres No. 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Grafik 5.1
Perkembangan Proyek KPBU yang Beroperasi Tahun 2021–2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)

Keterangan: Menggunakan kurs APBN tahun 2026



Pelaksanaan proyek KPBU hingga semester I 2026 menunjukkan perkembangan signifikan yang ditandai dengan tiga proyek baru dalam tahap operasi. Ketiga proyek tersebut adalah Proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Pelabuhan Patimban, dan Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg Seksi I. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan partisipasi swasta dalam mendukung penyediaan infrastruktur. Capaian penting

lainnya adalah penandatanganan perjanjian KPBU untuk proyek strategis yaitu Proyek Jalan Tol Bogor–Serpong (melalui Parung).

Dalam penyelenggaraan KPBU, proyek dapat diusulkan oleh pemerintah (*solicited*) maupun badan usaha (*unsolicited*). Hingga akhir semester I 2026, sebanyak 41 proyek KPBU telah mencapai tahap konstruksi dan operasi sebagai *success stories*, dengan nilai investasi sebesar Rp203,97 triliun pada proyek KPBU *solicited* dan Rp142,35 triliun pada proyek KPBU *unsolicited*.

Tabel 5.9
Jumlah dan Nilai Proyek KPBU Tahun 2025 dan Tahun 2026

Proyek KPBU Semester I		Tahapan Proyek	Proyek KPBU Semester I	
Nilai Investasi (Rp triliun)	Jumlah Proyek		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp triliun)
Prakarsa Pemerintah <i>(solicited)</i>				
69,30	18	Perencanaan - Penyiapan	15	597,08
39,19	7	Transaksi	4	14,50
44,96	6	Konstruksi	6	49,79
133,42	20	Operasi	22	154,18
286,87	51	TOTAL	47	815,55
Prakarsa Badan Usaha <i>(unsolicited)</i>				
43,72	12	Penyiapan	9	14,55
131,81	11	Transaksi	7	74,50
29,49	2	Konstruksi	3	39,96
79,03	9	Operasi	10	102,39
284,05	33	TOTAL	30	231,40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah).

Capaian tersebut menegaskan semakin kuatnya peran KPBU sebagai instrumen strategis pembiayaan infrastruktur yang mendukung percepatan pembangunan. Implementasi KPBU terus diperluas, antara lain melalui pengembangan Proyek Pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa dengan KPBU *solicited*, sehingga semakin memperkuat *pipeline* investasi infrastruktur nasional.

Pemerintah juga terus memperluas penerapan skema KPBU pada sektor sosial yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu proyek tersebut adalah Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun, yang merupakan proyek KPBU dengan pengembalian investasi *Availability Payment* (AP) pertama di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

5.8.2 Tantangan dan Upaya

Pelaksanaan KPBU menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) keselarasan antara karakteristik proyek dan skema pendanaan, khususnya pada proyek KPBU sektor sosial; serta (2) tata kelola proyek KPBU berbasis data dan sistem informasi yang terintegrasi.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, antara lain: (1) penguatan keselarasan antara karakteristik proyek dan skema pendanaan melalui pelibatan calon lembaga pembiayaan sejak tahap penyiapan proyek, pemberian insentif dan optimalisasi dukungan pemerintah; (2) pengembangan *database* proyek melalui platform sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola KPBU; (3) penyempurnaan kerangka regulasi dan penguatan kelembagaan KPBU; dan (4) penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan KPBU.

5.9 Proyek Strategis Nasional (PSN)

5.9.1 Capaian Utama Pembangunan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pembangunan nasional, pemerintah terus memperkuat tata kelola PSN agar semakin terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penguatan tersebut ditujukan untuk memastikan setiap PSN memiliki tingkat kesiapan yang memadai, selaras dengan prioritas pembangunan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal.

Penguatan tata kelola PSN ditandai dengan ditetapkannya regulasi yang mengatur substansi terkait tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional yang memperkuat pengaturan proses perencanaan, penetapan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi PSN. Selain itu, mekanisme penetapan daftar PSN diintegrasikan ke dalam proses penyusunan RKP sehingga setiap usulan proyek dinilai berdasarkan keselarasan dengan prioritas pembangunan, tingkat kesiapan pelaksanaan, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan.

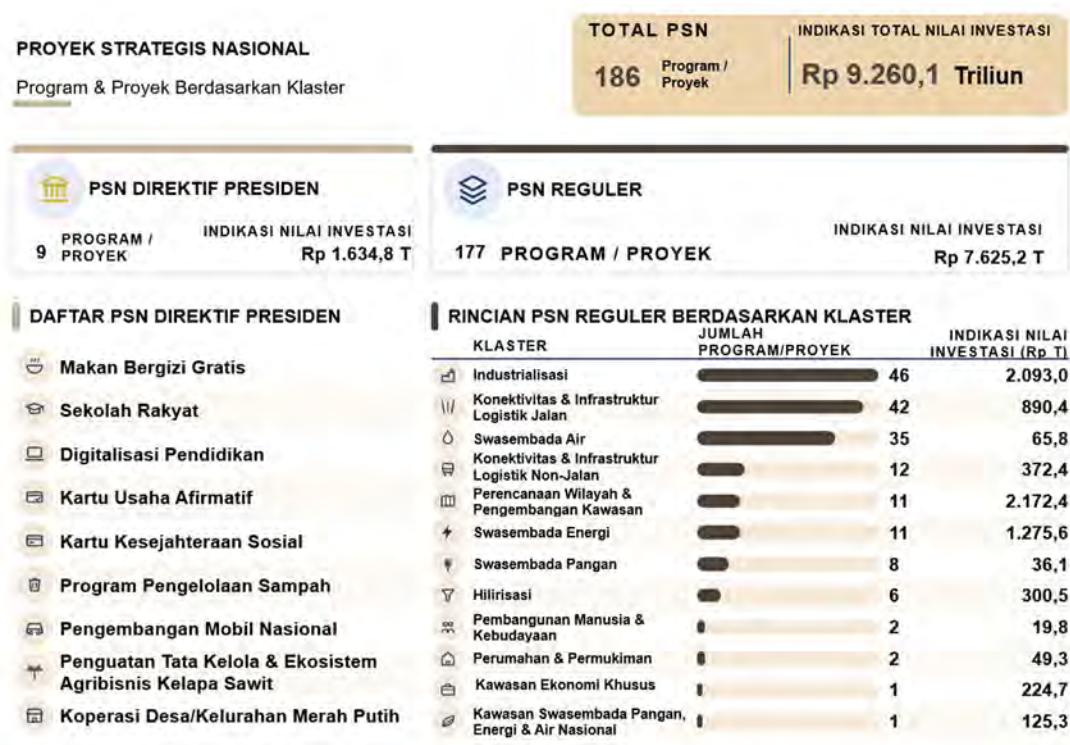
Hingga Mei 2026, terdapat 9 program PSN Direktif Presiden serta 12 klaster PSN reguler yang mencakup 151 program/proyek berjalan (*on going*) dan 26 program/proyek baru. PSN memiliki indikasi nilai rencana investasi sekitar Rp9.260 triliun, yang terdiri atas Rp1.635 triliun untuk Program PSN Direktif Presiden dan Rp7.625 triliun untuk PSN Reguler. PSN reguler mencakup berbagai sektor strategis yang didominasi oleh klaster industrialisasi (46 proyek), konektivitas dan infrastruktur logistik jalan (42 proyek), swasembada air (35 proyek), serta konektivitas dan infrastruktur logistik non-jalan (12 proyek).

PSN Direktif Presiden difokuskan pada percepatan penyelenggaraan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, meliputi klaster pembangunan manusia dan kebudayaan, penurunan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, PSN tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mempercepat pencapaian prioritas pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan gizi bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga Juli 2026, program ini telah menjangkau 63.13 juta penerima manfaat.



Gambar 5.9
Nilai Investasi Proyek Strategis Nasional Tahun 2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Di bidang ekonomi kerakyatan, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus berkembang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa. Hingga Juli 2026 telah terbentuk 83.382 koperasi berbadan hukum. KDKMP berperan sebagai fondasi penguatan aktivitas ekonomi desa. Selanjutnya, penguatan diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui Program Sekolah Rakyat. Hingga triwulan II 2026, sebanyak 93 Sekolah Rakyat Permanen dan 81 Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi. Hingga akhir 2026 terdapat penambahan 8 lokasi Sekolah Rakyat Rintisan yang akan beroperasi.

Sekolah Rakyat telah beroperasi dan melayani 43.251 siswa, didukung oleh 5.629 guru dan 11.504 tenaga kependidikan.

Dalam rangka mendukung transformasi pendidikan nasional, pemerintah terus mempercepat implementasi Program Digitalisasi Pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Hingga triwulan II 2026, telah dilaksanakan Pendampingan Digitalisasi pada satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi digital pendidikan dan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.

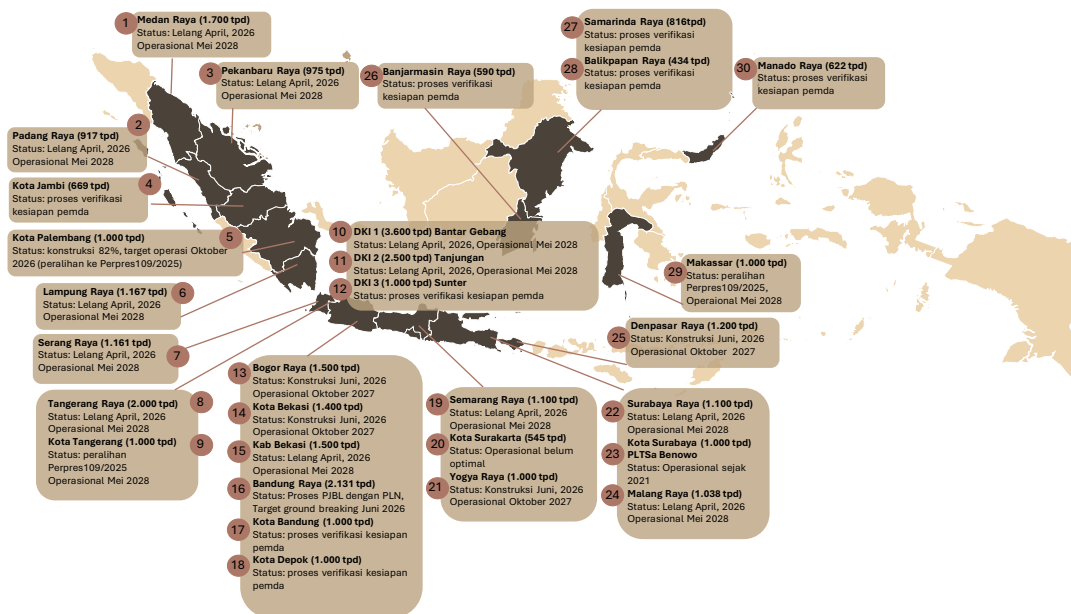
Pemerintah juga terus memperkuat sistem perlindungan sosial melalui Kartu Kesejahteraan.

Hingga semester I 2026, program ini telah menjangkau 9.576.161 keluarga penerima bantuan sosial bersyarat, 96.800.000 penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN), serta 13.663.630 Peserta didik penerima Program Indonesia Pintar. Di sisi lain, Program Kartu Usaha Afirmatif terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui penguatan kapasitas usaha, pendampingan, dan perluasan akses pembiayaan.

Di sektor ketahanan pangan dan transformasi ekonomi, pemerintah terus mempercepat implementasi berbagai PSN Direktif Presiden, antara lain melalui penguatan Agribisnis Kelapa Sawit dan juga Pengembangan Mobil Nasional. Berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat ketahanan pangan dan lingkungan, serta mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah terus mendorong pengelolaan sampah terpadu melalui PSN PSEL. Hingga tahun 2026, dua kota telah mengoperasikan fasilitas PSEL sesuai Perpres No. 35/2018, yaitu Kota Surabaya dengan kapasitas 1.100 ton per hari dan daya 10 MW serta Kota Surakarta dengan kapasitas 545 ton per hari dan daya 5 MW. Selain itu, PSEL di Kota Palembang sedang dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Perpres No. 109/2025 menetapkan skema baru yang menugaskan Danantara untuk menyusun kajian investasi serta memilih Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL berdasarkan penetapan daerah yang dilakukan melalui mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan. PSEL Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya menjadi lokasi tahap pertama yang telah menyelesaikan proses pemilihan BUPP. Sementara itu, lokasi pada tahap berikutnya tengah memasuki proses lelang pemilihan BUPP dan percepatan kesiapan Pemerintah Daerah.

Gambar 5.10
Peta Status Perkembangan Lokasi Penerapan PSEL Tahun 2026



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2026



5.9.2 Tantangan dan Upaya

Pelaksanaan PSN dalam skala besar dan lintas sektor menuntut penguatan tata kelola yang menyeluruh agar setiap proyek dapat diselesaikan sesuai target waktu dan beroperasi sebagaimana mestinya. Mengingat seluruh PSN diwajibkan beroperasi atau memulai konstruksi paling lambat tahun 2029, tantangan ketepatan waktu menjadi sangat krusial. Selektivitas dalam penetapan PSN perlu terus diperkuat agar setiap proyek yang ditetapkan memiliki keterkaitan langsung dengan PHTC dan program prioritas Presiden, serta memiliki kesiapan implementasi yang memadai. Di sisi pelaksanaan, penyelesaian hambatan perizinan, nonperizinan, dan pengadaan lahan masih memerlukan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif. Sementara itu, proyek yang telah beroperasi perlu dipastikan memberikan dampak terukur bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penurunan angka kemiskinan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkuat selektivitas penilaian usulan PSN melalui pengetatan kriteria berdasarkan nilai strategis, keterkaitan dengan PHTC, dan kesiapan implementasi. Percepatan penyelesaian hambatan lintas sektor juga terus diintensifkan, mencakup koordinasi perizinan, nonperizinan, dan pengadaan lahan, agar proyek dapat diselesaikan sesuai koridor waktu yang ditetapkan.

Pemerintah juga memastikan bahwa setiap PSN, termasuk PSN Direktif Presiden, tidak hanya diselesaikan secara fisik tetapi juga memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, pemantauan pelaksanaan PSN diarahkan pada pengukuran dampak pembangunan, bukan semata capaian output. Seluruh upaya ini ditopang oleh penyempurnaan kerangka regulasi pengelolaan PSN sebagai landasan tata kelola jangka panjang yang lebih kuat dan koordinasi antarlembaga yang lebih efektif.



Pasar Terapung Lok Baintan, Kalimantan Selatan
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

BAB 6

ASTA CITA 4

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas



Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SMPN 5 Bandung, Jawa Barat
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2026

Indeks Modal Manusia Tahun 2025

IMM 2025: 0,562



Dimensi Survival

• Angka Kelangsungan Hidup Balita

98,40
persen

Sumber: Proyeksi LSFP 2020 dan Estimasi SUPAS 2025, BPS (2025)



Dimensi Pendidikan

• Harapan Lama Sekolah 4–18 tahun

12,18
tahun

Sumber: Susenas BPS, Dapodik Kemendikdasmen, EMIS Kemenag (2025)

• Harmonized Test Score (Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional)

58,07

Sumber: Hasil Asesmen Nasional Kemendikdasmen (2025)



Dimensi Kesehatan

• Prevalensi Stunting

19,80
tahun

Sumber: SSGL, Kemenkes (2024)

• Angka Kelangsungan Hidup Dewasa 15–60 Tahun

90,90
persen

Sumber: Proyeksi LSFP 2020 dan Estimasi SUPAS,

Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun pada 2021-2025

2021

9,23

2022

8,06

2023

6,92

2024

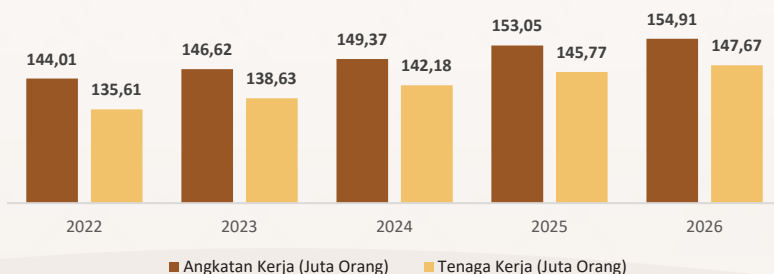
5,9

2025

4,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-2025 (diolah)

Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2022-2026



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Februari, 2020-2026



Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera merupakan pilar utama pembangunan bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk mewujudkan manusia yang sehat serta memiliki keahlian sains dan teknologi yang didukung dengan gizi baik dan pendidikan yang bermutu. Pendekatan tersebut dilakukan secara inklusif yang berpihak penuh pada kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, dan kesetaraan gender.

6.1 Indeks Modal Manusia

6.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Indeks Modal Manusia (IMM) mengukur potensi produktivitas seorang anak ketika memasuki usia produktif (18 tahun) yang menggambarkan tingkat efektivitas investasi pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Pada 2025, nilai indikatif IMM Indonesia mencapai 0,562. Capaian ini menunjukkan produktivitas SDM Indonesia diperkirakan telah mencapai 56,20 persen dari potensi produktivitas maksimal yang dapat diraih pada usia produktif.

Capaian IMM Indonesia didukung oleh tiga dimensi utama, yaitu *survival*, pendidikan, dan kesehatan. Pada dimensi *survival*, angka kelangsungan hidup balita sebesar 98,40 persen, mengindikasikan tingginya peluang anak untuk bertahan hidup hingga memasuki usia sekolah sebagai prasyarat penting bagi pembentukan modal manusia yang berkualitas.

Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 4-18 tahun sebesar 12,82 tahun, dan rata-rata nilai asesmen tingkat nasional sebesar 58,07. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki kesempatan belajar yang lebih luas dengan kualitas pembelajaran yang terus mengalami perbaikan.

Pada dimensi kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 19,80 persen dan angka kelangsungan hidup penduduk usia 15-60 tahun mencapai 90,90 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan layanan kesehatan pada anak dan kualitas kesehatan penduduk yang tecermin dari semakin besarnya proporsi masyarakat yang tumbuh sehat dan mampu bertahan hidup hingga usia produktif.

Capaian tersebut merupakan modal penting untuk meningkatkan kesiapan penduduk dalam bekerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 6.1
Indeks Modal Manusia Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Keterangan: Capaian IMM baru tersedia mulai tahun 2025 dan menjadi baseline pertama pengukuran IMM

Capaian IMM tersebut didukung oleh berbagai kebijakan strategis pemerintah yang secara konsisten memperkuat kualitas investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan, pemerintah terus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui: (1) program revitalisasi 17.188 satuan pendidikan mencakup 16.167 sekolah dan 1.021 madrasah, serta percepatan digitalisasi pendidikan yang telah menjangkau hampir seluruh satuan pendidikan di Indonesia; (2) pengembangan ekosistem pembelajaran digital dan peningkatan kompetensi guru untuk mendorong pemerataan kualitas pembelajaran; serta (3) penguatan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta mitra pembangunan dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), sehingga jumlah ATS berhasil diturunkan dari 3,7 juta anak (Susenas KOR BPS, 2024) menjadi 3 juta anak (Susenas KOR BPS, 2025). Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan lama sekolah sekaligus kualitas pembelajaran peserta didik sebagai fondasi pembentukan modal manusia yang unggul.

Pada sektor kesehatan, peningkatan capaian IMM didukung oleh berbagai intervensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sejak usia dini, melalui: (1) perluasan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga Juni 2026 telah menjangkau 59,5 juta jiwa (20,7 persen dari total penduduk) sebagai upaya deteksi dini faktor risiko kesehatan; (2) percepatan program penuntasan tuberkulosis (TB) melalui penguatan tata laksana, dengan cakupan penemuan kasus TB hingga pertengahan Juni 2026 mencapai 31 persen dan kasus diobati mencapai 87 persen; serta (3) pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama kepada kelompok sasaran 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) yang dilaksanakan secara terpadu, berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting dari 21,5 persen (2023) menjadi 19,8 persen (2024). Berbagai kebijakan tersebut mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga anak-anak Indonesia memiliki peluang yang semakin besar untuk tumbuh sehat, terbebas dari stunting, memperoleh pembelajaran yang optimal, dan menjadi sumber daya manusia yang produktif serta berdaya saing.



6.1.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan modal manusia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) keragaman karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang memengaruhi kebutuhan serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan; (2) akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan antarwilayah; (3) sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung yang menjamin layanan dasar berkualitas secara merata; (4) struktur demografi yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini hingga usia produktif; serta (5) pola penyakit yang memerlukan penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkelanjutan.

Berbagai upaya dalam mengakselerasi peningkatan kualitas dan daya saing SDM, antara lain: (1) penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung perluasan akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, aman, dan kondusif bagi semua anak, termasuk pencegahan dan penanganan ATS; (2) percepatan peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan sistem perencanaan kebutuhan dan rekrutmen guru, peningkatan kompetensi guru, serta penerapan kurikulum pembelajaran esensial dan kontekstual terhadap kebutuhan anak; (3) penguatan layanan kesehatan melalui perbaikan gizi masyarakat, penguatan kesehatan ibu dan anak, optimalisasi Integrasi Layanan Primer (ILP), pemenuhan tenaga kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan telemedicine, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan bagi kelompok rentan; serta (4) penguatan promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kampanye pencegahan penyakit tidak menular, serta perluasan CKG.

6.2 Kesehatan

6.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan kesehatan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, ditandai dengan Umur Harapan Hidup (UHH) yang meningkat dari 74,15 tahun (2024) menjadi 74,47 tahun (2025). Capaian ini didukung oleh peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, dan penguatan sistem kesehatan.

Peningkatan kualitas gizi dan kesehatan ibu dan anak ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup (2020) menjadi 144 kematian per 100.000 kelahiran hidup (2025), dan menurunnya prevalensi stunting dari 21,5 persen (2023) menjadi 19,8 persen (2024). Hal ini didorong melalui peningkatan kapasitas Puskesmas yang mampu menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), serta penguatan deteksi dini serta sistem pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan anak.

Penguatan kualitas gizi masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus diperluas penerima manfaatnya dari 53 juta jiwa (2025) menjadi 63,13 juta jiwa (Juli 2026). Pelaksanaan MBG diarahkan kepada kelompok sasaran 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sebagai intervensi pemenuhan gizi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hingga Juni 2026, MBG bagi kelompok sasaran 3B telah menjangkau 9.928.297 penerima manfaat. Pelaksanaannya diperkuat melalui pelibatan 136.115 kader Tim Pendamping Keluarga (TPK)

dalam pemberian edukasi dan pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran 3B.

Selain itu, upaya promotif dan preventif dilakukan melalui Cek Kesehatan Gratis yang telah mencapai 59,5 juta jiwa (Juni 2026). Pelaksanaan CKG terus diupayakan melalui peningkatan kapasitas Puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan dan intensifikasi CKG komunitas. Penanggulangan penyakit dilakukan melalui upaya percepatan dan perbaikan intervensi, ditandai dengan menurunnya insidensi TB dari 387 kasus per 100.000 penduduk (2023) menjadi 382 kasus per 100.000 penduduk (2024). Penuntasan TB terus diperkuat melalui percepatan penemuan kasus dan integrasi tata laksana kasus.

Peningkatan kualitas rumah sakit terus dilakukan sebagai upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Sebanyak 21 RS telah selesai dibangun pada tahun 2025, sementara 21 RS

lainnya masih dalam tahap pembangunan. Dengan progres tersebut, peningkatan 42 kapasitas rumah sakit ditargetkan dapat tercapai pada akhir 2026. Sementara itu, guna memperkuat layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA), pemerintah menargetkan peningkatan 66 Rumah Sakit (RS) di wilayah yang belum memiliki fasilitas setara Tipe C hingga 2028.

Selanjutnya, dalam memenuhi permintaan terhadap pelayanan kesehatan serta menjamin pembiayaan kesehatan bagi masyarakat, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperluas dari 98,42 persen (2024) menjadi 98,62 persen (2025). Penguatan sistem kesehatan dilakukan melalui peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, logistik Kesehatan, dan SDM Kesehatan.

Tabel 6.1
Capaian Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2024-2026

Uraian	Satuan	2024	2025	2026
Umur Harapan Hidup	tahun	74,15	74,47	74,68 ^{d)}
Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	189 ²⁾	144 ¹⁾	109 ^{d)}
Prevalensi stunting pada balita	%	19,80	18,8 ²⁾	17,5 ^{d)}
Makan Bergizi Gratis	juta penerima manfaat	- ^{a)}	53,68	63,13 ^{e)}
Insiden tuberkulosis	per 100.000 penduduk	382	-	252 ^{d)}
Cek kesehatan gratis	%	- ^{a)}	24,72	18 ^{f)}
Rumah sakit upgrade	rumah sakit	- ^{a)}	21 ^{b)}	21 ^{b)}
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,42	98,62	98,62 ^{d)}

Sumber: 1) Supas tahun 2025; 2) Long Form Sensus 2020

Keterangan: a) program belum berjalan; b) capaian kumulatif, pelaksanaan 2026 masih pada fase awal konstruksi yang sedang dilaksanakan di 20 RS; c) target tahun 2025; d) target tahun 2026; e) capaian triwulan II; f) capaian Maret 2026



6.2.2 Tantangan dan Upaya

Peningkatan pembangunan kesehatan selama beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) beban ganda penyakit yang ditandai dengan penyakit tidak menular yang terus meningkat dan di saat bersamaan penyakit menular tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat; (2) ketimpangan akses terhadap sumber pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman masih menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tiga masalah gizi; (3) pembudayaan hidup sehat yang memengaruhi beban ganda penyakit dan tiga masalah gizi seperti merokok, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, serta kurangnya aktivitas fisik; (4) masih terdapat variasi kapasitas sistem kesehatan antar daerah yang memengaruhi pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; (5) ketimpangan kapasitas sistem kesehatan antar daerah yang menyebabkan upaya kesehatan tidak optimal; dan (6) dukungan lintas sektor untuk isu-isu kesehatan yang memerlukan peran dari sektor lain.

Untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan, dibutuhkan langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan, antara lain: (1) penguatan pelayanan kesehatan primer melalui perluasan upaya promotif dan preventif, peningkatan deteksi dini, dan integrasi pelayanan; (2) penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup perbaikan tata kelola, peningkatan kepesertaan aktif, dan penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan JKN; dan (3) penguatan sinergi lintas sumber pembiayaan dan optimalisasi pendanaan kesehatan guna memperluas jangkauan dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Sementara itu, upaya peningkatan pelaksanaan di bidang kesehatan akan terus dioptimalkan

melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN): (1) penguatan Program Makan Bergizi Gratis melalui *refocusing* penerima manfaat, peningkatan kualitas penyelenggaraan, penguatan tata kelola ekosistem pendukung, serta intensifikasi promosi dan edukasi kepada penerima manfaat; (2) peningkatan kapasitas penemuan kasus dan diagnosa TB melalui pemenuhan alat skrining dan diagnosa, pemberdayaan kader dalam penemuan kasus, dan perluasan cakupan skrining; (3) peningkatan cakupan dan kualitas Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui layanan skrining lintas-sektor dan perluasan pelaksanaan CKG di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selain puskesmas; serta (4) percepatan peningkatan kapasitas rumah sakit melalui penyelesaian pembangunan, pemenuhan SDM kesehatan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta penguatan kesiapan operasional agar mampu memberikan pelayanan rujukan yang berkualitas dan merata.

6.3 Pendidikan

6.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Keberhasilan pembangunan pendidikan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif. Berbagai intervensi pembangunan diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi pendidik, serta mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Capaian indikator pembangunan pendidikan menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi.

Peningkatan RLS penduduk usia 15 tahun ke atas dan HLS didukung melalui percepatan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta penguatan penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan

melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencakup 24,96 juta peserta didik, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap I kepada 13,66 juta peserta didik dari keluarga miskin dan rentan, serta penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

Tabel 6.2
Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2022-2026

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026 ^{a)}
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun ¹⁾	tahun	9,08	9,13	9,22	9,41	9,45
Harapan lama sekolah penduduk usia di atas 7 tahun ¹⁾	tahun	13,10	13,15	13,21	13,30	13,36
Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional ²⁾	nilai	56,30	60,89	63,06	62,89	63,89
(a) Literasi Membaca		45,59	51,36	55,92	54,01	55,86
(b) Numerasi						
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi ³⁾	%	31,16	31,45	32,00	32,89	34,96
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi ³⁾	%	10,15	10,15	10,20	11,00	11,49
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ⁴⁾	%	69,84	66,30	68,14	67,12	68,50

Sumber: 1) Susenas 2022-2025; 2) Kemendikdasmen, 2022-2025; 3) BPS 2022-2025; 4) Sakernas 2022-2025

Keterangan: a) Target RKP 2026

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga menunjukkan perbaikan. Capaian tersebut didukung oleh upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui perluasan akses pendidikan, antara lain pemberian KIPK kepada 1,19 juta mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), serta peningkatan kapasitas perguruan tinggi. Penguatan akses

dan keberlanjutan pendidikan pada periode mendatang dilakukan melalui berbagai program prioritas yang berfokus pada peningkatan akses, kualitas, dan tata kelola pendidikan.

Berbagai program prioritas tersebut dilaksanakan melalui percepatan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah, penyediaan bantuan perlengkapan sekolah, pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi,



serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga pada desil 1 dan 2 melalui konsep pendidikan berasrama yang mendukung pengembangan kecerdasan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Dalam rangka memperluas akses pendidikan sejak usia dini sebagai bagian dari pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, cakupan PIP diperluas hingga jenjang Taman Kanak-kanak (TK) untuk meningkatkan partisipasi pendidikan prasekolah dan kesiapan anak memasuki pendidikan dasar.

Pada aspek kualitas pembelajaran, capaian hasil belajar peserta didik masih menunjukkan perbaikan, yang ditunjukkan oleh meningkatnya nilai literasi dan numerasi. Untuk mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran, pemerintah terus mendorong transformasi pembelajaran melalui digitalisasi pendidikan, pengembangan Studio Guru sebagai platform peningkatan kompetensi pendidik, serta penyaluran tunjangan guru secara langsung untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru.

Penguatan kualitas pembelajaran juga dilakukan dengan penciptaan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, antara lain melalui kebijakan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda yang berfokus pada pengembangan sains dan teknologi. SMA Unggul Garuda terdiri atas SMA Unggul Garuda Baru (SUGB) dan SMA Unggul Garuda Transformasi (SUGT). Sampai dengan tahun 2026, telah dilakukan pembangunan 4 unit SUGB yang berlokasi di Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara. Selain itu, sebanyak 42 sekolah telah ditetapkan sebagai SUGT.

Pemerintah juga memperkuat perlindungan peserta didik di ruang digital melalui

implementasi PP No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini menjadi landasan penyelenggaraan sistem elektronik yang mendukung terciptanya ekosistem digital yang aman bagi peserta didik.

Selain intervensi di bidang pendidikan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 43,42 juta peserta didik penerima manfaat (Kemendikdasmen, 28 Juli 2026) yang mendukung kesiapan belajar, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran secara lebih optimal.

Penguatan pendidikan tinggi dilakukan melalui pembangunan universitas baru pada bidang kedokteran, farmasi, serta sains dan teknologi yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan tenaga profesional pada sektor-sektor strategis. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi dilaksanakan melalui penyediaan beasiswa gelar dan nongelar, sertifikasi dosen, serta pengembangan kapasitas perguruan tinggi. Pengembangan tersebut didukung oleh pemanfaatan sumber pendanaan alternatif, sehingga peningkatan akses pendidikan tinggi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan daya saing perguruan tinggi.

Relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja ditunjukkan melalui persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi yang mencapai 67,12 (2025). Oleh karena itu, pengembangan pendidikan vokasi diarahkan untuk berorientasi pada kebutuhan industri melalui penguatan kemitraan antara satuan pendidikan, dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi lulusan.



Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025



6.3.2 Tantangan dan Upaya

Berbagai tantangan masih menjadi isu dalam pembangunan pendidikan, antara lain: (1) akses pendidikan pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; (2) infrastruktur dasar dan digital pada satuan pendidikan untuk mendukung pendidikan berkualitas yang merata; (3) sarana dan prasarana pembelajaran untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif; (4) kualitas pembelajaran untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik, khususnya pada kompetensi literasi membaca dan numerasi; serta (5) pemerataan distribusi, kompetensi guru dan dosen.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata, antara lain: (1) percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan literasi dan numerasi; (3) pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (4) pengembangan SMK Go Global sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN); (5) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (6) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (7) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic* (STEAM); serta (8) penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi.

6.4 Iptek dan Inovasi

6.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (Iptekin) menjadi fondasi transformasi menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat ekosistem Iptekin melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur strategis, penguatan fungsi intermediasi, dan optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif di berbagai bidang, termasuk pengawasan ketenaganukliran.

Kinerja pembangunan Iptekin pada periode 2024 hingga semester I 2026 menunjukkan perkembangan dalam sejumlah aspek. Hal ini adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan Indeks Inovasi Global (IIG). Komitmen tersebut didukung oleh intervensi strategis pemerintah melalui berbagai program beasiswa dan penguatan sistem rekrutmen berjenjang berbagai lembaga iptek. Hal ini telah meningkatkan jumlah SDM Iptek menjadi 1.267 orang per 1 juta penduduk.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah terus memperkuat kapasitas riset nasional melalui pembangunan infrastruktur Iptekin berkualitas. Salah satunya Laboratorium Penyakit Infeksi dengan Tingkat Keamanan Tinggi pada periode 2026–2027 untuk mendukung kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi kejadian penyakit infeksi dan mendukung program keamanan dan ketahanan kesehatan (*health resilience*). Selain itu, pemerintah juga sedang membangun *Multipurpose Research Vessels* (MRV) yang

terdiri atas kapal riset penjelajah samudera dan kapal penjelajah pesisir. Infrastruktur ini diharapkan dapat memperkuat pemetaan hidrografi pesisir, laut dalam, dan landas kontinen ekstensi.

Dalam rangka memperkuat fungsi intermediasi, pemerintah mendorong pengembangan ekosistem Iptekin di daerah melalui penguatan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Implementasi pengembangan ekosistem Iptekin daerah telah dimulai di Provinsi DKI Jakarta

dan Kota Depok melalui komitmen bersama kolaborasi pemerintah daerah, universitas, lembaga riset dan industri dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Selain itu, di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah terus memperkuat kolaborasi strategis melalui pembentukan tim kerja bersama untuk menjembatani hilirisasi inovasi ke dalam berbagai program pada bidang-bidang prioritas, salah satunya melalui pembentukan Hub Iptekin pada bidang pertanian.

Tabel 6.3
Capaian Pembangunan Bidang Iptek dan Inovasi Tahun 2024-2026

Uraian	Satuan	2024	2025	2026 ^{a)}
Peringkat Indeks Inovasi Global (GII)	-	54 ¹⁾	55 ²⁾	50-55
Jumlah SDM Iptek per 1 juta penduduk ^{*)}	SDM iptek per 1 juta penduduk	1.138 ³⁾	1.267 ⁴⁾	1.292
Jumlah infrastruktur strategis yang dibangun	unit	8 ⁵⁾	1 ⁶⁾	3
Jumlah Science Techno Park yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	5 ⁷⁾	5 ⁴⁾	5
Jumlah BRIDA/Ekosistem Daerah yang beroperasi optimal	lembaga	Indikator baru	2 ⁶⁾	5
Jumlah Hub Iptekin di K/L Yang Mengampu Bidang Prioritas yang dibentuk	lembaga	Indikator baru	-	1
Jumlah Produk Hasil Iptek dan Inovasi Strategis yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Masyarakat pada Bidang – Bidang Prioritas	produk	Indikator baru	25 ⁶⁾	40

Sumber: 1) Laporan GII WIPO, 2024; 2) Laporan GII WIPO, 2025; 3) Buku Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia, 2025; 4) Kemdiktisaintek, 2025; 5) BRIN, 2024; 6) BRIN, 2025; 7) Kemdiktisaintek, 2024

Keterangan: a) Target RKP 2026

Catatan: *) Profesional yang aktif melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah terus mempercepat hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Implementasinya diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi ARSINUM *Mobile* yang berhasil mengolah air banjir menjadi air layak minum dengan kapasitas hingga 5.000 liter/hari pada penanganan pasca bencana banjir di Sumatera. Keberhasilan

tersebut kini direplikasi melalui rencana penempatan empat unit ARSINUM stasioner di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam bidang keanekaragaman hayati, tim peneliti Indonesia berhasil mengidentifikasi spesies baru katak semak endemik Pulau Jawa dari genus *Philautus* (*Philautus candrageni sp*) yang menandakan posisi Indonesia sebagai



salah satu negara megabiodiversitas dunia. Sejalan dengan swasembada pangan nasional, pemerintah telah berhasil melaksanakan panen perdana varietas padi unggul “Sidenuk” (Sintanur Dedikasi Nuklir) dengan keunggulan potensi produksi 9,1 ton/ha.

Pada sektor kesehatan dan ketenaganukliran, pemerintah mengembangkan radiofarmaka baru berbasis senyawa molekul kecil peptida bertanda *Fluorine-18* untuk pencitraan PET (*Positron Emission Tomography*). Penelitian ini merupakan hasil kerja sama multipihak guna memperkuat akurasi diagnosis dan pemantauan respons pengobatan kanker.

Pengawasan ketenaganukliran juga terus diperkuat melalui penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perizinan dan inspeksi. Pada 2026, pemerintah telah mengembangkan aplikasi Bapeten *Licensing and Inspection System* (Balis) 2.5 yang berkontribusi besar terhadap peningkatan efektivitas layanan perizinan dan pengawasan. Implementasi sistem tersebut mendukung peningkatan kualitas layanan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif (FRZR) serta pengawasan instalasi dan bahan nuklir. Hal ini ditunjukkan melalui hasil inspeksi 113 fasilitas di bidang FRZR, 4 instalasi nuklir, 5 limbah radioaktif, 13 lembaga bahan nuklir dan proteksi fisik, dan 40 lembaga fasilitas kesehatan, serta pemeliharaan 7 unit detektor I-RDMS.

6.4.2 Tantangan dan Upaya

Pengembangan Iptekin masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) fungsi intermediasi hasil riset dan inovasi dengan kebutuhan penerima manfaatnya; (2) pengalokasian anggaran riset agar lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna; dan (3) dukungan kebijakan dan regulasi di daerah guna

mendukung aktivitas penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan hasil teknologi dalam negeri.

Pemerintah akan terus memperkuat ekosistem Iptekin melalui intervensi strategis, antara lain: (1) penguatan fungsi intermediasi hasil riset dan inovasi melalui optimalisasi peran Science Techno Park, Hub Iptekin di tingkat kementerian/lembaga maupun daerah, serta lembaga penelitian; (2) peningkatan investasi dan efektivitas pendanaan riset yang lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna, penguatan kapasitas SDM, dan pengembangan infrastruktur riset strategis; serta (3) penyempurnaan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat dan daerah untuk memperkuat kelembagaan dan menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif.

6.5 Ketenagakerjaan

6.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah memperkuat pembangunan ketenagakerjaan agar dapat mewujudkan pekerjaan layak melalui penyiapan tenaga kerja yang produktif, kompeten, dan adaptif. Penguatan ini diwujudkan melalui transformasi vokasi berbasis industri, perluasan sertifikasi kompetensi dan pemagangan, penguatan pasar kerja inklusif, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri.

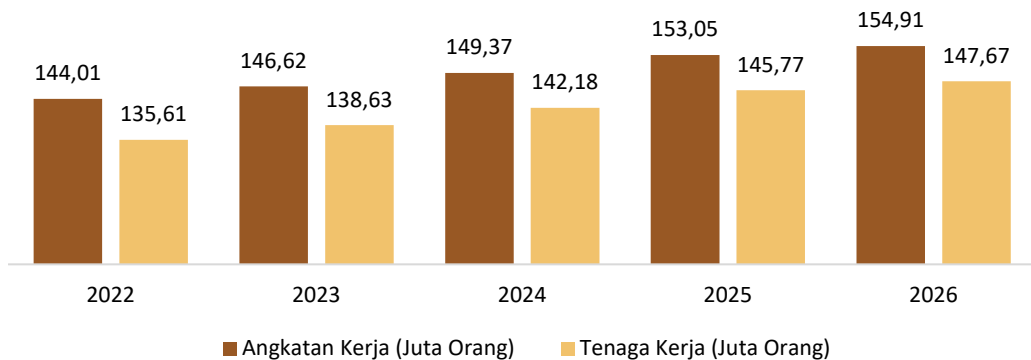
Jumlah angkatan kerja Indonesia meningkat 1,22 persen dari 153,05 juta orang (2025) menjadi 154,91 juta orang (2026). Selain itu, jumlah penduduk bekerja juga mengalami peningkatan 1,30 persen dari 145,77 juta orang (2025) menjadi 147,67 juta orang (2026). Peningkatan ini menunjukkan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tambahan angkatan kerja meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga tecermin dari tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten terjadi sejak tahun 2021. Pada 2025, TPT tercatat sebesar 4,76 persen dan kembali menurun menjadi 4,68 persen (Februari 2026). Penurunan TPT terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, yang menunjukkan bahwa perluasan kesempatan kerja semakin inklusif. Perluasan kesempatan kerja ini juga didukung oleh sektor ekonomi kreatif yang pada 2025 menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja, dengan

58,39 persen merupakan perempuan.

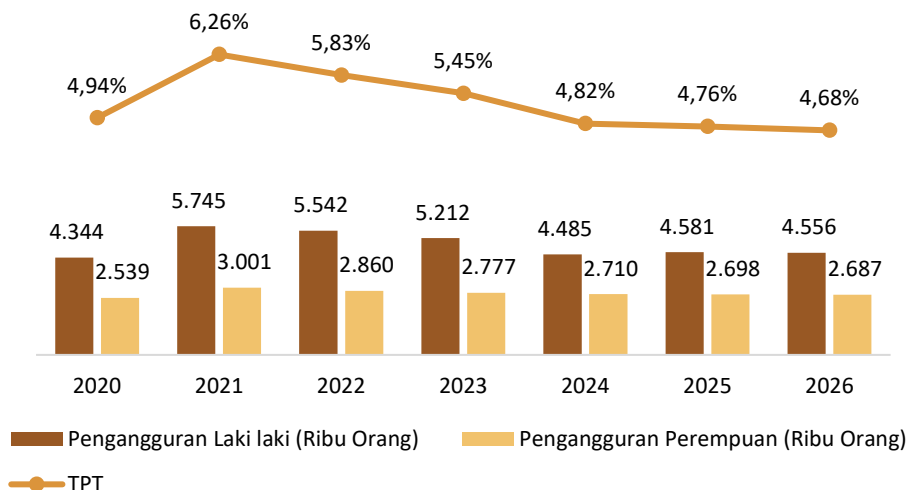
Di tengah dinamika penyesuaian pasar kerja di beberapa sektor usaha, tren penurunan TPT menunjukkan bahwa perekonomian tetap memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja yang terdampak perubahan struktur usaha maupun pemutusan hubungan kerja mampu bertransisi ke pekerjaan lain, baik sebagai pekerja formal dan informal, maupun sebagai pelaku usaha mandiri, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga.

Grafik 6.1
Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2022-2026



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Februari 2026

Grafik 6.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2026



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Februari 2026

Peningkatan jumlah tenaga kerja turut disertai perbaikan kualitas pekerjaan, tecermin dari kenaikan rata-rata upah pekerja sebesar 6 persen, dari Rp3,09 juta/bulan (2025) menjadi Rp3,29 juta/bulan (2026). Selain itu, setengah pengangguran juga mengalami penurunan sebesar 8,05 persen, dari 11,67 juta orang (2025) menjadi 10,72 juta orang (2026).

Pemerintah terus berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan melalui penyiapan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan perlindungan tenaga kerja. Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui penguatan pelatihan vokasi, yang pada semester I 2026 melalui balai dan pusat pelatihan kerja telah menghasilkan 38.009 lulusan, dengan 20.916 di antaranya menerima sertifikasi kompetensi.

Kesempatan kerja juga diperluas melalui Kartu Usaha Afirmatif dan Kartu Usaha Produktif. Salah satu implementasinya adalah Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), pada semester I 2026 telah menjangkau 7.034 wirausaha pemula, 1.777 penerima TKM Tematik Kemiskinan Ekstrem, serta 1.000 penerima TKM Lanjutan untuk mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Pelindungan tenaga kerja terus ditingkatkan melalui perluasan cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) yang hingga Juni 2026 telah mencapai 31,4 persen dari total pekerja. Capaian ini didorong oleh implementasi PP No. 50/2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk pekerja ekonomi digital (*gig workers*). Hal ini memperluas akses perlindungan bagi pekerja sektor informal dan digitalisasi layanan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Penguatan hubungan industrial terus dilakukan melalui peningkatan penerapan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial di perusahaan. Hingga semester I 2026, jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial mencapai 14,3 juta pekerja, didukung oleh meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar pada Wajib Laport Ketenagakerjaan (WLKP) Online menjadi 5,4 juta perusahaan.

Penguatan kebekerjaan bagi siswa SMK turut dilaksanakan melalui program Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri bagi Lulusan SMK, yang telah menjangkau 2.750 siswa. Selain itu, Program Magang Nasional diperluas dengan target 150.000 peserta pada semester II 2026.

Selanjutnya, tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah pekerja migran yang mencapai 153.049 orang pada semester I 2026. Penguatan ini tecermin dari proporsi penempatan melalui pemberi kerja berbadan hukum yang telah mencapai 69,74 persen, sehingga memberikan kepastian hubungan kerja dan pelindungan yang lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia.

6.5.2 Tantangan dan Upaya

Kondisi ketenagakerjaan nasional masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) produktivitas tenaga kerja; (2) ekosistem ketenagakerjaan; (3) kualitas dan pasar kerja yang inklusif; dan (4) tata kelola mobilitas tenaga kerja dan pelindungan sosial, termasuk tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia serta cakupan kepesertaan jaminan

sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain: (1) peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui penguatan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, *reskilling*, *upskilling*, pembelajaran sepanjang hayat, serta peningkatan kapasitas 40.000 calon Pekerja Migran Indonesia melalui program SMK Go Global sebagai program penyiapan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia; (2) penguatan ekosistem ketenagakerjaan melalui penguatan *link and match* pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri; (3) perluasan kesempatan kerja yang berkualitas dan inklusif melalui pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja formal, peningkatan akses bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta penguatan hubungan industrial; dan (4) penguatan perlindungan tenaga kerja melalui tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia, perluasan skema *Government to Government* (G to G) dan *Government to Private* (G to P), serta perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

6.6 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

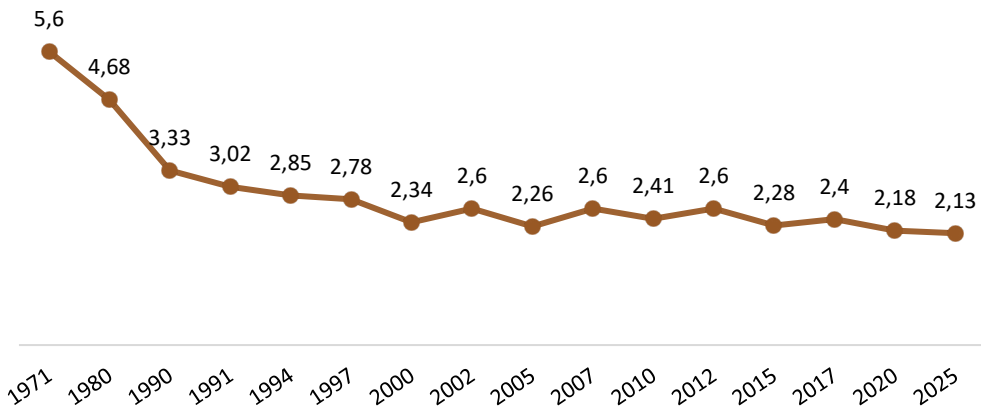
6.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Kebijakan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pengelolaan fertilitas

dan pencegahan kehamilan berisiko dengan meningkatkan pemahaman, perubahan perilaku, serta akses dan kualitas layanan kontrasepsi. Penurunan angka kelahiran diukur melalui indikator Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) yang menggambarkan rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun. Saat ini, TFR Indonesia terus menunjukkan penurunan dan telah mendekati tingkat penggantian penduduk (*replacement level*) sebesar 2,10. *Replacement level* menggambarkan tingkat fertilitas suatu populasi untuk menggantikan dirinya melalui kelahiran untuk mempertahankan jumlah penduduk dari generasi ke generasi. Penurunan TFR tersebut didukung oleh meningkatnya persentase peserta KB aktif melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

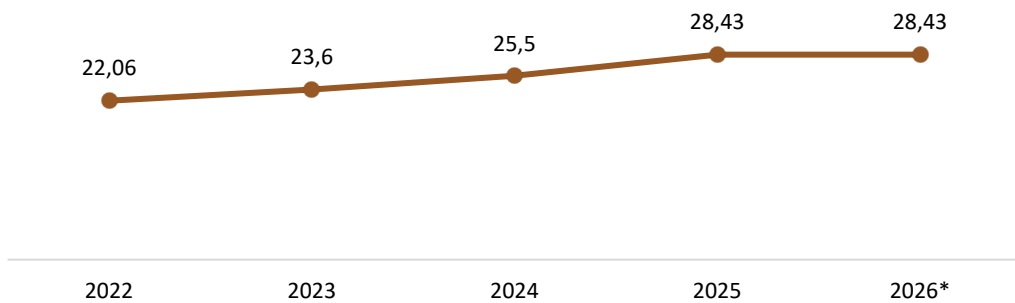
Selain menurunkan angka fertilitas, penyediaan layanan KB dan Kespro yang berkualitas juga berkontribusi pada penurunan kehamilan berisiko, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi *stunting*, serta mendukung optimalisasi bonus demografi. Pada 2025, AKI menurun dari 189 (2020) menjadi 144 per 100.000 kelahiran hidup, AKB menurun dari 19,83 (2020) menjadi 16,38 per 1.000 kelahiran hidup, dan prevalensi *stunting* menurun dari 21,50 persen (2023) menjadi 19,80 persen (2024). Namun demikian, capaian AKI dan AKB masih belum mencapai target pada 2025, yaitu sebesar 122 (AKI) dan 15,00 (AKB). Untuk itu, masih diperlukan upaya percepatan, termasuk melalui penyediaan layanan KB dan Kespro berkualitas sebagai bagian dari layanan kesehatan maternal yang komprehensif.

Grafik 6.3
Tren Angka Kelahiran Total Tahun 1971 – 2025



Sumber: BPS, BKKBN (SP, SDKI, SUPAS), 2025

Grafik 6.4
Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2022 - 2026



Sumber: Kemendukbangga/BKKBN, 2026

Keterangan: *) Target RKP 2026

Upaya peningkatan pemahaman Kespro dilakukan sejak dini melalui edukasi yang diintegrasikan ke dalam Modul Pendidikan Kespro Remaja, baik di satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan. Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kespro dilaksanakan melalui penyediaan 41.182 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta pembinaan kepada 60.789 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk menguatkan peran keluarga dalam pendampingan, pengasuhan, dan pembinaan remaja. Penguatan pemahaman dan kesadaran remaja terkait KB dan Kespro juga turut berkontribusi terhadap penurunan

angka perkawinan anak dari 9,23 persen (2021) menjadi 4,56 persen (2025).

Advokasi, edukasi, serta pendampingan Kespro dilakukan oleh Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB) yang tersebar di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Saat ini terdapat 15.510 PKB dan 2.972 PLKB yang terdiri dari 916 PLKB laki-laki dan 2.056 PLKB perempuan.

Pelibatan PKB dan PLKB laki-laki diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepesertaan pria dalam program KB. Pada 2025, jumlah penggunaan KB modern jenis Vasektomi/

Metode Operasi Pria (MOP) meningkat dari 2.284 orang (2024) menjadi 3.179 orang. Peningkatan tersebut mencerminkan penguatan peran pria dalam mewujudkan tanggung jawab bersama dalam perencanaan keluarga.

Dalam rangka perluasan cakupan, KIE dilakukan melalui berbagai media, seperti serial webinar di media daring. Penggerakan juga dilakukan melalui layanan KB serentak dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional serta layanan gratis jemput bola kepada calon akseptor di berbagai wilayah yang sulit secara geografis. Berdasarkan data SIGA tahun 2025, pelayanan kontrasepsi yang tercatat didominasi oleh pembiayaan dari pemerintah, yaitu sebesar 78 persen untuk alat kontrasepsi jangka pendek (jenis suntik, pil, dan kondom) dan 92 persen untuk alat kontrasepsi jangka panjang (jenis IUD dan Implan). Selebihnya, layanan KB dibiayai secara mandiri oleh akseptor.

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pemerintah mendorong peningkatan cakupan KB pascapersalinan melalui pendampingan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas untuk memperoleh layanan KB dalam periode 42 hari pascapersalinan. Edukasi juga diberikan kepada suami melalui program Ayah Idaman (AMAN) untuk meningkatkan peran aktif suami dalam merencanakan keluarga. Upaya tersebut mendukung pengaturan jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat pengasuhan anak dalam keluarga.

6.6.2 Tantangan dan Upaya

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan KB dan Kespro, antara lain: (1) disparitas capaian indikator KB dan Kespro antarwilayah; (2) pola

pikir masyarakat terkait dengan pembentukan keluarga dan keinginan memiliki anak; (3) pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap jenis dan efek samping dalam penggunaan Alokon yang berdampak pada tingkat partisipasi dalam ber-KB; (4) gaya hidup dan perilaku berisiko remaja yang berdampak terhadap kesehatan reproduksi; (5) keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang terlatih dan tersertifikasi kompetensi layanan KB dan Kespro; dan (6) penguatan sistem pencatatan dan pelaporan serta ketepatan perencanaan kebutuhan Alokon untuk mencegah kekosongan stok di fasyankes.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program KB dan Kespro, di antaranya: (1) perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB dan Kespro melalui penyediaan Alokon yang merata di seluruh wilayah Indonesia; (2) penguatan kebijakan KB dan Kespro yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, sosial, budaya, dan kelompok sasaran; (3) penguatan advokasi dan KIE yang inklusif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kespro melalui berbagai kanal komunikasi; (4) peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga lini lapangan untuk memastikan terlaksananya penggerakan masyarakat, termasuk di dalamnya konseling dan pendampingan dalam pemenuhan layanan KB berbasis hak dan penurunan angka *unmet need*; (5) penguatan peran PKB dan PLKB laki-laki untuk meningkatkan kepesertaan laki-laki dalam ber-KB; (6) peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan KB dan Kespro; serta (7) penguatan tata kelola melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan swasta dan masyarakat, guna mendukung pelaksanaan program KB dan Kespro yang efektif dan berkelanjutan.

6.7 Kualitas Keluarga

6.7.1 Capaian Utama Pembangunan

Keluarga merupakan institusi terkecil dan utama yang berperan dalam menanamkan nilai, moral, dan karakter bangsa. Keluarga Berkualitas berfokus pada upaya untuk memastikan setiap individu dapat hidup sejahtera dalam keluarga yang tangguh dan lingkungan sehat. Semakin berkualitas keluarga maka semakin tinggi modal manusia yang terbentuk untuk mewujudkan generasi yang berkarakter.

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) mencerminkan meningkatnya kualitas pembangunan keluarga. Capaian ini merupakan hasil dari penguatan institusi keluarga yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam menjalankan fungsi

keluarga, penyediaan fasilitas pendukung dalam melaksanakan fungsi utama keluarga, pemenuhan hak sipil dan hukum, serta afirmasi bagi keluarga rentan.

Di sisi lain, capaian Median Usia Kawin Pertama (MUKP) selama periode 2023-2025 menunjukkan masih diperlukan penguatan kepada calon pengantin (catin) dalam hal pendewasaan usia perkawinan pertama dan kesiapan membangun keluarga. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat edukasi, pendampingan calon pengantin, serta memperluas layanan kesehatan reproduksi melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk pemanfaatan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Hingga Juli 2026, data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tercatat sebanyak 328.312 catin telah mendapatkan pendampingan pranikah.

Tabel 6.4
Capaian Pembangunan Bidang Kualitas Keluarga Tahun 2023-2026

Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026 ^{a)}
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	-	69,51	71,62	72,47	73,83
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	61,43	62,40	67,34	67,34
Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Tahun	22,3	22,32	21,30	22,50

Sumber: Kemendukbangga/BKKBN 2025, BPS 2025, Bappenas 2026
Keterangan: a) Target akhir tahun 2026

Keluarga memiliki peran utama dalam memberikan pengasuhan yang layak sehingga dapat menanamkan nilai dan karakter kepada anak. Di tengah dinamika keluarga dengan ibu bekerja, kebutuhan akan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengasuhan keluarga juga semakin meningkat. Oleh karena itu, penyediaan layanan seperti Tempat Penitipan Anak (TPA) menjadi penting untuk memastikan anak tetap

memperoleh pengasuhan yang optimal ketika orang tua bekerja. Pemerintah memastikan seluruh layanan penitipan anak memenuhi standar perlindungan dan mendukung tumbuh kembang anak. Saat ini telah diterbitkan Standar Nasional Untuk Taman Asuh Ramah Anak dan telah dilaksanakan pendampingan program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) pada 3.406 TPA (Juli 2026), serta pembentukan

Satuan Tugas Penguatan Tata Kelola Layanan Pengasuhan Sementara.

Pemerintah juga memperkuat fungsi keluarga dalam pengasuhan melalui: (1) PP No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS); (2) Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) melalui layanan konseling Halo GATI; (3) Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (GAMAS); dan (4) Gerakan Ayah Mengambil Raport (GEMAR). Selain itu untuk memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya, telah dilakukan peningkatan kapasitas dan pembinaan pada 97.399 kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), 60.789 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), dan 68.046 kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) (Juli 2026).

Pemenuhan hak sipil dan legalitas keluarga akan memperkuat kualitas keluarga. Pada semester I 2026, cakupan kepemilikan akta perkawinan mencapai 67,16 persen, akta kelahiran 96,43 persen, akta cerai 65,82 persen, dan 14.674.150 aktakematian. Kondisi tersebut menggambarkan tumbuhnya kesadaran keluarga untuk memperoleh hak sipil dan legalitasnya, sehingga anggota keluarga mendapatkan kepastian hukum serta semakin terlindungi hak-haknya terutama dalam mendapatkan akses layanan publik dan program pemerintah.

Pemerintah juga memberikan dukungan bagi keluarga melalui penyediaan 5.551 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Satyagatra dan 464 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, fasilitasi penguatan ketahanan ekonomi keluarga juga dilakukan melalui pendampingan dan pemberdayaan bagi 44.700

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Juli 2026) yang bergerak di bidang peternakan, pertanian, perikanan, pelayanan/jasa, kuliner, kerajinan, dan bidang usaha lainnya.

6.7.2 Tantangan dan Upaya

Beberapa tantangan utama dalam meningkatkan kualitas keluarga ke depan, antara lain: (1) ketersediaan dan kualitas layanan pendukung keluarga, khususnya TPA dan pusat layanan konsultasi keluarga, (2) pengasuhan dalam keluarga di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital; (3) kekerasan dalam rumah tangga dan pola asuh yang tidak layak bagi anak; dan (4) kapasitas keluarga dalam menjalankan fungsinya, termasuk keluarga yang berada pada kondisi rentan.

Untuk menjawab tantangan di atas, beberapa upaya yang perlu dilakukan, antara lain: (1) peningkatan cakupan, kualitas, dan akses TPA terstandar, serta layanan konsultasi keluarga dan fasilitas pendukung keluarga lainnya; (2) penguatan kolaborasi K/L/D melalui kampanye dan edukasi publik untuk mendorong pembangunan keluarga berkualitas, termasuk penguatan *digital wellness* dan literasi digital; (3) penyiapan kehidupan keluarga yang optimal melalui pendidikan dan pendampingan calon pengantin terhadap pengetahuan fungsi keluarga, relasi gender yang setara, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta memastikan aspek kesehatan bagi catin; serta (4) penguatan dukungan terhadap kelompok rentan melalui kepastian hukum, program afirmasi, dan pemberdayaan keluarga.

6.8 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan

6.8.1 Capaian Utama Pembangunan

Kemajuan dalam pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan tecermin dari meningkatnya kualitas hidup perempuan di berbagai bidang, yang ditunjukkan oleh capaian positif dari berbagai indikator pembangunan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan kondisi kesetaraan yang semakin membaik, dari 0,447 (2023) menjadi 0,402 (2025). Hal ini sejalan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), dari 92,29 (2023) menjadi 92,69 (2025). Nilai tersebut mencerminkan hasil dari berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat kesetaraan gender, antara lain melalui pengintegrasian perspektif gender ke dalam seluruh sektor dan tahapan pembangunan serta melalui revitalisasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Berbagai intervensi tersebut berkontribusi pada perbaikan dimensi kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan yang merupakan komponen pembentuk IKG dan IPG.

Tabel 6.5
Capaian Pembangunan Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan Tahun 2023-2026

Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026 ^{a)}
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	0,447 ¹⁾	0,421 ¹⁾	0,402 ¹⁾	0,394
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	92,29 ¹⁾	92,46 ¹⁾	92,69 ¹⁾	92,11-92,21 ^{e)}
Proporsi perempuan kawin/ pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	%	0,126 ¹⁾	0,094 ¹⁾	0,077 ¹⁾	0,072
Proporsi Anggota Legislatif	%	Laki-Laki: 77,86; Perempuan: 22,14 ¹⁾	Laki-Laki: 77,54; Perempuan: 22,46 ¹⁾	Laki-Laki: 77,72; Perempuan: 22,28 ¹⁾	Laki-Laki: 77,29; Perempuan: 22,71
Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	%	Laki-Laki: 42,62; Perempuan: 37,60 ¹⁾	Laki-Laki: 43,78; Perempuan: 37,64 ¹⁾	Laki-Laki: 44,23; Perempuan: 38,35 ¹⁾	Laki-Laki: 44,56; Perempuan: 38,60
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,52 ¹⁾	56,42 ¹⁾	56,63 ¹⁾	56,40 - 59,31
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	8,70 ^{2)b)}	6,60 ²⁾	6,30 ^{d)}	5,90
Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan	ribu rupiah	Laki-Laki: 16.736; Perempuan: 9.579 ¹⁾	Laki-Laki: 17.346; Perempuan: 9.922 ¹⁾	Laki-Laki: 17.808; Perempuan: 10.220 ¹⁾	Laki-Laki: 18.037; Perempuan: 10.135
Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	lembaga	KL: 7; Provinsi 4; Kab/Kota: 4 ^{3)c)}	KL: 3; Provinsi: 2; Kab/Kota: 3 ³⁾	KL: 4; Provinsi: 3; Kab/Kota: 5 ^{d)}	KL: 7; Provinsi: 6; Kab/Kota: 11

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik, 2023-2025; 2) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 dan 2024 (survei tiga tahunan sehingga data 2023 dan 2025 tidak tersedia); 3) Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2022 dan 2024 (survei dua tahunan sehingga data tahun 2023 dan 2025 tidak tersedia)

Keterangan: a) Target tahun 2026; b) Capaian tahun 2021; c) Capaian tahun 2022; d) Target tahun 2025; e) Proyeksi target tahun 2026 sedang dikaji dan dihitung ulang menyesuaikan perubahan metode penghitungan IPG oleh BPS.

Pada dimensi kesehatan, pemerintah terus memperluas akses terhadap layanan dasar kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Salah satunya, diwujudkan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memberikan manfaat pada perempuan, termasuk ibu hamil. Pada 2025, partisipasi perempuan pada program tersebut mencapai 39,59 juta orang (54,39 persen).

Pada dimensi ekonomi, pemerintah terus mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan melalui pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*). Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui: (1) penetapan UU No. 2/2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga; (2) peluncuran Kelompok Kerja Ekonomi Perawatan; (3) penyusunan Peta Okupasi dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pekerja perawatan; serta (4) penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Perawatan.

Pada dimensi pemberdayaan, peran perempuan juga terus diperkuat melalui: (1) peningkatan akses terhadap pendidikan; (2) pengawalan kuota afirmasi 30 persen melalui Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan penyelenggaraan Musyawarah Ibu Bangsa; serta (3) penguatan kepemimpinan perempuan di birokrasi.

Selanjutnya, untuk memastikan implementasi PUG berjalan efektif dan berkelanjutan di seluruh sektor pembangunan, tata kelola penyelenggaraan PUG di tingkat pusat dan daerah terus diperkuat. Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG). Implementasi PUG juga diperkuat

melalui advokasi, sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terlatih PUG, penyusunan berbagai modul integrasi PUG dalam proses pembangunan, serta penguatan koordinasi antarkementerian/lembaga penggerak. Sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan implementasi PUG, pemerintah juga menyelenggarakan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) bagi kementerian/lembaga/daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam mendukung pembangunan yang responsif gender.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari kekerasan. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan menurun, dari 8,70 persen (2021) menjadi 6,60 persen (2024). Penurunan ini didukung oleh penguatan berbagai upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP). Di tataran regulasi, pemerintah menetapkan beberapa aturan pelaksana UU No. 12/2025 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yakni PP No. 29/2025 tentang Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual, PP No. 30/2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS.

Pada aspek layanan, pemerintah terus memperluas akses terhadap layanan perlindungan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di 34 provinsi dan 431 kabupaten/kota, serta mendorong pembentukannya di seluruh wilayah. Jenis layanan yang diberikan juga diperluas dari enam menjadi sebelas layanan sesuai kebutuhan korban. *Hotline* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 sebagai pintu masuk pelaporan

terus diperkuat, disertai dengan pengembangan SIMFONI PPA Versi 3 berbasis manajemen kasus untuk memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan kasus.

6.8.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan, antara lain: (1) implementasi kebijakan dan pedoman operasional PUG di tingkat pusat dan daerah secara efektif dan berkelanjutan; (2) advokasi integrasi perspektif gender pada kebijakan sektoral dan daerah; (3) afirmasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan; (4) norma sosial dan budaya yang menyebabkan ketidakadilan gender; (5) pencegahan kekerasan yang terintegrasi secara sistematis dan berkelanjutan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, komunitas, tempat kerja, serta ruang digital; (6) tata kelola penanganan dan respons terhadap perempuan korban kekerasan; (7) pembiayaan layanan pendampingan korban kekerasan; (8) integrasi dan interoperabilitas data kekerasan; dan (9) kapasitas SDM pada lembaga layanan, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).

Langkah untuk menjawab tantangan tersebut: (1) advokasi dan sosialisasi Stranas PUG kepada pemerintah pusat dan daerah; (2) penyelesaian Rencana Intervensi Pembangunan Kesetaraan Gender dalam seluruh sektor pembangunan, serta mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender; (3) penguatan kebijakan yang mendorong penciptaan ekosistem kerja yang inklusif dan ramah keluarga; (4) pengembangan intervensi perubahan norma sosial melalui transformasi relasi gender, penghapusan praktik yang mentoleransi kekerasan, dan pelibatan laki-laki

sebagai agen perubahan; (5) pengembangan mekanisme deteksi dini dan identifikasi faktor risiko kekerasan berbasis keluarga, satuan pendidikan, layanan dasar, dan komunitas untuk mencegah kekerasan berulang; (6) penguatan fungsi kelembagaan dan standar layanan melalui penguatan koordinasi, manajemen kasus, dan sistem rujukan lintas sektor; (7) penyusunan standar pembiayaan lintas sektor sebagai acuan penyediaan layanan korban kekerasan; (8) penguatan sistem data administrasi kasus kekerasan; dan (9) pengembangan bahan ajar serta pelaksanaan sertifikasi SDM lembaga layanan dan APH.

6.9 Perlindungan Anak

6.9.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan bidang perlindungan anak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bidang perlindungan anak terus menunjukkan kemajuan, baik dari sisi pemenuhan hak anak maupun perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya.

Indeks perlindungan anak menunjukkan peningkatan dari 68,29 (2023) menjadi 71,02 (2024). Peningkatan tersebut didukung oleh berbagai upaya lintas sektor dalam memperkuat pemenuhan hak anak secara universal serta perlindungan khusus bagi anak. Pada aspek pemenuhan hak sipil, persentase anak usia 0–4 tahun yang memiliki akta kelahiran meningkat dari 94,52 persen (2024) menjadi 94,96 persen (2025). Capaian tersebut memperkuat pemenuhan hak identitas anak sebagai fondasi untuk memperluas akses anak terhadap berbagai hak dan layanan publik lainnya. Selain itu, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

juga terus meningkat, dari 58,38 persen (2024) menjadi 62,88 persen (semester I tahun 2026). Selanjutnya, pemenuhan hak atas kesehatan terus diperkuat melalui peningkatan cakupan

kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi anak usia 0–17 tahun yang mencapai 79,32 persen (2025).

Tabel 6.6

Capaian Pembangunan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026

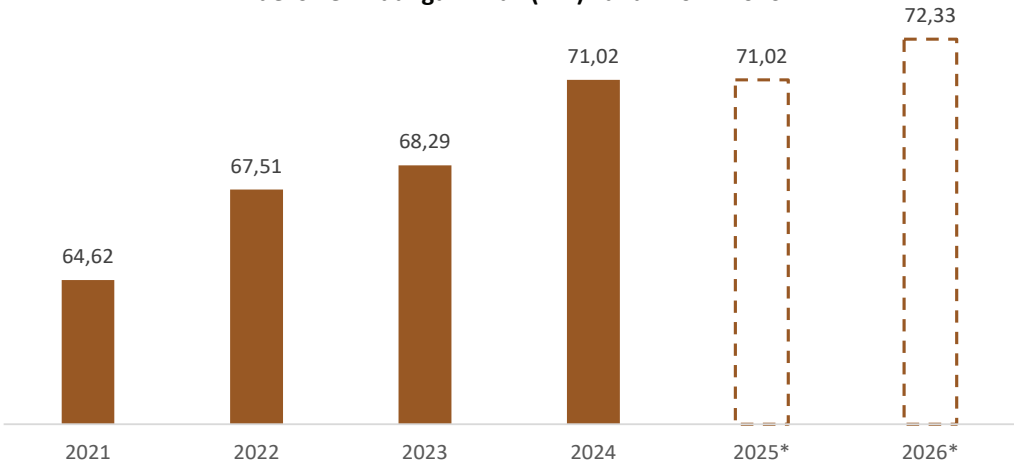
Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026 ^{a)}
Indeks Perlindungan Anak (IPA) ¹⁾	Nilai	68,29	71,02	71,02 ^{b)}	72,33
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) ¹⁾	Nilai	65,58	68,87	68,87 ^{b)}	69,74
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) ¹⁾	Nilai	79,91	80,32	81,44 ^{c)}	83,42
Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran ²⁾	%	95,29	94,52	94,96	97
Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami minimal salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir ¹⁾	%	-	Laki-laki: 31,11 Perempuan: 36,31	Laki-laki: 25,37 Perempuan: 31,60 ^{c)}	Laki-laki: 24,63 Perempuan: 31,06
Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan ¹⁾	%	-	2,37	2,41 ^{c)}	2,48
Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) usia 0-17 tahun ³⁾	%	70,00	73,58	79,32	73,00

Sumber: 1) Kementerian PPPA; 2) Kementerian Dalam Negeri; 3) BPJS Kesehatan.

Keterangan: a) Target tahun 2026; b) Capaian tahun 2024; c) Target tahun 2025.

Grafik 6.5

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2021-2026



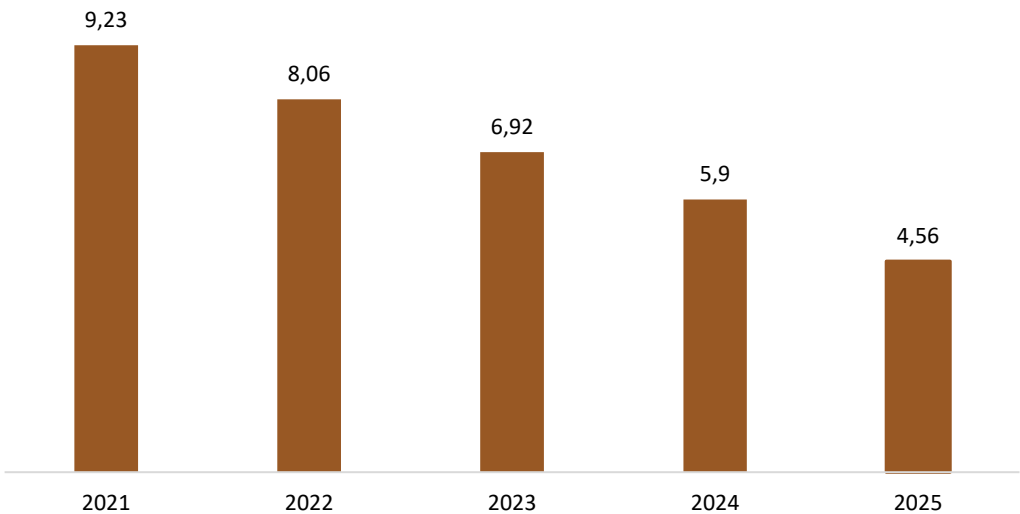
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2026 (diolah)

Keterangan : *) Target 2026

Berbagai intervensi dalam memastikan pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang layak, antara lain: (1) pemberian layanan edukasi dan konsultasi pengasuhan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yang hingga 10 Juli 2026 telah terbentuk sebanyak 464 Puspaga di daerah pada berbagai tingkatan, dengan 91 di antaranya telah terstandar; (2) penguatan tata kelola layanan pengasuhan sementara melalui standardisasi lembaga layanan, tercatat sebanyak 70 lembaga telah terstandar Taman Asuh Ramah Anak (TARA) (April 2026); serta (3) penguatan tata kelola dan implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, untuk memastikan anak usia dini memperoleh layanan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, dan kesejahteraan.

Peningkatan capaian pembangunan perlindungan anak lainnya juga ditunjukkan dengan terus menurunnya angka perkawinan anak yang tercermin melalui capaian indikator proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau hidup bersama pertama sebelum usia 18 tahun. Angka perkawinan anak turun dari 9,23 persen (2021) menjadi 4,56 persen (2025). Penurunan angka perkawinan anak ini berdampak positif untuk peningkatan pemenuhan hak anak atas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan peluang ekonomi dan penurunan kemiskinan. Upaya pencegahan perkawinan anak saat ini juga telah diperkuat dengan diterbitkannya PP No. 3/2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Grafik 6.6
Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun pada 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak (KtA) terus diperkuat melalui implementasi Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan budaya antikekerasan di masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, serta memastikan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi anak korban kekerasan. Pada 2024, prevalensi kekerasan terhadap anak mencapai sebesar 31,11 persen pada anak laki-laki dan 36,31 persen pada anak perempuan.

Untuk memperkuat pencegahan KtA, penyebaran informasi melalui berbagai media terus dilakukan dengan sasaran kepada anak, orang tua, keluarga dan masyarakat. Sementara itu, untuk memperkuat penanganan yang komprehensif dan berkualitas bagi anak korban kekerasan, telah dilakukan berbagai upaya, seperti: (1) penguatan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 sebagai *hotline* pengaduan kasus kekerasan yang terintegrasi pusat dan daerah; (2) peningkatan ketersediaan dan standarisasi lembaga layanan PPA di daerah, yang ditunjukkan dengan telah terbentuknya 34 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak di 34 provinsi dan 431 kabupaten/kota; (3) pengembangan Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Versi 3 sebagai sistem pencatatan dan penanganan kekerasan berbasis manajemen kasus, serta penguatan implementasinya di pusat dan daerah; dan (4) pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2025 dan 2026 bagi provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan dan kapasitas kelembagaan PPA di provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk memperkuat pencegahan dan penanganan KtA di satuan pendidikan telah dilaksanakan beberapa intervensi antara lain: (1) pengembangan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN); (2) pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Anak; serta (3) penguatan upaya pencegahan perundungan/*bullying*.

Di samping itu, untuk memperkuat penghapusan KtA, implementasi berbagai kebijakan terus diperkuat pada tahun 2025 dan 2026, antara lain melalui: (1) implementasi UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) beserta sejumlah regulasi dan kebijakan turunannya; (2) implementasi PP No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), di antaranya melalui pembatasan akses terhadap konten yang berisiko bagi anak serta peningkatan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Guna mendukung implementasi PP TUNAS, telah diterbitkan kebijakan pelaksana dan sejumlah platform digital telah berkomitmen menerapkan ketentuan PP tersebut, yang diperkirakan telah menjangkau perlindungan terhadap sekitar 156 juta akun anak secara nasional. Selain itu, implementasi PP Tunas juga didukung dengan implementasi Perpres No. 87/2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025–2029 di pusat dan daerah.

Selain itu, capaian perlindungan anak juga tergambar dari meningkatnya jumlah daerah yang memperoleh peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada 2025, sebanyak 355 kabupaten/kota memperoleh predikat KLA, yang terdiri atas 22 kabupaten/kota berpredikat Utama, 69 berpredikat Nindya, 125 berpredikat

Madya, dan 139 berpredikat Pratama. Capaian tersebut didukung oleh penguatan partisipasi anak melalui pembentukan 34 Forum Anak Provinsi, 486 Forum Anak Kabupaten/Kota, 3.073 Forum Anak Kecamatan, dan 13.273 Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai wadah partisipasi bermakna anak dalam pembangunan.

6.9.2 Tantangan dan Upaya

Perlindungan anak masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain: (1) kualitas pengasuhan di keluarga dan di luar keluarga, termasuk memastikan tersedianya lembaga layanan pengasuhan sementara sesuai kebutuhan masyarakat yang menjamin pemenuhan hak serta melindungi anak dari kekerasan dan perlakuan salah; (2) akses dan kualitas layanan sebelum dan setelah terjadi perkawinan anak; (3) kekerasan terhadap anak di keluarga, satuan pendidikan, termasuk satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama, masyarakat dan di ranah daring; (4) akses dan kualitas layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan di pusat dan daerah; serta (5) penguatan proses pembangunan di berbagai bidang yang berbasis hak anak dan menerapkan prinsip-prinsip hak anak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan anak melalui berbagai upaya, antara lain: (1) pengembangan regulasi dan kebijakan pengasuhan di keluarga dan luar keluarga serta penyusunan Peta Jalan Pengasuhan dan *Blueprint* Layanan Pengasuhan Sementara; (2) penguatan koordinasi lintas sektor untuk pencegahan perkawinan anak, termasuk integrasinya dengan pencegahan

dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); (3) penguatan pencegahan KtA berbasis keluarga, satuan pendidikan, termasuk di satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama, dan ruang digital melalui penguatan implementasi PP TUNAS; (4) penguatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan; (5) penguatan pengarusutamaan hak anak melalui penyusunan kebijakan, pedoman operasional, serta implementasi prinsip-prinsip hak anak dalam proses pembangunan.

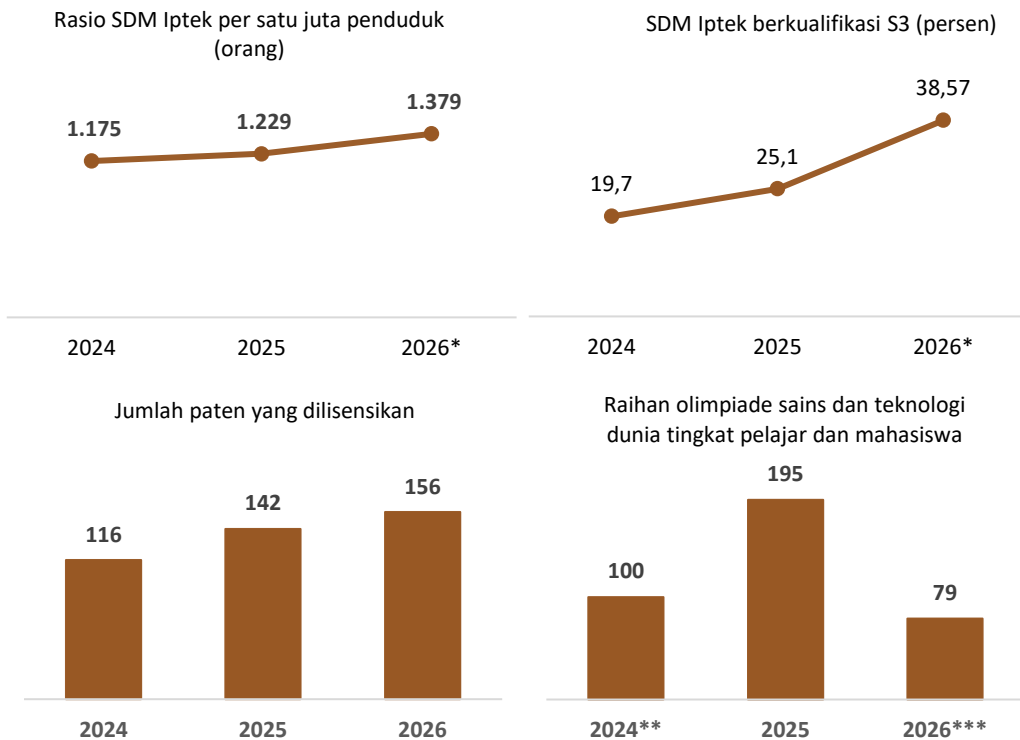
6.10 Manajemen Talenta Nasional

6.10.1 Capaian Utama Pembangunan

Manajemen Talenta Nasional (MTN) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memetakan, membina, dan mempertahankan SDM unggul berdaya saing global. Pemerintah melalui MTN berfokus pada peningkatan kompetensi, penyiapan talenta, dan ekosistem talenta. Pembangunan MTN merupakan paradigma baru dalam pengelolaan SDM yang menekankan pada talenta unggul, daya saing berbasis meritokrasi, serta investasi pada manusia.

Pemerintah memperkuat ekosistem talenta nasional yang merupakan kemitraan terintegrasi yang berfungsi untuk membina, mengembangkan, dan mempertahankan talenta bangsa. Ekosistem ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 108/2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.

Grafik 6.7
Capaian MTN Bidang Riset dan Inovasi Tahun 2024-2026



Sumber: BRIN, Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, 2026

Keterangan: *) Target akhir tahun 2026; **) baseline 2024; ***) data sementara, data Belmawa Kemendiktisaintek belum tersedia

Pada bidang riset dan inovasi, intervensi pemerintah dilakukan mulai dari tahap pra-bibit hingga talenta unggul. Sekolah Unggul Garuda (SUG) sebagai tempat bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan kecintaan terhadap sains, teknologi, serta kegiatan riset sejak dini.

Program pembinaan talenta dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terjaring dari berbagai tingkatan dan wilayah. Hingga saat ini, sebanyak 22.215 peserta telah mengikuti berbagai program pembinaan, mulai dari kompetisi, pendidikan berbasis riset, pendampingan, mobilitas periset, hingga kolaborasi ilmiah. Penguatan pembinaan

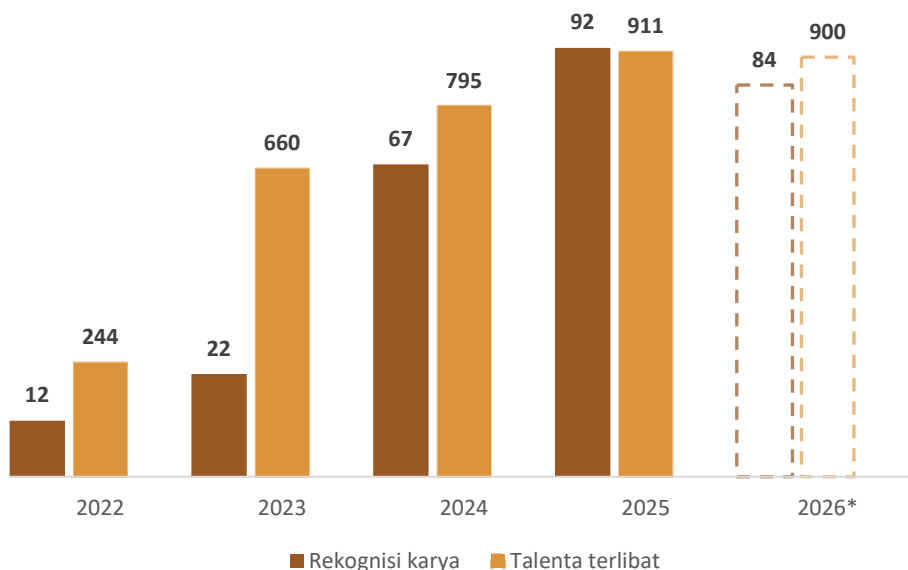
tersebut turut mengantarkan talenta Indonesia pada tingkat pelajar dan mahasiswa (meraih 79 prestasi internasional bidang sains dasar, sains terapan dan teknologi terdiri atas medali 26 emas, 21 perak, 15 perunggu, dan 17 *honorable mention*).

Pelaksanaan apresiasi talenta unggul sebagai pengakuan atas kontribusi talenta Indonesia dalam pengembangan pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Apresiasi ini diberikan kepada 13 talenta unggul melalui lima ajang penghargaan riset dan inovasi. Langkah ini memperkuat rekognisi talenta Indonesia serta membuka jejaring kolaborasi dan peluang pemanfaatan hasil riset yang lebih luas.

Pelaksanaan MTN bidang Seni Budaya telah melibatkan 36.990 talenta dengan 5.711 talenta potensial dan unggul, mendapatkan 116 rekognisi di tingkat internasional melalui 28 kegiatan di 19 negara. Selama periode 2022-2025, jumlah karya Seni Budaya yang memperoleh rekognisi internasional meningkat

secara signifikan dari 12 karya tahun 2022 menjadi 92 karya tahun 2025. Pada periode yang sama, jumlah talenta Seni Budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi internasional juga mengalami peningkatan dari 244 orang menjadi 911 orang.

Grafik 6.8
Capaian MTN Bidang Seni Budaya Tahun 2022-2026



Sumber: BPS, Kementerian Kebudayaan, 2026

Keterangan: *) Target RKP 2026

Manajemen Talenta Nasional bidang Seni Budaya telah memberikan dampak positif dalam memperluas eksposur, meningkatkan daya saing talenta, serta memperkuat posisi Seni Budaya Indonesia di kancah Internasional sehingga dapat berkontribusi terhadap penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui prestasi dan karya Seni Budaya. Pada 2026, pemerintah memperkuat ekosistem pembinaan talenta secara holistik, mencakup pembibitan, pengembangan, hingga internasionalisasi dan promosi talenta ke panggung global melalui kolaborasi lintas sektor.

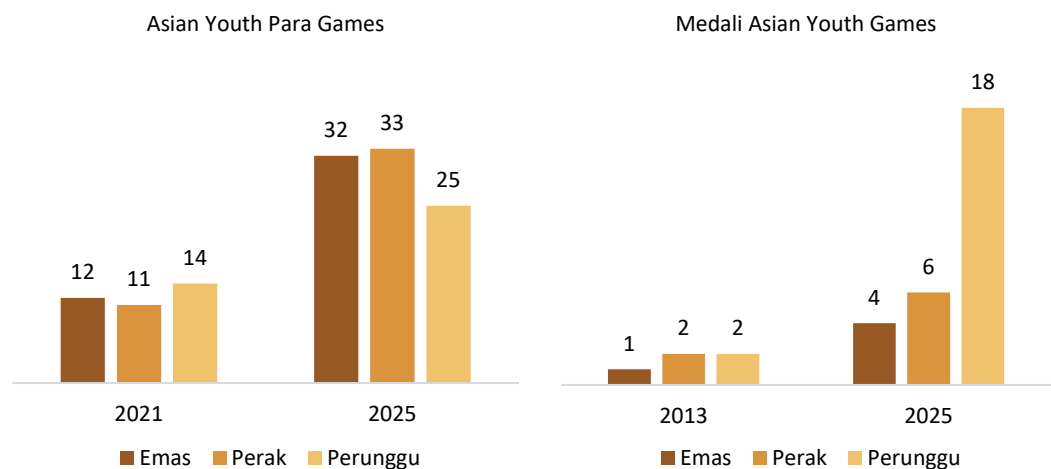
Pemerintah juga memperkuat dukungan fasilitasi pembinaan talenta olahraga nasional melalui implementasi MTN Bidang Olahraga yang terintegrasi dan berbasis data. Saat ini, telah tersedia sebanyak 25.524 talenta olahraga yang terdiri atas 22.142 olahragawan unggul dan potensial serta 3.382 olahragawan pada tahapan pra-bibit dan bibit.

Implementasi MTN pada bidang olahraga menunjukkan peningkatan. Pada ajang *Asian Youth Games 2025* Indonesia berhasil meraih 28 medali, meningkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang meraih

5 medali. Selanjutnya pada *Asian Youth Para Games 2025*, Indonesia memperoleh 90 medali meningkat dari 37 medali yang diraih pada penyelenggaraan sebelumnya. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kompetensi pelatih dan tenaga keolahragaan yang semakin profesional dalam menerapkan pembinaan

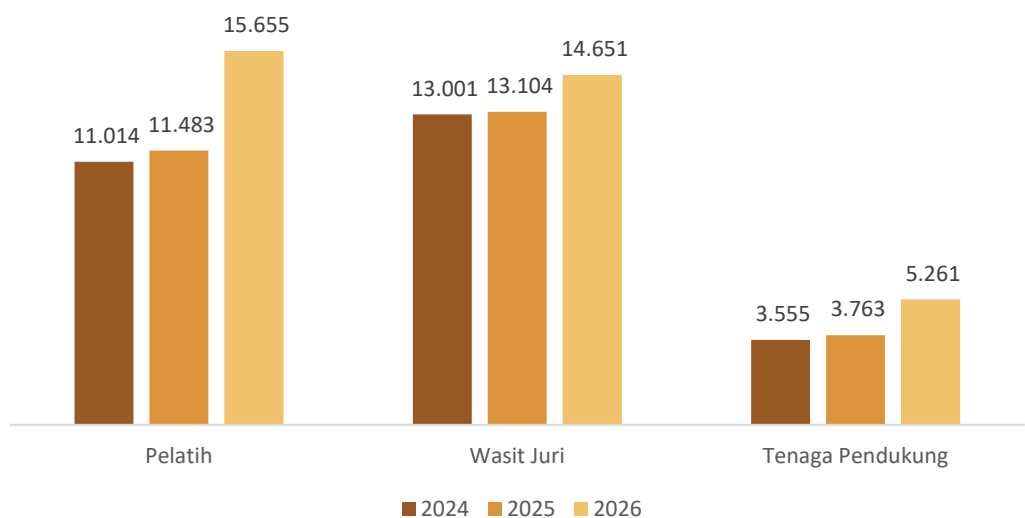
berbasis ilmu pengetahuan dan pendampingan atlet secara menyeluruh. Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah dalam memperkuat ekosistem pembinaan olahraga nasional guna melahirkan generasi atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia.

Grafik 6.9
Perolehan Medali Asian Youth Para Games dan Asian Youth Games



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2026

Grafik 6.10
Data Pelatih, Wasit Juri, dan Tenaga Pendukung Tahun 2024-2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)

Penguatan implementasi Desain Besar Manajemen Talenta Nasional dilakukan melalui pembentukan Gugus Tugas MTN sebagai wadah orkestrasi kebijakan lintas sektor, penetapan Rencana Aksi MTN Tahun 2025-2029 sebagai acuan bersama, serta pengembangan Basis Data Terpadu (BDT) MTN sebagai landasan penguatan ekosistem kesinambungan pembinaan talenta. Langkah ini memperluas akses pengembangan talenta dan mendorong pembinaan dari tahap pra-bibit hingga unggul secara lebih terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

6.10.2 Tantangan dan Upaya

Berbagai tantangan masih menjadi isu dalam penyelenggaraan MTN, antara lain: (1) kesinambungan jalur pengembangan talenta dari tahap prabibit, pembibitan, potensial, hingga unggul belum sepenuhnya terhubung; (2) integrasi data talenta untuk mendukung pemetaan, penelusuran perkembangan, dan pemberian dukungan kepada talenta secara tepat; (3) kapasitas kelembagaan talenta di daerah; serta (4) keterlibatan dan kontribusi pemangku kepentingan nonpemerintah dalam pembinaan talenta belum terbangun secara sistematis.

Dalam mewujudkan ekosistem MTN yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan, upaya yang dilakukan, antara lain: (1) penguatan kesinambungan jalur pengembangan talenta; (2) percepatan integrasi data dan program pembinaan melalui pengembangan Basis Data Terpadu Manajemen Talenta Nasional sebagai dasar pemetaan, penelusuran trajektori, pemberian intervensi, serta pemantauan perkembangan talenta; (3) penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MTN; serta (4) perluasan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi,

komunitas, media, filantropi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pembiayaan, fasilitas, jejaring, peningkatan kapasitas, dan kesempatan pengembangan talenta.

6.11 Pemuda dan Olahraga

6.11.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan pemuda merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan bonus demografi. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kepemudaan yang berkualitas dan inklusif, tecermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dari 62,88 (2024) menjadi 65,56 (2025).

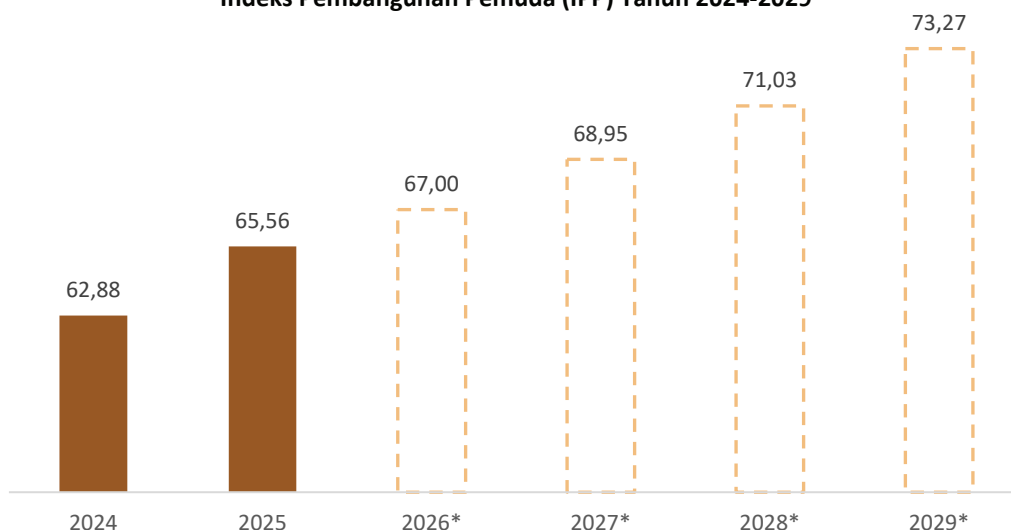
Peningkatan ini didukung oleh membaiknya indikator penyusun IPP, antara lain persentase pemuda dengan yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (*Not in Employment, Education, or Training/NEET*) dari 23,78 persen (2024) menjadi 22,90 persen (2025). Selain itu, peningkatan IPP juga didukung oleh meningkatnya proporsi pemuda penyandang disabilitas yang bekerja dari 20,04 persen (2024) menjadi 25,78 persen (2025).

Capaian tersebut didukung oleh penguatan kebijakan dan tata kelola pelayanan kepemudaan melalui pemptakhiran Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta Pengembangan Kewirausahaan Nasional (tematik kewirausahaan pemuda). Implementasi ini diwujudkan melalui: (1) perluasan pemberdayaan ekonomi pemuda dengan memfasilitasi 100 tenaga kerja muda rentan dan mengakselerasi 1.228 Kader Kewirausahaan Nasional melalui dukungan permodalan; (2) pemberdayaan 800 pemuda miskin ekstrem di delapan provinsi dan 500

pemuda penyandang disabilitas di tiga provinsi melalui program kewirausahaan; serta (3) penyelenggaraan Program *Youth Edulife Skill* (YES) bagi 514 peserta. Di saat yang sama, pemerintah memperkuat kepemimpinan dan

kapasitas pemuda melalui pembinaan 691 kader kepemudaan tingkat nasional dan internasional dari seluruh Indonesia, serta penguatan 40 organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

Grafik 6.11
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2024-2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)
Keterangan: *) Target

Penguatan budaya olahraga di masyarakat berdampak baik terhadap peningkatan kualitas SDM. Budaya ini didorong oleh penerapan kebijakan Hari Bebas Kendaraan di berbagai kabupaten/kota, pelaksanaan kampanye olahraga, dan berbagai tren aktivitas olahraga yang berkembang di masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat yang berolahraga setidaknya sekali dalam seminggu, yang semula 33,62 persen (2024) menjadi 37,27 persen (2025).

Penguatan tersebut turut diikuti oleh peningkatan capaian Indonesia pada berbagai ajang *multi-event* dan *single-event* internasional. Prestasi Indonesia pada ajang *multi-event* semakin menegaskan keberhasilan program pembinaan olahraga, salah satunya melalui raihan 135 medali emas dengan total 392 medali pada ASEAN Para Games. Selanjutnya, Indonesia

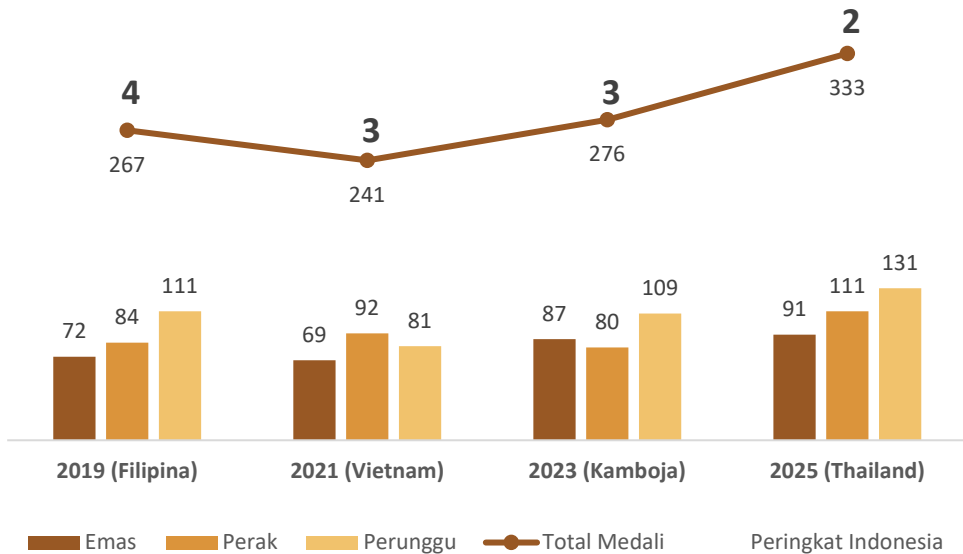
mencatatkan capaian terbaik sepanjang sejarah keikutsertaan di ajang SEA Games 2025, dengan meraih peringkat kedua dan memperoleh 333 medali.

Pembinaan berbagai cabang olahraga terus dilakukan dengan memperkuat dukungan dan fasilitasi pembinaan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat FIFA tim nasional Indonesia dari 122 menjadi 118 dunia. Sementara itu, tim nasional futsal Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan menempati peringkat ke-14 dunia. Pada cabang olahraga bola voli, keberhasilan tim putra Indonesia menjuarai Asian Volleyball Confederation (AVC) Men's Cup 2026 mengantarkan Indonesia menduduki peringkat ke-43 dunia, dan tim putri Indonesia menembus peringkat ke-57 dunia pasca AVC Women's Cup 2026.



Selebrasi Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 di India
Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2026

Grafik 6.12
Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Sea Games

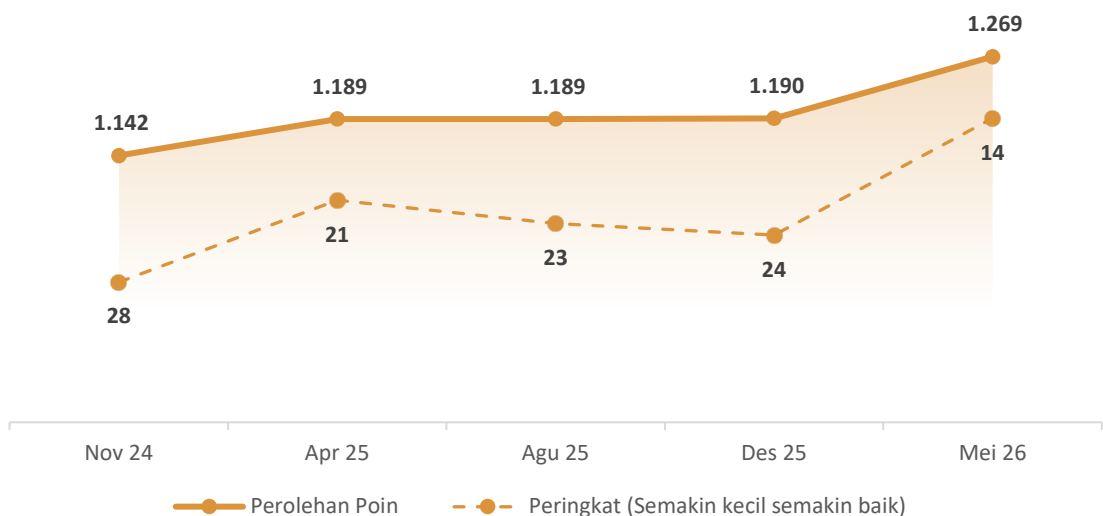


Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2026

Dalam cabang olahraga angkat besi, Rizki Juniansyah memecahkan rekor dunia kategori kelas 79 kg putra pada Kejuaraan Dunia Angkat Besi International Weightlifting Federation 2025. Indonesia menjadi juara umum World Para

Athletics Grand Prix 2026 dengan perolehan 29 medali. Selain itu, Indonesia memperoleh 3 medali emas pada World Archery Para Series 2026.

Grafik 6.13
Peringkat FIFA Futsal Indonesia



Sumber: FIFA, 2026

Berbagai ajang internasional telah diselenggarakan di Indonesia antara lain: (1) Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) di Sirkuit Mandalika; (2) Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2026; (3) Asian Fencing Championship 2025; (4) World Rally Championship; (5) Indonesia Jetsport World Series; dan (6) AFC Futsal Asian Cup 2026. Rangkaian agenda tersebut semakin memperkuat peran Indonesia sebagai bagian dalam ekosistem olahraga internasional.

6.11.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan pemuda masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) kesenjangan pembangunan kepemudaan antarwilayah; (2) keterpaduan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan antarpemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah; (3) kebutuhan percepatan transisi pemuda menuju ketenagakerjaan yang layak dan kewirausahaan yang produktif; serta (4) kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang menuntut penguatan karakter, kepemimpinan, partisipasi, dan daya saing pemuda.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, upaya yang dilakukan meliputi: (1) pemerataan pembangunan kepemudaan antarwilayah melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan data; (2) peningkatan keterpaduan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui penyelarasan kebijakan, penguatan koordinasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah; (3) perluasan dukungan bagi transisi pemuda menuju ketenagakerjaan layak dan kewirausahaan produktif melalui peningkatan keterampilan dan penguatan ekosistem kewirausahaan; serta (4) penguatan pembinaan karakter, kepemimpinan, dan partisipasi

pemuda melalui organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan masyarakat.

Pembangunan olahraga juga menghadapi tantangan, antara lain: (1) persaingan prestasi olahraga di tingkat dunia; (2) perkembangan metode latihan, ilmu dan teknologi olahraga; (3) standar pembinaan atlet pada tingkat internasional; (4) kebutuhan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan berstandar internasional; serta (5) ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional yang inklusif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain: (1) perluasan cabang olahraga unggulan dari 14 menjadi 21 cabang dan cabang olahraga unggulan disabilitas dari 5 menjadi 10 cabang sebagai fokus pembinaan nasional; (2) pengembangan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional sebagai pusat pengembangan talenta potensial dan unggul; (3) penguatan kualitas penyelenggaraan pembinaan prestasi melalui peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga; (4) penguatan tata kelola prasarana olahraga melalui pembentukan satgas optimalisasi pemanfaatan stadion; dan (5) pengembangan Paralympic Training Center sebagai pusat pembinaan olahraga disabilitas.

6.12 Perpustakaan

6.12.1 Capaian Utama Pembangunan

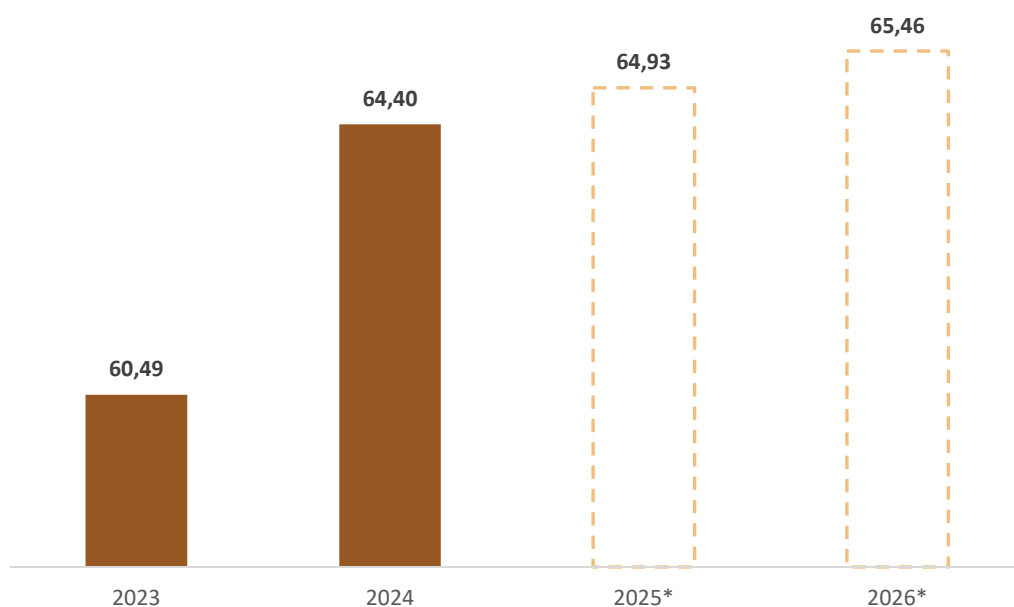
Literasi merupakan fondasi dari ilmu, teknologi, dan inovasi yang mempunyai peran penting dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Pemerintah juga mendorong kemajuan literasi yang menysar seluruh lapisan masyarakat melalui perpustakaan yang menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan berperan dalam meningkatkan kompetensi

akademis, serta mendorong perwujudan masyarakat yang kritis, inovatif, berdaya saing dan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman.

Penguatan ekosistem literasi melalui perpustakaan tecermin dari peningkatan Nilai Budaya Literasi. Indikator Nilai Budaya Literasi merupakan salah satu indikator tingkat literasi masyarakat yang diukur dari kebiasaan membaca

masyarakat, masyarakat yang mengakses informasi melalui internet, dan masyarakat yang mengunjungi perpustakaan atau yang memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Nilai Budaya Literasi meningkat dari 60,49 (2023) menjadi 64,40 (2024). Capaian ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun literasi bangsa guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang literat.

Grafik 6.14
Nilai Budaya Literasi Tahun 2023-2026



Sumber: Kemendikbudristek, Kemenbud, Bappenas, 2026 (diolah)
Keterangan: *) Angka prognosa

Untuk meningkatkan kegemaran membaca dan kecakapan literasi masyarakat, pemerintah telah melakukan beberapa intervensi kebijakan. Pada tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan 10 juta eksemplar bantuan bacaan bermutu ke 4.927 perpustakaan desa, 1.003 perpustakaan kelurahan, 2.102 perpustakaan rumah ibadah, dan 1.968 TBM. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis kepada 20.000 pengelola TBM. Hingga tahun 2026, sebanyak 3.667 perpustakaan telah mendapatkan bantuan Transformasi

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah menjangkau 13,98 juta penerima manfaat secara kumulatif sejak dimulainya program.

Pelibatan relawan dan mahasiswa menjadi strategi pemerintah untuk menjangkau masyarakat luas dalam rangka penguatan budaya baca dan kecakapan literasi. Pada 2026, pemerintah terus memperkuat pelibatan Relawan Literasi Masyarakat (Relima) melalui perekrutan 360 relawan. Sejalan dengan itu,

dilaksanakan juga program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi di 1.000 desa yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan melibatkan 21 perguruan tinggi dan 10.334 mahasiswa.

Pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap sumber bahan literasi melalui pengembangan aplikasi perpustakaan digital yang terintegrasi dalam jaringan nasional Indonesia OneSearch dan Pojok Baca Digital (POCADI). Sebanyak 569 titik POCADI telah tersebar di 38 provinsi, 319 kabupaten/kota, 450 kecamatan, dan 489 desa/kelurahan. Upaya ini turut didukung melalui penguatan sarana, prasarana, serta kapasitas pengelolaan perpustakaan daerah untuk meningkatkan mutu layanan dan budaya baca masyarakat.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola informasi dan pengetahuan bangsa, pemerintah turut mengoptimalkan fungsi pengawasan bibliografi melalui penerbitan Nomor Buku Standar Internasional (*International Standard Book Number/ISBN*). Pada tahun 2025, permohonan ISBN mencatatkan realisasi mencapai 122.647 judul dari target 87.870 judul. Capaian ini didorong kebijakan tunjangan kinerja dosen untuk penulisan buku ber-ISBN serta kebijakan buku bacaan bermutu. Momentum ini berlanjut pada semester I 2026, dimana 89.751 judul telah diajukan dan 68.119 judul diantaranya berhasil divalidasi. Pemerintah telah mengawasi penerbitan 1.365.712 judul buku ber-ISBN dari 25.843 penerbit terdaftar.

Pada fungsi deposit, realisasi penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) tahun 2025 mencapai 264.630 eksemplar, melampaui target yang ditetapkan sebesar 260.400 eksemplar. Akumulasi total koleksi KCKR hasil serah-simpan

yang dikelola pemerintah kini mencapai 3,93 juta eksemplar. Selain itu, untuk memperkuat literasi berbasis kearifan lokal dan memelihara memori kolektif bangsa, pemerintah juga melaksanakan kebijakan pengelolaan naskah kuno nusantara melalui program pelestarian fisik dan isi naskah kuno nusantara. Dari 143.259 naskah kuno yang teridentifikasi, sebanyak 25.475 naskah kuno nusantara yang telah dikonservasi dan dialihmedia. Hingga 2026, sebanyak 13.649 koleksi digital naskah kuno, 3.364 koleksi digital buku langka, dan 1.874 koleksi digital peta dapat diakses di Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara). Selain itu, tercatat sebanyak 20 naskah kuno yang dikelola sebagai bagian dari Ingatan Kolektif Bangsa (IKON) dan delapan naskah kuno telah terdaftar sebagai *Memory of The World* (MoW).

6.12.2 Tantangan dan Upaya

Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang literasi dan perpustakaan, antara lain: (1) aksesibilitas dan kualitas layanan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP); (2) aksesibilitas bahan bacaan berkualitas; (3) pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis digital di tengah disrupsi kecerdasan buatan dan mesin pencari instan; (4) pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam mendukung kompetensi literasi dan numerasi; dan (5) kapasitas dan kualitas sumber daya dalam mendukung layanan perpustakaan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain: (1) perluasan akses atas bahan bacaan bermutu melalui digitalisasi dan mobilisasi layanan perpustakaan keliling, terutama di wilayah 3T; (2) pengembangan ekosistem digital nasional dan transformasi

digital layanan publik melalui stabilisasi sistem informasi perpustakaan; (3) penguatan peran Relima dan KKN Tematik Literasi; (4) optimalisasi kolaborasi multipihak yang diarahkan untuk peningkatan minat membaca dan kecakapan

literasi masyarakat; (5) penyusunan regulasi dan fasilitasi teknis; dan (6) peningkatan kapasitas pustakawan serta pelestari naskah kuno. Berbagai upaya ini diarahkan agar setiap perpustakaan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

BAB 7

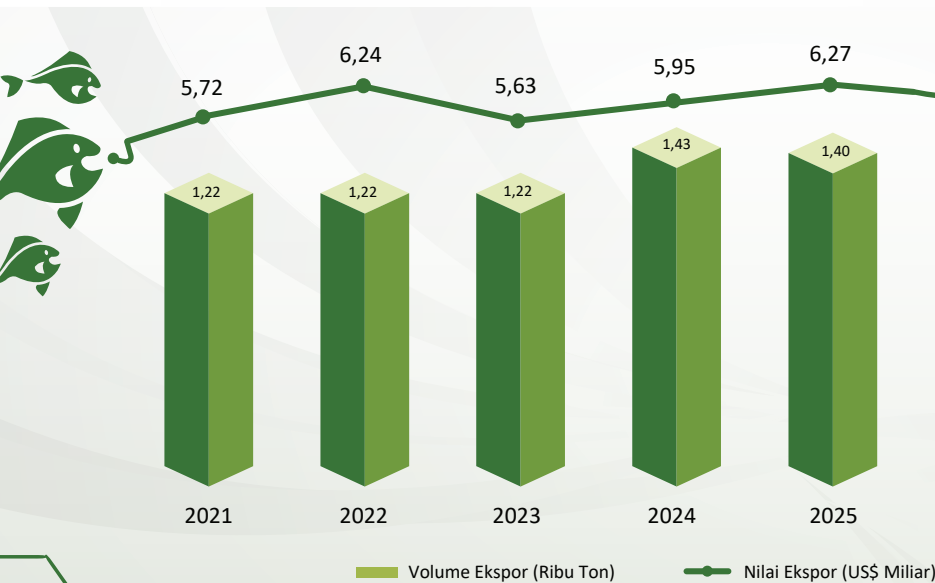
ASTA CITA 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri
Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan
Nilai Tambah di Dalam Negeri



Kilang Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2026

Capaian Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2021-2025



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2026

Capaian Realisasi Investasi Tahun 2024 - Semester I 2026

Kategori	Satuan	2024	2025	Semester 1	
				2025	2026
Nilai PMA	Rp triliun	900,2	900,9	431,9	507,6
Nilai PMDN	Rp triliun	814	1.030,30	510,3	503,0
Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder	Rp triliun	721,3	780,9	369,3	385,2
Nilai Realisasi Penanaman Modal Bidang Hilirisasi	Rp triliun	407,8	584,1	280,8	300,1

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026



Hilirisasi sumber daya alam terus diperkuat sebagai strategi transformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Percepatan hilirisasi komoditas mineral dan hayati dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi melalui penguatan rantai nilai domestik. Sinergi berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ekspor produk bernilai tambah tinggi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan ekonomi.

7.1 Hilirisasi Industri

7.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global, sektor Industri Pengolahan masih menjadi kontributor terbesar bagi PDB Indonesia. Pada semester I 2026, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,78 persen (yoy), didorong oleh percepatan program hilirisasi sumber daya alam, penguatan struktur industri, dan peningkatan investasi pada sektor industri prioritas. Hilirisasi industri difokuskan pada percepatan hilirisasi nikel, tembaga, sawit, kelapa, rumput laut.

Tabel 7.1
Capaian Pembangunan Industri dan Hilirisasi Tahun 2024-Semester I 2026

Indikator	Satuan	2024	2025	Semester 1	
				2025	2026
Kontribusi PDB Industri Pengolahan ¹⁾	%	18,98	19,07	18,95	18,77
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan ¹⁾	%	4,43	5,30	5,12	4,78
Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel ³⁾	juta ton/tahun	33,96	36,89	36,27	38,12
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel ⁴⁾	Rp triliun	153,20	185,20	94,12	70,95
Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga ³⁾	ribu ton/tahun	1.071,75	1.495,40	1.362,78	1.337,68
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga ⁴⁾	Rp triliun	68,50	65,90	40,00	37,40
Ragam Produk Hilir Sawit ²⁾	produk	193	208	195	208

Indikator	Satuan	2024	2025	Semester 1	
				2025	2026
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit ⁴⁾	Rp triliun	44,09	62,82	31,66	29,50
Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa ²⁾	%	40,00	57,05	40,00	70,04 ^{a)}
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa ⁴⁾	Rp triliun	4,49	1,78	0,76	0,97
Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut ²⁾	%	49,51	61,32	55,00	71,38 ^{a)}
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut ⁴⁾	Rp triliun	0,23	0,32	0,10	0,23
Kapasitas Produksi Pati Sagu ²⁾	ton/tahun	60.000	100.000	100.000	100.000
Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara ²⁾	ribu ton	59.783	61.320	61.000	61.320
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi ⁴⁾	Rp triliun	17,46	41,74	7,93	26,40
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi ⁴⁾	Rp triliun	16,11	18,31	9,35	9,00
Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik ¹⁾	%	6,16	4,58	4,08	10,35 ^{a)}
Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi ¹⁾	%	4,26	3,55	4,5	4,86 ^{a)}
Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman ¹⁾	%	5,90	6,38	6,09	7,04

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik; 2) Kementerian Perindustrian; 3) Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM; 4) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2026

Keterangan: a) data realisasi triwulan I 2026.

Kapasitas produksi industri olahan nikel meningkat dari 36,89 juta ton/tahun (2025) menjadi 38,12 juta ton/tahun (semester I 2026). Peningkatan tersebut didukung oleh beroperasinya 76 smelter nikel, dengan total nilai investasi mencapai lebih dari Rp400,0 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 147 ribu pekerja. Dari total smelter tersebut, 14 diantaranya merupakan smelter hidrometalurgi yang menghasilkan produk akhir berupa bahan baku baterai.

Penguatan ekosistem industri baterai juga terus didorong untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik utamanya di Maluku Utara dan Jawa Barat.

Kapasitas produksi baterai kendaraan listrik Indonesia telah mencapai 10 GWh (semester I 2026) dan akan meningkat menjadi 16,9 GWh atau setara 225 ribu baterai kendaraan listrik.

Kapasitas produksi tembaga juga meningkat. Peningkatan ini didukung oleh telah beroperasinya fasilitas pemurnian tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Hilirisasi juga terus dilakukan melalui pengembangan industri tembaga dan emas terintegrasi. Salah satunya berada di KEK Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) Gresik yang menghasilkan katoda tembaga, batang tembaga (*copper rod*), kawat dan pipa



tembaga, komponen berbahan kuningan (*brass*), serta logam mulia.

Untuk komoditas sumber daya hayati, hilirisasi komoditas rumput laut dan kelapa menunjukkan capaian sangat baik. Utilisasi industri pengolahan rumput laut pada triwulan I 2026 mencapai 71,38 persen. Salah satu proyek pengungkitnya adalah pengembangan industri hidrokoloid, seperti industri karagenan di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, utilisasi industri pengolahan kelapa mencapai 70,04 persen. Peningkatan utilisasi industri pengolahan kelapa dan rumput laut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan global terhadap produk berbahan alami sebagai substitusi bahan kimia sintetis, seiring dengan tren gaya hidup sehat dan kenaikan harga bahan baku kimia.

Pemerintah juga terus memperkuat struktur industri nasional, salah satunya melalui pengembangan industri kimia. Hingga semester I 2026, kapasitas produksi industri kimia dasar berbasis minyak, gas bumi, dan batu bara mencapai 61,32 juta ton. Peningkatan tersebut, didukung oleh pengembangan dan modernisasi sejumlah proyek strategis petrokimia, seperti: (1) pembangunan industri kimia terintegrasi di Cilegon yang memproduksi etilena dan propilena, *soda ash*, *chlor alkali*, serta *ethylene dichloride*; (2) peremajaan pabrik amonia di Kalimantan Timur yang mampu mengurangi 110.000 ton emisi karbon per tahun; serta (3) operasionalisasi pabrik polyurethane resin di Karawang.

Selanjutnya, pemerintah terus melakukan upaya untuk menjaga dan memperkuat daya saing industri padat karya, khususnya industri tekstil serta industri makanan dan minuman. Upaya-upaya tersebut di antaranya adalah fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Industri

Padat Karya (KIPK), fasilitasi *upgrade* teknologi melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan, serta pengendalian impor khususnya produk jadi.

Kebijakan Industri 4.0 merupakan Agenda transformasi industri nasional untuk mendorong kesiapan Industri dalam penerapan teknologi, yang diukur dengan *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0). Selama 2025 hingga semester I 2026 sebanyak 37 perusahaan memperoleh nilai INDI 4.0 di atas 3,00.

Minat pelaku industri termasuk industri kecil menengah untuk mengikuti seleksi penghargaan *National Lighthouse* Industri 4.0 terus meningkat. Pada periode yang sama, pemerintah memfasilitasi program restrukturisasi mesin dan peralatan bagi 48 Industri Kecil Menengah (IKM) dan pendampingan implementasi Industri 4.0 bagi 1.159 IKM.

7.1.2 Tantangan dan Upaya

Hilirisasi industri menghadapi berbagai tantangan yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain: (1) volatilitas harga energi, bahan baku, dan nilai tukar akibat ketidakpastian geopolitik dan konflik Timur Tengah; (2) jaminan ketersediaan bahan baku yang memadai dari sisi kuantitas dan kualitas untuk menjaga keberlanjutan rantai pasok industri; (3) ketidakpastian perdagangan global; (4) inovasi dan komersialisasi riset industri; (5) tuntutan global pada aspek keberlanjutan dan ketertelusuran; (6) produktivitas dan adopsi teknologi untuk mempercepat transformasi industri 4.0; serta (7) praktik *unfair trade* dan barang impor ilegal.

Untuk menjawab tantangan diatas, beberapa upaya yang dilakukan, antara lain: (1) diversifikasi sumber pasokan bahan baku/

penolong, khususnya yang mengalami disrupsi rantai pasok pasca konflik Timur Tengah; (2) penguatan integrasi industri dengan sektor hulu seperti perkebunan, pertambangan, serta minyak dan gas; (3) harmonisasi tarif bea masuk bahan baku/penolong yang belum mencukupi kebutuhan industri dalam negeri; (4) penyusunan neraca komoditas; (5) fasilitasi kerja sama industri untuk diversifikasi pasar ekspor; (6) kolaborasi lembaga riset, perguruan tinggi, dan industri untuk komersialisasi riset; (7) implementasi peta jalan dekarbonisasi industri; (8) program restrukturisasi mesin dan peralatan serta pendampingan penerapan industri 4.0; (9) penerapan standardisasi dan sertifikasi produk; serta (10) penguatan kapasitas diplomasi perdagangan atas praktik *unfair trade* dan penegakan hukum terkait ekspor-impor ilegal.

Selanjutnya, percepatan hilirisasi dilakukan pula melalui: (1) pengembangan fasilitas Baja Nirkarat berbasis nikel di Sulawesi Tengah; (2) percepatan proyek *ACID Iron Metal* (AIM) yang menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik di Maluku Utara; (3) pembangunan proyek *Excelsior Nickel Cobalt* (ENC) HPAL di Sulawesi Tengah; (4) penguatan ekosistem industri semikonduktor melalui kerja sama Indonesia dengan Belanda dalam pengembangan SDM

dan teknologi desain cip; (5) percepatan pembangunan industri baterai *lithium-ion* di Jawa Barat; serta (6) fasilitasi *business matching* industri tembaga dalam mendukung rantai pasok dalam negeri.

Di sisi lain, hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati dilakukan melalui: (1) percepatan Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II (*oleofood* dan biodiesel) di KEK Sei Mangkei; (2) percepatan pembangunan fasilitas pengolahan kelapa terpadu di Maluku Tengah; (3) pembangunan *biorefinery* Cilacap fase II untuk *Sustainable Aviation Fuel* (SAF); serta (4) peningkatan sentra IKM pengolahan kelapa dan sagu.

7.2 Perikanan

7.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan sektor perikanan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan melalui hilirisasi. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan baku berkualitas, penguatan rantai dingin dan logistik, peningkatan kapasitas dan utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), pengembangan dan diversifikasi produk olahan bernilai tambah, penerapan standar mutu, serta akses pasar domestik dan ekspor.

Tabel 7.2
Capaian Produksi Hasil Perikanan Tahun 2025 – Triwulan II 2026 (juta ton)

Komoditas	2025*					2026**	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II
Total Produksi Perikanan	6,09	6,35	6,78	7,03	26,26	6,30	6,78
Perikanan Tangkap	1,69	1,70	2,03	2,42	7,85	1,73	1,79
Perikanan Budidaya	4,40	4,65	4,75	4,61	18,41	4,57	4,99

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2026

Keterangan : *) angka sementara, **) angka sangat sementara



Pada tahun 2025 produksi perikanan nasional mencapai 26,26 juta ton, terdiri dari 7,85 juta ton perikanan tangkap dan 18,41 juta ton perikanan budidaya. Capaian tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ketersediaan bahan baku domestik bagi industri pengolahan. Hingga Semester I 2026, produksi perikanan telah mencapai 13,08 juta ton, yang mencerminkan terjaganya pasokan bahan baku domestik untuk mendukung keberlanjutan industri pengolahan perikanan.

Pemerintah menetapkan empat komoditas prioritas hilirisasi sektor perikanan, yaitu Tuna Cakalang Tongkol (TCT), rumput laut, udang, dan tilapia. Pengembangan komoditas prioritas tersebut dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui intervensi antara lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), penyediaan kapal ikan modern, penetapan lokasi budidaya ikan darat tematik, revitalisasi tambak nila salin, serta pengembangan modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi. Intervensi tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat rantai pasok hingga sektor hilir.

Kampung Nelayan Merah Putih menjadi contoh intervensi terintegrasi yang memperkuat mata rantai nilai perikanan. Selain menyediakan sarana penangkapan ikan, program ini mengintegrasikan pembangunan dermaga, tambatan perahu, bengkel nelayan, pabrik es, *cold storage*, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar, dan balai pelatihan dalam satu kawasan. KNMP juga mencakup penguatan kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, dan pengembangan pemasaran.

Melalui pendekatan di atas, KNMP tidak hanya meningkatkan produksi usaha penangkapan di tingkat hulu, tetapi juga memperkuat logistik dan rantai dingin untuk menjaga mutu hasil tangkapan serta mendukung kegiatan pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Pada tahap awal implementasi, telah diselesaikan pembangunan KNMP Tahap I di 65 lokasi dan Tahap II pada 35 lokasi. Sebagai bagian dari upaya perluasan cakupan program dan penguatan ekosistem perikanan terintegrasi, pemerintah menargetkan untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih di 1.000 lokasi pada tahun 2026.

Tabel 7.3
Komoditas Prioritas Hilirisasi Sektor Perikanan Tahun 2025 (juta ton)

Komoditas	Produksi 2025 ¹⁾	Ekspor 2025	Produk hilir
TCT	1,48	0,29	Tuna loin, <i>fillet</i> , ikan kaleng, surimi, tepung ikan, minyak ikan, kolagen, gelatin.
Rumput Laut	11,65	0,24	Karagenan, agar, alginat, bioplastik, kosmetik, farmasi, pangan fungsional, pupuk hayati.
Udang	0,32	0,21	Udang beku, <i>cooked shrimp</i> , <i>breaded shrimp</i> , <i>ready-to-cook</i> , produk ekspor.
Tilapia	1,68	0,01	<i>Frozen fillet</i> , <i>whole fish</i> , <i>ready-to-cook</i> , <i>ready-to-eat</i> , surimi, kolagen, gelatin.

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2026 (diolah)
Keterangan : *) Data sementara

Keterkaitan hulu hingga hilir tecermin dari besarnya potensi produksi dan capaian volume ekspor komoditas prioritas hasil perikanan. Pada 2025, rumput laut mencatat produksi terbesar dibandingkan dengan komoditas lainnya, sedangkan volume ekspor terbesar berasal dari TCT. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi rumput laut masih dapat dioptimalkan melalui pengembangan industri hilir, sementara produksi TCT perlu terus diperkuat untuk mendukung peningkatan ekspor. Sejalan dengan itu, seluruh komoditas prioritas tersebut

memiliki peluang untuk diolah menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah sehingga dapat meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi.

Pada sektor hilir, kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan. UPI berperan dalam berbagai kegiatan pembekuan dan pengolahan, antara lain pengasapan, penggaraman, pengalengan, produksi minyak ikan, serta pengolahan berbasis surimi dan *fish jelly*.

Tabel 7.4
Jumlah UPI Menengah dan Besar Menurut Jenis Kegiatan Olahan Utama Tahun 2024

Jenis Kegiatan Olahan Utama	Jumlah UPI
Pembekuan Ikan	922
Pengolahan Rumput Laut	145
Pendinginan dan Pengesan Ikan	118
Penggaraman / Pengeringan Ikan	110
Pengalengan	58
Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi	30
Penanganan Ikan	29
Pengolahan Lainnya	29
Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan	21
Pengasapan / Pemanggangan Ikan	9
Pembuatan Minyak Ikan	6
Peragian / Fermentasi Ikan	3
Total	1480

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2026 (diolah)

Saat ini, UPI di Indonesia masih didominasi usaha skala mikro dan kecil sekitar 81.350 unit, sedangkan UPI skala menengah dan besar sebanyak 1.480 unit. Sebagian besar UPI skala menengah dan besar masih bergerak dalam kegiatan pembekuan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan perikanan masih banyak bertumpu pada kegiatan penanganan dan pengawetan awal. Sementara itu, kegiatan pengalengan baru mencakup sekitar 3,9 persen

dari total UPI. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan industri pengalengan melalui kepastian pasokan bahan baku, peningkatan utilitas pabrik, investasi teknologi, dan perluasan akses pasar domestik maupun ekspor.

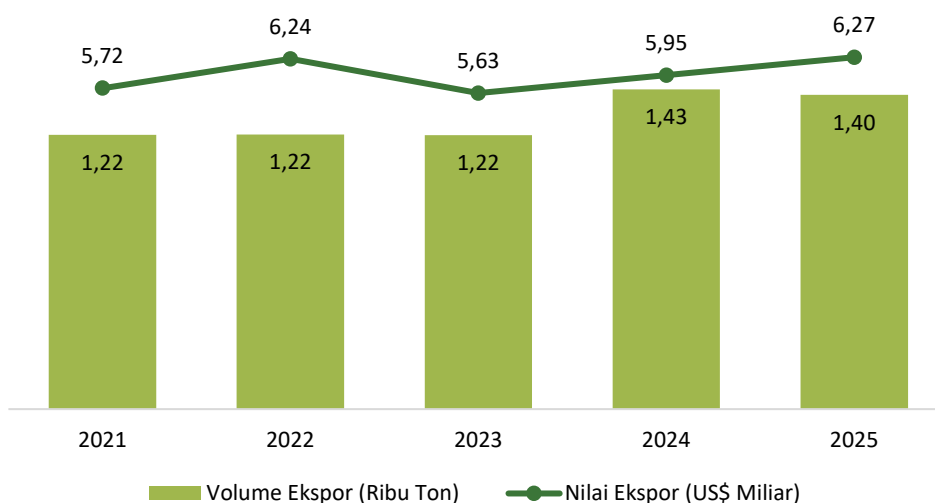
Untuk mempercepat hilirisasi, pemerintah terus memperkuat kapasitas UPI melalui pembinaan dan pendampingan agar naik kelas, fasilitasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi



HACCP dan sertifikat mutu, diversifikasi produk olahan bernilai tambah, penguatan sarana dan prasarana pengolahan, pembangunan empat laboratorium pada 2026 di Jawa Barat, Banten,

Banyuwangi, dan Palembang, peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi akses pembiayaan dan promosi, serta perluasan akses pasar domestik maupun ekspor.

Grafik 7.1
Capaian Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2021-2025



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2026

Penguatan sektor hilir mendukung peningkatan kinerja ekspor hasil perikanan. Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari US\$ 5,72 miliar (2021) menjadi US\$ 6,27 miliar (2025), dengan volume ekspor mencapai sekitar 1,40 juta ton (2025). Hingga semester I 2026, nilai ekspor telah mencapai US\$ 2,99 miliar dengan volume ekspor sebesar 0,63 juta ton. Capaian tersebut mencerminkan keberlanjutan kinerja ekspor hasil perikanan pada tahun 2026, meskipun realisasi tahunan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan ekspor pada semester kedua. Meskipun volume ekspor relatif terjaga, peningkatan nilai ekspor menunjukkan bahwa produk perikanan Indonesia mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan tetap memiliki daya saing di pasar global. Untuk meningkatkan kinerja ekspor, pemerintah terus memperkuat akses pasar internasional melalui fasilitasi penyelesaian hambatan ekspor, *business matching*, penumbuhan eksportir baru,

promosi produk perikanan, serta penguatan sistem jaminan mutu dan sertifikasi. Intervensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai dan volume ekspor produk perikanan Indonesia di pasar internasional.

7.2.2 Tantangan dan Upaya

Penguatan hilirisasi sektor perikanan masih menghadapi tantangan pada setiap mata rantai hulu hingga hilir. Pada sisi hulu, produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, kualitas bahan baku, kontinuitas pasokan, serta ketertelusuran produksi masih perlu diperkuat agar sesuai dengan kebutuhan industri. Pada sisi rantai pasok, infrastruktur rantai dingin, *cold storage*, sarana pascapanen, pelabuhan perikanan, dan konektivitas logistik belum merata, sementara sentra produksi banyak berada di Kawasan Timur Indonesia dan industri pengolahan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Pada sisi hilir, struktur UPI masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil, sehingga kapasitas teknologi, pembiayaan, sertifikasi mutu, inovasi produk, dan akses pasar masih terbatas. Selain itu pemanfaatan hasil samping (*by-product*) perikanan sebagai produk bernilai tambah tinggi juga masih belum optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan sektor perikanan perlu dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada sisi hulu, pemerintah memperkuat produktivitas dan keberlanjutan perikanan tangkap melalui penerapan kebijakan sesuai prinsip *maximum sustainable yield* serta perikanan budidaya melalui pengembangan komoditas prioritas, peningkatan kualitas benih dan pakan, perbaikan tata kelola kawasan budidaya, serta penguatan mutu dan ketertelusuran bahan baku. Pemerintah juga melakukan percepatan pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan target 5000 kampung nelayan pada akhir 2029.

Pada sisi rantai pasok, penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional perlu didorong melalui penyediaan *cold chain*, *cold storage*, fasilitas pascapanen, modernisasi pelabuhan perikanan, dan peningkatan konektivitas dari sentra produksi ke industri pengolahan.

Pada sisi hilir, peningkatan kapasitas UPI perlu diperkuat melalui inkubasi bisnis, fasilitasi pembiayaan, kemitraan usaha, sertifikasi mutu, adopsi teknologi, pengembangan industri pengolahan dekat sentra produksi, serta diversifikasi produk olahan dengan pemanfaatan hasil samping (*by-product*) perikanan.

7.3 Kelautan

7.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan sektor kelautan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan melalui penguatan fondasi di sisi hulu berupa kepastian ruang laut, perlindungan ekosistem, pengawasan sumber daya, serta tata kelola pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan. Fondasi ini berperan penting bagi sektor hilir kelautan, industri garam, jasa kelautan, investasi berbasis ruang laut, serta pengembangan ekonomi biru yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan masyarakat pesisir.

Pada sisi hulu, persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir menjadi instrumen utama untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan mendukung iklim investasi sektor kelautan. Hingga 2025, penataan ruang laut dan zonasi pesisir telah mencapai 17,01 persen.

Fondasi hulu juga diperkuat melalui perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Luas kawasan konservasi perairan meningkat dari 29,9 juta ha (2024) menjadi 30,9 juta ha (2025). Capaian ini diikuti peningkatan efektivitas pengelolaan sehingga kawasan konservasi mampu menjaga keanekaragaman hayati, mendukung pemulihan stok ikan, memperkuat ketahanan pesisir terhadap perubahan iklim, serta menyediakan modal ekologis bagi kegiatan hilir seperti perikanan, pariwisata bahari, dan jasa lingkungan kelautan.

Kepastian pemanfaatan ruang laut selanjutnya ditopang oleh pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara



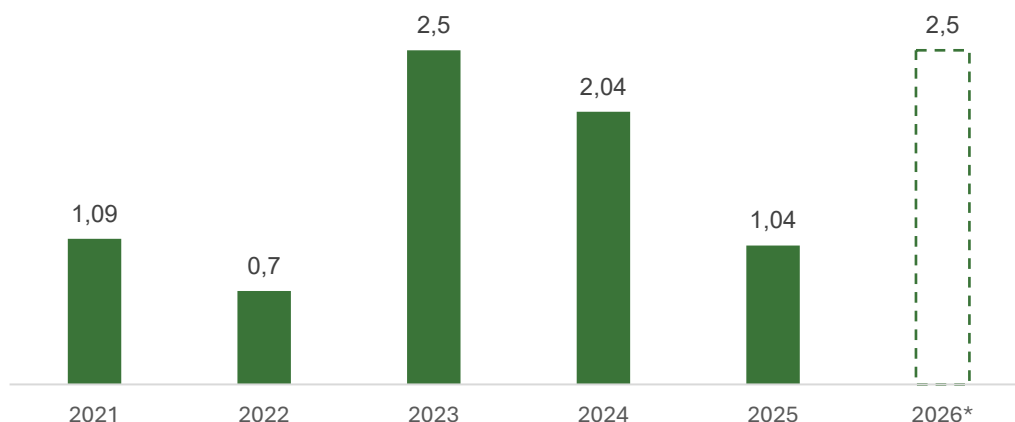
Republik Indonesia (WPPNRI). Pengawasan dilakukan untuk mendukung inspeksi kepatuhan kapal perikanan, penindakan kapal pelanggar, dan pemantauan objek kelautan strategis. Pengawasan tersebut berperan dalam melindungi sumber daya dan ekosistem kelautan sekaligus menciptakan kepastian bagi aktivitas ekonomi kelautan yang legal dan berkelanjutan.

Garam merupakan salah satu komoditas strategis dalam sektor kelautan. Pelaksanaan Perpres No. 17/2025 tentang Percepatan

Pembangunan Pergaraman Nasional diarahkan untuk mewujudkan swasembada garam melalui peningkatan produksi garam berkelanjutan.

Produksi garam nasional selama 2021–2025 masih fluktuatif akibat pengaruh perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya modernisasi produksi, penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas, serta penerapan teknologi adaptif agar pasokan garam domestik lebih stabil dan berkelanjutan.

Grafik 7.2
Produksi Garam Tahun 2021-2026 (juta ton)



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2026

Keterangan: *) Angka target

Pada sisi hilir, pemerintah mengakselerasi pengembangan industri pengolahan garam untuk meningkatkan nilai tambah serta memperkuat kemandirian bahan baku industri. Tingkat utilisasi industri pengolahan garam meningkat dari 39,15 persen (2025) menjadi 60,50 persen (triwulan I 2026). Proyeksi kebutuhan garam nasional 2026 mencapai 5,35 juta ton, terutama untuk industri Chlor-Alkali Plant (CAP). Hal ini menunjukkan masih besarnya kebutuhan pasokan garam berkemurnian tinggi. Kebutuhan tersebut akan meningkat sejalan dengan rencana pengoperasian

pabrik CAP pada 2027 dan pabrik soda abu pada 2028. Oleh karena itu, keterhubungan antara peningkatan produksi dan kualitas di hulu dengan standardisasi, pengolahan, serta kepastian penyerapan di hilir menjadi kunci untuk menopang industri strategis, antara lain pulp dan kertas, tekstil, kaca dan keramik, deterjen, serta farmasi.

7.3.2 Tantangan dan Upaya

Penguatan sektor kelautan masih menghadapi tantangan pada setiap mata rantai hulu hingga hilir. Terdapat beberapa tantangan guna

mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing antara lain: (1) tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut akibat perubahan iklim, pencemaran, dan degradasi habitat; (2) pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta perlindungan keanekaragaman hayati laut; (3) penataan ruang laut melalui penyempurnaan regulasi, penyelesaian rencana zonasi, dan peningkatan kepatuhan pemanfaatan ruang laut; (4) produktivitas dan daya saing sektor pergarman nasional yang masih dipengaruhi anomali iklim, keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan kualitas garam yang belum sesuai kebutuhan industri; serta (5) integrasi data dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola kelautan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah antara lain: (1) perluasan kawasan konservasi laut, percepatan rehabilitasi ekosistem pesisir, serta pelaksanaan program pengendalian sampah laut; (2) percepatan penyusunan rencana zonasi kawasan strategis nasional, pengembangan sistem digital e-SEA, dan integrasi tata ruang laut dengan tata ruang darat; (3) pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional seluas 2000 ha melalui pembangunan sentra garam, penerapan teknologi produksi, pembangunan gudang dan

infrastruktur pendukung, serta pemberdayaan petambak garam untuk mendukung target swasembada garam; (4) penguatan sinergi antara produksi garam nasional dengan kebutuhan industri, termasuk dukungan kebijakan untuk peningkatan penyerapan produk hilir garam dalam negeri; serta (5) penguatan sistem data dan tata kelola kelautan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, dan penguatan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dengan demikian, sektor kelautan diharapkan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya laut.

7.4 Perdagangan

7.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Kinerja sektor perdagangan terus menunjukkan kemajuan dalam mendukung agenda hilirisasi dan penguatan industri manufaktur sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perdagangan berperan dalam memperluas akses pasar bagi produk bernilai tambah, mendorong peningkatan daya saing industri nasional, serta memperkuat transformasi struktur ekonomi menuju industri berbasis pengolahan.

Tabel 7.5
Capaian Pembangunan Perdagangan Tahun 2024 - Semester I 2026

Uraian	Satuan	2024	2025	Semester I	
				2025	2026
Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Total Ekspor Barang Dunia ¹⁾	%	1,22	1,23	1,21	1,45
Nilai Ekspor Jasa Indonesia ²⁾	US\$ miliar	39,09	42,52	19,45	9,03 ^{a)}

Sumber: 1) Kementerian PPN/Bappenas, 2026; 2) Bank Indonesia, 2026

Keterangan: a) Capaian Januari- Mei 2026



Di tengah dinamika perdagangan global, kinerja perdagangan secara umum tetap terjaga. Hal tersebut tecermin dari meningkatnya kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap perdagangan dunia serta meningkatnya nilai ekspor jasa Indonesia.

Peningkatan kinerja perdagangan luar negeri didukung oleh semakin berkembangnya ekspor produk manufaktur dan produk hasil hilirisasi. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya pangsa

pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi (*Medium-High Technology*), meningkatnya jumlah produk industri berbasis sumber daya alam yang diolah dan berdaya saing, dan meningkatnya ekspor produk berkategori hijau (*environmental goods*). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa struktur ekspor Indonesia semakin bergeser ke arah produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, berdaya saing, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Tabel 7.6
Capaian Pendukung Peningkatan Hilirisasi Tahun 2024 - 2026

Uraian	Satuan	2024	2025	2026
Kontribusi Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi terhadap Total Ekspor Produk Indonesia ¹⁾	%	24,90	26,36	25,52
Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia ¹⁾	%	0,05	0,58	0,68
Jumlah produk industri berbasis sumber daya alam yang diolah dan berdaya saing ²⁾	produk (kumulatif)	189	196	209
Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (<i>Environmental Goods</i>) ¹⁾	US\$ miliar	7,89	11,71	8,64

Sumber: 1) Kementerian PPN/Bappenas, 2026; 2) Kementerian Perindustrian, 2026

Keterangan: *) Angka target

Peningkatan ekspor Indonesia menggambarkan menguatnya daya saing ekspor. Hal tersebut didukung oleh telah efektifnya berbagai perjanjian perdagangan internasional yang memperluas akses pasar bagi produk manufaktur dan hasil hilirisasi Indonesia. Perjanjian dagang tersebut turut mendorong diversifikasi pasar ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai regional maupun global. Melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), nilai ekspor Indonesia ke negara-negara anggota meningkat dari US\$ 83,99 miliar (semester I 2025) menjadi US\$ 90,36 miliar (semester I 2026). Selain itu, nilai ekspor Indonesia ke Jepang meningkat dari

US\$ 8,12 miliar (semester I 2025) menjadi US\$ 8,18 miliar (semester I 2026) dengan berlakunya Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) telah mendorong peningkatan nilai ekspor ke Uni Emirat Arab dari US\$ 1,71 miliar (semester I 2025) menjadi US\$ 1,76 miliar (semester I 2026).

Di sisi lain, perdagangan dalam negeri turut menjadi fondasi penting dalam mendukung hilirisasi melalui penguatan perdagangan antarwilayah sebagai bagian dari rantai pasok industri nasional. Meningkatnya keterkaitan perdagangan antara daerah penghasil sumber

daya alam dengan kawasan industri pengolahan menunjukkan semakin terintegrasinya pasar domestik dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Hal tersebut, terlihat pada arus perdagangan komoditas mineral dari Kalimantan dan Sulawesi menuju kawasan industri di Jawa Timur dalam pengembangan industri pengolahan mineral. Selain itu, arus perdagangan komoditas sawit dari Sumatra dan Kalimantan menuju sentra industri pengolahan menunjukkan menguatnya hilirisasi industri berbasis agro.

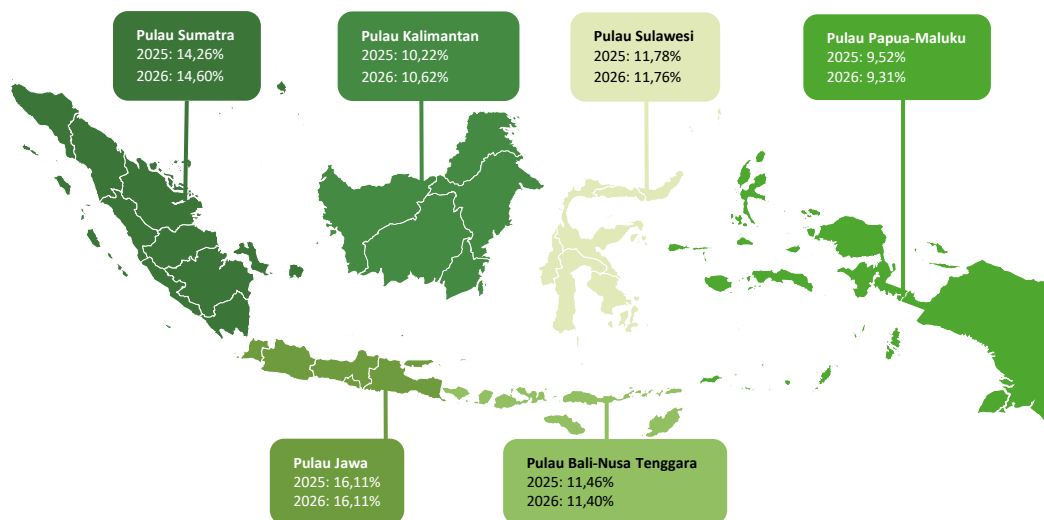
Penguatan arus perdagangan antarwilayah tecermin dari volume Perdagangan Antarpulau Barang (PAB). Volume muatan terbesar tercatat pada pelabuhan Kendari (123,94 juta ton), Tanjung Balai Karimun (25,23 juta ton), dan Bagendang (23,57 juta ton).

Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya konektivitas logistik antarpulau dalam menopang integrasi pasar domestik dan hilirisasi industri nasional.

Peningkatan perdagangan antarwilayah tersebut didukung oleh iklim persaingan usaha yang semakin kondusif, meningkatnya keberdayaan konsumen, serta berkembangnya aktivitas perdagangan di berbagai daerah. Hal ini tecermin dari meningkatnya Indeks Persaingan Usaha dari 4,95 (2024) menjadi 5,01 (2025) dan Indeks Keberdayaan Konsumen dari 60,11 (2024) menjadi 63,11 (2025), serta meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatra dan Kalimantan sebagai indikasi semakin menguatnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Gambar 7.1

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Semester I 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Penguatan perdagangan juga didukung oleh perbaikan infrastruktur perdagangan di wilayah terdampak bencana. Sampai dengan akhir April 2026, sebanyak 196 dari 210 unit

Pasar Rakyat (93,3 persen) telah beroperasi kembali. Capaian tersebut, bersama dengan pemulihan layanan Metrologi Legal, mendukung kelancaran distribusi barang, menjaga stabilitas



pasokan, serta memperkuat ketahanan sistem perdagangan nasional. Ke depan, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana perdagangan akan terus dilanjutkan guna memastikan infrastruktur perdagangan mampu mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi barang secara berkelanjutan.

Sementara itu, perdagangan jasa turut memperkuat daya saing perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor jasa modern, khususnya jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi dari US\$ 0,81 miliar (triwulan I 2025) menjadi US\$ 1,06 miliar (triwulan I 2026) serta jasa bisnis lainnya dari US\$ 2,04 miliar (triwulan I 2025) menjadi US\$ 2,33 miliar (triwulan I 2026). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi perdagangan Indonesia tidak hanya ditopang oleh ekspor barang hasil hilirisasi, tetapi juga oleh sektor jasa berbasis teknologi, inovasi, dan pengetahuan yang mendukung penguatan ekosistem industri nasional.

7.4.2 Tantangan dan Upaya

Kinerja sektor perdagangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Dari sisi eksternal, antara lain: (1) ketidakpastian perdagangan internasional; (2) kecenderungan proteksionisme; (3) penerapan berbagai hambatan non-tarif; serta (4) perlambatan permintaan di sejumlah negara mitra dagang berpotensi memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

Dari sisi internal, (1) ketimpangan diversifikasi perdagangan antarwilayah sehingga potensi ekonomi daerah belum sepenuhnya terhubung dengan rantai pasok nasional maupun global; (2) biaya logistik nasional yang masih relatif tinggi; serta (3) keterhubungan antarpelaku usaha dalam rantai pasok yang belum optimal

masih memengaruhi efisiensi distribusi barang.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus memperkuat daya saing perdagangan melalui: (1) deregulasi kebijakan perdagangan dan pengaturan impor; (2) optimalisasi pemanfaatan perjanjian dan kerja sama perdagangan internasional melalui percepatan proses perundingan, ratifikasi, dan implementasi berbagai perjanjian perdagangan strategis; (3) penguatan sistem logistik nasional melalui peningkatan infrastruktur konektivitas dan penguatan integrasi layanan logistik; (4) pengembangan ekspor jasa bernilai tambah tinggi sebagai salah satu sumber pertumbuhan perdagangan; serta (5) penguatan daya saing produk Indonesia melalui peningkatan kualitas produk dan pemenuhan standar internasional.

7.5 Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

7.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus diperkuat sebagai strategi penguatan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah mendorong pengembangan KI/KEK yang terintegrasi dengan potensi sumber daya agar tercipta proses hilirisasi dan penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

Hingga semester I 2026, capaian indikator pengembangan KI/KEK menunjukkan peningkatan. Salah satu indikator yang mencerminkan penguatan tersebut adalah meningkatnya kontribusi PDRB sektor industri pengolahan di daerah yang memiliki KI/KEK prioritas terhadap industri pengolahan

nasional. Rasio PDRB industri pengolahan pada provinsi KI/KEK prioritas terhadap PDB industri pengolahan nasional mengalami peningkatan dari 50,98 persen (2024) menjadi 51,86 persen

(semester I tahun 2026). Kenaikan tersebut menunjukkan peran provinsi yang memiliki KI/KEK prioritas semakin kuat sebagai basis aktivitas industri pengolahan nasional.

Tabel 7.7
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas Terhadap PDB Industri Pengolahan Nasional

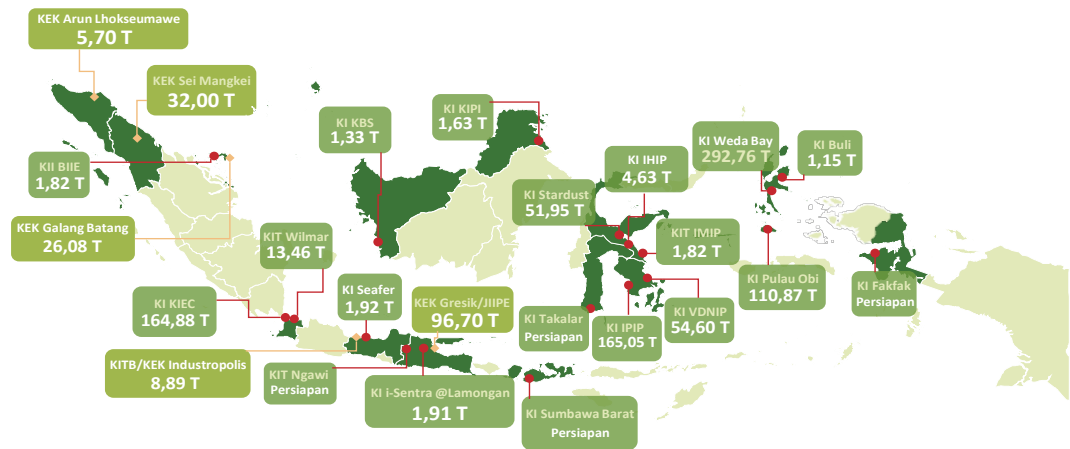
Indikator	Satuan	2024	2025	Semester I	
				2025	2026
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan	%	50,98	51,38	51,36	51,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Keberadaan KI/KEK Prioritas di berbagai provinsi tersebut meningkatkan aliran investasi, khususnya pada sektor industri pengolahan, baik investasi yang berasal dari tenant maupun dari pengelola KI/KEK. Pertumbuhan investasi ini berhasil meningkatkan aktivitas industri,

sehingga berimplikasi pada kenaikan nilai tambah sektor industri pengolahan di daerah tersebut. Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi pada 24 KI/KEK Prioritas mencapai Rp1.580,63 triliun, dan menyerap lebih dari 360 ribu tenaga kerja.

Gambar 7.2
Sebaran Investasi di KI/KEK Prioritas Triwulan I 2026



Sumber: Kementerian Perindustrian, 2026



Pada tahun 2026, pemerintah memfokuskan pengembangan KI/KEK pada empat kawasan prioritas, yakni KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara, KI Terpadu Batang/KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah, KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara, serta KI Weda Bay di Maluku Utara. KEK Sei Mangkei mencatatkan peningkatan realisasi investasi dari Rp5,61 triliun (2024) menjadi Rp32,00 triliun (triwulan I 2026, kumulatif), sehingga tingkat okupansi lahan telah mencapai 30,93 persen. Sebanyak 35 *tenant* telah berinvestasi di KEK Sei Mangkei yang terdiri atas 18 *tenant* sudah operasional dan 17 *tenant* dalam tahap konstruksi, delapan diantaranya ditargetkan mulai beroperasi pada 2026. Peningkatan aktivitas industri di KEK Sei Mangkei berimplikasi positif bagi penyerapan tenaga kerja. Sampai dengan semester I 2026, KEK Sei Mangkei mampu menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja. Selain itu, diversifikasi produk hilir berbasis kelapa sawit dan karet di kawasan tersebut juga terus berkembang, meliputi minyak goreng, oleokimia, bioenergi, *biofertilizer*, *medical gloves*, sabun, hidrogen, hingga es krim.

Sementara itu, di Jawa, KI Terpadu Batang (KITB)/KEK Industropolis Batang menjadi salah satu tujuan investasi industri manufaktur berteknologi menengah-tinggi. Keberadaan infrastruktur dasar dan konektivitas logistik yang memadai berdampak positif bagi realisasi investasi di KITB. Hingga triwulan I 2026, kawasan ini telah memiliki 96 *tenant* dengan realisasi investasi mencapai Rp8,89 triliun. KITB juga mampu menyerap sekitar 26 ribu orang tenaga kerja, dengan sekitar 70 persen merupakan masyarakat Kabupaten Batang. Dalam rangka pengembangan KITB Tahap II, pemerintah juga tengah menyelesaikan revisi

Perpres No. 106/2022 yang akan menjadi dasar hukum percepatan pembangunan infrastruktur kawasan.

Pengembangan KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) semakin menunjukkan kemajuan. Hingga Semester I 2026, realisasi investasinya mencapai Rp24,58 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.224 orang. Kawasan ini telah memiliki *anchor tenant* yang ditargetkan mulai beroperasi pada triwulan III 2026, yakni smelter aluminium yang mengolah alumina menjadi aluminium ingot dengan kapasitas terpasang sebesar 500 ribu ton per tahun.

Pengembangan KI Weda Bay semakin memperkuat posisi Maluku Utara sebagai pusat hilirisasi nikel nasional. Realisasi investasi di KI Weda Bay mencapai Rp292,76 triliun (semester I 2026). Sebanyak 40 *tenant* sudah beroperasi dan mampu menyerap lebih dari 82 ribu tenaga kerja. Sejalan dengan investasi tersebut, rantai hilirisasi nikel pun semakin mengarah pada produk dengan *complexity index* dan nilai tambah tinggi, mulai dari produk hulu seperti feronikel, *nickel matte*, dan *mixed hydroxide precipitate* (MHP); produk antara seperti nikel dan kobalt sulfat, prekursor, katoda nikel, dan aluminium elektrolitik; hingga ke produk hilir seperti baterai kendaraan serta kendaraan berat listrik.

7.5.2 Tantangan dan Upaya

Akselerasi pengembangan KI/KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru membutuhkan dukungan lintas sektor yang terintegrasi. Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya mencakup ketersediaan infrastruktur luar kawasan yang memadai, namun juga bauran kebijakan untuk menarik minat investor. Tantangan tersebut antara lain: (1) kapasitas

infrastruktur konektivitas dan sistem logistik untuk mendukung kelancaran mobilitas barang dan tenaga kerja menuju kawasan; (2) ketersediaan infrastruktur dasar yang andal, khususnya energi, air baku, dan utilitas pendukung lainnya; (3) ketersediaan fasilitas penunjang tenaga kerja, baik dalam hal sarana dan prasarana diklat atau permukiman; (4) sinkronisasi tata ruang dan pengadaan lahan, kepastian proses perizinan, termasuk sistem perizinan berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS); (5) ekosistem industri hijau dalam kawasan; serta (6) tata kelola pengembangan kawasan industri agar mampu mendukung kebutuhan *tenant* dan keberlanjutan investasi.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut antara lain: (1) percepatan pembangunan dan integrasi infrastruktur konektivitas, logistik, energi, air baku, serta utilitas kawasan; (2) peningkatan ketersediaan jumlah dan kualifikasi calon tenaga kerja lokal melalui penguatan jejaring kemitraan antara kawasan industri, dunia usaha, dan lembaga pendidikan vokasi; (3) percepatan penyelesaian perizinan, sinkronisasi tata ruang, dan penguatan kepastian investasi, termasuk penguatan interoperabilitas OSS; (4) penguatan ekosistem industri melalui integrasi rantai pasok domestik, dan peningkatan daya tarik investasi; serta (5) penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Industri sebagai landasan penguatan tata kelola, kepastian hukum, dan daya saing kawasan industri.

7.6 Investasi

7.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Investasi berperan penting dalam mendukung percepatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mendorong pembangunan industri pengolahan, penguatan rantai nilai, adopsi teknologi serta peningkatan kapasitas produksi yang menjadi fondasi transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah terus mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen pada 2029.

Selama periode 2025-2029, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 13.032,8 triliun atau meningkat 31,47 persen dibandingkan realisasi investasi satu dekade sebelumnya (2014-2024). Pemenuhan kebutuhan investasi tersebut didukung oleh penguatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai fondasi investasi nasional serta Penanaman Modal Asing (PMA) yang berperan dalam memperluas pembiayaan, mendorong transfer teknologi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat integrasi industri Indonesia ke dalam rantai nilai global.

Upaya tersebut tecermin pada capaian investasi nasional yang tetap menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun atau sebesar 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya (yoy) serta berhasil menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja.

Pada semester I 2026 realisasi investasi telah mencapai Rp 1.010,6 triliun, meningkat 7,2 persen dibandingkan semester I Tahun 2025



(yoy). Capaian tersebut membuktikan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang menjadi modal penting

dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tabel 7.8
Capaian Realisasi Investasi Tahun 2024 - Semester I 2026

Indikator	Satuan	2024	2025	Semester I	
				2025	2026
Nilai PMA	Rp triliun	900,2	900,9	431,9	507,6
Nilai PMDN	Rp triliun	814	1.030,30	510,3	503,0
Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder	Rp triliun	721,3	780,9	369,3	385,2
Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	%	47,5	53,4	54,1	49,8
Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan	Rp triliun	347,10	445,6	213,0	208,0
Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Rp triliun	407,8	584,1	280,8	300,1
Nilai PMA berorientasi ekspor	Rp triliun	164,63	135,80	-*)	-*)
Nilai PMDN berorientasi ekspor	Rp triliun	56,22	58,32	-*)	-*)
Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa	%	52,20	51,30	50,50	50,20

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026

Keterangan: *) Indikator Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor hanya dilaporkan pada Triwulan IV setiap tahun (capaian data tahunan)

Realisasi investasi semester I 2026, didorong oleh meningkatnya PMA dengan nilai kontribusi sebesar 50,2 persen, tumbuh sebesar 17,5 persen dibanding realisasi semester I 2025. Hal ini mencerminkan menguatnya investasi asing baik sebagai sumber pembiayaan dan alih teknologi. Di sisi lain, kapasitas investor nasional terus di dorong untuk mendukung transformasi ekonomi.

Berdasarkan distribusi sektoral, realisasi investasi pada sektor sekunder mencapai Rp385,2 triliun, sedangkan investasi pada bidang hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

investasi mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan industrialisasi.

Pencapaian ini tidak hanya di nilai dari besarnya volume realisasi investasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja yang tumbuh sebesar 15,0 persen (yoy) atau menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Hal ini juga mendorong pemerataan investasi, khususnya di Luar Pulau Jawa dengan capaian sebesar 50,2 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemerataan investasi antarwilayah terus terjaga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Peningkatan realisasi investasi merupakan hasil sinergi pemerintah dengan pelaku usaha dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif dan berorientasi pada hasil, diperkuat dengan Implementasi PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui penguatan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang berbasis *Service Level Agreement* (SLA), yang memberikan kepastian waktu dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal tersebut diperkuat melalui penyesuaian ketentuan modal disetor bagi PMA menjadi 2,5 miliar per perseroan, Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), dan penyederhanaan prosedur perizinan.

Sejalan dengan upaya tersebut, UU No. 16/2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menegaskan peran penting Danantara dalam meningkatkan dan mengoptimalkan investasi. Danantara telah mendukung prioritas pembangunan nasional melalui tiga jalur investasi. Pertama, Danantara mendukung percepatan hilirisasi melalui investasi pada 19 proyek di 6 sektor utama yaitu energi, pangan, industri garam, material konstruksi, agroindustri, mineral dan logam dengan nilai investasi sebesar US\$7 miliar ($\pm$ Rp126 triliun) pada fase 1 dan US\$6,44 miliar ($\pm$ Rp116 triliun) pada fase 2.

Selain itu, pemerintah berdasarkan UU No. 4/2026 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis/BMKS (Indonesia Commodity and Mineral Exchange/ICOMEX). Bursa tersebut akan mulai beroperasi pada Januari 2027. Pembentukan bursa menjadi langkah penting untuk membangun pasar mineral dan komoditas strategis melalui mekanisme pembentukan harga acuan yang kredibel.

Kemudian, pemerintah juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berperan sebagai BUMN Ekspor sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 24/2026. DSI memiliki mandat dalam memastikan pengelolaan komoditas strategis nasional, menjaga keberlanjutan pasokan, dan mendukung pembangunan nasional berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai tambah, penerimaan negara, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Dengan dukungan berbagai pihak, DSI telah membangun kerangka tata kelola ekspor dan tengah melanjutkan pengembangan platform ekspor sumber daya alam nasional terintegrasi. Saat ini, DSI telah memulai proses integrasi data ekspor lintas sistem pemerintah dengan tetap menjaga kelancaran kegiatan komersial. DSI juga aktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan proses pelaksanaan, sekaligus mengakomodasi masukan guna memastikan transparansi dalam tata kelola ekspor nasional.

Kedua, investasi strategis juga dilakukan pada prioritas pembangunan seperti Program 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ketiga, Danantara juga memperkuat kerja sama investasi strategis seperti: (1) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau *Waste-to-Energy* (WtE) yang dilakukan di lebih dari 30 kabupaten/kota; (2) Pembangunan Ekosistem Haji dan Umrah berupa akuisisi multi-aset di Makkah serta pembangunan hotel, masjid, dan kawasan komersial di kawasan Thakher; (3) Pembangunan ekosistem semikonduktor dengan inisiasi berupa program pengembangan talenta bagi 1.000 insinyur dari 15.000 tenaga ahli di Indonesia sebagai upaya memperkuat penguasaan teknologi strategis nasional.



7.6.2 Tantangan dan Upaya

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas persaingan dan fragmentasi ekonomi, beberapa tantangan penting untuk meningkatkan investasi di Indonesia, antara lain: (1) insentif investasi yang kompetitif; dan (2) iklim investasi termasuk kelembagaan, regulasi, kualitas infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan efektivitas penyelesaian sengketa.

Merespons tantangan di atas, pemerintah pusat melakukan beberapa penguatan kebijakan antara lain: (1) optimalisasi fungsi satgas percepatan investasi dalam penyelesaian hambatan investasi termasuk berbagai permasalahan di lapangan; (2) optimalisasi implementasi *Online Single Submission* (OSS);

(3) perluasan pembiayaan pembangunan melalui bauran pendanaan (*blended finance*), skema *spending to invest*, serta berbagai bentuk kerja sama investasi internasional; serta (4) pengembangan instrumen pembiayaan inovatif untuk memperkuat sumber pembiayaan non-pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah Daerah diharapkan berperan aktif melalui: (1) fasilitasi investasi melalui penyederhanaan proses perizinan, penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung; (2) penguatan pelayanan terpadu dan promosi potensi investasi sesuai keunggulan wilayah; serta (3) peningkatan kemitraan untuk melanjutkan pemerataan dan penguatan UMKM.



Pengembangan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan
Sumber: BP BUMN, 2026

BAB 8

ASTA CITA 6

Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah
Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan
Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan



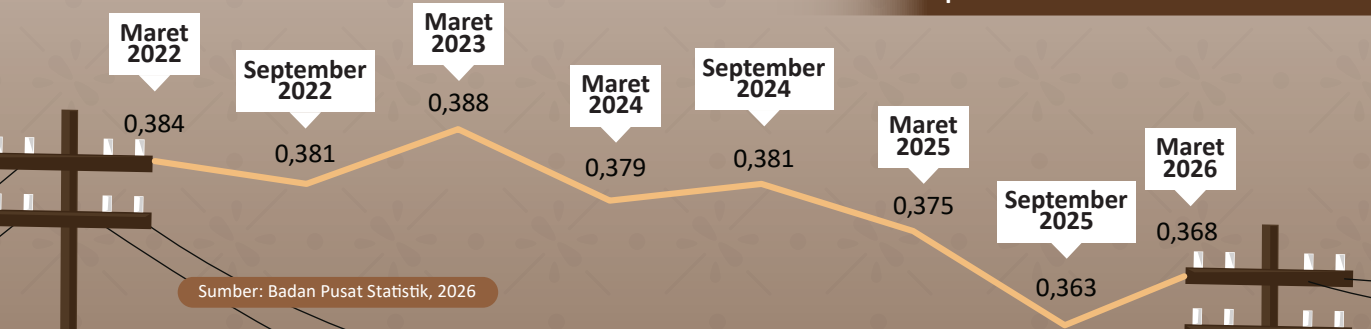
Cetak Sawah di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Kondisi Kemiskinan Indonesia Tahun 2021-2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Capaian Rasio Gini Tahun 2022-2026



Capaian Indikator Perkotaan, Perdesaan, serta Daerah Afirmasi dan Transmigrasi

Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional ^{a)}	44,80%**	Persentase Daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju ^{b)}	13,33**
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional ^{a)}	57,55%**	Persentase Desa Mandiri ^{b)}	27,24*
Proporsi Kontribusi PDB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional ^{a)}	3,38%**	Persentase desa maju dan desa mandiri di 22 pusat pertumbuhan Kawasan perbatasan ^{c)}	47,59*
Persentase Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di 204 Kecamatan Perbatasan ^{c)}	22,54%*	Rata rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) ^{c)}	0,55*

Sumber: a) Kementerian PPN/Bappenas, 2026
 b) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2026
 c) Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2026

Keterangan: * Capaian 2025
 ** Capaian Triwulan I 2026





Desa bukan hanya sekedar wilayah administratif melainkan fondasi utama yang menopang kedaulatan ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang menempatkan desa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan, mengurangi disparitas ekonomi, dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Pembangunan dari desa menjadi fondasi penguatan ekonomi lokal yang lebih berkeadilan menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

8.1 Kependudukan

8.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan kependudukan memerlukan data yang akurat dan mutakhir untuk memahami dinamika jumlah, karakteristik, serta persebaran penduduk. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan, penentuan sasaran penerima

manfaat program, serta penyediaan berbagai layanan publik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah terus memperkuat sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati sebagai sumber data kependudukan sekaligus memastikan setiap penduduk memiliki identitas hukum untuk memperoleh akses terhadap berbagai layanan dasar berbasis identitas kependudukan tunggal.

Tabel 8.1

Capaian Indikator Kependudukan Tahun 2021-2026

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ^{*)}
Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0–4 tahun	%	91,71	94,53	95,29	94,52	94,96	94,66
Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	-	0,26	3,41	6,53	8,51	9,70
Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	lembaga	4.517	5.371	6.268	6.777	7.421	7.693

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2026

Keterangan: *) capaian semester I

Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terus menjadi fokus dalam memastikan seluruh penduduk tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Hal tersebut tecermin dari cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0–4 tahun sebagai bentuk pengakuan identitas hukum sejak lahir. Selain itu, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah mencakup seluruh penduduk menjadi dasar penerapan identitas tunggal nasional dalam penyelenggaraan berbagai layanan publik. Sejalan dengan itu, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus diperluas untuk mendukung transformasi digital layanan publik melalui penyediaan identitas digital yang lebih mudah, aman, dan efisien.

Pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal terus diperluas dalam berbagai layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan digital. Melalui NIK, data kependudukan dimanfaatkan sebagai acuan dalam proses verifikasi dan validasi identitas serta mendukung interoperabilitas berbagai sistem layanan. Beberapa pemanfaatan data NIK antara lain melalui integrasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, manajemen aparatur sipil negara, administrasi perpajakan melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemutakhiran data pemilih, serta pemadanan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

Perluasan pemanfaatan data kependudukan juga terlihat dari meningkatnya jumlah lembaga pengguna. Hingga semester I 2026, sebanyak 7.693 lembaga pengguna telah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, fasilitas kesehatan,

lembaga pendidikan, serta berbagai penyelenggara layanan publik lainnya. Perluasan pemanfaatan tersebut memperkuat integrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung tata kelola pemerintahan dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Berbagai capaian tersebut didukung oleh berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain: (1) perluasan akses layanan administrasi kependudukan melalui layanan jemput bola; (2) percepatan transformasi digital melalui pengembangan layanan administrasi kependudukan secara daring, implementasi IKD, dan pemanfaatan *electronic Know Your Customer* (e-KYC); (3) perluasan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik; serta (4) peningkatan edukasi dan literasi administrasi kependudukan kepada masyarakat.

8.1.2 Tantangan dan Upaya

Penguatan administrasi kependudukan menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) keberlanjutan cakupan identitas hukum dan kepemilikan NIK sepanjang siklus hidup penduduk; (2) kualitas, kelengkapan, dan interoperabilitas data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan publik; (3) perluasan pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal pada berbagai layanan publik; (4) transformasi digital administrasi kependudukan; serta (5) kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah,



dan penyelenggara layanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah akan memfokuskan kebijakan pada: (1) penguatan integrasi administrasi kependudukan dan statistik hayati guna meningkatkan kualitas dan kemutakhiran data kependudukan; (2) percepatan interoperabilitas data kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital; (3) optimalisasi pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal pada berbagai layanan publik; (4) penguatan kapasitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat pusat dan daerah; serta (5) peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik berbasis data kependudukan.

8.2 Kesejahteraan Sosial dan Penurunan Kemiskinan

8.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menunjukkan kemajuan signifikan, yang tecermin dari capaian peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan. Tingkat kemiskinan telah turun dari 8,47 persen (Maret 2025) menjadi 8,07 persen (Maret 2026) dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 23,85 juta jiwa menjadi 22,93 juta jiwa. Sepanjang periode Maret 2025-Maret 2026, sekitar 920 ribu penduduk keluar dari garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan penguatan sinergi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar mulai memberikan dampak terhadap percepatan penurunan kemiskinan.

Grafik 8.1
Kondisi Kemiskinan Indonesia Tahun 2022-2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan didukung oleh penguatan tata kelola yang terintegrasi dan berkelanjutan, di antaranya melalui implementasi Inpres No. 4/2025 tentang Data Tunggal

Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Inpres No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Optimalisasi DTSEN sebagai basis data tunggal lintas sektor dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan. Sinkronisasi dengan lokasi prioritas penurunan kemiskinan dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dan pelaksanaan program berjalan selaras dengan sasaran serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memastikan sistem perlindungan sosial dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap guncangan sosial ekonomi dan mendorong graduasi masyarakat miskin dan

rentan menuju kemandirian. Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) yang mengkonsolidasikan program bantuan sosial dan subsidi dapat memperkuat digitalisasi bantuan sosial. Langkah ini meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pada semester I 2026, sebanyak 564.994 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PRO-KESRA berhasil tergraduasi menjadi keluarga sejahtera.

Selain itu, hingga semester I 2026 pemerintah telah memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9.576.161 keluarga, Program Sembako kepada 16.191.955 keluarga, Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) kepada 96.800.000 penerima, dan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 13.663.630 peserta didik.

Tabel 8.2
Realisasi Bantuan Sosial dalam Program Penurunan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023-2026

Uraian	Satuan	2023	2024	2025	Semester I	
					2025	2026
Program Keluarga Harapan	KPM (juta)	9,87	10,00	10,00	9,40	9,58
Program Sembako/BPNT	KPM (juta)	18,72	18,73	18,27	17,72	16,19
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial (PBI JKN)	jiwa (juta)	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	jiwa (ribu)	45,32	29,33	47,91	36,65	18,37
Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	jiwa (ribu)	19,74	11,26	9,10	5,55	13,14
Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	jiwa (ribu)	62,33	35,67	46,42	29,12	23,07
Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	jiwa (ribu)	63,92	53,30	61,46	29,92	19,96
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Keluarga	KPM (juta)	6,83	8,83	5,92	5,02	6,52

Sumber: Kementerian Sosial, 2026



Pemerintah juga memperkuat sistem perlindungan sosial adaptif untuk menghadapi risiko guncangan sosial ekonomi akibat bencana alam melalui keterpaduan langkah tanggap darurat, pemulihan pascabencana, dan penguatan mitigasi berbasis masyarakat di wilayah rawan bencana. Salah satu langkah strategis pemulihan pascabencana adalah implementasi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera pascabencana banjir bandang dan longsor. Hingga penyaluran tahap III, pemerintah telah memberikan bantuan logistik tanggap darurat kepada 99.329 jiwa, mendukung pemulihan sosial-ekonomi melalui bantuan jaminan hidup kepada 273.911 jiwa, dan pemenuhan isi hunian dan stimulan ekonomi bagi 75.065 keluarga.

Upaya pemulihan tersebut dilengkapi dengan layanan rehabilitasi psikososial dan perlindungan bagi kelompok rentan terdampak bencana, terutama anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Sejalan dengan agenda mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat diperkuat melalui fasilitasi Kampung Siaga Bencana bagi 33.975 jiwa.

Sementara itu, untuk meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan, pemerintah juga memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Program ini memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta menyiapkan sumber daya manusia unggul.

Intervensi kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan terus dioptimalkan melalui uji coba digitalisasi bantuan sosial di 43 kabupaten/kota dan diperluas ke 100 kabupaten/kota lainnya. Uji coba ini merupakan langkah awal pengembangan sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, akurat, transparan, dan adaptif melalui pemanfaatan DTSEN, IKD,

serta mekanisme penyaluran bantuan secara nontunai. Transformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial, termasuk dalam mendukung respons pemerintah pada situasi kedaruratan, bencana, maupun guncangan sosial ekonomi lainnya.

8.2.2 Tantangan dan Upaya

Peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) integrasi sistem pendataan sosial ekonomi secara *real-time* untuk meningkatkan ketepatan sasaran; (2) keterpaduan antara bantuan sosial dengan program pemberdayaan lainnya; (3) kapasitas sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap guncangan sosial ekonomi akibat bencana; (4) disparitas antarwilayah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia; dan (5) koordinasi lintas sektor serta kapasitas teknis pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan berbasis data.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, akan dilakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain: (1) percepatan pemanfaatan DTSEN hingga level desa serta penguatan interoperabilitas data lintas sektor; (2) percepatan transformasi bantuan sosial menuju skema produktif melalui mekanisme graduasi terukur yang terintegrasi dengan pelatihan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, skema kemitraan dan pemberdayaan ekonomi melalui kelembagaan koperasi; (3) penguatan sistem perlindungan sosial adaptif melalui integrasi data dan mekanisme kontinjensi; (4) penajaman pembangunan wilayah berbasis kemiskinan; dan (5) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, disertai penguatan stabilitas dan penanganan isu keamanan.

8.3 Penurunan Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat

8.3.1 Capaian Utama Pembangunan

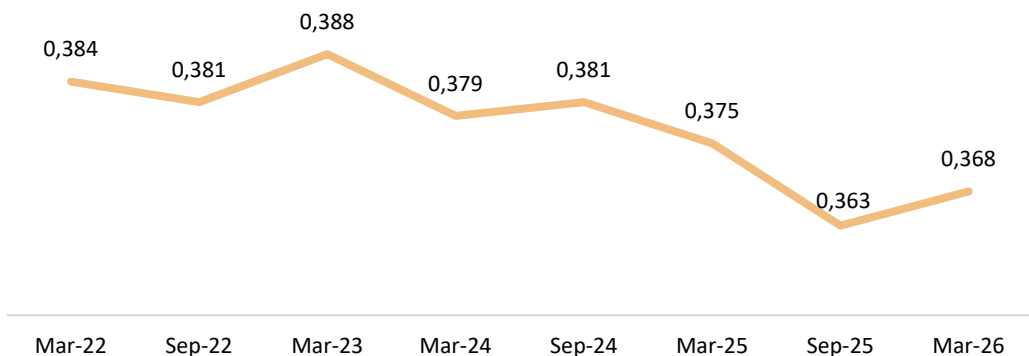
Komitmen kuat pemerintah dalam membangun perekonomian dari desa membuahkan hasil nyata dalam menekan ketimpangan antarkelompok masyarakat. Hal ini tecermin dari rasio gini yang terus membaik. Pada Maret 2026, capaian rasio gini sebesar 0,368 lebih baik dari capaian Maret 2025 sebesar 0,375 dan Maret 2024 sebesar 0,379. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk menurunkan ketimpangan ekonomi.

Komitmen tersebut dilakukan melalui berbagai intervensi, antara lain: (1) perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk akses

pembiayaan dan peningkatan inklusi keuangan yang membantu usaha mikro berkembang dan naik kelas; (2) perluasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan; dan (3) perluasan hilirisasi industri dan sumber daya alam untuk peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi baru.

Selain itu, penurunan ketimpangan juga didukung oleh penguatan program perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran melalui pemanfaatan DTSEN. Pemanfaatan DTSEN dalam program bantuan sosial dan kebijakan stabilisasi harga kebutuhan pokok telah berhasil menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi kesenjangan pengeluaran antarkelompok masyarakat.

Grafik 8.2
Rasio Gini Indonesia Tahun 2022-2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Keberhasilan penurunan ketimpangan ekonomi nasional juga didukung oleh peran pemerintah daerah. Beberapa daerah berhasil menurunkan rasio gini secara signifikan sehingga berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan secara

nasional. Penurunan rasio gini tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,048, Kepulauan Riau sebesar 0,028, dan Sumatera Selatan sebesar 0,026 poin.



Tabel 8.3
Sepuluh Provinsi dengan Penurunan Rasio Gini Tertinggi Tahun 2025 - 2026

No	Provinsi	Capaian		Selisih
		Maret 2025	Maret 2026	
1	Papua Pegunungan	0,349	0,301	-0,048
2	Kepulauan Riau	0,382	0,354	-0,028
3	Sumatera Selatan	0,311	0,285	-0,026
4	Banten	0,330	0,312	-0,018
5	Papua Tengah	0,333	0,315	-0,018
6	Sumatera Utara	0,295	0,278	-0,017
7	DI Yogyakarta	0,426	0,411	-0,015
8	Maluku	0,296	0,281	-0,015
9	Kalimantan Tengah	0,292	0,278	-0,014
10	Maluku Utara	0,299	0,288	-0,011

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Penurunan rasio gini pada beberapa provinsi teratas didukung oleh membaiknya berbagai indikator sosial ekonomi. Di Provinsi Papua Pegunungan, penurunan ketimpangan didorong dengan penguatan ekonomi berbasis masyarakat antara lain melalui peningkatan akses pasar bagi petani yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah. Di sisi lain, terdapat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi serta percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Trans-Papua yang mempermudah distribusi barang dan hasil pertanian, menekan biaya logistik, dan meningkatkan konektivitas antardaerah.

Di Provinsi Kepulauan Riau, penurunan rasio gini didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, terutama pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Kondisi ini tecermin dari tren penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan yang mengindikasikan

meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta perbaikan pendapatan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, keberlanjutan program perlindungan sosial turut menjaga daya beli rumah tangga rentan di tengah dinamika perekonomian. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan peningkatan pengeluaran rumah tangga kelompok bawah relatif lebih cepat dibanding kelompok atas sehingga distribusi pengeluaran menjadi lebih merata.

8.3.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan menurunkan ketimpangan ekonomi antarkelompok masyarakat secara nasional antara lain: (1) konsentrasi investasi dan kesempatan ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar; (2) pekerja sektor informal yang belum sepenuhnya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan; serta (3) kelompok penduduk kelas menengah rentan mengalami penurunan tingkat kesejahteraan.

Dalam menghadapi tantangan yang ada, pemerintah terus memperkuat berbagai upaya strategis, antara lain: (1) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa melalui penyediaan infrastruktur layanan dasar, penguatan konektivitas dan sistem logistik, serta investasi pada industri bernilai tambah berbasis potensi lokal; (2) penguatan integrasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam rantai pasok formal serta peningkatan akses pasar dan sumber pembiayaan; (3) peningkatan lapangan kerja dan perluasan akses pekerjaan formal, serta penguatan *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dunia industri; serta (4) penguatan jaring pengaman sosial dan penguatan skema graduasi bantuan menuju kemandirian yang lebih implementatif dan berdampak.

8.4 Kemandirian Masyarakat

8.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, salah satunya dalam bentuk Kartu Usaha Afirmatif (KUA). Pada 2025, KUA telah diberikan kepada 2.498.535 penerima manfaat. Kartu ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, kelompok rentan (perempuan, lansia, dan kelompok disabilitas), serta masyarakat dengan penghasilan rendah menjadi mandiri dan berdaya, sehingga mampu tergraduasi dari kemiskinan dan taraf kesejahteraan meningkat.

Beberapa program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam mendukung KUA, meliputi: (1) Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi (PPSE) yang memberikan bantuan modal dan

pendampingan bagi keluarga miskin dan rentan; (2) Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang memberikan akses pembiayaan pelaku usaha mikro; (3) Program Perhutanan Sosial yang memberikan bantuan kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), untuk mengembangkan usaha produktif yang bernilai tambah berdasarkan pemanfaatan kawasan hutan; (4) Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM); (5) Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; serta (6) program pemberdayaan lain di sektor pertanian dan perikanan.

Program KUA dikembangkan sebagai ekosistem program-program pemberdayaan ekonomi afirmatif lintas sektor. Program ini dilaksanakan dengan standar pendampingan yang komprehensif dan melalui implementasi yang terintegrasi, sehingga mampu mendorong tercapainya kesejahteraan penerima manfaat. Pelaksanaan KUA mendukung proses graduasi penduduk miskin dan rentan agar mandiri, tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan PPSE hingga Juli 2026, sebanyak 6.840 keluarga telah tergraduasi. Keluarga penerima manfaat tersebut dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka menengah ke panjang, serta tidak lagi membutuhkan bantuan sosial.

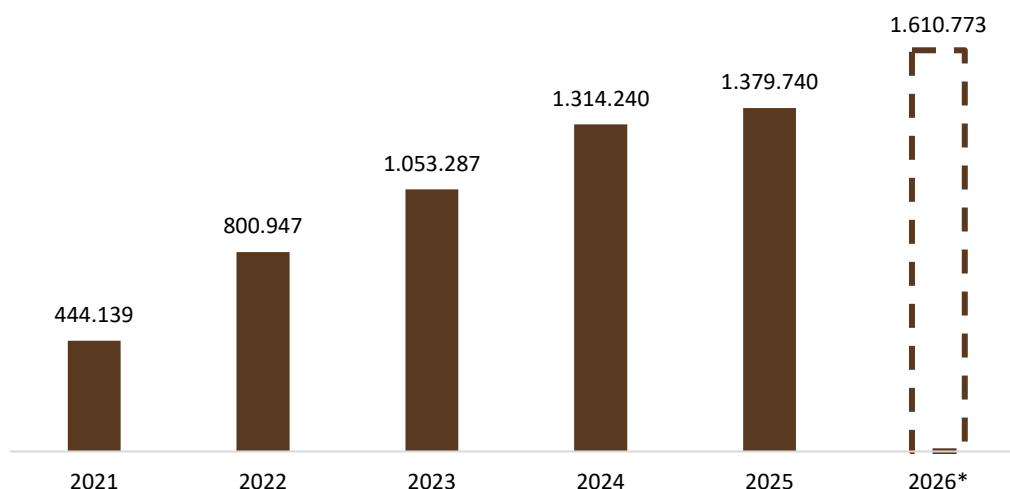
Selain itu, Reforma Agraria juga dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Pada 2025, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 65.500 bidang kepada penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Pemerintah hingga saat ini telah meredistribusikan tanah sebanyak 6.203.558 bidang kepada masyarakat yang tidak



memiliki tanah atau bertanah sempit. Hingga akhir 2026, diharapkan terdapat penambahan 231.033 bidang tanah yang dapat didistribusi kepada masyarakat. Proses redistribusi

tanah ini akan dilanjutkan dengan pemberian program pemberdayaan sehingga penerima TORA mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Grafik 8.3
Capaian Kumulatif Redistribusi Tanah Tahun 2021-2026 (bidang tanah)



Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2026

Keterangan: *) angka proyeksi

Dalam mewujudkan kemandirian sosial dan ekonomi, pemerintah terus memperkuat berbagai program pemberdayaan, seperti pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Pusat Kesejahteraan Sosial, Bina Keluarga Lansia, Pemberdayaan Karang Taruna, serta Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang menguatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kelompok maupun komunitas. Pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk kemiskinan, kerentanan akibat bencana, dan perubahan iklim.

Penguatan kohesi dan integrasi masyarakat menjadi agenda utama untuk meningkatkan kapasitas masyarakat berdaya, terutama dalam menghadapi perubahan dan melindungi

kelompok yang paling rentan. Diversifikasi kegiatan ekonomi menjadi langkah preventif untuk melindungi dan menjaga pendapatan masyarakat ketika perubahan dan bencana berdampak pada mata pencaharian tertentu. Pemerintah mengembangkan model pemberdayaan adaptif bersama mitra pembangunan untuk dapat merespons berbagai kejadian bencana dan perubahan lain.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat hingga terlepas dari kemiskinan didukung oleh tenaga pendamping. Tenaga pendamping pembangunan pada 2025 mencapai 134.200 orang yang terdiri dari beragam jenis pendamping, seperti Tenaga Pendamping Profesional, Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh

Pertanian, serta Pendamping PKH dan Pekerja Sosial Masyarakat. Tenaga pendamping pembangunan ini berperan sebagai pemampu (*enabler*) dan katalis pemberdayaan dari program-program pemberdayaan masyarakat.

8.4.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, antara lain: (1) pengembangan standar dan indikator bersama terkait pemberdayaan masyarakat yang holistik sehingga capaiannya mudah diukur secara konsisten di tingkat nasional maupun daerah; (2) transformasi pemberdayaan masyarakat yang semula berorientasi pada pemberian bantuan sosial menjadi kemandirian untuk jangka panjang; (3) integrasi dan sinergi program-program pemberdayaan; dan (4) optimalisasi program pendukung serta sumber pendanaan inovatif dan berkelanjutan antarprogram pemberdayaan masyarakat.

Sebagai upaya dalam memperkuat kemandirian masyarakat, pemerintah menyusun beberapa arah kebijakan, antara lain: (1) pemberdayaan

ekonomi melalui Kartu Usaha untuk mendukung PRO-KESRA; (2) penyusunan dan pengembangan desain besar pemberdayaan masyarakat; serta (3) penguatan peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat.

8.5 Perkotaan

8.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah memfokuskan pembangunan perkotaan pada pengembangan 10 wilayah metropolitan, 4 calon wilayah metropolitan, serta 36 perkotaan besar, sedang, kecil (non-wilayah metropolitan), dan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam lingkup Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan. Program ini selain dimaksudkan untuk membangun kota-kota agar maju, layak huni, inklusif, tangguh, dan didukung dengan tata kelola yang baik, juga untuk meningkatkan keseimbangan sistem perkotaan nasional. Pembangunan IKN menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemerataan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Tabel 8.4
Capaian Indikator Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2024-2026

Indikator	Satuan	2024	2025	2026
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	%	56,92	57,03	57,55
Perkotaan Wilayah Metropolitan				
Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	%	44,26	44,32	44,80**
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan	Skor	44,61	64,18*	64,18*
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	%	40,85	38,67	42,31**
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI	Skor	45,86	69,68*	69,68*



Indikator	Satuan	2024	2025	2026
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	%	3,41	5,66	2,49**
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI	Skor	42,74	35,04*	35,04*
Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan				
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	%	7,26	7,36	3,38**
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	Skor	48,36	42,69*	42,69*
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	%	3,86	3,87	4,12**
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI	Skor	49,81	47,61*	47,61*
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	%	3,39	3,49	3,26**
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI	Skor	47,20	38,78*	38,78*

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Keterangan: *) angka sementara IKB Tahun 2025

**) capaian triwulan I 2026

Pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN, dilakukan melalui beberapa intervensi. Dalam hal pembangunan Wilayah Metropolitan (WM), beberapa intervensi kunci pada 2026, antara lain: (1) program pengendalian banjir di WM Medan, WM Semarang, dan WM Manado serta pembangunan prasarana perlindungan Kawasan Pantai Utara Jawa dari daya rusak air; (2) peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak seksi 1A, penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Kota Makassar-

Parepare, revitalisasi Stasiun Tanah Abang tahap I, proyek MRT Jakarta jalur timur-barat fase I, serta penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Banjarmasin dan Kota Makassar; (3) pengembangan SPAM regional di WM Medan dan WM Makassar; (4) pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tinggi di Kota Makassar dan Kota Surabaya; serta (5) penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta, penyusunan RPerpres RTR Nasional untuk wilayah Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-

Puncak-Cianjur) dan Cekungan Bandung, serta penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 19 lokasi pada wilayah metropolitan.

Dalam hal pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan, beberapa intervensi kunci pada 2026, antara lain: (1) peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalur kereta api *elevated* Solo Balapan-Kadipiro, penyediaan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di Kota Depok dan Kota Balikpapan, serta pengembangan Bandar Udara Morowali; (2) pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tinggi di Kota Bengkulu dan Kabupaten Banyumas; (3) peningkatan layanan dasar perkotaan melalui pembangunan SPAM Regional Kota Surakarta, penyediaan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Gresik, peningkatan kualitas RSUD Weda Kabupaten Halmahera Tengah, serta operasi dan pemeliharaan BTS 4G dan akses internet untuk kota besar, sedang, dan kecil; serta (4) penyusunan RPerpres RTR Nasional untuk Kawasan Samarinda-Sanga Sanga-Muara Jawa-Balikpapan serta penyusunan dan penetapan RDTR di 4 lokasi pada lokasi perkotaan non-wilayah metropolitan.

Capaian pembangunan IKN hingga triwulan II 2026, telah menunjukkan hasil nyata untuk semakin memantapkan penyelenggaraan ekosistem pemerintahan di IKN. Memasuki Tahap II Pembangunan IKN (2025–2029), telah dituntaskan pembangunan sejumlah infrastruktur, antara lain: (1) kawasan kompleks istana; (2) kawasan rumah ibadah; (3) sekolah terpadu SD, SMP, dan SMA yang akan menjadi Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dan beroperasi pada Agustus 2026; serta (4) jalan kawasan sepanjang 12,56 km.

Di samping itu, juga dilaksanakan pembangunan akses jalan menuju kawasan legislatif dan yudikatif serta kawasan pendukung lainnya, penyediaan layanan Bus Perkotaan, proses pembangunan hunian untuk pimpinan dan anggota serta staf pada lembaga legislatif dan yudikatif.

Selain pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, pihak swasta juga berperan dalam membangun infrastruktur pendukung lainnya seperti hotel, rumah sakit, dan sekolah. Hingga saat ini, komitmen investasi pihak swasta untuk pembangunan di IKN sebesar Rp74,01 triliun (Juni 2026).

8.5.2 Tantangan dan Upaya

Seiring dengan pesatnya urbanisasi, pembangunan perkotaan dihadapkan pada tantangan, antara lain: (1) tata kelola lintas batas administratif dan fragmentasi penyelenggaraan layanan publik di wilayah aglomerasi; (2) infrastruktur dasar dan layanan publik yang inklusif; (3) ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana; (4) pengurangan kemiskinan dan ketimpangan perkotaan; serta (5) inovasi pendanaan kreatif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Sementara tantangan pembangunan IKN, antara lain: (1) kompleksitas operasionalisasi kota dan integrasi kewilayahan; (2) akselerasi pembiayaan inovatif untuk menopang pembangunan lanjutan di tengah keterbatasan ruang fiskal; serta (3) keterlibatan dan isu sosiokultural masyarakat lokal.

Menjawab beberapa tantangan di atas, pemerintah melakukan upaya antara lain: (1) penguatan koordinasi lintas K/L/D melalui TKSPPN dan forum perencanaan; (2) mendorong perencanaan perkotaan yang terpadu;



(3) akselerasi pembangunan infrastruktur dengan berbagai skema pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dan inklusif; serta (4) *pilotting* percontohan inovasi pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan di beberapa kota, baik dari sisi perencanaan maupun pendanaan inovatif.

Sementara untuk menjawab tantangan pembangunan IKN, pemerintah memfokuskan kebijakan pada: (1) penguatan iklim investasi dan optimalisasi tata kelola pembiayaan, termasuk melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara; (2) penguatan integrasi IKN dengan daerah sekitarnya melalui kolaborasi antardaerah; dan (3) menjadikan IKN sebagai satu kesatuan *superhub* ekonomi melalui penguatan konektivitas antarwilayah dan ekstensifikasi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

8.6 Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Transmigrasi

8.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan dari desa merupakan ujung tombak pemerataan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Pembangunan dari desa, terutama di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, maupun transmigrasi diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan memperbesar peluang ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang selama ini terbatas, mulai dapat terpenuhi, sehingga kawasan perdesaan mulai berkembang dan berfungsi sebagai simpul baru pertumbuhan wilayah yang terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 8.5
Capaian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Transmigrasi Tahun 2024-2026

No	Uraian	Satuan	2024	2025	2026 ¹⁾
Pembangunan Desa					
1	Persentase Desa Mandiri	%	22,85 ¹⁾	27,24 ¹⁾	23,92
			KTI: 7,42 ¹⁾	KTI: 8,48 ¹⁾	KTI: 7,89
2	Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI	%	KBI: 15,42 ¹⁾	KBI: 18,76 ¹⁾	KBI: 16,02
3	Persentase rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman	%	18,90 ²⁾	18,98 ²⁾	24,00
4	Persentase rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman	%	4,77 ²⁾	4,81 ²⁾	7,00
5	Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan	%	25,99 ¹⁾	38,87 ¹⁾	26,25
6	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	24,62 ³⁾	25,67 ³⁾	25,01
7	Persentase bagi hasil BUMDes terhadap PADes	%	3,97 ¹⁾	6,67 ¹⁾	4,07
8	Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing	kawasan	3 ¹⁾	4 ¹⁾	5
9	Persentase Desa Berketahanan Iklim	%	33,73 ¹⁾	63,69 ¹⁾	35,73

No	Uraian	Satuan	2024	2025	2026*)
10	Persentase desa yang menerapkan layanan berbasis digital	%	74,00 ¹⁾	90,03 ¹⁾	78,00
11	Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa	desa	-	90 ⁴⁾	800
12	Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	desa	-	100 ⁴⁾	1620
Pembangunan Daerah Tertinggal					
1	Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkatkan Statusnya menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju	%	-	13,33 ¹⁾	23,33
Kawasan Perbatasan					
1	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas	%	21,46 ⁵⁾	22,54 ⁵⁾	18,29
2	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	%	44,38 ⁵⁾	47,59 ⁵⁾	46,29
3	Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP)	indeks	0,52 ⁵⁾	0,55 ⁵⁾	0,60
4	Rata-rata IPKP di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas	indeks	0,64 ⁵⁾	0,75 ⁵⁾	0,71
Kawasan Transmigrasi					
1	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	%	52,88 ⁶⁾	55,81 ⁶⁾	58,10
2	Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	indeks	0,425 ⁶⁾	0,50 ⁶⁾	0,475
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	%	0,90 ⁶⁾	1,32 ⁶⁾	1,20
4	Persentase dukungan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Masyarakat/ Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	%	37,5 ⁶⁾	40 ⁶⁾	45

Sumber: 1) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2026; 2) Kementerian Pekerjaan Umum; 3) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia; 4) Kementerian Dalam Negeri; 5) Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2026; dan 6) Kementerian Transmigrasi, 2026.

Keterangan: *) angka target

Pada 2025, pembangunan desa diarahkan untuk memperkuat kemandirian desa melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal. Penguatan tata kelola ditunjukkan oleh 90 desa yang menginisiasi kerja sama dan 100 desa yang menerapkan administrasi serta pengelolaan keuangan berbasis digital.

Pada 2026, pemerintah meningkatkan kualitas layanan dasar melalui penyediaan akses air minum aman di rumah tangga perdesaan, peningkatan sanitasi aman, penerapan layanan digital, serta digitalisasi administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, pada 2025 pemerintah terus mengakselerasi pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pemenuhan



layanan dasar, penguatan aksesibilitas, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Upaya tersebut mendorong peningkatan status daerah tertinggal dan sangat tertinggal menuju daerah berkembang dan/atau maju. Capaian tersebut didukung oleh intervensi lintas sektor yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Pembangunan kawasan perbatasan pada 2025 mengalami perkembangan penting yang ditunjukkan melalui meningkatnya persentase desa maju dan mandiri di 22 Pusat Pengembangan Kawasan Perbatasan (PPKP) dan meningkatnya Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas. Pembangunan Kawasan Perbatasan pada 2026 diarahkan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda terdepan melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan.

Hingga semester I tahun 2026, Pemerintah telah melaksanakan sejumlah kegiatan strategis, antara lain (1) pelaksanaan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang; (2) penanganan dampak penegasan batas wilayah negara, khususnya di Sebatik, Kalimantan Utara; dan (3) penetapan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2026 dan penyusunan Rancangan Rencana Aksi PBWNKP Tahun 2027 sebagai bentuk komitmen pembangunan Kawasan Perbatasan.

Pengembangan kawasan transmigrasi terus diarahkan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pada 2025, pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui peningkatan status perkembangan desa, penguatan indeks transformasi kawasan, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, serta penguatan dukungan kegiatan lintas sektor dan lintas pelaku pada kawasan transmigrasi prioritas.

Transformasi kawasan transmigrasi terus diakselerasi untuk mencapai target pembangunan transmigrasi tahun 2026. Beberapa kemajuan penting hingga semester I 2026 antara lain: (1) penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM); (2) penguatan konektivitas kawasan transmigrasi; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan transmigrasi melalui pelatihan pengembangan produk unggulan; dan (4) riset kolaboratif pengembangan kawasan transmigrasi.

8.6.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan transmigrasi menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) hilirisasi industri berbasis produk unggulan sesuai karakteristik wilayah; (2) kompetensi sumber daya manusia untuk peningkatan daya saing wilayah; (3) ketersediaan layanan dasar, seperti akses dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta air bersih dan sanitasi; (4) konektivitas intra dan antarmasyarakat; (5) perubahan iklim dan bencana yang berdampak pada kondisi geografis; dan (6) dukungan intervensi lintas sektor dalam pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan transmigrasi.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal,

kawasan perbatasan, dan transmigrasi melalui: (1) pengembangan ekosistem hilirisasi industri berbasis produk unggulan yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dan informasi; (2) peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan pendampingan masyarakat; (3) pemenuhan akses dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta air bersih dan sanitasi; (4) peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan pengembangan sistem logistik yang efisien; (5) penguatan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana; dan (6) penguatan koordinasi multisektor melalui integrasi perencanaan dan penganggaran, serta sinkronisasi program dan kegiatan.

8.7 Pengembangan Wilayah

8.7.1 Capaian Utama Pembangunan

Pengembangan wilayah Indonesia diarahkan untuk percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Upaya tersebut dilakukan terintegrasi melalui penguatan konektivitas, peningkatan kualitas SDM, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, serta penyediaan infrastruktur dan layanan dasar. Melalui upaya tersebut, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing, berkurangnya kesenjangan antarwilayah, serta berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendukung pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.

Tabel 8.6
Realisasi Pertumbuhan PDRB Wilayah KBI dan KTI (persen, yoy) Tahun 2020–2026

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
KBI	-2,30	3,53	5,14	4,90	4,80	5,17	5,56
Sumatera	-1,20	3,18	4,69	4,69	4,45	4,81	5,09
Jawa-Bali	-2,69	3,52	5,30	4,98	4,93	5,32	5,72
KTI	-0,82	3,81	6,21	5,78	5,97	4,84	4,98
Nusa Tenggara	-0,71	2,39	5,30	2,51	4,64	4,02	8,18
Kalimantan	-2,30	3,24	4,94	5,43	5,52	4,79	4,09
Sulawesi	0,23	5,67	7,07	6,37	6,18	6,23	6,21
Maluku	2,00	9,90	14,24	13,54	10,19	22,32	13,14
Papua	1,40 ^{a)}	10,32 ^{a)}	7,03 ^{a)}	4,87 ^{b)}	7,00 ^{b)}	-5,90 ^{b)}	-1,50 ^{b)}

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, diolah

Keterangan: *) capaian semester I 2026 a) Realisasi pertumbuhan PDRB di Papua Tahun 2020-2022 menggunakan data pertumbuhan ekonomi sebelum adanya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat; b) Realisasi pertumbuhan PDRB di Papua 2023-2025 menggunakan data pertumbuhan ekonomi setelah adanya pemekaran DOB meliputi Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Pertumbuhan ekonomi KBI pada semester I 2026 tercatat sebesar 5,56 persen (yoy), hal ini menunjukkan bahwa KBI sebagai motor utama ekonomi nasional masih cukup besar

berkontribusi terhadap PDRB nasional. Kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatra didorong oleh hilirisasi hasil perkebunan dan sumber daya



alam unggulan, serta pengembangan kawasan seperti KEK Sei Mangkei dan KEK Galang Batang. Wilayah Jawa dan Bali diperkuat sebagai pusat ekonomi, dengan pemanfaatan pada ekonomi kreatif, ekspor, perkembangan kawasan perkotaan, serta pengembangan kawasan KEK Gresik dan KIT Batang.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi KTI pada semester I 2026 tercatat sebesar 4,98 persen (yoy), menunjukkan adanya variasi kinerja ekonomi antarsektor di sejumlah wilayah. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Maluku didorong oleh (1) hilirisasi industri pengolahan dan pertambangan nikel; (2) pengembangan kawasan industri (KI) di KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli; serta (3) sektor perikanan, kelautan, dan perkebunan berorientasi ekspor.

Selanjutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi Wilayah Nusa Tenggara utamanya ditopang oleh (1) akselerasi sektor pertambangan seiring meningkatnya produksi konsentrat tembaga; (2) pemanfaatan komoditas unggulan, khususnya di sektor perikanan dan kelautan berorientasi ekspor; serta (3) penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti DPP Lombok-Gili Tramena dan DPP Labuan Bajo.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi diperkuat melalui (1) pengembangan kawasan industri seperti, KI Konawe dan KI Morowali yang berperan meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi pada sektor pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan; (2) hilirisasi komoditas unggulan, seperti kakao, kopi, kelapa, tuna-cakalang-tongkol (TCT), rumput laut, dan perikanan budidaya; serta (3) penguatan sektor pariwisata seperti, DPP Manado-Likupang dan DPP Wakatobi.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan diproyeksikan dapat tetap tumbuh seiring masih terus berlanjutnya pembangunan berbagai proyek, seperti (1) pembangunan IKN; (2) pengembangan kawasan industri hijau Tanah Kuning, kawasan industri Ketapang, dan kawasan industri Pulau Penebang; serta (3) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit dan alumina.

Perkembangan ekonomi Wilayah Papua menunjukkan kemajuan dibandingkan capaian 2025, hal ini didukung dengan berbagai aktivitas yang mendorong perekonomian, antara lain (1) pembangunan dan penataan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua; (2) pengembangan KI Fakfak, Kawasan Pertambangan dan Pengolahan Migas Teluk Bintuni, DPP Raja Ampat; dan (3) pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan TCT, kakao, sagu, kopi, udang, dan rumput laut.

Pengembangan wilayah di KBI dan KTI telah dioptimalkan dengan pelaksanaan program pembangunan seperti penguatan SDM melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan pengembangan potensi unggulan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Pengembangan wilayah juga didukung dengan pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan konektivitas, memperluas akses pelayanan dasar. Hal ini dilaksanakan melalui Inpres Jalan Daerah, yang telah memberikan kemudahan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, pelabuhan, kawasan pangan,

dan pusat kegiatan ekonomi untuk masyarakat. Pada 2025, telah terbangun jalan daerah sepanjang 1.151 km di 37 provinsi.

Di sisi lain, penguatan aktivitas ekonomi masyarakat dilaksanakan melalui Inpres Irigasi yang mempercepat pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi mencapai 589.605,80 ha untuk menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

8.7.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan pemerataan struktur ekonomi antarwilayah, antara lain: (1) aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa; (2) nilai tambah hilirisasi komoditas unggulan belum merata di Wilayah Sumatra; (3) diversifikasi ekonomi di Wilayah Kalimantan perlu dipercepat; dan (4) ketimpangan pendapatan di KTI. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong transformasi ekonomi daerah dengan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas akses pasar, dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif, serta peningkatan konektivitas wilayah. Selain itu, Program Pengembangan Pangan Terintegrasi, Program Swasembada Air, Program Pemenuhan Elektrifikasi Desa, serta Inpres Irigasi untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Tantangan pemerataan kualitas SDM antarwilayah adalah kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan yang menyebabkan

kualitas SDM serta produktivitas tenaga kerja belum merata antarwilayah baik di KBI maupun KTI. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan dan peningkatan kualitas SDM. Program MBG dan Sekolah Rakyat menjadi instrumen pembangunan manusia dalam pemenuhan gizi dan perluasan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dan keluarga rentan.

Sementara itu, tantangan keterbatasan konektivitas, infrastruktur, dan layanan dasar, antara lain: (1) konektivitas jalan yang menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, pelabuhan, pasar, dan pusat layanan dasar; (2) kualitas infrastruktur dan aksesibilitas, menyebabkan aktivitas ekonomi dan pemerataan pelayanan belum optimal, terutama di KTI; serta (3) integrasi pembangunan yang berbasis wilayah dan potensi lokal di kawasan perdesaan, transmigrasi, perbatasan, daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan, khususnya di Wilayah Papua.

Upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut, antara lain: (1) pelaksanaan Inpres Jalan Daerah guna memperkuat keterhubungan antara sentra produksi, kawasan industri, pelabuhan, pasar, pusat kegiatan ekonomi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan; dan (2) penguatan ketahanan pangan, air, dan energi di KBI dan KTI melalui peningkatan jaringan irigasi, pengelolaan sumber daya air, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penguatan distribusi pangan, konservasi DAS, diversifikasi energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta perluasan akses energi, terutama di wilayah kepulauan, terpencil, terluar, dan tertinggal.

BAB 9

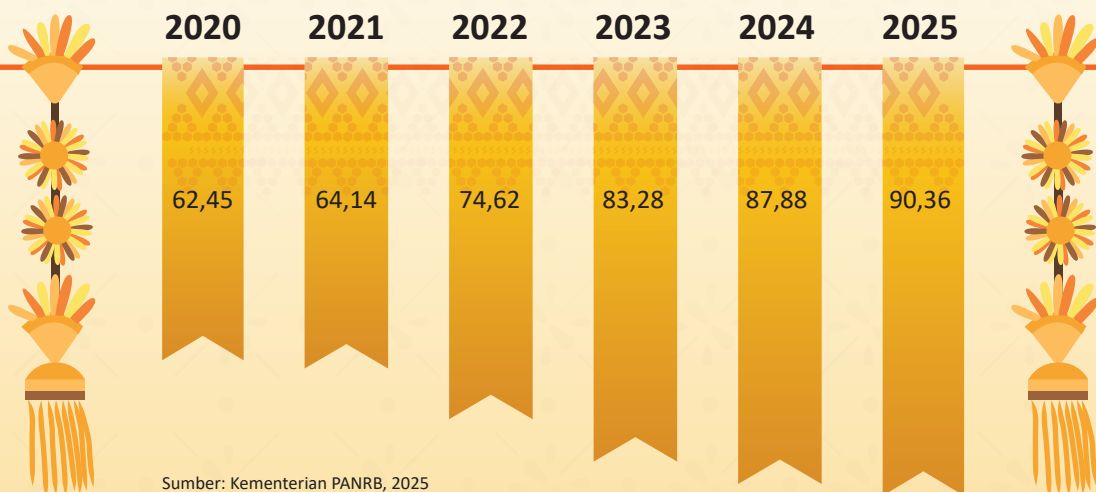
ASTA CITA 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi,
Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.



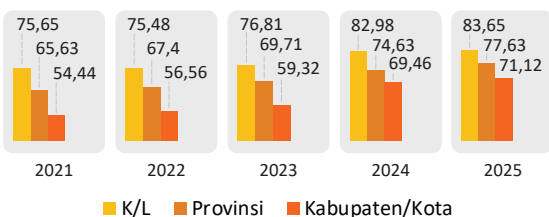
Warga Binaan Lapas Cirebon, Jawa Barat
Sumber: Kementerian Imigrasi dan Pemasaran, 2026

Capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2020-2025



Sumber: Kementerian PANRB, 2025

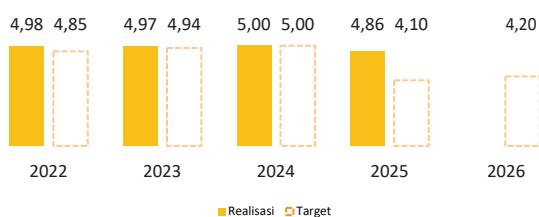
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota 2021-2025



■ K/L ■ Provinsi ■ Kabupaten/Kota

Sumber: Kementerian PANRB, 2026

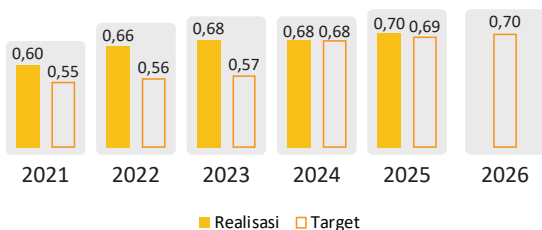
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional (2022-2025)



■ Realisasi ■ Target

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2026

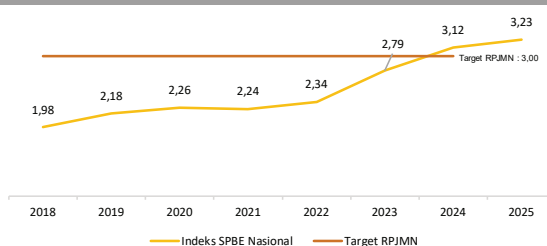
Indeks Pembangunan Hukum 2021-2026



■ Realisasi ■ Target

Sumber: Kementerian PANRB, 2025

Capaian Indeks SPBE 2018-2025



— Indeks SPBE Nasional — Target RPJMN

Sumber: Kementerian PANRB, 2025





Tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik memperkuat ketahanan nasional, serta menjaga kontribusi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan geoeкономи global. Selain itu, transformasi digital pemerintahan yang responsif serta penataan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif berperan penting dalam menjaga keseimbangan pusat dan daerah.

9.1 Reformasi Politik

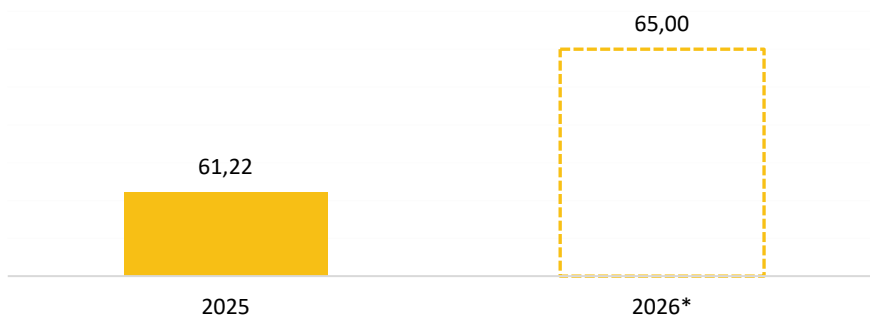
9.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah terus memperkuat agenda reformasi politik sebagai fondasi bagi terwujudnya stabilitas politik nasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik (Parpol) dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan akuntabel. Reformasi politik diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik, menghadirkan kepemimpinan yang representatif dan berlegitimasi kuat, serta

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Partai politik memiliki peran sentral sebagai pilar demokrasi, sarana kaderisasi dan rekrutmen jabatan politik, serta sarana komunikasi dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Penguatan tata kelola Parpol akan mendukung proses politik yang semakin sehat ditandai oleh Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) sebagai instrumen dalam mendorong penguatan internal Parpol yang lebih terukur dan berbasis bukti.

Grafik 9.1
Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) Nasional



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 2026.
Keterangan: *) Angka target

Capaian IIPP nasional 2025 merupakan hasil pengukuran terhadap delapan Parpol yang memiliki kursi di DPR RI. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Parpol di Indonesia masuk dalam kategori “Berintegritas Sedang” dengan capaian tertinggi pada dimensi kode etik dan demokrasi internal. Capaian tersebut berarti bahwa Parpol telah memiliki fondasi tata kelola kapasitas internal yang cukup baik untuk mendukung integritas kelembagaan dalam penerapan kode etik, pelaksanaan demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen yang transparan, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

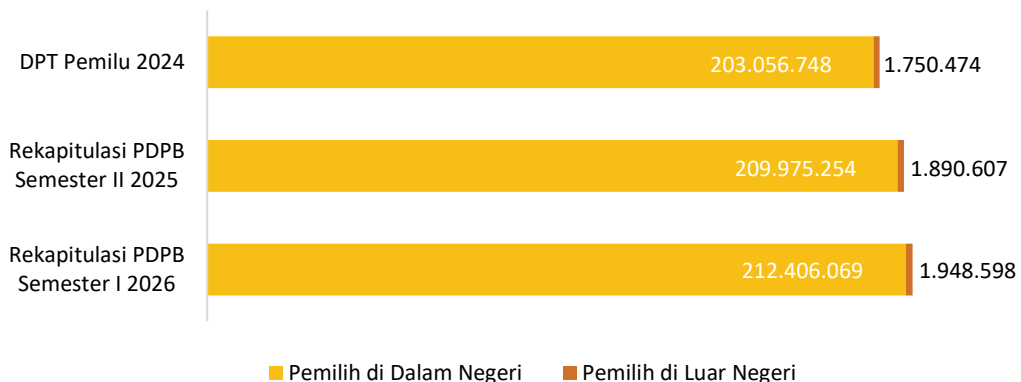
Indeks tersebut tidak hanya sebagai instrumen pengukuran, tetapi juga sebagai landasan bagi Parpol untuk memperkuat tata kelola dan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat dukungan publik. Pendampingan pada proses

asesmen hingga penyusunan tindak lanjut semakin memperkuat peran IIPP sebagai katalis penguatan kelembagaan.

Selain penguatan pada Parpol, penyelenggaraan pemilu yang inklusif, adil, dan representatif merupakan fondasi reformasi politik untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional. Representasi politik yang berkualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dilakukan melalui penjaminan hak setiap warga untuk memilih dan dipilih.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan untuk menjamin data yang lebih komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk meningkatkan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemutakhiran data pemilih menekankan pada proses sinkronisasi data dari penyelenggara pemilu dengan penyedia data kependudukan untuk menjamin hak memilih dalam pemilu sebagaimana amanat dalam konstitusi.

Grafik 9.2
Jumlah Data Pemilih Berdasarkan Rekapitulasi PDPB Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026



Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2026

Berdasarkan hasil PDPB, jumlah pemilih diproyeksikan meningkat pada Pemilu 2029 seiring bertambahnya jumlah warga negara yang memasuki usia berhak memilih. Hal

ini menjadi momentum untuk memperkuat pendidikan politik sebagai fondasi dalam membangun budaya demokrasi yang partisipatif dan berintegritas.



Kegiatan pendidikan politik diselenggarakan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, serta didukung penyelenggara pemilu yang menjangkau pemilih pemula, kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, korban konflik dan bencana alam, lansia, fakir miskin. Selain itu, pendidikan politik juga menjangkau kelompok marginal seperti buruh tani, pemulung, pedagang, serta warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

9.1.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan dalam mewujudkan reformasi politik, antara lain: (1) legalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) sebagai instrumen penguatan tata kelola Parpol dan dasar pemberian insentif; (2) sinergi dan pembagian peran antar pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan pendidikan politik yang relevan dan berdaya jangkau luas; (3) akurasi data pemilih melalui penguatan koordinasi dan interoperabilitas data lintas K/L dan instansi terkait; serta (4) tata kelola dan kode etik yang menjamin independensi penyelenggaraan pemilu.

Untuk menjawab tantangan tersebut, upaya reformasi politik perlu diarahkan pada (1)

penguatan regulasi terkait bantuan keuangan dan pelibatan Parpol dalam penyamaan persepsi mengenai SIPP sebagai dasar pemberian insentif; (2) penyusunan peta jalan pendidikan politik yang memperjelas pembagian peran dan mekanisme koordinasi antar K/L; (3) penguatan mekanisme koordinasi, interoperabilitas sistem, serta pemutakhiran dan pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan melalui sinergi lintas K/L dan instansi terkait; serta (4) penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, dan penegakan kode etik penyelenggara pemilu untuk menjaga independensi serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, berintegritas, dan berkualitas.

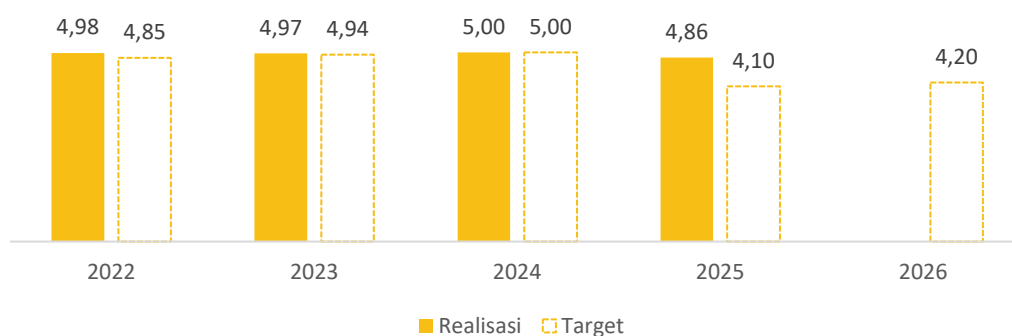
9.2 Politik Luar Negeri

9.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan politik luar negeri diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional, memperjuangkan kepentingan nasional, dan meningkatkan kontribusi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Peran tersebut terlihat dari nilai Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional yang mencapai 4,86 pada tahun 2025.

Grafik 9.3

Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2022-2025



Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2026

Keterangan: Tahun 2025, Indeks mengalami perubahan metodologi sehingga dilakukan penyesuaian target (semula terdiri atas 2 Sub-IKU menjadi 4 Sub-IKU guna menggambarkan kinerja diplomasi yang lebih riil).

Indeks ini menunjukkan peran Indonesia pada forum strategis melalui kepemimpinan multilateral, penerimaan prakarsa Indonesia, serta keberhasilan pencalonan pada organisasi internasional. Posisi Indonesia turut diperkuat melalui Keketuaan D-8 periode 2026-2027

serta keberhasilan Indonesia memenangkan pencalonan strategis di organisasi internasional pada tahun 2025. Keterlibatan ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk memengaruhi agenda global sesuai dengan kepentingan nasional.

Gambar 9.1

Keberhasilan Pencalonan Strategis Indonesia di Organisasi Internasional Tahun 2025



Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2026

Penguatan peran Indonesia di tingkat global juga didukung oleh kunjungan kenegaraan Presiden RI yang berkontribusi dalam menghasilkan berbagai kesepakatan strategis dengan negara mitra. Dalam satu tahun terakhir, kunjungan tersebut menghasilkan perjanjian komersial dengan Prancis senilai USD 3,50 miliar di bidang ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan, serta komitmen bisnis hasil kunjungan ke Jepang dan Republik Korea sebesar Rp575 triliun.

Peran Indonesia di tingkat global berkontribusi terhadap perdamaian dunia melalui berbagai misi. Indonesia telah mengirimkan 1.963 personel ke tujuh misi pemeliharaan perdamaian dan satu *Security Officer* ke markas PBB. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai

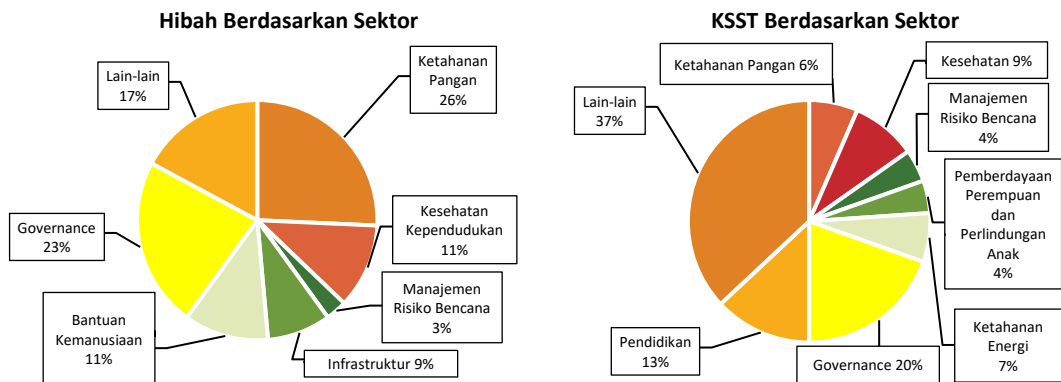
negara kontributor pasukan terbesar keenam di dunia. Dalam upaya pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030, Indonesia sementara telah memperoleh komitmen dukungan dari 35 negara.

Di sisi lain, Indonesia semakin menegaskan kiprahnya sebagai *dual-role country* dan *emerging donor* dalam skema kerja sama pembangunan internasional. Pada 2025, Indonesia telah menyalurkan hibah senilai Rp579,10 miliar melalui 35 kegiatan yang menjangkau 35 negara, dan melaksanakan 46 kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSS-T) bersama dengan 74 negara senilai Rp82,24 miliar.



Grafik 9.4

Komposisi Nilai Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular berdasarkan Sektor Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)

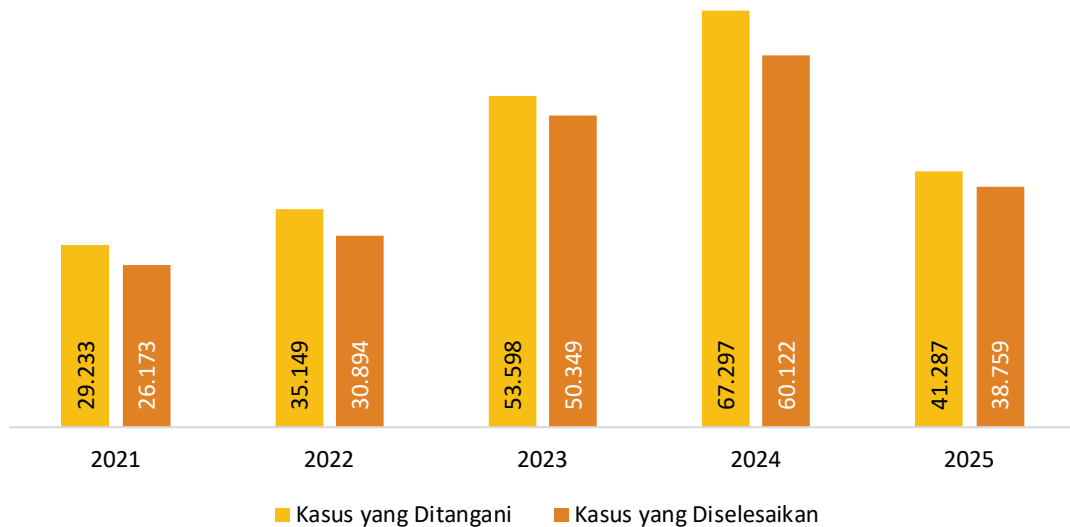
Di samping memperkuat kontribusi global, politik luar negeri diarahkan untuk menjaga kedaulatan melalui penyelesaian perundingan batas negara. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Perbatasan Darat mencapai nilai 63 sesuai target pada 2025, dengan disepakatinya *Memorandum of Understanding* (MoU) RI-Malaysia terkait *Outstanding Boundary Problems* (OBP) di tiga segmen.

Manfaat politik luar negeri yang langsung dirasakan masyarakat diwujudkan dalam pelaksanaan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri. Peningkatan capaian Pelindungan WNI di luar negeri ditunjukkan oleh Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri, dari 93,10 (2024) menjadi 97,14 (2025). Capaian ini didukung oleh koordinasi lintas sektor, mulai dari persiapan pemberangkatan PMI, berbagi pakai data antar instansi terkait, pemanfaatan Portal Peduli WNI, edukasi migrasi aman, dan

penguatan kerja sama bilateral dengan negara mitra. Penguatan tersebut menunjukkan pergeseran perlindungan WNI dari respons kasus menuju sistem pelayanan dan perlindungan yang lebih terukur.

Pada 2025, pemerintah berhasil menyelesaikan 93,88 persen kasus WNI di luar negeri. Penyelesaian kasus tersebut, antara lain 6.505 kasus *online scam* di Asia Tenggara dan pemulangan 27.768 WNI dari berbagai situasi krisis, termasuk pemulangan 882 WNI dari Myanmar, 1.301 WNI kelompok rentan dari Malaysia, serta mengevakuasi 385 WNI dari Suriah, Yaman, Iran, dan wilayah Palestina yang diduduki Israel. Selain itu, pemerintah telah memulihkan hak finansial PMI senilai lebih dari Rp61 miliar, melalui proses fasilitasi mediasi, pendampingan hukum, dan koordinasi dengan negara penempatan.

Grafik 9.5
Pelindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2021-2025



Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2025

9.2.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan politik luar negeri menghadapi tantangan dinamika geopolitik, geoekonomi, dan ketidaksiapan tata kelola dalam negeri dalam merespons gejolak global, antara lain: (1) perang terbuka antar negara; (2) pemanfaatan tarif dan instrumen ekonomi dalam rivalitas geoekonomi; (3) melemahnya mekanisme multilateral; (4) berkembangnya ancaman tradisional dan nontradisional; serta (5) eskalasi konflik di berbagai kawasan.

Dalam merespons tantangan tersebut, upaya politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk: (1) peningkatan intensitas hubungan baik dalam memitigasi munculnya konflik, serta upaya aktif dalam penyelesaian konflik; (2) penguatan diplomasi kedaulatan melalui penyelesaian batas darat dan maritim dengan negara tetangga; (3) peningkatan keikutsertaan pada berbagai forum global, multilateral, regional dan bilateral untuk meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh; (4) peningkatan peran Indonesia sebagai *emerging donor*; (5) penguatan pelindungan dan

pelayanan WNI termasuk PMI yang berkualitas; serta (6) penguatan postur diplomasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur diplomasi.

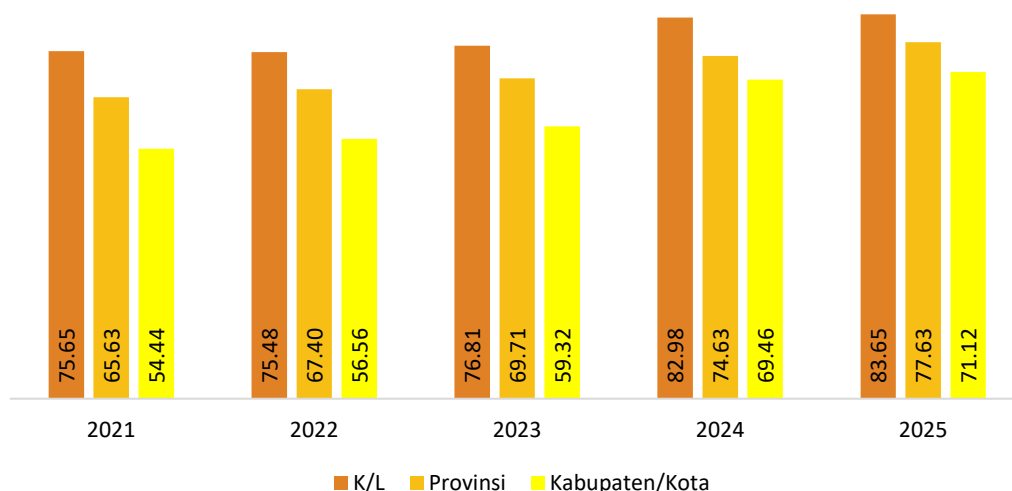
9.3 Reformasi Birokrasi

9.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dengan menerapkan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, pemerintah digital, serta penataan desentralisasi dan otonomi daerah. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi ditandai dengan terjaganya capaian Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Nasional yang meningkat dari 71,54 (2024) menjadi 73,37 (2025). Realisasi Indeks RB pada kementerian/ lembaga (K/L), provinsi, dan kabupaten/kota terus mengalami peningkatan seiring dengan menguatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.



Grafik 9.6
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025



Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Kebijakan pemerintah difokuskan pada penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah (TDP), terutama mendukung enam Prioritas Presiden sebagaimana ditetapkan dalam RB Tematik pada 174 instansi pusat dan pemerintah daerah prioritas. Adapun enam Prioritas Presiden yang menjadi fokus RB Tematik adalah (1) pengentasan kemiskinan, (2) kemudahan investasi, (3) mendorong hilirisasi, (4) peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, (5) ketahanan pangan nasional; dan (6) peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan.

Pada 2025, evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan pada 639 instansi pemerintah dengan rincian 94 K/L, 38 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional pada 2025 tercatat sebesar 66,42. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) secara nasional masih cukup baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Penguatan akuntabilitas kinerja pada K/L dan Pemda dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, dengan fokus pada: (1) harmonisasi kebijakan perencanaan, penganggaran, dan kinerja; (2) penerapan manajemen kinerja instansi pemerintah; (3) pengukuran kinerja individu yang mendukung organisasi; serta (4) pemberian *reward and punishment* terkait efektivitas penggunaan anggaran.

Penguatan akuntabilitas pemerintahan juga terlihat dari pengelolaan keuangan negara yang semakin baik. Pada 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Semester I dan Semester II menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112,08 triliun. Hal ini merupakan wujud penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

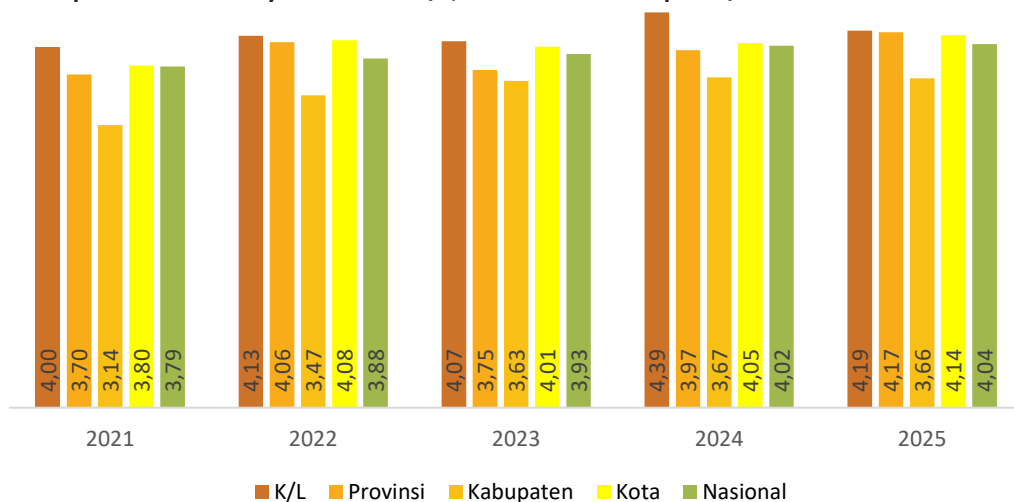
Reformasi birokrasi didukung oleh penataan manajemen aparatur sipil negara (ASN) dengan menerapkan sistem merit yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas dan moralitas. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan kebijakan terkait penambahan frekuensi kenaikan pangkat menjadi 12 kali dalam setahun, perluasan layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO), serta kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi. Selain itu, perwujudan keadilan karir dilakukan melalui pemberian kemudahan uji kompetensi yang dilengkapi sistem remedial, pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) bagi ASN yang berdedikasi tinggi.

Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas Presiden, pemerintah menyiapkan 34.080 formasi pada Badan Gizi Nasional melalui rekrutmen, 37.542 formasi penyuluh pertanian melalui pengalihan dan rekrutmen baru, serta 5.501 guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat melalui redistribusi dan rekrutmen. Pemetaan kebutuhan

aparatur dilakukan untuk Sekolah Unggul Garuda, sedangkan pemenuhan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan melalui proyeksi penugasan 240.000 PPPK. Dengan langkah tersebut, pelaksanaan program prioritas didukung oleh aparatur yang sesuai dengan fungsi, kompetensi, dan lokasi pelayanan. Perencanaan kebutuhan ASN tidak hanya didasarkan pada ketersediaan formasi, tetapi juga dikaitkan dengan proses bisnis, sasaran pembangunan, kebutuhan organisasi, dan pemerataan pelayanan pada setiap wilayah.

Perbaikan tata kelola pemerintahan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diukur dengan Indeks Pelayanan Publik nasional meningkat dari 4,02 (2024) menjadi 4,04 (2025). Berdasarkan kelompok instansi, nilai Indeks Pelayanan Publik mencapai 4,19 (2025) pada K/L, 4,17 pada pemerintah provinsi, 4,14 pada pemerintah kota, dan 3,66 pada pemerintah kabupaten. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masih perlu diperkuat secara lebih terarah, khususnya pada pemerintah kabupaten.

Grafik 9.7
Capaian Indeks Pelayanan Publik K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025

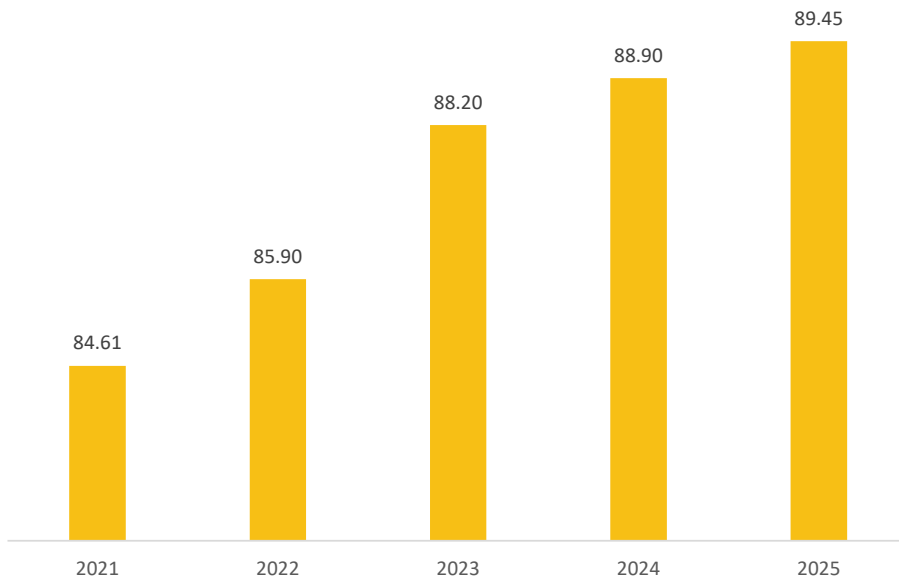


Sumber : Kementerian PANRB, 2026



Indeks Kepuasan Masyarakat juga meningkat dari 84,61 (2021) menjadi 89,45 (2025). Perkembangan ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas layanan semakin dirasakan masyarakat, meskipun pemerataan kualitas layanan antarunit dan antarwilayah masih terus ditingkatkan.

Grafik 9.8
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional Tahun 2021-2025

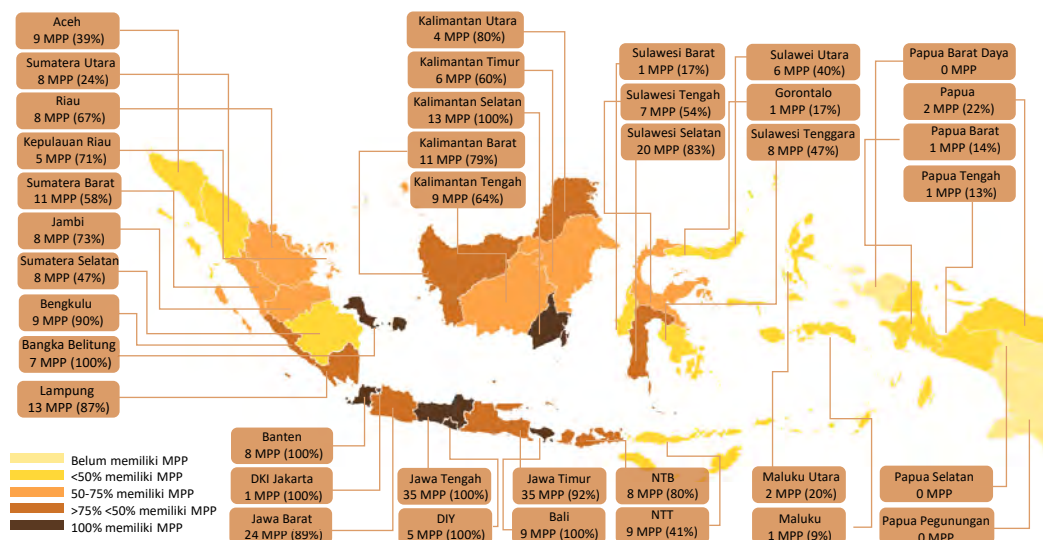


Sumber : Kementerian PANRB, 2026

Pemerintah terus memperluas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu dari berbagai jenis layanan pemerintah dalam satu lokasi. Hingga Juli 2026, telah tersedia 313 MPP yang tersebar di berbagai lokasi atau sekitar 62 persen dari seluruh

kabupaten/kota. Setiap MPP menyediakan rata-rata 155 jenis layanan, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi tanpa harus mendatangi banyak instansi atau melalui prosedur yang terpisah.

Gambar 9.2
Sebaran 313 MPP Seluruh Provinsi di Indonesia



Sumber : Kementerian PANRB, 2026

Kurasi inovasi pelayanan publik yang dilakukan melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) juga mendapat penghargaan di tingkat dunia. Pada *United Nations Public Service Awards* (UNPSA) 2026, sebanyak 3 inovasi dari 12 penerima penghargaan berasal dari Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa inovasi Indonesia mempunyai daya saing dalam menjawab tantangan global. Berdaya Srikandi menjadi pemenang kategori *Gender-responsive Public Services*, sementara Siskeudes, dan MAGMA Indonesia memperoleh *Honourable Mention* masing-masing pada kategori *Transparent Accountable Public Institutions to Achieve the SDGs* dan *Delivering Inclusive and Equitable Services to Leave No One Behind*.

9.3.2 Tantangan dan Upaya

Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) konsistensi penerapan SAKIP oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (2) penerapan pola karir dan operasionalisasi

sesuai kebutuhan instansi; (3) adaptasi penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis; (4) pemerataan capaian Indeks RB pada K/L dan pemerintah daerah; dan (5) dukungan tata kelola pembangunan dalam penataan kelembagaan dan proses bisnis instansi pemerintah.

Upaya yang akan dilakukan untuk menjawab tantangan di atas adalah: (1) perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian atau pengukuran kinerja; (2) percepatan implementasi manajemen talenta dan pengembangan kompetensi pegawai; (3) percepatan penyelesaian rancangan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik melalui kolaborasi antar K/L; (4) pendampingan, evaluasi, dan replikasi praktik baik pada K/L dan pemerintah daerah, serta penerapan mekanisme insentif dan disinsentif berbasis kinerja dalam meningkatkan Indeks RB; dan (5) penataan kelembagaan dan penyusunan proses bisnis instansi pemerintah yang terintegrasi serta berbasis tugas dan fungsi.



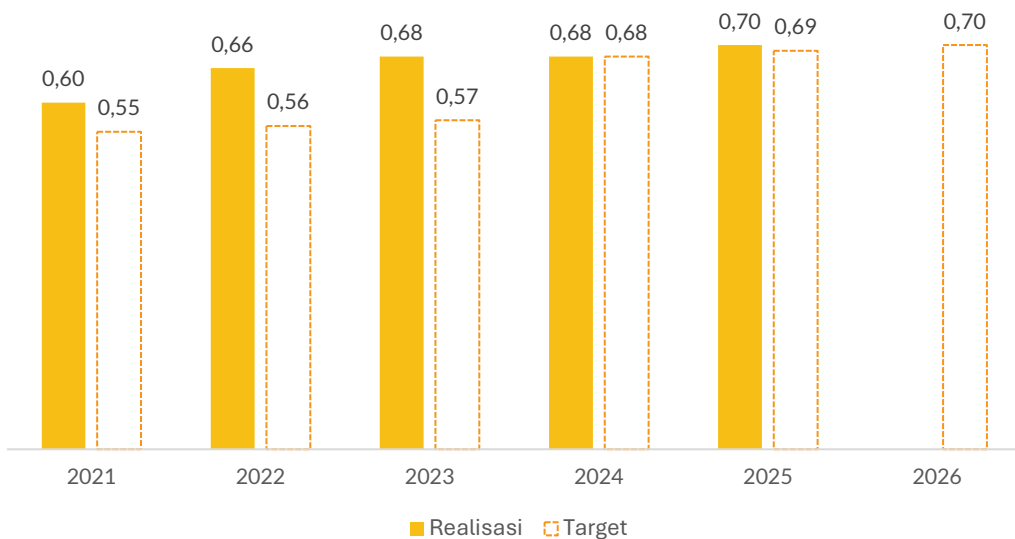
9.4 Reformasi Hukum

9.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan hukum di Indonesia secara konsisten berada dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari skor Indeks Pembangunan

Hukum (IPH) 2024 yang diterbitkan pada 2025, yaitu 0,68. Angka tersebut didapatkan dari pengukuran terhadap lima pilar, antara lain budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

Grafik 9.9
Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2021-2026



Sumber : Kementerian PANRB, 2025

Capaian IPH didukung oleh beberapa langkah strategis. Pada aspek kualitas regulasi, dilaksanakan penetapan Pedoman *Regulatory Impact Assessment* (RIA) pada Maret 2026. Peluncuran Pedoman RIA ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam proses akses *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Komitmen pemerintah tersebut dilakukan dengan memastikan pengembangan kebijakan dan regulasi yang *fit-for-purpose* dan tidak menimbulkan biaya yang tidak perlu.

Beberapa rancangan regulasi yang sudah menerapkan Pedoman RIA, yaitu: (1) RUU

tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; (2) RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal; dan (3) RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian. Regulasi yang berkualitas perlu didukung penegakan hukum yang efektif.

Salah satu dukungan pada penegakan hukum dilakukan melalui transformasi sistem penuntutan. Transformasi ini terlihat dari capaian pengendalian perkara sejumlah 61 persen pada 2025 dan 93 persen pada awal 2026 yang meliputi perkara korupsi seperti salah satunya penyimpangan ekspor *Crude Palm*

Oil 2022–2024 senilai Rp7,3 triliun. Penegakan hukum juga diperkuat dengan peningkatan integritas hakim melalui pengawasan perilaku serta peningkatan kapasitas hakim. Indeks Integritas Hakim pada 2025 memperoleh nilai 8,05. Hal ini menunjukkan stabilitas integritas hakim pada level baik.

Sepanjang 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menangani 701 perkara dan telah memutus 598 perkara. Khusus perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), sebanyak 263 perkara telah diputus dengan rata-rata waktu penyelesaian 69 hari kerja, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan penguatan kapasitas peradilan konstitusi dalam merespons meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan konstitusional.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memperkuat digitalisasi layanan peradilan melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) dan Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). Pada 2025, hampir 300 perkara PUU diregistrasi melalui e-BRPK, sekaligus menjadi jumlah registrasi perkara PUU tertinggi sepanjang sejarah MK. Pada 2026, Mahkamah Konstitusi telah menerima 286 permohonan dimana sebanyak 240 permohonan atau 84,51 persen diajukan secara daring. Digitalisasi juga memungkinkan dokumen perkara dan putusan diakses secara daring oleh masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan kemudahan akses terhadap proses peradilan konstitusi.

Penerapan UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), membawa penegakkan hukum yang lebih baik, bergeser dari

asas keadilan retributif menuju keadilan yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Mahkamah Agung telah berhasil memutus 37.973 perkara dari 38.148 perkara yang ditangani pada tahun 2025, sehingga rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,54 persen dan persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan mencapai 96,74 persen, yang menjadi capaian ketepatan waktu minutasasi tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

Produktivitas memutus perkara tersebut juga diikuti dengan produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak sebesar 80,79 persen dan pengadilan tingkat pertama mencapai 97,43 persen. Hal ini didukung oleh digitalisasi penanganan perkara, penegakkan integritas dan anti korupsi serta peningkatan kualitas SDM terutama Hakim.

Kemandirian dan Integritas Hakim juga diperkuat oleh peran Komisi Yudisial (KY). Pada periode Januari sampai Juni 2026, laporan yang diterima KY sebesar 1.402 laporan masyarakat dan 622 laporan permohonan pemantauan Hakim di persidangan. KY telah mengusulkan sanksi kepada 121 Hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat.

Di samping penguatan penegakan hukum, capaian pembangunan hukum juga mencakup peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, telah dilakukan: (1) pemberian bantuan hukum litigasi kepada 13.420 orang; (2) pemberian bantuan hukum nonlitigasi sebanyak 1.160 kegiatan; (3) pembentukan 83.980 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan; serta (4) pemberian 16.675 program perlindungan



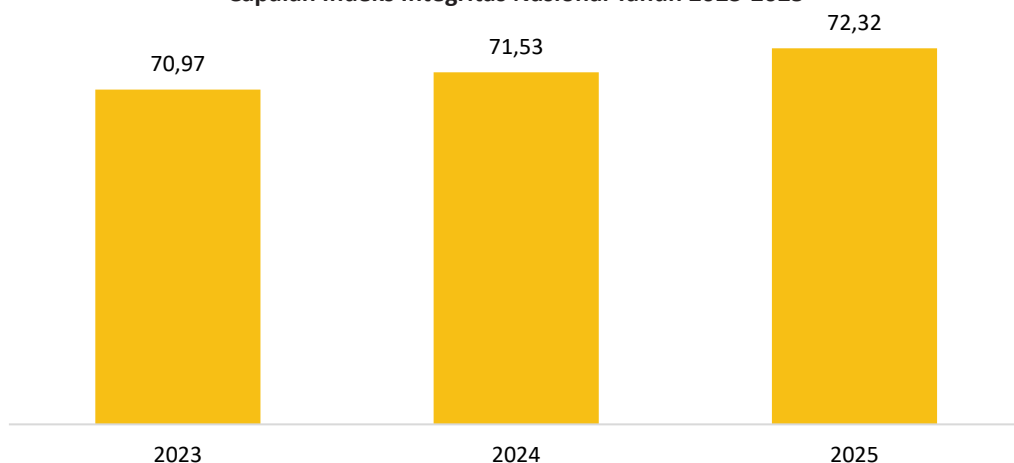
terhadap saksi dan korban. Pemerintah mendorong pemberdayaan terhadap 1.053.446 warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan ini adalah bagian penting dukungan negara terhadap Program Swasembada Pangan sekaligus memperkuat proses reintegrasi sosial warga binaan.

Pada aspek layanan hukum yang mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku usaha, beberapa capaian penting hingga Semester I 2026, antara lain: pencatatan Kekayaan Intelektual mencapai 185.263, dengan kontribusi terbesar berupa Hak Cipta (102.171), Merek (67.170),

dan Paten (8.377). Capaian ini mencerminkan sinergi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang kuat dan berkelanjutan. Di samping itu, telah dilakukan pengesahan terhadap 23.730 yayasan yang berpartisipasi pada program Makan Bergizi Gratis serta 83.031 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sementara itu, aspek integritas dalam penyelenggaraan negara turut menjadi perhatian dalam pembangunan hukum. Indeks Integritas Nasional (IIN) menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada 2025, skor IIN mencapai 72,32 dan pada 2026 dijadikan tahun evaluasi penghitungan IIN, yang kemudian diukur kembali pada 2027.

Grafik 9.10
Capaian Indeks Integritas Nasional Tahun 2023-2025



Sumber : Kementerian PANRB, 2025

Kondisi integritas tersebut didukung oleh penguatan budaya antikorupsi. Pemerintah melalui Kolaborasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang diluncurkan pada 11 Mei 2026 melakukan penyusunan bahan ajar dan panduan pendidikan antikorupsi, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Pada sisi lain, penindakan

tindak pidana korupsi oleh KPK sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, telah berhasil menyetorkan Rp1,91 triliun dari hasil pemulihan aset ke kas negara. Selain itu, nilai Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang 2025 sebesar 5,37. Capaian tersebut didukung oleh kualitas pelaporan dan tata kelola berbasis risiko untuk memperkuat deteksi transaksi

mencurigakan, efektivitas penegakan hukum dan *asset tracing*, dan pengawasan sektoral melalui harmonisasi regulasi.

Pada 2025, pemerintah berkomitmen kuat dalam mengatasi permasalahan narkoba. Pada aspek pengurangan permintaan (*demand reduction*), pemerintah terus memperkuat kerjasama antarpihak serta mengoptimalkan

layanan rehabilitasi. Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan jumlah penyalahguna yang mendapat layanan rehabilitasi dari 19.474 pasien (2024) menjadi 25.809 pasien (2025). Pada pengurangan pasokan (*supply reduction*), pemerintah telah berhasil menyelesaikan 42.849 perkara narkoba dan psikotropika serta menyita barang bukti.

Tabel 9.1

Barang Bukti Narkoba dan Psikotropika yang Berhasil Disita Tahun 2026

Barang Bukti	Jumlah	Satuan
Daun dan Biji Ganja	576.476.745,46	gram
Pohon Ganja	1.900.109,80	batang
Luas Area Ganja	127.876,75	ha
Heroin, Kokain, dan Sabu	12.424.613,71	gram
Ekstasi dan PCC	2.348.881,17	tablet
Hashish, Ganja Sintetis, dan Mushroom	1.887.009,62	gram
Daftar G, Gol III, dan Gol IV	1.728.794,00	tablet
Ketamin	1.200.001,05	gram

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2026

9.4.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan yang dihadapi dalam reformasi hukum, antara lain regulasi berkualitas, akses terhadap keadilan, budaya antikorupsi, dan pemberantasan narkoba.

Dalam membentuk regulasi yang berkualitas tantangan yang dihadapi adalah kapasitas pemahaman dan analisis permasalahan berbasis bukti dan data mutakhir. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah memperkuat penerapan pedoman *Regulatory Impact Assessment* (RIA) melalui bimbingan teknis, fasilitasi, dan pendampingan secara konsisten dan terinternalisasi dalam setiap tahapan pembentukan regulasi.

Tantangan untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan merata adalah akses terhadap

bantuan dan perlindungan hukum. Upaya dalam mengatasi tantangan ini, antara lain: (1) penguatan regulasi dan perluasan akses terhadap keadilan, termasuk revisi UU Bantuan Hukum dan penyusunan peraturan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban; (2) penguatan koordinasi dan keterpaduan layanan hukum; dan (3) peningkatan kapasitas seluruh pelaku yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum yang berkeadilan.

Selanjutnya, tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain: (1) internalisasi nilai integritas dan penegakan hukum kepada penyelenggara negara; dan (2) keterbukaan seluruh proses pelayanan publik dalam pencegahan *petty corruption* di sektor yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut,



antara lain: (1) penguatan integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Penegak Hukum (APH), badan usaha, lembaga legislatif, serta masyarakat umum; serta (2) peluncuran Peta Kerawanan Gratifikasi 2025 sebagai acuan pencegahan korupsi.

Pemberantasan narkoba menghadapi tantangan semakin meningkatnya keterlibatan sindikat narkoba internasional yang beroperasi di wilayah Indonesia yang berada di jalur perdagangan narkoba global. Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus meningkatkan literasi dan edukasi bahaya narkoba, pengawasan terhadap pelabuhan, bandara, dan lintas batas negara yang menjadi jalur perdagangan narkoba antarnegara, dan perluasan kerja sama internasional dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

9.5 Pemerintah Digital

9.5.1 Capaian Utama Pembangunan

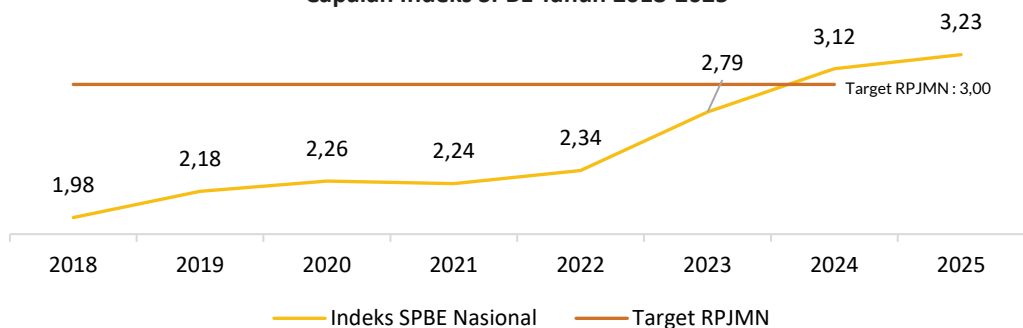
Penguatan ekosistem pemerintah digital diarahkan pada pemanfaatan data, informasi, teknologi, dan infrastruktur digital untuk mewujudkan pemerintahan yang terpadu dan berorientasi pada masyarakat. Fokusnya adalah menguatkan tata kelola data dan teknologi informasi yang saling terhubung dan berbagi pakai (interoperabilitas) untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Untuk memastikan transformasi digital berjalan konsisten, terarah, terukur, dan berdampak nyata, pemerintah telah meluncurkan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025-2045 pada 26 Februari 2026. Dokumen ini menjadi kerangka jangka panjang dan komitmen lintas kementerian/lembaga agar kebijakan, program, dan inisiatif digital selaras, terukur, efektif, dan akuntabel.

Salah satu indikator penting dalam pemerintah digital adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Capaian SPBE pada 2025 menunjukkan menguatnya fondasi tata kelola dan teknologi untuk mendukung transformasi layanan digital pemerintah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan berbagi pakai data, seluruh instansi pemerintah harus memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai sarana keterhubungan sistem dan aplikasi pusat maupun daerah, serta untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia, mewujudkan *Single Source of Truth*, dan memperkuat tata kelola data nasional. Pemanfaatannya terlihat dari lebih dari 90 juta hit sepanjang 2025.

Penguatan pemerintah digital ditandai dengan transisi dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Pemerintah Digital.

Grafik 9.11
Capaian Indeks SPBE Tahun 2018-2025



Sumber : Kementerian PANRB, 2025

Satu Data Indonesia menjadi fondasi agar transformasi digital ditopang data yang akurat, mutakhir, terpadu, aman, dapat dibagikan, serta mudah diakses sesuai kebutuhan dan kewenangan. Implementasinya menjadi *enabler* berbagi pakai data antar instansi

sehingga kebijakan dan layanan publik dapat diselenggarakan secara lebih tepat, cepat, dan berbasis data. Kemajuan juga terlihat pada tingkat Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul yang mencapai 4,26 persen.

Tabel 9.2
Capaian K/L/D yang Memanfaatkan SPLP Tahun 2023-2026

Uraian	Satuan	2023	2024	2025	2026
Persentase K/L/D yang Mengimplementasikan SPLP	%	55 (345 dari 629 K/L/D)	60 (377 dari 629 K/L/D)	60,55 (442 dari 730 K/L/D)	61,50 (449 dari 730 K/L/D)

Sumber: Kementerian Komdigi, 2026

Keterangan: Pada tahun 2023–2024, capaian difokuskan pada keterhubungan K/L/D melalui SPLP

Salah satu implementasi penting pemerintah digital pada 2025 adalah *piloting* Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota untuk mendukung bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Satu Data Indonesia menjadi landasan pertukaran data antar instansi agar data lebih akurat dan cepat tersedia bagi penetapan sasaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kebijakan. Bersamaan dengan itu, pemerintah

menyusun Pedoman Pertukaran Data antar instansi sebagai panduan pertukaran data yang terarah, aman, cepat, dan akuntabel. Pedoman ini mengatur kebutuhan data, kewenangan penggunaan, standar dan kualitas data, keamanan, perlindungan data pribadi, mekanisme akses, serta tanggung jawab para pihak, sekaligus mengoptimalkan infrastruktur digital pemerintah.



Gambar 9.3

Hasil Uji Coba Tahap I Digitalisasi Bantuan Sosial di Bali dan Surabaya



Sumber: Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, 2026

Pemerintah digital ditopang oleh Portal Layanan Digital Pemerintah, Identitas Digital, Pembayaran Digital Pemerintah, Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, serta Sistem Penghubung Data dan Layanan Digital (SPDLP) sebagai pengembangan SPLP. Fondasi ini diarahkan untuk membangun *Digital Public Infrastructure* yang menghubungkan layanan, data, identitas, transaksi, dan proses bisnis pemerintah secara aman, terstandar, berbagi pakai data, serta berorientasi pada pengguna. Capaian infrastruktur diperkuat melalui pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh 403 K/L/D, pengoperasian PDN-1, dan pengembangan SPDLP sebagai *platform* pertukaran data nasional.

Sejalan dengan arah pembangunan pemerintah digital, kompetensi dan budaya digital ASN terus diperkuat. Pada 2025, ASN dengan kompetensi digital optimal mencapai 38,69 persen. Pencapaian tersebut didukung oleh penyusunan rujukan kerangka kompetensi

digital ASN serta integrasi data pelatihan. Dengan demikian, penguatan Satu Data Indonesia, pemanfaatan infrastruktur digital nasional, dan penyederhanaan mekanisme pertukaran data menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintah digital yang lebih terpadu, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

9.5.2 Tantangan dan Upaya

Pemerintah digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) layanan publik yang terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan pengguna; (2) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi di berbagai instansi dalam pelaksanaan SPBE; dan (3) keberlanjutan tata kelola layanan PDNS dan migrasi menuju PDN-1.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melakukan upaya penguatan fondasi transformasi digital melalui pengembangan Pusat Data Nasional (PDN). Pusat data ini diarahkan untuk mengonsolidasikan

infrastruktur pusat data pemerintah yang tersebar agar lebih terintegrasi, efisien, aman, andal, dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan percepatan penetapan regulasi Pemerintah Digital, penguatan kebijakan ekosistem PDN, peningkatan kolaborasi lintas kementerian/ lembaga dalam pengembangan layanan berbasis *Digital Public Infrastructure*, penguatan Sistem Penghubung Data dan Layanan Digital melalui pengembangan SPLP, serta penyiapan model pembiayaan berkelanjutan bagi PDN dan *Government Cloud*.

Upaya lainnya adalah standardisasi layanan, penguatan berbagi pakai data, perlindungan data pribadi, dan peningkatan kapasitas pengelola teknologi di seluruh instansi. Langkah tersebut diharapkan mengurangi fragmentasi ekosistem digital pemerintah dan mendorong terwujudnya layanan publik digital yang terpadu, berorientasi pada kebutuhan pengguna, aman, andal, serta memberikan layanan yang lebih akuntabel bagi masyarakat.

9.6 Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

9.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan tipologi

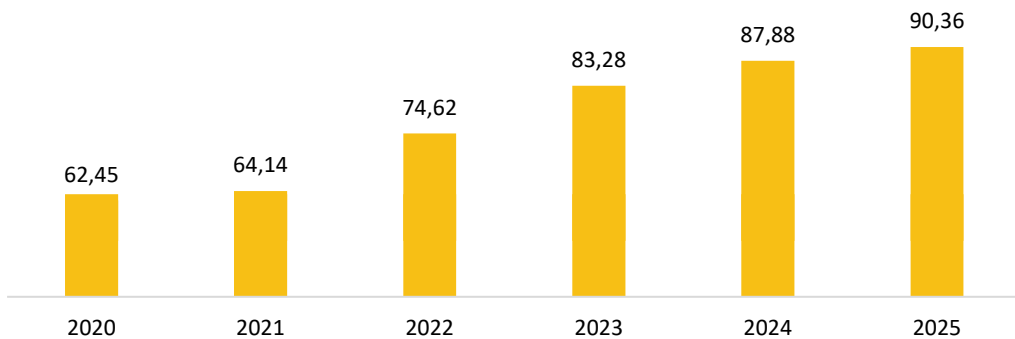
wilayah dan penguatan fondasi keuangan daerah. Capaian utama penataan desentralisasi dan otonomi daerah berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Penerapan SPM sebagai urusan wajib bagi Pemerintah Daerah menjadi bagian penting dalam menjamin pemenuhan pelayanan dasar yang merata bagi warga negara melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Penerapan SPM ini diukur dengan Indeks SPM yang menilai pencapaian dan mutu layanan urusan wajib pelayanan dasar antara lain: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum; (4) perumahan rakyat (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum/Satuan Polisi Pamong Praja); serta (6) sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Indeks SPM meningkat dari 62,45 (2020) menjadi 90,36 (2025). Pada 2025, tujuh provinsi masuk ke dalam kategori “Tuntas Paripurna” yang mencerminkan penerapan SPM secara optimal dan berkelanjutan. Sementara itu, 417 kabupaten/kota masuk ke dalam kategori setidaknya “Tuntas Madya” yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar.



Grafik 9.12
Capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2025

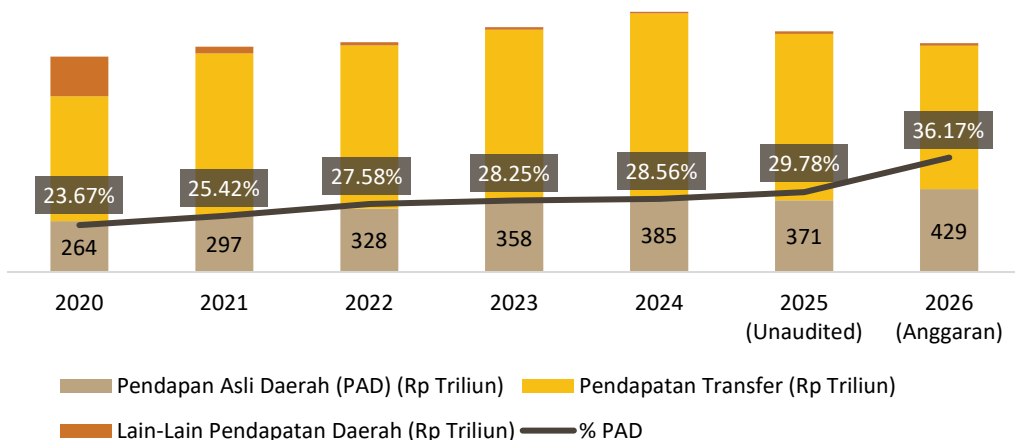


Sumber : Kementerian PANRB, 2025

Peningkatan indeks SPM didukung oleh: (1) penyelesaian penyusunan rencana aksi penerapan SPM di daerah; (2) penguatan pemantauan, pengawasan, dan sistem *reward* berupa penghargaan SPM; (3) pencapaian komitmen dan peningkatan kualitas pelaporan dari pemerintah daerah; serta (4) peningkatan kapasitas pelaksana di daerah. Kolaborasi antara kebijakan ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan pemenuhan pelayanan dasar di seluruh daerah di Indonesia.

Aspek keuangan daerah tidak terpisahkan dalam penataan desentralisasi dan otonomi daerah. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu strategi dalam arah kebijakan penguatan fondasi keuangan daerah. Selama periode 2020-2026, tren PAD, baik secara proporsi terhadap total pendapatan daerah dalam APBD maupun secara nominal, mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD di wilayahnya.

Grafik 9.13
Tren Pendapatan Asli Daerah Seluruh Pemerintah Tahun 2020-2026



Sumber : Kementerian PANRB, 2025

Penguatan harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan melalui pelaksanaan GWPP. Pada 2026, pemerintah menyusun skema pembinaan dan penilaian indeks GWPP yang dikolaborasikan dengan pelaksanaan Direktif Presiden di daerah. Hal ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan perangkat gubernur dalam mengakselerasi implementasi kebijakan Presiden di daerah.

9.6.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan dalam penerapan SPM, antara lain: (1) kapasitas SDM aparatur di daerah; (2) pemanfaatan pendanaan alternatif; dan (3) kepatuhan dokumentasi pelaksanaan SPM yang dilaporkan dalam aplikasi e-SPM. Untuk merespon tantangan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain: (1) asistensi dan fasilitasi peningkatan mutu dan layanan SPM di daerah; (2) pemberian penghargaan kepada daerah yang memiliki kinerja terbaik sebagai bentuk stimulan terhadap pelaksanaan SPM; serta (3) penguatan monitoring dan evaluasi di daerah serta sistem pengaduan SPM secara berkala.

Sementara itu, optimalisasi potensi PAD menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) pemutakhiran basis data potensi PAD yang

berkala dan menyeluruh; (2) pemanfaatan digitalisasi transaksi keuangan daerah; serta (3) pemanfaatan anggaran berbasis PAD yang efektif dan efisien. Untuk merespon tantangan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain: (1) perluasan basis data potensi PAD melalui penguatan koordinasi antar-OPD dan K/L; (2) percepatan digitalisasi transaksi keuangan secara menyeluruh; serta (3) peningkatan kinerja PAD melalui optimalisasi tata kelola sumber PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pemanfaatan aset daerah.

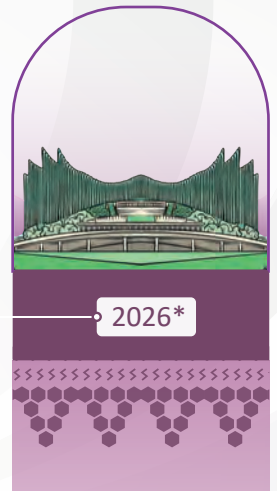
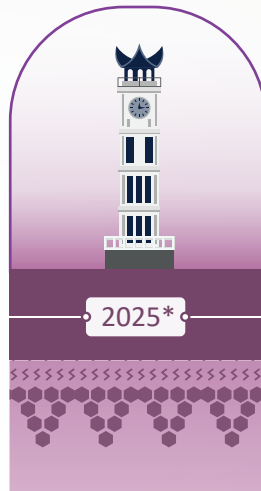
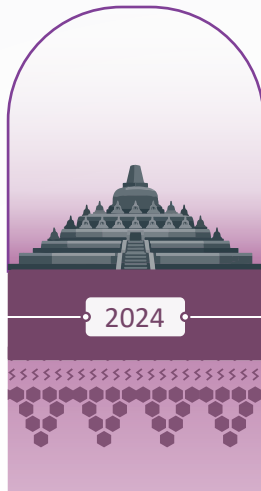
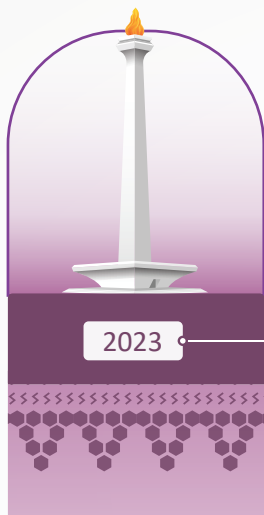
Dalam pelaksanaan tugas GWPP, tantangan yang dihadapi antara lain: (1) kualitas pelaporan pelaksanaan GWPP; (2) kualitas pembinaan dan pengawasan; dan (3) sinkronisasi pelaksanaan tugas GWPP yang dibiayai APBN dan APBD. Dalam menjawab tantangan tersebut upaya yang dilakukan, antara lain: (1) peningkatan peran tim sekretariat bersama maupun kelembagaan GWPP; (2) penguatan pembinaan, koordinasi, pendampingan, dan pemutakhiran data pelaporan yang berbasis hasil; serta (3) pengembangan sistem informasi monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagai dasar penilaian indeks kinerja GWPP.

BAB 10

ASTA CITA 8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan,
Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama
untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.





Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023-2026

57.13

59.98

60.13

60.27

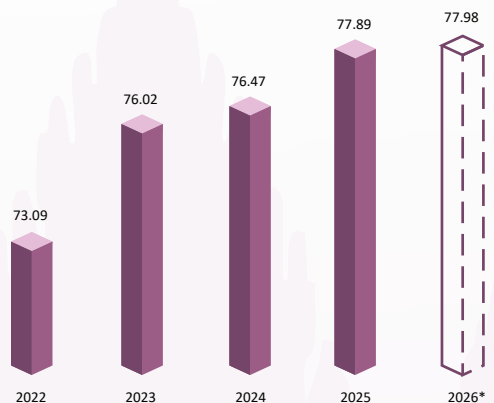
Sumber: Kementerian Kebudayaan, BPS, Bappenas, 2026, diolah
Keterangan: *) angka prognosa

Tabel Arsip Indonesia yang Masuk ke dalam Daftar Memory of the World

2024	2025	2026*
Arsip Indarung I: Pabrik Semen Pertama di Asia Tenggara (1910-1972)	Arsip RA Kartini	Arsip Letusan Gunung Krakatau 1883
Arsip Pusat Penelitian Perkebunan Gula 1887-1986	Arsip Pendirian ASEAN	Arsip Tenun Ikat Timor
	Arsip Seni Tari Mangkunegara	Arsip Makam Eropa Peneleh Surabaya
		Arsip Kota Baru Yogyakarta
		Arsip Boven Digoel
		Arsip Kongres Wanita Indonesia

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2026
Keterangan: *) Dalam proses pengusulan

Perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022-2026



Sumber: Kementerian Agama, 2025, diolah
Keterangan: *) Angka target





Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya ditopang oleh kemajuan ekonomi, tetapi juga oleh kuatnya jati diri bangsa dan terpeliharanya kerukunan umat beragama. Semua itu menjadi modal sosial yang memperkuat toleransi, meningkatkan ketahanan masyarakat, serta membangun hubungan yang selaras antara manusia, alam, dan lingkungan sebagai prasyarat menuju Indonesia Maju. Kemajuan pada seluruh aspek tersebut tecermin pada meningkatnya kerukunan umat beragama, serta semakin menguatnya ketahanan sosial, budaya, dan identitas bangsa.

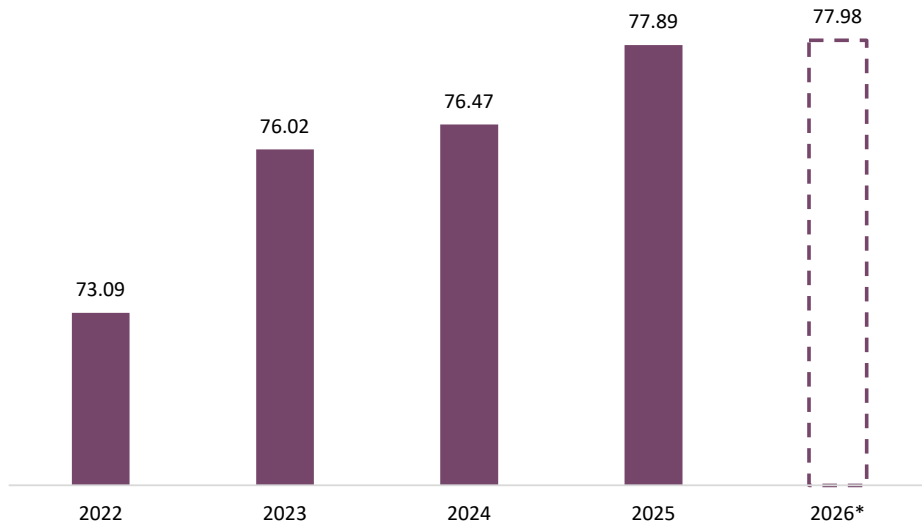
10.1 Agama

10.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan keagamaan berperan strategis dalam memperkuat kohesi sosial dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berintegritas. Kinerja pembangunan sektor ini tecermin pada meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Capaian tersebut merupakan hasil dari penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

Sinergi tersebut terlihat dalam peran strategis 593 Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang secara efektif memfasilitasi dialog lintas agama dan menjadi sistem peringatan dini dalam memitigasi potensi konflik sosial. Selanjutnya, pengembangan 366 Desa Sadar Kerukunan menjadi instrumen untuk memitigasi friksi sosial-keagamaan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Selain itu, sebanyak 3.122 penyuluh agama telah ditingkatkan kapabilitasnya sehingga menjadi penyuluh yang secara aktif memproduksi konten penyuluhan, sekaligus mengantisipasi hoaks, ujaran kebencian, dan narasi intoleran yang beredar luas di platform digital.

Grafik 10.1
Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022-2026



Sumber : Kementerian Agama, 2025, diolah

Keterangan: *) Angka target

Peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama tecermin pada meningkatnya nilai Indeks Layanan Keagamaan (ILK) dari 86,51 (2024) menjadi 86,77 (2025). Capaian ini didorong oleh komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan. Hingga 2026, pemerintah telah melakukan revitalisasi sarana prasarana pada 1.888 kantor urusan agama (KUA). Revitalisasi ini ditujukan agar KUA bertransformasi menjadi pusat layanan holistik yang memberikan akses lebih cepat, mudah, dan transparan, mulai dari pencatatan pernikahan, pengelolaan filantropi yang terintegrasi, hingga pemberdayaan ekonomi umat.

Hingga semester I 2026, peningkatan layanan keagamaan terhadap pemenuhan sarana prasarana peribadatan dilakukan melalui pendistribusian sekitar 200 ribu kitab suci kepada masyarakat, lembaga pendidikan, dan rumah ibadah, serta dukungan revitalisasi

9.540 rumah ibadah. Sementara itu, dalam memperkuat resiliensi sosial-keagamaan, pemerintah secara khusus mengakselerasi penanggulangan bencana Sumatera, di antaranya melalui pemulihan rumah ibadah.

Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, pemerintah telah membangun kolaborasi dengan 14.184 lembaga pengelola Dana Sosial Keagamaan (DSK) sepanjang 2025. Kolaborasi tersebut mencakup Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lembaga nadzir wakaf, lembaga pengelola Dana Amal Kasih Katolik, lembaga pengelola Dana Kasih Kristen, lembaga pengelola Dana Punia Hindu, serta lembaga pengelola Dana Paramitha Buddha. Kemitraan ini mendorong optimalisasi penghimpunan dan pemanfaatan DSK untuk mendukung berbagai program sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat, sehingga manfaatnya semakin berdampak dan tepat sasaran.



Dalam mewujudkan keluarga yang tangguh dan masyarakat yang berkualitas, pemerintah terus memperluas jangkauan layanan bimbingan perkawinan dan bimbingan keluarga yang inklusif bagi seluruh pemeluk agama. Sejak 2025 hingga pertengahan 2026, sebanyak 1.3 juta pasangan telah mendapat bimbingan perkawinan dan sebanyak 216 ribu pasangan telah mendapatkan bimbingan keluarga. Intervensi ini diarahkan untuk memperkuat kesiapan calon keluarga dan ketangguhan keluarga dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sebagai fondasi lahirnya generasi yang berkualitas.

Transformasi layanan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) direalisasikan melalui penerbitan 1.632.504 sertifikat halal *self-declare* untuk 3.028.554 produk hingga April 2026. Penjaminan kehalalan produk juga telah diarahkan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui akselerasi sertifikasi halal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejak November 2025 hingga Mei 2026, sebanyak 6.084 SPPG telah distandardisasi dan memperoleh sertifikasi halal.

Transformasi layanan haji sesuai dengan UU 14/2025 difokuskan pada pembentukan instansi khusus penanganan haji dan umrah. Dengan transformasi tersebut, pemerintah berhasil menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi Rp54,1 juta. Transformasi ini juga mempercepat layanan melalui revitalisasi 5 Asrama Haji dan 67 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).

Selain itu, transformasi ini diintegrasikan dengan pemanfaatan potensi ekosistem ekonomi haji dan umrah senilai Rp74,47 triliun per tahun. Pada tahap awal, pemanfaatan potensi ekonomi

direalisasikan melalui ekspor 208 ton bumbu dan 840 ribu porsi makanan ke Arab Saudi. Sinergi antara pelayanan jemaah dan eskalasi daya saing produk lokal ini selanjutnya akan diperkuat melalui pembangunan Kampung Haji di Mekah.

10.1.2 Tantangan dan Upaya

Berbagai tantangan masih menjadi isu pembangunan agama, di antaranya: (1) dinamika literasi digital masyarakat dalam kaitannya dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan kohesi sosial; (2) ketersediaan infrastruktur layanan keagamaan yang merata, berkualitas, dan akuntabel; (3) keterjangkauan bimbingan calon pengantin yang inklusif guna memperkuat kesiapan calon keluarga dan bimbingan keluarga dalam merespons kerentanan sosial; (4) integrasi pengelolaan DSK dalam kerangka program pembangunan nasional, serta cakupan sertifikasi halal pada ekosistem produk domestik; (5) kemandirian dan keberlanjutan ekosistem haji dan umrah dalam memberikan kontribusi yang berdaulat bagi perekonomian nasional; serta (6) resiliensi sosial-keagamaan, kecepatan adaptasi, dan pemulihan masyarakat di wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Berbagai upaya diperlukan untuk memastikan terwujudnya kehidupan beragama yang rukun dan membawa kemaslahatan bagi umat, antara lain: (1) optimalisasi peran FKUB, Desa Sadar Kerukunan, dan kapasitas penyuluh agama; (2) akselerasi penyediaan sarana prasarana, revitalisasi rumah ibadah, dan pendistribusian kitab suci; (3) penyediaan layanan pendampingan keagamaan bagi pasangan calon pengantin guna mewujudkan keluarga yang berketahanan; (4) penguatan kolaborasi

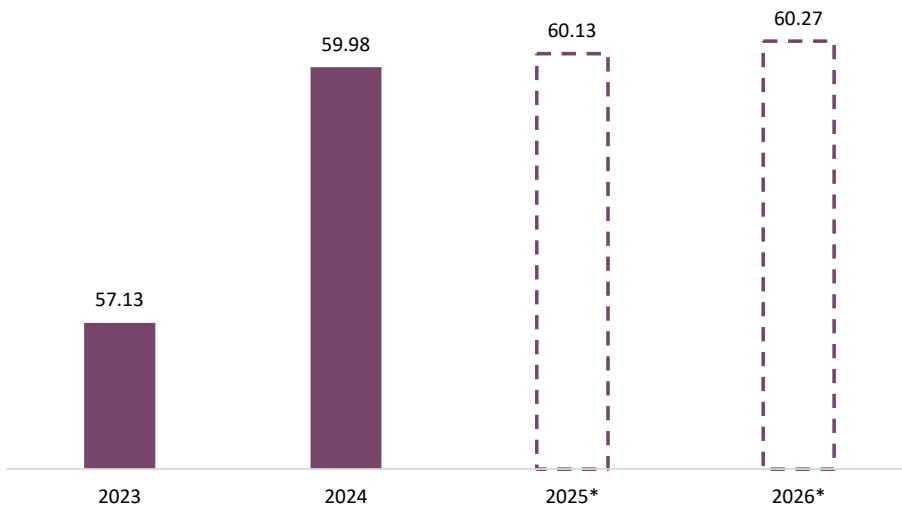
dengan lembaga pengelola DSK serta akselerasi sertifikasi halal; (5) penguatan ekosistem layanan haji dan umrah yang berkualitas, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional; serta (6) percepatan penanggulangan bencana yang difokuskan pada restorasi rumah ibadah dan distribusi kitab suci untuk menjaga kehidupan beragama masyarakat secara utuh.

10.2 Kebudayaan

10.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Kebudayaan merupakan aset strategis bangsa Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan kebudayaan diukur melalui

Grafik 10.2
Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023-2026



Sumber: Kementerian Kebudayaan, BPS, Bappenas, 2026, diolah
Keterangan: *) angka prognosa

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan kesetaraan gender. Melalui berbagai dimensi tersebut, IPK memberikan gambaran capaian pembangunan kebudayaan secara holistik dan komprehensif.

Perkembangan IPK menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong pembangunan kebudayaan. Pada 2024, nilai IPK mencapai angka 59,98, meningkat dibandingkan 2023 yang sebesar 57,13. Kemajuan ini diproyeksikan akan berlanjut menjadi 60,13 pada 2025 dan 60,27 pada 2026.

Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan 6 dari 7 dimensi IPK pada 2024, meliputi dimensi ekonomi budaya yang meningkat dari 29,50 menjadi 31,25. Hal tersebut terlihat dari peningkatan indikator persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni, dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan dari 0,30 menjadi 0,31 persen. Peningkatan juga terjadi pada dimensi pendidikan dari 73,35 menjadi 73,41 melalui peningkatan indikator persentase satuan pendidikan yang memiliki guru bahasa daerah dan/atau kegiatan ekstrakurikuler kesenian dari 32,00 menjadi 60,93 persen.



Dimensi ketahanan sosial budaya meningkat dari 70,73 menjadi 75,73 dengan peningkatan persentase penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dari 76,17 menjadi 85,95 persen. Sementara itu, dimensi ekspresi budaya meningkat dari 34,91 menjadi 39,85 melalui bertambahnya persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni dari 1,50 menjadi 3,27 persen.

Dimensi budaya literasi mengalami peningkatan dari 60,49 menjadi 64,40 didorong oleh peningkatan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat dari 4,52 menjadi 10,92 persen. Sementara itu, dimensi warisan budaya juga mengalami peningkatan dari 51,54 menjadi 54,93. Peningkatan tersebut tercermin dari bertambahnya persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran dari 8,06 menjadi 8,49 persen. Hingga 2026, secara kumulatif pemerintah telah menetapkan 743 cagar budaya peringkat nasional dan 2.727 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) tingkat nasional. Adapun dimensi kesetaraan gender terus menjadi fokus penguatan guna meningkatkan capaian pembangunan kebudayaan secara lebih merata

Pembangunan kebudayaan juga terlihat dari pembangunan kebahasaan dan kesastraan melalui pemertabatan Bahasa Indonesia, pelestarian bahasa dan sastra daerah, serta perluasan peran Bahasa Indonesia di tingkat internasional. Hingga akhir 2025, pembangunan kebahasaan menunjukkan perkembangan. Indeks Pembangunan Kebahasaan (IPEBAS) mencapai 51,56 yang mencerminkan kualitas

pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa melalui beberapa intervensi antara lain: pembinaan kualitas penggunaan bahasa pada 1.517 lembaga, 8.885 penutur bahasa terbina, dan 308.780 penutur bahasa teruji.

Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD) 2025 mencapai 56,77 yang menggambarkan kuatnya pelestarian melalui pewarisan antargenerasi, partisipasi pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat. Hingga 2025, pemerintah memetakan bahasa dan sastra daerah serta merevitalisasi 146 bahasa daerah/dialek. Pelestarian bahasa dan sastra daerah menjadi perhatian dunia, terutama setelah UNESCO menetapkan periode 2022-2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah. Sementara itu, Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI) 2025 mencapai 52,99, menunjukkan posisi strategis Bahasa Indonesia secara global, melalui pengukuhan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO serta perluasan layanan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) pada 471 lembaga di 62 negara pada 2026.

Komitmen pemerintah dalam pembangunan kebudayaan tidak hanya berhenti pada tingkat nasional, melainkan juga pada tingkat global melalui penguatan diplomasi budaya. Salah satunya melalui penetapan pantun sebagai nominasi *Intangible Cultural Heritage* UNESCO. Dukungan terhadap promosi budaya tercermin dari terselenggaranya 125 *event* berskala nasional dan internasional. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong rekognisi dan daya saing budaya Indonesia baik di tingkat nasional maupun di kancah internasional.

10.2.2 Tantangan dan Upaya

Kemajuan pembangunan sektor kebudayaan masih dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain: (1) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, serta pembinaan SDM, lembaga, dan pranata kebudayaan; (2) kesetaraan hak, kesempatan, dan tanggung jawab di antara masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kebudayaan berkelanjutan; (3) perlindungan bahasa daerah oleh penutur muda; (4) pemanfaatan Bahasa Indonesia di ruang publik dan forum internasional; (5) diplomasi dan promosi kebudayaan; serta (6) tata kelola dan sinergi pembangunan kebudayaan, kebahasaan, dan kesastraan.

Dalam rangka merespons berbagai tantangan di atas, sejumlah upaya yang dapat dilakukan antara lain: (1) optimalisasi pemajuan kebudayaan melalui penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara terpadu dan berkelanjutan; (2) penguatan akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam pemajuan kebudayaan secara inklusif dan berkelanjutan; (3) perluasan revitalisasi bahasa daerah; (4) optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia dan penguatan layanan BIPA; (5) penguatan strategi diplomasi dan promosi kebudayaan; serta (6) penguatan tata kelola pembangunan kebudayaan melalui pengembangan sistem tata kelola yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data.

10.3 Kearsipan

10.3.1 Capaian Utama Pembangunan

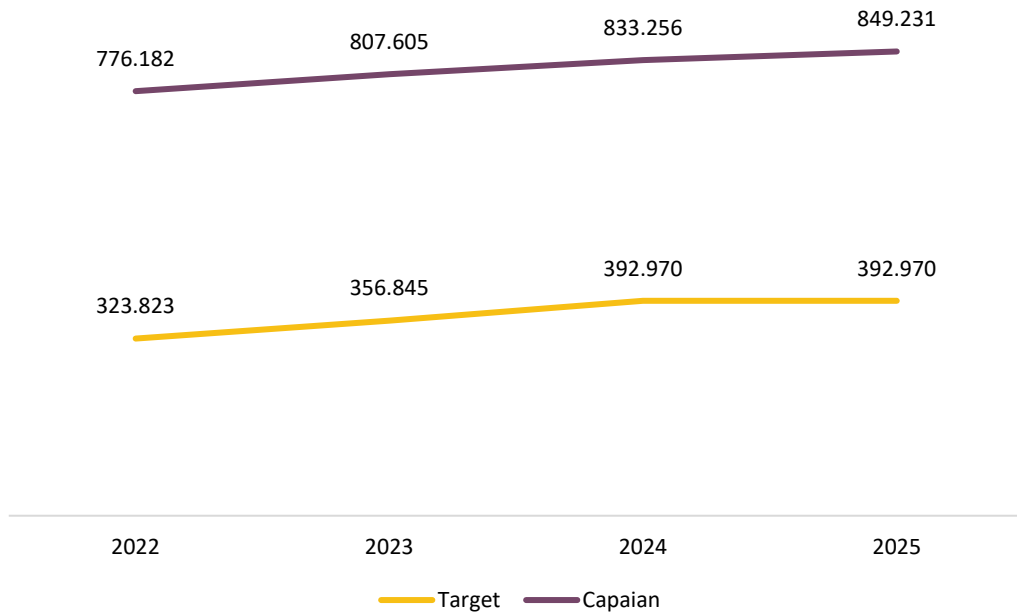
Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut, ditunjukkan dari kinerja penyelamatan dan preservasi arsip. Sepanjang 2025, sebanyak 19.151 arsip diselamatkan dan 849.231 arsip dilestarikan. Melalui upaya penyelamatan, pengolahan, dan pelestarian, pemerintah menegaskan posisi strategis arsip dalam upaya pemajuan kebudayaan serta penguatan memori kolektif bangsa. Arsip tidak hanya merekam perjalanan sejarah dan identitas nasional, tetapi juga menjadi referensi pengembangan riset, sarana pembelajaran bagi terwujudnya kehidupan berbangsa yang harmonis, serta dukungan bagi penguatan karakter dan jati diri bangsa.

Preservasi arsip juga diperkuat melalui percepatan transformasi digital kearsipan, antara lain melalui pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang memungkinkan pengelolaan arsip terintegrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan bukti (*evidence-based governance*). Digitalisasi arsip juga berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan pelestarian sejarah.



Grafik 10.3

Jumlah Arsip yang Dilestarikan Tahun 2022–2025



Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2026

Sejalan dengan upaya transformasi dan digitalisasi arsip, pemerintah terus mengupayakan pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Implementasi SRIKANDI terus menunjukkan kemajuan signifikan dengan peningkatan penggunaan

dari 712 instansi di 2024 menjadi 734 instansi di tingkat pusat maupun daerah pada semester I 2026. SRIKANDI mencatatkan jumlah arsip yang tersimpan mencapai 253,77 juta naskah. Penerapan SRIKANDI merupakan wujud nyata transformasi digital kearsipan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan efisien.

Tabel 10.1

Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2023-2025

Tahun	Instansi Pusat	Instansi Provinsi	Instansi Kabupaten/ Kota
2023	81,7%	74%	42,5%
2024	85,1%	78,5%	59,8%
2025	87,9%	82,8%	67,4%

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2026

Peran strategis kearsipan dalam reformasi birokrasi terlihat melalui penguatan budaya tertib arsip dan transformasi digital arsip. Untuk menjamin terselenggaranya dua langkah strategis tersebut dalam penyelenggaraan kearsipan nasional, pemerintah melakukan pengawasan arsip secara rutin terhadap kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil pengawasan tersebut menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi arsip mengalami kemajuan dalam 3 tahun terakhir. Penguatan budaya tertib arsip dilakukan juga melalui peningkatan

kapasitas SDM kearsipan. Sepanjang 2025, sebanyak 1.623 orang berhasil lulus uji kompetensi dan sertifikasi kearsipan atau naik 15 persen dari capaian 2024, yaitu 1.416 orang.

Pemerintah juga secara konsisten mendorong pengakuan khazanah arsip nasional ke dalam daftar UNESCO *Memory of the World* (MoW). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengenalkan, menjaga, dan menampilkan arsip-arsip penting yang merefleksikan sejarah dan jati diri bangsa di panggung global. Pada periode 2024 dan 2025, lima arsip Indonesia telah masuk ke dalam daftar MoW.

Tabel 10.2

Arsip Indonesia yang Masuk ke dalam Daftar Memory of the World Tahun 2024-2026

2024	2025	2026*
1. Arsip Indarung I: Pabrik Semen Pertama di Asia Tenggara (1910-1972)	1. Arsip RA Kartini	1. Arsip Letusan Gunung Krakatau 1883
2. Arsip Pusat Penelitian Perkebunan Gula 1887-1986	2. Arsip Pendirian ASEAN	2. Arsip Tenun Ikat Timor
	3. Arsip Seni Tari Mangkunegara	3. Arsip Makam Eropa Peneleh Surabaya
		4. Arsip Kota Baru Yogyakarta
		5. Arsip Boven Digoel
		6. Arsip Kongres Wanita Indonesia

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia, 2026
Keterangan: *) Dalam proses pengusulan

Upaya pengakuan dan preservasi arsip secara berkelanjutan juga dilakukan pada tingkat nasional guna menjaga memori sejarah bangsa agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh generasi kini dan nanti. Upaya ini tecermin melalui keseriusan pemerintah dalam melakukan identifikasi, kurasi, dan registrasi khazanah arsip ke dalam daftar Memori Kolektif Bangsa (MKB). Sejak 2025 hingga awal 2026, telah terdaftar 23 khazanah arsip.

Pemanfaatan arsip terus diperkuat melalui inovasi layanan kearsipan agar konten arsip tetap relevan dan menarik bagi masyarakat.

Sebagai langkah intensifikasi pemanfaatan dan layanan arsip, pemerintah mengembangkan Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara. Selain itu, penguatan pemanfaatan arsip juga dilakukan melalui publikasi naskah sumber, pameran arsip virtual, serta kolaborasi dengan komunitas sejarah dan negara-negara sahabat.

10.3.2 Tantangan dan Upaya

Penyelenggaraan kearsipan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain: (1) akses dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan kearsipan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana



digitalisasi arsip untuk meningkatkan fungsi arsip sebagai sumber informasi autentik; (3) kapasitas pencipta arsip dan SDM kearsipan dalam menghadapi disrupsi teknologi; (4) penanggulangan arsip rusak dan rentan, khususnya arsip film seluloid dan arsip keraton; dan (5) pengakuan dan pelestarian arsip di tingkat nasional dan global.

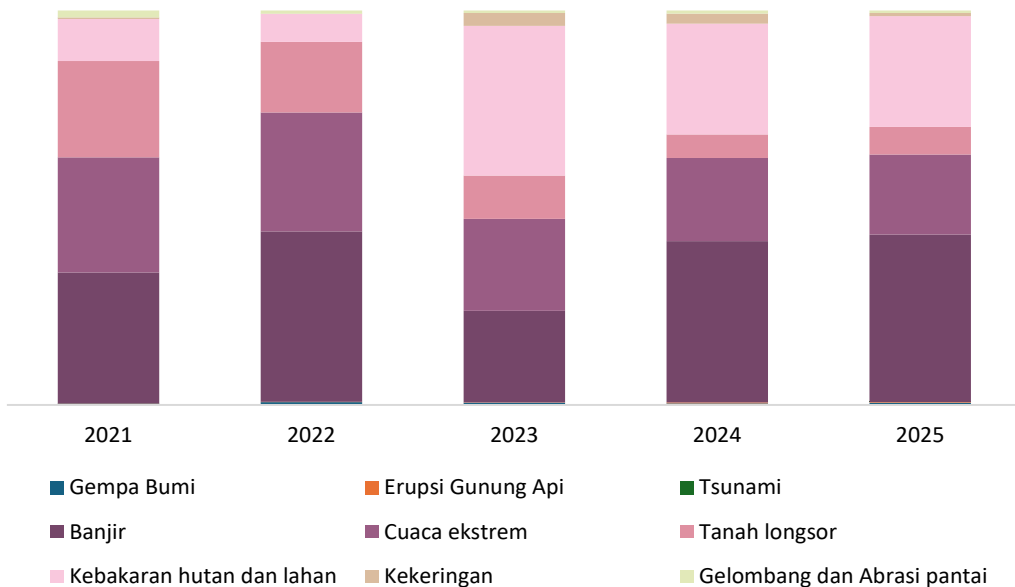
Untuk menjawab tantangan di atas pemerintah melakukan serangkaian upaya sebagai berikut: (1) peningkatan inovasi layanan kearsipan yang menarik bagi masyarakat lintas generasi melalui pengembangan pusat layanan khazanah kearsipan, pameran arsip, dan publikasi naskah sumber; (2) pengembangan sarana dan prasarana digital untuk mendukung SIKN dan JIKN; (3) peningkatan kapasitas teknis dan manajerial SDM kearsipan melalui uji kompetensi dan sertifikasi kearsipan serta layanan konsultasi teknis daring; (4) akselerasi restorasi dan alih media terhadap arsip statis yang rusak atau sangat rentan rusak; dan (5) penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penetapan MKB dan pengusulan MoW.

10.4 Mitigasi Bencana

10.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah terus memperkuat mitigasi bencana sebagai bagian integral dari pembangunan nasional guna meningkatkan ketahanan masyarakat, melindungi hasil-hasil pembangunan, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Penguatan tersebut menjadi semakin penting seiring perubahan lanskap risiko bencana akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta meningkatnya eksposur penduduk dan aset pembangunan. Periode lima tahun terakhir, lebih dari 98 persen kejadian bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi, seperti banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta abrasi pantai. Pada semester I 2026 tercatat sebanyak 1.161 kejadian bencana dengan 99 persen merupakan bencana hidrometeorologi. Pembangunan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko bencana yang dipengaruhi oleh perubahan iklim.

Grafik 10.4
Kejadian Bencana Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2026

Pada akhir 2025, terjadi Siklon Tropis Senyar yang memicu hujan intensitas tinggi di wilayah Sumatra. Peristiwa ini menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini mengakibatkan korban jiwa, kerusakan di sektor perumahan dan permukiman, serta kerusakan pada infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya.

Pemerintah bergerak cepat melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan dengan mengerahkan personel tanggap darurat, bantuan logistik, pelayanan kesehatan, dukungan pencarian dan penyelamatan, serta pemulihan infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak. Pemerintah juga menyusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatra sebagai acuan terpadu dalam percepatan pemulihan

wilayah terdampak, melalui prinsip *build back better, safer, and sustainable*, untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Pemerintah terus memperkuat pencegahan dan mitigasi sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk menekan risiko. Pengurangan risiko bencana semakin terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang, termasuk pada kawasan strategis nasional, kawasan metropolitan, sentra pangan, dan destinasi pariwisata prioritas. Penguatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang tangguh, pengembangan ketangguhan masyarakat, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah telah memberikan manfaat nyata berupa berkurangnya potensi kerusakan aset, terjaganya keberlangsungan layanan publik, meningkatnya kepastian investasi, serta berkurangnya gangguan terhadap rantai pasok nasional.



Penanggulangan bencana telah menjadi instrumen strategis pembangunan yang mengintegrasikan upaya mitigasi, pengurangan risiko, kesiapsiagaan, dan peningkatan ketahanan ke dalam proses pembangunan. Pergeseran paradigma ini tidak hanya memperkuat kapasitas menghadapi bencana, tetapi juga melindungi hasil-hasil pembangunan, mengurangi potensi kerugian ekonomi, serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional.

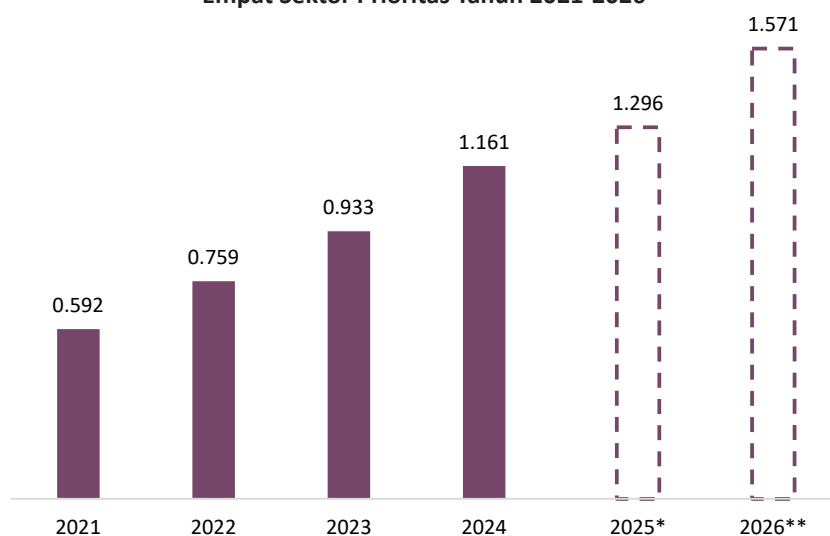
Berdasarkan berbagai kajian internasional yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia dan *Global Facility for Disaster Reduction and Recovery* (GFDRR), kerugian ekonomi langsung akibat bencana diperkirakan berada pada kisaran Rp 22-30 triliun per tahun, belum termasuk kehilangan produktivitas, gangguan rantai pasok, penurunan investasi,

dan dampak sosial jangka panjang. Dengan meningkatnya eksposur aset pembangunan, urbanisasi, konsentrasi penduduk di wilayah pesisir, serta intensifikasi dampak perubahan iklim, kerugian ekonomi tahunan berpotensi meningkat secara signifikan pada periode 2030-2045 apabila tidak diimbangi investasi ketahanan dan pengurangan risiko bencana.

Dalam upaya menekan potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim, Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) diimplementasikan melalui empat sektor prioritas terdampak, meliputi kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Hingga 2025, pemerintah berhasil menekan potensi kerugian ekonomi tersebut sebesar 1,296 persen terhadap PDB. Capaian tersebut didukung oleh berbagai intervensi yang dilakukan di lokasi prioritas PBI melalui pembangunan infrastruktur maupun penerapan teknologi adaptif iklim.

Grafik 10.5

Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim terhadap PDB pada Empat Sektor Prioritas Tahun 2021-2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Keterangan:*) Capaian tahun 2025 bersifat sementara, **) Angka target

Catatan: Empat sektor prioritas meliputi kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan

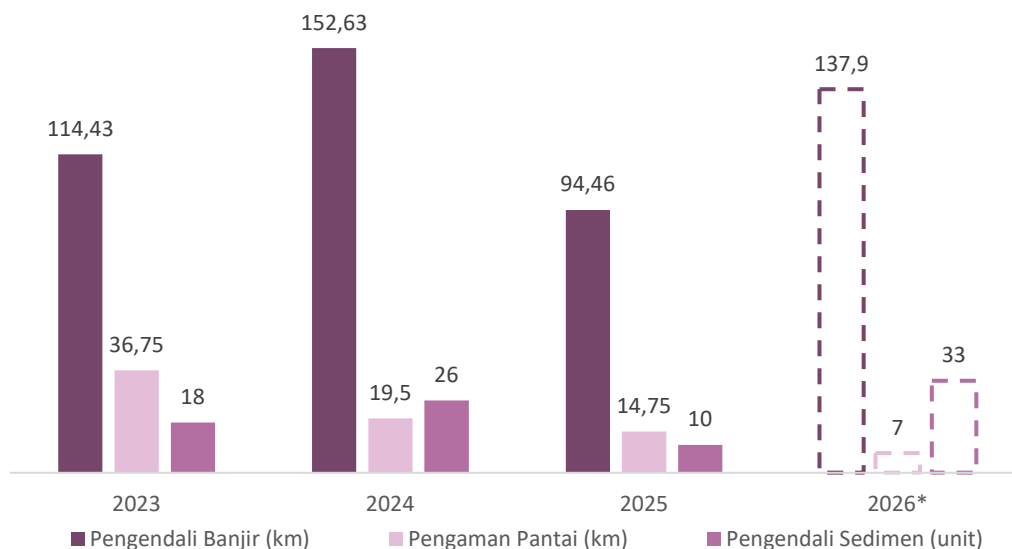
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana hidrometeorologi, pemerintah terus memperkuat intervensi pada sektor air. Dukungan infrastruktur pada sektor ini adalah pembangunan 137,90 km infrastruktur pengendali banjir dan 33 unit pengendali sedimen. Pada 2026, intervensi ini difokuskan untuk memperkuat ketahanan kawasan perkotaan dan metropolitan strategis terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Selain itu, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan tingkat akurasi keberhasilan 95 persen juga mendukung pengurangan risiko banjir dan cuaca ekstrem.

Lebih lanjut, sebagai respons terhadap meningkatnya gelombang tinggi dan abrasi pesisir, pemerintah juga memperkuat intervensi pada sektor kelautan dan pesisir. Dukungan infrastruktur pada sektor ini adalah pembangunan pengaman pantai sepanjang 7 km yang diprioritaskan untuk pengamanan pesisir utara Jawa dan kawasan

strategis lainnya. Selain itu, dilakukan rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir seluas 39,20 ha, serta penyaluran sarana dan prasarana pendukung kawasan pesisir tangguh.

Selain melalui pembangunan infrastruktur fisik dan solusi berbasis alam, upaya mitigasi bencana hidrometeorologi juga dilakukan melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) dan Sekolah Lapang Iklim (SLI) secara berkelanjutan. Pada 2025, SLCN telah menjangkau 1.390 peserta di 12 Provinsi dan ditargetkan meningkat menjadi 4.500 peserta pada 2026. Sementara itu, pada 2025 SLI telah menjangkau 1.775 peserta di 28 Provinsi dan ditargetkan mencapai 5.835 peserta pada 2026. Melalui penyelenggaraan kedua program tersebut, diharapkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan informasi meteorologi dan klimatologi semakin meningkat sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan.

Grafik 10.6
Capaian Pembangunan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air Tahun 2023-2026



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2026

Keterangan: *) Angka target



10.4.2 Tantangan dan Upaya

Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta tingginya kerentanan masyarakat dan aset pembangunan menjadi tantangan utama penanggulangan bencana. Kapasitas pemerintah daerah yang belum merata dan terbatasnya integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan dan investasi turut memengaruhi efektivitas pencegahan.

Untuk menjawab tantangan di atas, pemerintah memperkuat sistem penanggulangan secara terpadu antara lain melalui: (1) penguatan tata kelola risiko; (2) pengembangan sistem peringatan dini multibahaya; (3) pengarusutamaan PRB dalam penataan ruang; (4) peningkatan ketahanan infrastruktur dan layanan dasar; (5) penguatan kapasitas daerah dan masyarakat; (6) pengembangan Desa Tangguh Bencana; serta (7) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Implementasi PBI dalam menghadapi tantangan, berupa: (1) peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi serta pergeseran pola musim yang berisiko terhadap pembangunan; (2) tata kelola

dan pemahaman pemangku kepentingan; (3) karakteristik dampak spesifik lokasi; (4) metodologi pengukuran kontribusi intervensi terhadap penurunan potensi kerugian ekonomi; (5) skema pembiayaan berkelanjutan; serta (6) menurunnya kinerja infrastruktur pengendalian daya rusak air.

Penguatan PBI diupayakan melalui: (1) penajaman kerangka regulasi melalui pendalaman analisis lokasi prioritas dengan mempertimbangkan risiko dan dampak perubahan iklim pada sektor prioritas; (2) integrasi intervensi dari hulu ke hilir dan tata ruang berbasis risiko; (3) peningkatan kapasitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko yang bersifat lokal spesifik serta merumuskan intervensi ketahanan iklim yang tepat; (4) pengembangan metodologi pemantauan evaluasi yang andal; (5) bauran pembiayaan dari pemerintah, swasta, dan mitra pembangunan; (6) pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali daya rusak air; (7) penguatan operasi dan pemeliharaan berbasis manajemen aset; serta (8) penguatan sistem informasi, peringatan dini, konservasi DAS, dan sinkronisasi rencana pembangunan dengan tata ruang.



Kain Tenun Merupakan Salah Satu Prioritas Sektor Ekonomi Kreatif
Sumber: Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif RI, 2026

BAB 11

Penutup



Interaksi Presiden Prabowo dengan Peserta Didik
Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025



Presiden Prabowo pada WEF Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss
Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2026

Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur merupakan semangat pembangunan yang akan terus hidup menuju Indonesia Emas 2045. Tahun 2026, merupakan bukti bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia masih resilien dan tetap tumbuh. Keberhasilan ini menunjukkan terjaganya stabilitas ekonomi domestik dan berjalannya berbagai transformasi yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat kemandirian nasional, meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM), serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tema RKP 2026, perkuatan kemandirian nasional ditunjukkan dengan adanya perbaikan kinerja pembangunan di berbagai sektor. Penguatan ketahanan pangan didukung oleh upaya pengembangan kawasan pangan terintegrasi dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Ketahanan air diperkuat melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Kemandirian energi ditunjukkan melalui terobosan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT), perluasan jaringan transmisi, dan penerapan teknologi *smart grid*. Sementara itu, upaya pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai terobosan untuk mengatasi kondisi darurat sampah sekaligus mendorong penguatan ketahanan energi nasional.

Kinerja investasi meningkat seiring dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Hal ini tecermin dari meningkatnya realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menunjukkan semakin menguatnya struktur modal nasional. Pada sisi lain, penguatan iklim investasi melalui optimalisasi peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga mempercepat mobilisasi investasi pada berbagai sektor prioritas yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi.

Pertumbuhan ekonomi lokal yang semakin inklusif salah satunya ditandai dengan upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi melalui pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai wujud optimisme pembangunan ekonomi dari desa yang diharapkan terus meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap produk domestik bruto nasional.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional. Upaya tersebut didorong melalui penguatan ekosistem perlindungan sosial melalui DTSEN serta implementasi Program Kesejahteraan Rakyat

(PRO-KESRA) yang mengintegrasikan berbagai bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat miskin agar semakin tepat sasaran. Sejalan dengan itu, pemerintah memperluas intervensi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan melalui Program 3 Juta Rumah sebagai upaya memperkuat kualitas hidup dan mendorong graduasi menuju kemandirian.

Peningkatan daya saing SDM Indonesia ditandai oleh peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah pada 2025. Berbagai terobosan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dilakukan melalui pelaksanaan berbagai Program Prioritas Presiden, antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Digitalisasi Pendidikan, dan Revitalisasi Sarana Prasarana Sekolah dan Madrasah.

Penguatan layanan kesehatan, peningkatan upaya promotif dan preventif, maupun penguatan tata kelola program kesehatan berdampak pada peningkatan usia harapan hidup. Berbagai intervensi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan akses pemanfaatan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Upaya terobosan yang dilakukan meliputi Program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, penuntasan TB, penurunan stunting, dan pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas.

Keluarga merupakan institusi terkecil dan utama yang berperan dalam menanamkan nilai, moral, dan karakter bangsa. Keluarga Berkualitas

berfokus pada upaya untuk memastikan setiap individu dapat hidup sejahtera dalam keluarga yang tangguh dan lingkungan sehat. Perlindungan terhadap generasi muda di tengah ruang digital yang semakin terbuka dan dinamis akan mewujudkan generasi yang berkarakter.

Penguatan ideologi Pancasila menjadi landasan bagi stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, serta reformasi birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Didukung penguatan tata kelola partai politik dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif di tingkat nasional, Indonesia mempertegas perannya di tingkat global sebagai *dual-role country*, yaitu *recipient country* sekaligus *emerging donor* dalam kerja sama pembangunan internasional.

Keberlanjutan negara sangat ditentukan oleh hubungan yang selaras antara manusia dan lingkungan. Pelestarian alam dan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana menciptakan keseimbangan ekosistem dan mengamankan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Penguatan kelestarian lingkungan hidup juga diwujudkan melalui transformasi menuju ekonomi sirkular.

Selanjutnya, pembangunan yang berkesinambungan terus didorong melalui berbagai kebijakan strategis. Dengan semangat kerja sama, persatuan, dan gotong royong, Indonesia akan terus melangkah maju menuju Indonesia Emas 2045.



Candi Borobudur, Jawa Tengah
Sumber: BP BUMN, 2026

INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR

Delapan puluh satu tahun kemerdekaan Indonesia adalah perjalanan panjang sebuah bangsa untuk berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri.

Kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah kemampuan untuk menentukan masa depan sendiri, mengelola kekayaan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memastikan keadilan hadir bagi seluruh rakyat, serta membangun negara yang kuat dan berdaulat di tengah perubahan dunia.

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026, merefleksikan perjalanan tersebut sekaligus menegaskan tekad untuk melanjutkan transformasi Indonesia.

**Berdaulat dalam menentukan arah.
Adil dalam memberikan kesempatan.
Makmur dalam mewujudkan kesejahteraan.**

Ini lah Indonesia yang kita perjuangkan bersama.

Pindai Kode QR
Untuk Mengunduh
Lampiran Pidato Presiden 2026

